

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

CREATING INNOVATION DELIVERING NEW OPTIMISM

2022

ANNUAL REPORT & SUSTAINABILITY REPORT
LAPORAN TAHUNAN & LAPORAN KEBERLANJUTAN

MIZUHO



Creating Innovation Delivering New Optimism

Seiring dengan waktu, kemajuan teknologi terus berkembang dan senantiasa memasyarakat. Oleh karena itu, Perseroan selalu melakukan inovasi yang selaras dengan perubahan perilaku konsumen untuk memberikan kualitas layanan yang maksimal sekaligus menciptakan optimisme baru bagi semua Pemangku Kepentingan.

Over time, technological advances continue to develop and are always popular in society. Therefore, the Company always innovates in line with changes in customers behavior to provide maximum service quality while creating new optimism for all Stakeholders.

Batasan Tanggung Jawab

Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perseroan yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang, serta lingkungan bisnis dimana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini memuat kata "Perseroan" dan "Perusahaan" yang mengacu pada PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk, yang menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang jasa pembiayaan investasi, modal kerja, dan multiguna, dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Adakalanya kata "kami" digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk.

Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini telah disiapkan dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bilamana terdapat perbedaan arti atau interpretasi antara keduanya, maka yang berlaku adalah naskah dalam Bahasa Indonesia dalam menentukan tujuan, maksud, dan pengertian dari Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini.

Disclaimer

This Annual Report and Sustainability Report contains a statement of the financial condition, results of operations, policies, projections, plans, strategies, and objectives of the Company, which are classified as forward statements in the implementation of applicable legislation, with the exception of historical matters. These statements have the prospect of risks, uncertainties, and can result in actual developments materially different from those reported.

Prospective statements in this Annual Report and Sustainability Report are based on various assumptions regarding current conditions and future conditions, as well as the business environment in which the Company conducts business activities. The Company does not guarantee that documents that have been confirmed as valid will result in certain results as expected.

This Annual Report and Sustainability Report contains the words "the Company" and "the Corporate" which refer to PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk, which runs main business activities in the fields of investment, working capital and multipurpose financing services, and/or other financing business activity with the approval of the Financial Services Authority ("OJK"). Sometimes the word "we" is used for convenience to refer to PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk.

The Annual Report and Sustainability Report has been prepared in 2 (two) languages, namely bahasa Indonesia and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the Bahasa Indonesia version shall prevail in determining the spirit, intent and meaning of this Annual Report and Sustainability Report.

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

KINERJA 2022 / 2022 PERFORMANCE	4
Ikhtisar Keuangan / Financial Highlights	5
Sekilas Kinerja 2022 / 2022 Performance Overview	6
Informasi Saham / Shares Information	7
Grafik Perdagangan Saham Tahun 2021 - 2022 / Share Trading Chart Year 2021 - 2022	8
Aksi Korporasi / Corporate Action	8
Penghentian Sementara Perdagangan Saham dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham / Suspension of Shares Trading and / or Delisting	8
Peristiwa Penting / Event Highlights	9
LAPORAN MANAJEMEN / MANAGEMENT REPORT	16
Laporan Dewan Komisaris / The Board of Commissioners Report	17
Laporan Direksi / The Board of Directors Report	24
PROFIL PERUSAHAAN / COMPANY PROFILE	30
Sekilas Perseroan / Company Overview	31
Kegiatan Usaha / Business Activities	32
Produk & Layanan / Product & Service	33
Jaringan Kantor / Office Network	34
Jejak Langkah Perseroan / Company Milestones	36
Visi Misi, dan Nilai Perseroan / Vision, Mission and Values of The Company	38
Profil Direksi / The Board of Directors Profile	39
Profil Dewan Komisaris / The Board of Commissioners Profile	44
Struktur Organisasi / Organization Structure	48
Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi / Affiliation Relationship of Members of The Board of Commissioners and The Board of Directors	50
Struktur Kepemilikan Saham / Shareholding Structure	51
Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal / Capital Market Supporting Institutions & Professionals	52
Informasi Entitas Anak / Subsidiary Information	52
Informasi Kepemilikan Saham / Shareholding Information	53
Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi / Board of Commissioners and Board of Directors Share Ownership	53
Daftar Pemegang Saham Berdasarkan Klasifikasi / Shareholders Classification	53
Kronologis Pencatatan Saham / Chronology of Shares Listing	54
Kronologis Pencatatan Efek Lainnya / Chronology of Other Securities Listings	55
Sumber Daya Manusia / Human Resources	56
Teknologi Informasi / Information Technology	58
Keanggotaan Pada Asosiasi / Association Membership	60
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN / MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS	62
Uraian Per Segmen / Review Per Segment	63
Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan / Review of Company Financial Performance	64
Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang / Ability to Pay Liabilities and Receivables Collectability	69
Struktur Modal / Capital Structure	70
Kebijakan Struktur Modal / Capital Structure Policy	
Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal / Material Commitments to Capital Goods Investment	71
Informasi dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan / Material information and Material facts that occurred after the date of the accountant's report	71

Prospek Usaha / Business Prospect	71	TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN / SOCIAL & ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY	156
Unit Bisnis Korporasi & Unit Bisnis Ritel / Corporate Business Unit & Retail Business Unit	72	Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / Corporate Social Responsibility Commitment and Policy	157
Target dan Realisasi Tahun Buku / Target and Realization of the Financial Year	75	Visi Misi, dan Nilai Perseroan / Vision, Mission and Values of The Company	157
Investasi Barang Modal yang Direalisasikan pada Tahun Buku Terakhir / Capital Goods Investment Realized at the End of Fiscal Year	76	Profil Perusahaan / Company Profile	157
Dividen / Dividend	76	Penjelasan Strategi Keberlanjutan / Elaboration on Sustainability Strategy	158
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum / Realization of Use of Funds From Public Offering	76	Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan / Achievements of Sustainable Finance Action Plan	159
Informasi Material Lainnya / Other Material Information	76	Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan / Objective of Sustainable Finance Action Plan	160
Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan / Changes to Laws and Regulation with Significant Effects	77	Program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan / Objective of Sustainable Finance Action Plan	160
Perubahan Kebijakan Akuntansi / Changes in Accounting Policies	77	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 5 (Lima) Tahun / 5 (Five) Years Sustainable Finance Action Plan	162
TATA KELOLA PERSEROAN / GOOD CORPORATE GOVERNANCE	78	Proses Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan / Sustainable Finance Action Plan Preparation Process	165
Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") / General Meeting of Shareholders ("GMS")	79	Faktor Penentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan / Determinative Factors of Sustainable Finance Action Plan	167
Pelaksanaan RUPS Tahun 2022 / The Implementation of 2022 GMS	79	Prioritas Uraian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan / Priority of Detail of Sustainable Finance Action Plan	168
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) / Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)	79	Kegiatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan / Sustainable Finance Action Plan Activities	169
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) / Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)	82	Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan / Performance Overview of Sustainability Aspect	170
Dewan Komisaris / Board of Commissioners	84	Penjelasan Direksi / The Board of Directors' Remark	172
Direksi / Board of Directors	94	Tata Kelola Keberlanjutan / Sustainability Governance	180
Prosedur dan Dasar Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi / Procedure and Basis for Determining the Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors	104	Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan / Follow Up To Sustainable Finance Action Plan	183
Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris / Committees Under the Board of Commissioners	106	Kinerja Keberlanjutan / Sustainability Performance	184
Komite Audit / Audit Committee	106	Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan / Responsibility for Sustainable Product Developments and/or Services	192
Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee	113	Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan / Report and Complaint Resolution	193
Komite Pemantau Risiko / Risk Monitoring Committee	122	REFERENSI KRITERIA POJK NO. 51/POJK.03/2017 / CRITERIA REFERENCE PURSUANT TO POJK NO. 51/POJK.03/2017	194
Komite Pendukung Pelaksanaan Tugas Direksi / Supporting Committee for Implementing the Duties of the Board of Directors	122	LEMBAR UMPAN BALIK / FEEDBACK SHEET	199
Penilaian Kinerja Komite dan Unit Kerja yang Berada di Bawah Direksi / Performance Assessment of Committees and Work Units under the Board of Directors	123	SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN & LAPORAN KEBERLANJUTAN 2022 / STATEMENT LETTER OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE 2022 ANNUAL REPORT & SUSTAINABILITY REPORT	200
Komite Manajemen Risiko / Risk Management Committee	124	LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN YANG TELAH DIAUDIT / AUDITED ANNUAL FINANCIAL STATEMENT	201
Komite Pengarah Teknologi Informasi / Information Technology Steering Committee	126		
Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary	128		
Unit Audit Internal / Internal Audit Unit	131		
Pengendalian Internal / Internal Control	132		
Sistem Manajemen Risiko / Risk Management System	140		
Sanksi Administratif / Administrative Sanction	140		
Litigasi / Litigation	140		
Kode Etik / Code of Conducts	141		
Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan Direksi / Share Ownership Program by Employees and Board of Directors	141		
Sistem Pelaporan Pelanggaran / Whistleblowing System	142		
Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik / Guidelines on The Implementation of Good Corporate Governance	145		
Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme / Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing	147		
Kebijakan Antikorupsi / Anti-Corruption Policy	147		
Perlindungan Konsumen / Customer Protection	150		
Rekomendasi dalam Penerapan Pedoman GCG / Recommendation on GCG Implementation	150		

KINERJA 2022

2022 PERFORMANCE

MIZUHO



LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION	2020	2021	2022
Aset / Asset			
Kas dan Setara Kas / Cash and cash equivalents	131.57	95.64	102.60
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih / Net Consumer financing receivables	1,098.59	1,193.68	1,438.26
Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih / Net Finance lease receivables	1,211.47	835.78	674.83
Piutang Lain-Lain - Bersih / Other receivables - net	113.59	91.74	79.06
Biaya dibayar dimuka / Prepaid expenses	1.07	1.02	1.75
Aset pajak tangguhan / Deferred tax assets	21.86	5.61	11.58
Aset Tetap - Bersih / Property and equipment - net	39.53	39.82	53.03
Aset derivatif / Derivatives assets	-	0.19	17.53
Aset Hak-Guna – Bersih / Right-of-use assets - net	9.23	8.65	33.76
Aset Lain-Lain / Other assets	53.01	51.02	54.27
Jumlah Aset / Total Assets	2,679.92	2,323.15	2,466.67
Liabilitas dan Ekuitas / Liabilities and Equity			
Utang bank / Bank loans	1,949.85	1,612.76	1,661.38
Utang usaha / Trade payables	10.30	0.85	0.71
Liabilitas derivatif / Derivative liabilities	2.55	0.18	0
Utang lain-lain / Other payables	57.70	61.92	56.11
Biaya masih harus dibayar / Accrued expenses	9.56	3.56	14.37
Utang pajak / Taxes payables	1.28	2.00	2.25
Liabilitas sewa / Lease liabilities	6.73	4.95	29.54
Liabilitas imbalan pasca-kerja / Post-employment benefits liabilities	10.05	11.69	12.41
Jumlah liabilitas / Total liabilities	2,048.02	1,697.91	1,776.77
Jumlah ekuitas / Total equity	631.90	625.24	689.90
Jumlah liabilitas & ekuitas / Total liabilities & equity	2,679.92	2,323.15	2,466.67

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME	2020	2021	2022
Pendapatan / Revenues			
Pembiayaan konsumen / Consumer financing	155.86	189.38	224.00
Sewa pembiayaan / Finance leases	100.83	64.88	46.35
Administrasi dan provisi / Administration and provision	28.27	29.45	32.45
Penalti / Penalty	11.95	12.36	14.58
Bunga / Interest	0.58	0.44	0.39
Pendapatan lain-lain / Other income	12.24	6.38	15.29
Jumlah pendapatan / Total Revenues	309.73	302.89	333.06

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (LANJUTAN) STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (CONTINUED)	2020	2021	2022
Beban / Expenses			
Bunga dan keuangan / Interest and financing charges	108.93	58.23	59.24
Umum dan administrasi / General and administrative	51.87	50.45	63.90
Kepegawaian / Personnel	89.62	92.07	102.96
Penyisihan kerugian penurunan nilai / Provision for impairment losses	59.93	93.38	49.55
Beban lain-lain / Other expenses	0.95	0.59	2.07
Jumlah beban / Total Expenses	311.30	294.72	277.72
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan / Profit (loss) before income tax	(1.57)	8.17	55.34
(Beban) Manfaat pajak penghasilan / Income Tax (Expense) Benefit	4.57	(15.94)	6.71
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / Net (loss) profit for the year	3.00	(7.77)	62.05
Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income			
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain / Total Other comprehensive income (loss)	0.34	1.12	2.60
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan / Total Comprehensive (Loss) Income for the Year	3.34	(6.65)	64.65
Laba (rugi) per saham (dalam Rupiah penuh) / Basic earning per share (in full Rupiah)	0.53	(1.37)	10.91

RASIO KEUANGAN FINANCIAL RATIOS	2020	2021	2022
Rasio Laba (Rugi) Bersih Terhadap Total Aset / Net Profit (Loss) to Total Assets Ratio	0.11%	-0.33%	2.52%
Rasio Laba (Rugi) Bersih Terhadap Ekuitas / Net Profit (Loss) to Equity Ratio	0.46%	-1.24%	8.99%
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan / Profit (Loss) on Revenue Ratio	0.97%	-2.56%	18.63%
Rasio Lancar / Current Ratio	162.89%	143.83%	147.69%
NPF Neto / NPF Net	2.24%	2.93%	2.22%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional / Operating Expenses to Operating Income	100.51%	99.54%	87.29%
Net Interest Margin / Net Interest Margin	6.12%	8.67%	9.88%
Total Kewajiban terhadap Ekuitas / Total Liabilities to Equity	3.24x	2.72x	2.58x
Total Kewajiban terhadap Total Aset / Total Liabilities to Total Assets	0.76x	0.73x	0.72x
Rasio Piutang terhadap Ekuitas / Accounts Receivable to Equity Ratio	3.66x	3.25x	3.06x
Rasio Gearing / Gearing Ratio	3.11x	2.60x	2.42x

○ Sekilas Kinerja 2022 2022 Performance Overview

Jumlah Pendapatan
Total Revenues



Rp
333.06
miliar / billion

Jumlah Aset
Total Assets



Rp
2,466.67
miliar / billion

NPF Neto
NPF Net



2.22%

Rasio Gearing
Gearing Ratio



2.42x

Informasi Saham Shares Information

Data Saham Perkuartal Tahun 2022
2022 Quarterly Shares Information

Bursa Efek / Stock Exchange : PT Bursa Efek Indonesia (IDX)

	Harga Saham / Share Price (Rp)			Volume Perdagangan di Pasar Reguler Trading Volume in Regular Market (Lembar / Shares)	Jumlah Saham yang Beredar Number of Outstanding Shares (Lembar / Shares)	Kapitalisasi Pasar Market Capitalization (Dalam Miliar Rupiah / In Billion Rupiah)
	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Penutupan Closing			
Kuartal I 1st Quarter	165	102	116	610,935	5,687,353,997	659.73
Kuartal II 2nd Quarter	128	99	106	581,817	5,687,353,997	602.86
Kuartal III 3rd Quarter	148	100	120	3,864,101	5,687,353,997	682.48
Kuartal IV 4th Quarter	168	102	103	1,533,725	5,687,353,997	585.80

Data Saham Perkuartal Tahun 2021
2021 Quarterly Shares Information

Bursa Efek / Stock Exchange : PT Bursa Efek Indonesia (IDX)

	Harga Saham / Share Price (Rp)			Volume Perdagangan di Pasar Reguler Trading Volume in Regular Market (Lembar / Shares)	Jumlah Saham yang Beredar Number of Outstanding Shares (Lembar / Shares)	Kapitalisasi Pasar Market Capitalization (Dalam Miliar Rupiah / In Billion Rupiah)
	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Penutupan Closing			
Kuartal I 1st Quarter	244	94	126	45,319,700	5,687,353,997	716.61
Kuartal II 2nd Quarter	244	105	133	169,980,300	5,687,353,997	756.42
Kuartal III 3rd Quarter	192	112	159	100,725,000	5,687,353,997	904.29
Kuartal IV 4th Quarter	250	138	150	571,016,600	5,687,353,997	853.10

Total jumlah saham Perseroan yang beredar di Bursa Efek Indonesia sepanjang 2022 adalah sebesar 5.687.353.997 lembar saham. Total Kapitalisasi Pasar Saham Perseroan per 31 Desember 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp585.797.461.691 dibandingkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp853.103.099.550.

The total number of Company shares circulated on the Indonesia Stock Exchange throughout 2022 was amounting to 5,687,353,997 shares. The Company's total market capitalization as of December 31, 2022 had decreased to Rp585,797,461,691 compared to December 31, 2021 of Rp853,103,099,550.

Grafik Perdagangan Saham Tahun 2021 - 2022 Share Trading Chart Year 2021 - 2022



Aksi Korporasi Corporate Action

Sepanjang tahun 2022, Perseroan tidak melaksanakan aksi korporasi, seperti pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham.

Throughout 2022, the Company did not conduct any corporate actions, such as stock split, reverse stock, stock dividend, stock bonus, and changes in the nominal value of shares.

Penghentian Sementara Perdagangan Saham dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham Suspension of Shares Trading and / or Delisting

Sepanjang tahun 2022, tidak ada penghentian sementara perdagangan saham dan/atau penghapusan pencatatan saham.

Throughout 2022, there was no suspension of shares trading and / or delisting.

Peristiwa Penting Event Highlights



Apresiasi Dealer Tur ke Bali | 15 - 18 Mar Dealer Appreciation Tour to Bali

Kesuksesan Perseroan tak lepas dari peranan para mitra utamanya, yakni *dealer* rekanan. Atas dasar ini, berbagai program apresiasi dari Perseroan terhadap kontribusi para *dealer* rekanan selama ini diberikan kepada para *dealer* rekanan tersebut, dimana salah satunya adalah tur ke Pulau Dewata Bali pada tanggal 15 – 18 Maret 2022. Program yang bertema “Bali Luxventure” ini di ikuti sebanyak 31 *dealer*.

The success of the Company cannot be separated from the role of its main partners, namely partner dealers. Based on this, various appreciation programs from the Company to the partner dealers contribution are given to these partner dealers, where one of them is a tour to the Island of the Gods Bali on 15-18 March, 2022. The program theme “Bali Luxventure” was attended by 31 dealers.



Program Pelatihan Keamanan Siber | 22 Jun Cyber Security Training Program

Program pelatihan yang di adakan oleh Mizuho Learning Center (“MLC”) dan Departemen Teknologi Informasi bertajuk “*Cyber Security Awareness*” yang diikuti oleh karyawan Perseroan dengan posisi Kepala Departemen, Kepala Cabang sampai dengan Direktur. Tujuan *training* ini adalah untuk meningkatkan kewaspadaan setiap karyawan pengguna teknologi informasi akan ancaman siber yang dapat menimbulkan gangguan bahkan kerugian finansial individu maupun Perseroan. Dalam pelatihan ini juga diberikan pemaparan mengenai berbagai cara untuk mencegah ancaman siber dengan penggunaan teknologi informasi yang berhati-hati dan bertanggung-jawab. Narasumber pelatihan ini adalah Bapak Dr. Bayu Prawira Hie, *Doctor of Philosophy* (“PhD”) dalam *Digital Transformation*.

The training program held by the Mizuho Learning Center (“MLC”) and the Information Technology Department themed “*Cyber Security Awareness*” is attended by the Company’s employees with the position of Head of Department, Branch Manager up to Directors. The purpose of this training is to increase the awareness of every employee who uses information technology about cyber threats that can cause disruption and even financial loss to each individual as well as the Company. This training also provides an explanation of various ways to prevent cyber threats by using information technology with prudence and responsible. The speaker for this training was Dr. Bayu Prawira Hie, Doctor of Philosophy (PhD) in Digital Transformation.



Apresiasi *Dealer* tur ke Dubai dan Turki | 14 - 22 May
Dealer appreciation tour to Dubai and Turkey

Kesuksesan Perseroan tak lepas dari peranan para mitra utamanya, yakni *dealer* rekanan. Atas dasar ini, berbagai program apresiasi dari Perseroan terhadap kontribusi para *dealer* rekanan selama ini diberikan kepada para *dealer* rekanan tersebut, dimana salah satunya adalah tur ke Dubai dan Turki pada tanggal 14 – 22 Mei 2022. Program yang bertema “*Amazing Journey Dubai & Turkey*” ini di ikuti sebanyak 21 *dealer*.

The success of the Company cannot be separated from the role of its main partners, namely partner dealers. Based on this, various appreciation programs from the Company to the partner dealers contribution are given to these partner dealers, where one of them is a tour to Dubai and Turkey on 14-22 May, 2022. The program theme “*Amazing Journey Dubai & Turkey*” was attended by 21 dealers.



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | 29 Jul
Annual General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) tahun ini dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, para Pemegang Saham, dan para Undangan. Hasil RUPST salah satunya adalah menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021. Pada kesempatan tersebut, Perseroan senantiasa menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan sosial sesuai ketentuan Pemerintah.

This year’s Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) was attended by members of the Board of Commissioners, Board of Directors, Shareholders and invitees. One of the results of the AGMS was approving the Company’s Annual Report for the books ending December 31, 2021. On this occasion, the Company continues to implement health protocols and social restrictions in accordance with Government regulations.



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | 19 Sep
Extraordinary General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) dihadiri oleh anggota Direksi, para Pemegang Saham, dan para Undangan. Hasil RUPSLB adalah menyetujui perubahan nama Perseroan dan perubahan alamat Kantor Pusat Perseroan. Pada kesempatan tersebut, Perseroan senantiasa menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan sosial sesuai ketentuan Pemerintah.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) was attended by members of the Board of Directors, Shareholders and Invitees. The results of the EGMS was to approve The Change Of Company Name and the Change of the Company’s Head Office address. On this occasion, the Company always implements health protocols and social restrictions according to Government regulations.



Perubahan Nama Perseroan dan Perubahan Alamat Kantor Pusat Perseroan | 24 Sep
The Change of Company Name and The Change of The Company’s Head Office Address

Sehubungan dengan telah diterimanya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas terkait dengan Perubahan Nama Perseroan dan telah diterimanya Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tentang Perubahan Alamat Kantor Pusat Perseroan, masing-masing pada tanggal 24 September 2022.

In accordance with the receipt of the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia concerning the Approval of Amendment to the Article of Association of Limited Liability Companies related to the Change of Company Name and the receipt of the Notification of the Change of Company Data regarding the Change of the Company’s Head Office Address, respectively on September 24, 2022

Terhitung sejak tanggal 24 September 2022, PT VERENA MULTI FINANCE Tbk telah berubah nama menjadi :

Effective from September 24, 2022, PT VERENA MULTI FINANCE Tbk has changed its name to:

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk

Dan telah melakukan perubahan alamat Kantor Pusat menjadi sebagai berikut :

And has changed the address of the Head Office to be as follows:

Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Jakarta 10220
Telp : 021- 50851848
Faksimili: 021- 50851849
Email : investor@mizuho-ls.co.id
Website : www.mizuho-ls.co.id

Menara Astra 32nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5-6, Jakarta 10220
Telp No. : 021- 50851848
Facsimile : 021- 50851849
Email : investor@mizuho-ls.co.id
Website : www.mizuho-ls.co.id



Program Pelatihan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan | 3 - 4 Nov
Sustainable Finance Action Plan Training Program

Perseroan yang diwakili oleh Mizuho Learning Centre (“MLC”) kembali melakukan program pelatihan terkait keuangan keberlanjutan yang di ikuti oleh karyawan di level Manajerial ke atas dengan mengusung tema “*Sustainable Finance Action Plan Training Program*”. Program pelatihan ini dilakukan secara *online* dan dipandu oleh Bapak Dodi Kurniawan dari MLC yang diawali dengan kata sambutan dari Bapak Yudi Gustiawan selaku Direktur. Yang bertindak sebagai narasumber adalah Bapak Ignatius Wisnu Adhi Kusuma, S.E., M.M., Beliau adalah Vice President - Senior Credit Approver, Medium Corporate Banking - CIMB Niaga.

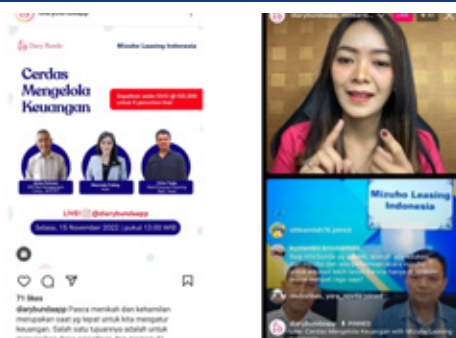
The Company, represented by the Mizuho Learning Center (“MLC”), was conducting a training program related to sustainability finance which was attended by employees at the Managerial level and above with the theme “Sustainable Finance Action Plan Training Program”. This training program was carried out online and guided by Mr. Dodi Kurniawan from MLC which began with remarks from Mr. Yudi Gustiawan as Director. The speaker was Mr. Ignatius Wisnu Adhi Kusuma, S.E., M.M., he is the Vice President - Senior Credit Approver, Medium Corporate Banking - CIMB Niaga.



Apresiasi Dealer tur ke Eropa & UK | 6 - 18 Nov
Dealer Appreciation tour to Europe & UK

Kesuksesan Perseroan tak lepas dari peranan para mitra utamanya, yakni *dealer* rekanan. Atas dasar ini, berbagai program apresiasi dari Perseroan terhadap kontribusi para *dealer* rekanan selama ini diberikan kepada para *dealer* rekanan tersebut, dimana salah satunya adalah tur ke Eropa meliputi negara Hungaria, Swiss, Perancis dan UK selama 10 (sepuluh) hari. Program yang bertema “*Grand Tour Switzerland Europe UK*” ini di ikuti sebanyak 8 *dealer*.

The success of the Company cannot be separated from the role of its main partners, namely partner dealers. Based on this, various appreciation programs from the Company to the partner dealers contribution are given to these partner dealers, where one of them is a tour to Europe such as Hungary, Switzerland, France and UK for 10 (ten) days. The program theme “Grand Tour Switzerland Europe UK “ was attended by 8 dealers.



Literasi Keuangan | 15 Nov
Financial Literacy

Dalam menjalankan amanah Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui POJK No.76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. Perseroan menjalankan kegiatan Literasi Keuangan bekerjasama dengan Diary Bunda melalui *platform* Instagram *Live*.

In carrying out the mandate of the Financial Services Authority (“OJK”) through POJK No.76/POJK.07/2016 concerning Increasing Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and/or the Public. The Company carried out Financial Literacy activities in collaboration with Diary Bunda through the Instagram Live platform.



Public Expose Tahunan | 2 Dec
Annual Public Expose

Sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia (“BEI”) melalui Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 Tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Butir III.3 Tentang Kewajiban *Public Expose* Tahunan, maka Perseroan mengadakan acara *Public Expose* pada tanggal 2 Desember 2022 bertempat di Catur Dharma Hall Lantai 5 Menara Astra, Jakarta, dengan tetap mengedepankan Protokol Kesehatan. Presentasi *Public Expose* Tahunan ini disampaikan oleh anggota Direktur Perseroan.

In accordance with the provisions of the Indonesia Stock Exchange (“BEI”) through the Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia Number: Kep-00066/BEI/09-2022 dated 30 September 2022 concerning Amendments to Regulation Number I-E concerning Obligations for Submission of Information, Item III.3 concerning Obligations of Disclosure To the public, the Company held an Annual Public Expose event on December 2, 2022 at Catur Dharma Hall, 5th floor of Menara Astra, Jakarta, implementing Health Protocol. This Annual Public Expose presentation was delivered by a member of the Board Directors of the Company.

Acara Peresmian
Grand Launching | 2 Dec

Sehubungan dengan perubahan nama dan alamat Kantor Pusat Perseroan, Perseroan mengadakan acara peresmian pada tanggal 2 Desember 2022 bertempat di Catur Dharma Hall lantai 5 Menara Astra, Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi, serta perwakilan dari APPI, OJK, Mizuho Leasing Co.,Ltd, Bank Panin serta para pemangku kepentingan. Acara dibuka dengan kata sambutan dari Bapak Hiroshi Nagamine selaku Senior Managing Executive Officer Member of The Board of Director of Mizuho Leasing Co.,Ltd. – Japan, dilanjutkan dengan kata sambutan dari Bapak Lintang Nugroho selaku Wakil Presiden Komisaris Independen PT Bank Pan Indonesia Tbk (“Panin Bank”), kemudian Bapak Bambang W. Budiawan selaku Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (“IKNB”) 2B Otoritas Jasa Keuangan, dan Gusti Wira Susanto selaku Ketua Bidang Akuntansi, Perpajakan dan Pengembangan Forum Komunikasi Daerah (“FKD”).

In connection with the change of Company name and the Company's Head Office address, the Company held a grand launching on December 2, 2022 at Catur Dharma Hall, 5th floor of Menara Astra, Jakarta. The event was attended by the Board of Commissioners and Directors, as well as representatives from APPI, OJK, Mizuho Leasing Co., Ltd, Panin Bank and other stakeholders. The event was opened with remarks from Mr. Hiroshi Nagamine as Senior Managing Executive Officer Member of The Board of Director of Mizuho Leasing Co., Ltd. - Japan, followed by remarks from Mr. Lintang Nugroho as Independent Vice President Commissioner of PT Bank Pan Indonesia Tbk (“Panin Bank”), then Mr. Bambang W. Budiawan as Head of the Department of Supervision of the Non-Bank Financial Industry (“IKNB”) 2B Financial Services Authority, and Gusti Wira Susanto as Head of Accounting, Taxation and Development of the Regional Communication Forum (“FKD”).



Donasi Peduli
Donation | 5 Dec

Perseroan bersama Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (“APPI”) peduli mengadakan donasi untuk korban bencana gempa bumi Cianjur. Bersama dengan 43 Perusahaan dibawah Lembaga Keuangan Non-Bank. Donasi tersebut telah APPI salurkan melalui Palang Merah Indonesia (“PMI”) di Markas Pusat PMI dan diterima langsung oleh Ketua Umum PMI Bapak Jusuf Kalla.

Pihak Perseroan yang diwakili oleh Bapak Andi Harjono selaku Direktur Perseroan mengungkapkan, Perseroan turut berbelasungkawa terhadap bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Cianjur, “Semoga bantuan yang kami berikan dapat meringankan beban mereka dan dapat memberikan semangat untuk melewati masa-masa sulit ini.”ujarnya

Donasi Peduli Cianjur bersama APPI ini merupakan bagian dari rangkaian program *Corporate Social Responsibility* (“CSR”) yang telah dijalankan Perseroan setiap tahunnya. Perseroan terus berkomitmen untuk memberikan program tanggung jawab sosial berkelanjutan yang tepat sasaran.

The Company together with the Association of Indonesian Finance Companies (“APPI”) gave donations for the victims of the Cianjur earthquake disaster. Together with 43 Companies under Non-Bank Financial Institutions. This donation was distributed by APPI through the Indonesian Red Cross (“PMI”) at the PMI Headquarters and received directly by PMI Chairman Mr. Jusuf Kalla.

The Company, represented by Mr. Andi Harjono as the Director of the Company, said that the Company also expressed its condolences for the disaster happened to our brothers and sisters in Cianjur, “Hopefully the donation that we give can ease their burden and can give them enthusiasm to get through these difficult times.” he said

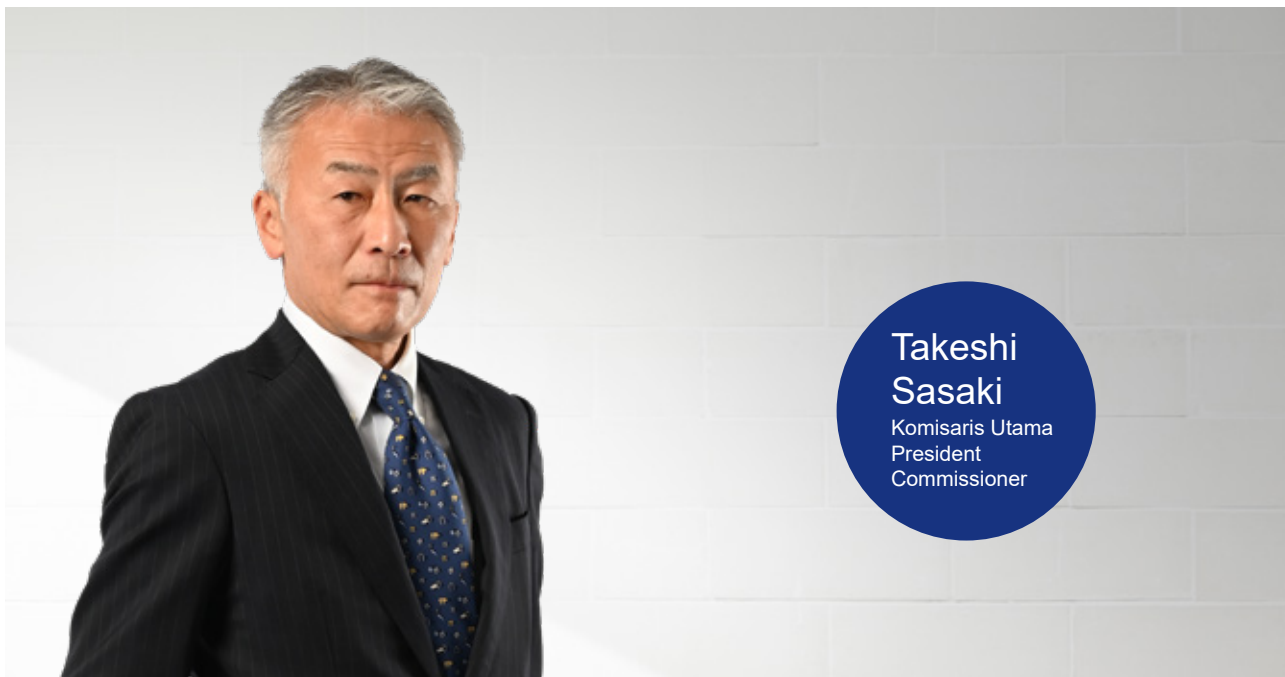
This Cianjur donation with APPI is part of a series of Corporate Social Responsibility (“CSR”) programs that the Company has implemented every year. The Company continues to be committed to providing sustainable social responsibility programs that are right on target.

LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT

MIZUHO





**Takeshi
Sasaki**
Komisaris Utama
President
Commissioner

Ditengah ketidakpastian iklim ekonomi global dan nasional, Perseroan mampu bertahan dan bahkan menunjukkan pertumbuhan portofolio pembiayaan yang cukup pesat dan penurunan rasio piutang bermasalah. Perseroan senantiasa meningkatkan pertumbuhan pembiayaan Ritel dan Korporasi secara berkesinambungan yang prosesnya dilakukan secara *prudent* serta memperkuat *credit risk management* khususnya pada Unit Bisnis Korporasi. Perseroan telah secara efektif menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (“*Good Corporate Governance*” atau “GCG”) dalam menjalankan setiap fungsi dalam tubuh Perseroan, serta mengimplementasikan metode penilaian sendiri demi terciptanya fondasi sumber daya manusia yang tangguh.

Amidst the uncertainty of the global and national economic climate, the Company was able to survive and even show quite rapid growth in the financing portfolio and a decrease in the non-performing financing ratio. The Company continues to increase the growth of Retail and Corporate financing on the ongoing basis, the process of which is carried out in a prudent manner and strengthens credit risk management, especially in the Corporate Business Unit. The Company has effectively implemented Good Corporate Governance (“GCG”) in every function within the Company and implemented self-assessment controls to build resilient human resources foundation.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dear Shareholders and Stakeholders,

Dewan Komisaris menyampaikan laporan tugas dan tanggung jawab pengawasan Perseroan sejalan dengan arahan Rapat Umum Pemegang Saham dan Anggaran Dasar yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan selama tahun 2022. Kami juga menyampaikan penilaian kinerja Direksi yang mencakup antara lain, kinerja operasional dan keuangan, pengawasan terhadap implementasi strategi Perseroan, prospek usaha yang disusun Direksi dan penerapan tata kelola perusahaan.

The Board of Commissioners submitted a report on the duties and responsibilities of the Company’s supervision in line with the direction of the General Meeting of Shareholders and the Articles of Association realized through various activities throughout 2022. We also submitted an assessment of the performance of the Board of Directors which includes, among others, operational and financial performance, supervision of the implementation of the Company’s strategy, business prospects prepared by the Board of Directors and the implementation of corporate governance.

Penilaian Atas Kinerja Direksi

Meski sempat mencatat pertumbuhan negatif saat diterpa badai pandemi Covid-19 pada tahun 2020, perekonomian nasional terus menunjukkan resiliensi dan beranjak pulih relatif

Assessment of the Performance of the Board of Directors

Even though it recorded negative growth when it was hit by the Covid-19 pandemic in 2020, the national economy continues to show resilience and is relatively recovering fast. Meanwhile, the

lebih cepat. Sementara itu, situasi ekonomi dunia ke depan mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Diiringi pengetatan kebijakan suku bunga yang mulai ditahan, berbagai lembaga internasional telah mengkoreksi prediksi ekonomi tahun 2023 mendatang sehingga probabilitas resesi terus menurun.

Harga komoditas utama global juga ternormalisasi pasca meredanya rantai pasok serta suhu iklim yang lebih bersahabat. Optimisme juga muncul dari Tiongkok yang kembali membuka perbatasan dan aktivitas ekonomi dari yang sebelumnya menerapkan kebijakan *zero-covid*. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi stimulus di tengah berbagai risiko yang terus muncul.

Didukung fundamental ekonomi nasional yang kuat, aktivitas ekonomi domestik tetap bergeliat meski kondisi global masih mengalami perkembangan yang pasang surut. Bauran berbagai kebijakan dan strategi konstruktif yang diambil Pemerintah, salah satunya melalui Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ("PC-PEN"), berhasil menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong laju ekonomi nasional.

Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan IV-2022 yang tumbuh solid sebesar 5,01% (yoy). Secara *full year*, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2022 juga mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,31%. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan Pemerintah yakni sebesar 5,2%, dan kembali mencapai level 5% seperti sebelum pandemi.

Nilai *outstanding* piutang pembiayaan konvensional mengalami lonjakan menjadi sebesar Rp415.864 miliar pada Desember 2022. Pertumbuhan tersebut disumbang oleh pembiayaan investasi sebesar Rp141.630 miliar, pembiayaan modal kerja sebesar Rp39.579 miliar, pembiayaan multiguna sebesar Rp215.399 miliar, dan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK sebesar Rp511 miliar. Profil risiko perusahaan pembiayaan juga terpantau masih terjaga dengan rasio *non-performing financing* ("NPF") yang tercatat turun menjadi sebesar 2.32% pada Desember 2022. Begitu pula pada rasio *gearing* perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 2,07 kali atau jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

Perseroan juga turut mengambil bagian untuk mensukseskan program PC-PEN untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional serta senantiasa meningkatkan pertumbuhan pembiayaan dan sekaligus menjaga kualitas pembiayaan.

Perseroan berfokus untuk menyediakan kebutuhan konsumen Ritel dan klien Korporasi secara berkesinambungan sekaligus meningkatkan portofolio pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian dan menunjang program keuangan berkelanjutan. Dengan ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik di tahun 2023, Perseroan akan meningkatkan pangsa pasar pembiayaan Ritel secara selektif dengan fokus pada kepemilikan mobil bekas serta pembiayaan multiguna yang berbasis jaminan otomotif dan properti. Sedangkan peningkatan pangsa pasar pembiayaan Korporasi dilakukan dengan meningkatkan jumlah customer yang tidak hanya terbatas pada perusahaan Jepang dan meningkatkan jumlah portofolio dari nasabah aktif.

world economic situation is starting to show signs of improvement. Accompanied by the tightening of interest rate policies that have begun to be put on hold, various international institutions have corrected upwards their economic predictions for 2023 so that the probability of a recession continues to decrease.

The prices of major global commodities have also normalized following the easing of supply chains and a friendlier climate. Optimism has also emerged from China, which has reopened its borders and economic activity from previously implementing a zero-covid policy. This policy is expected to be a stimulus amid various risks that continue to emerge.

Supported by strong national economic fundamentals, domestic economic activity continues to thrive even though global conditions are still experiencing ups and downs. A mix of various constructive policies and strategies taken by the Government, one of which is through the National Economic Recovery and COVID-19 Handling Program ("PC-PEN"), has succeeded in becoming the key to success in driving the pace of the national economy.

This is reflected in Indonesia's economic growth in the fourth quarter of 2022 which grew solidly by 5.01% (yoy). In full year, Indonesia's economic growth throughout 2022 also recorded an impressive growth of 5.31%. This figure exceeded the target set by the Government, which was 5.2%, and again reached the 5% level as before the pandemic.

The outstanding value of conventional financing receivables experienced a surge to Rp415,864 billion in December 2022. This growth was contributed by investment financing of Rp141,630 billion, working capital financing of Rp39,579 billion, multipurpose financing of Rp215,399 billion, and other financing based on OJK approval of Rp511. The risk profile of multi finance companies is also observed to be maintained with the ratio of non-performing financing ("NPF") which was recorded to have decreased to 2.32% in December 2022. In other hand, the gearing ratio of finance companies which was recorded at 2.07 times or far below maximum limit of 10 times.

The Company also takes part in the success of the PC-PEN program to drive the pace of national economic growth and continuously increase financing growth while maintaining the quality of financing.

The Company focuses on providing the needs of Retail consumers and Corporate clients on an ongoing basis while increasing the prudent financing portfolio and supporting sustainable finance programs. With expectations of the improvement of economic growth in 2023, the Company will selectively increase its Retail financing market share with a focus on used car ownership as well as multipurpose financing based on automotive and property guarantees. Meanwhile, increasing the market share for Corporate financing was carried out by increasing the number of customers, which were not only limited to Japanese companies, and by increasing the number of portfolios of active customers.

Secara umum, Dewan Komisaris menilai kinerja Direksi baik. Dimana Direksi telah secara adaptif melakukan penyesuaian strategi pemasaran, penagihan dan proses bisnis dengan mengedepankan aspek manajemen risiko yang handal dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam rangka menjaga pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan. Selanjutnya, Direksi diharapkan dapat terus melakukan penyesuaian yang adaptif terhadap perubahan dengan mengedepankan aspek manajemen risiko, memanfaatkan kekuatan likuiditas, sistem informasi dan teknologi tepat guna serta sumber daya manusia yang handal.

Jumlah Aset Perseroan pada tahun 2022 mencapai Rp2,47 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 6,18% dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya. Jumlah Liabilitas pada tahun 2022 mencapai Rp1,78 triliun, atau meningkat sebesar 4,64% dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya. Sementara itu Jumlah Ekuitas pada tahun 2022 mencapai Rp689,90 miliar, meningkat sebesar 10,34% dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya.

Pada sisi profitabilitas, jumlah Pendapatan Perseroan selama tahun 2022 sebesar Rp333,06 miliar, meningkat sebesar 9,96%, dan Perseroan mampu menekan Jumlah Beban Perseroan menjadi sebesar Rp277,72 miliar atau mengalami penurunan sebesar 5,77%. Per 31 Desember 2022, Perseroan mencatatkan Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp62,05 miliar atau meningkat sebesar 898,58% dari tahun sebelumnya. Dari segi kualitas aset, Perseroan masih dapat menjaga kualitas piutang pembiayaan sesuai ketentuan OJK yang berlaku dengan mencatatkan Rasio Piutang Pembiayaan Bermasalah (NPF-neto) sebesar 2,22% di tahun 2022 atau mengalami peningkatan kualitas dibandingkan dengan tahun 2021.

Dewan Komisaris menilai kinerja Direksi sangat baik dimana Perseroan mampu mengoptimalkan pertumbuhan pembiayaan dengan tetap melakukan pengendalian risiko yang handal. Dewan Komisaris berharap agar pada masa mendatang Perseroan dapat terus meningkatkan penyaluran pembiayaan dengan strategi pemasaran yang efektif dan tepat sasaran yang dilakukan secara *prudent* serta memperkuat *credit risk management* khususnya pada Unit Bisnis Korporasi. Perseroan juga senantiasa konsisten menerapkan *Good Corporate Governance* ("GCG"), kepatuhan, manajemen risiko, dan audit internal sesuai dengan peraturan OJK, yang menjadi peranan penting dalam mendukung operasional Perseroan yang sehat, mitigasi NPF dan senantiasa menjaga NPF dibawah ketentuan yang berlaku.

Penilaian atas Kinerja Komite

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris telah membentuk beberapa Komite yang berada di bawahnya yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko.

Sepanjang tahun 2022, Komite Audit telah melakukan tinjauan dan evaluasi atas pelaksanaan audit yang telah dilaksanakan oleh audit eksternal, memberikan rekomendasi penunjukan audit

In general, the Board of Commissioners considers that the performance of the Board of Directors is good, where the Board of Directors has adaptively made adjustments to marketing strategies, collection and business processes by prioritizing reliable risk management aspects and Good Corporate Governance in order to maintain quality and sustainable growth. Furthermore, the Board of Directors is expected to continue to make adaptive adjustments to changes by prioritizing risk management aspects, utilizing the strength of liquidity, appropriate information and technology systems and reliable human resources.

The Company's total assets in 2022 reached Rp2.47 trillion, or an increase of 6.18% compared to the position in the previous year. Total Liabilities in 2022 reached Rp1.78 trillion, or an increase of 4.64% compared to the position in the previous year. Meanwhile Total Equity in 2022 reached Rp689.90 billion, an increase of 10.34% compared to the position in the previous year.

On the profitability side, the Company's total Revenues in 2022 was Rp333.06 billion, an increase of 9.96% and the Company was able to reduce the Company's total Expenses to Rp277.72 billion or a decrease of 5.77%. As per December 31, 2022, the Company recorded a Net Profit for the Year of Rp62.05 billion, an increase of 898.58% from the previous year. In terms of asset quality, the Company can still maintain the quality of financing receivables in accordance with applicable OJK regulations by recording a Non-Performing Financing Receivables Ratio (NPF-net) of 2.22% in 2022 or experiencing an increase in quality compared to 2021.

The Board of Commissioners considers that the performance of the Board of Directors is very good where the Company is able to optimize financing growth while continuing to carry out reliable risk control. The Board of Commissioners hopes that in the future the Company can continue to increase the distribution of financing with an effective and targeted marketing strategy that is carried out in a prudent manner and strengthen credit risk management, especially in the Corporate Business Unit. The Company is also consistently implementing Good Corporate Governance (GCG), compliance, risk management and internal audit in accordance with OJK regulations, which play an important role in supporting the Company's healthy operations, mitigating NPF and always maintaining NPF under applicable regulations.

Committees Performance Assessment

In order to support the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners established several committees under it, namely the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee and the Risk Monitoring Committee.

Throughout 2022, the Audit Committee has reviewed and evaluated the implementation of audits carried out by external audits, provided recommendations for the appointment of

eksternal, melakukan evaluasi untuk memastikan proses audit internal dan eksternal dilaksanakan secara independen dan objektif.

Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan penilaian kinerja, program pengembangan kemampuan, menganalisa penerapan kebijakan dan program remunerasi, dan rekomendasi kebijakan Sumber Daya Manusia.

Selanjutnya, Komite Pemantau Risiko telah melakukan pemantauan dan penelaahan atas profil risiko Perseroan dan penerapan kepatuhan Perseroan.

Berdasarkan pembahasan realisasi kerja, Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh komite yang berada di bawah Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup baik.

Prospek Usaha 2023

Pertarungan global melawan inflasi, perang Rusia di Ukraina, dan kebangkitan Covid-19 di Tiongkok membebani aktivitas ekonomi global pada tahun 2022, dan kedua faktor utama tersebut akan terus berlanjut pada tahun 2023.

Bank Dunia memprediksi kemungkinan terjadinya resesi ekonomi global tahun 2023 mendatang. Prediksi tersebut, terasa semakin nyata dengan beberapa indikasi yang sudah mulai terjadi, seperti kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan bank sentral berbagai negara dalam upaya meredam laju inflasi. Perang Rusia-Ukraina merupakan faktor utama penyebab terjadinya resesi ekonomi global. Ketegangan geopolitik yang berimbas pada disrupsi rantai pasok global juga berpotensi berimbas pada perekonomian domestik. Disamping itu, dunia juga menghadapi tantangan perubahan iklim yang akan sangat mempengaruhi keuangan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat.

Pertumbuhan global, diproyeksikan turun menjadi 2,9% pada 2023. Proyeksi pertumbuhan yang rendah pada tahun 2023 mencerminkan kenaikan suku bunga Bank Sentral untuk melawan inflasi.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan ("KSSK") menyatakan, pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini masih tetap kuat, meski Dana Moneter Internasional ("IMF") merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,8% dari sebelumnya 5%. Bank Indonesia ("BI") memprediksi pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap kuat pada kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi.

Prakiraan tersebut sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat pasca penghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ("PPKM"), membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing ("PMA"), serta berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional ("PSN").

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") optimis memproyeksikan piutang pembiayaan akan tumbuh sekitar 13%-15% pada tahun 2023.

external audits, carried out evaluations to ensure that the internal and external audit processes were carried out independently and objectively.

The Nomination and Remuneration Committee has conducted performance assessments, capacity building programs, analyzed the implementation of remuneration policies and programs and recommended Human Resources policies.

Furthermore, The Risk Monitoring Committee has monitored and reviewed the Company's risk profile and the implementation of the Company's compliance.

Based on the discussion of work realization, the Board of Commissioners considers that all committees under the Board of Commissioners has carried out their duties and responsibilities quite well.

Business Prospects 2023

The global fight against inflation, Russia's war in Ukraine, and a resurgence of Covid-19 in China weighed on global economic activity in 2022, and the first two factors will continue to do so in 2023.

The World Bank predicts the possibility of a global economic recession in the upcoming 2023. This prediction feels even more real with several indications that have started to occur, such as the aggressive increase in benchmark interest rates by the central banks of various countries in an effort to reduce the inflation rate. The Russia-Ukrainian war was the main factor causing the global economic recession. Geopolitical tensions which impacting the global supply chain disruptions also have the potential to impact the domestic economy. Besides that, the world is also facing the challenge of climate change which will greatly affect state finances, the economy, and people's welfare.

Global growth, is projected to decline to 2.9% in 2023. The projected low growth in 2023 reflects the increase in Central Bank interest rates to fight inflation.

The Financial System Stability Committee ("KSSK") stated that national economic growth this year will remain strong, even though the International Monetary Fund ("IMF") revised Indonesia's economic growth to 4.8% from the previous 5%. Indonesia Central Bank ("BI") predicts that economic growth in 2023 will remain strong in the range of 4.5-5.3%, driven by the increase in domestic demand, both household consumption and investment.

This prediction is in line with the increase in community mobility after the abolition of the Imposition of Restrictions on Community Activities ("PPKM") policy, the improvement of business prospects, the increasing inflows of Foreign Investment ("PMA") and the completion of National Strategic Projects ("PSN").

The Financial Services Authority ("OJK") is optimistic that financing receivables will grow by around 13%-15% in 2023.

Berdasarkan proyeksi tersebut, meskipun masih dalam kondisi yang tidak stabil karena ketegangan geopolitik, ancaman resesi global, dan dampak perubahan iklim, Dewan Komisaris optimis bahwa strategi dan rencana bisnis yang telah dirumuskan oleh Direksi dapat meningkatkan kinerja Perseroan lebih lanjut dengan pertumbuhan piutang pembiayaan yang berkualitas. Dewan Komisaris yakin bahwa sinergi yang terjalin antara jajaran manajemen serta dukungan positif dari para karyawan Perseroan akan menghantarkan Perseroan menuju pencapaian target kinerja yang telah dicanangkan.

Dewan Komisaris juga menilai bahwa rencana bisnis yang telah disusun oleh Direksi tersebut cukup konservatif. Dewan Komisaris yakin rencana bisnis yang telah disusun tersebut akan menjadi energi pendorong untuk peningkatan kinerja ditengah situasi ekonomi global yang relatif belum stabil. Dewan Komisaris percaya bahwa Direksi akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan dan strategi yang adaptif dalam menghadapi kondisi kedepan sehingga Perseroan dapat terus berkembang dengan kinerja yang baik.

Penerapan Tata Kelola

Perseroan memiliki komitmen penuh untuk terus meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ("Good Corporate Governance" atau "GCG") dalam setiap proses bisnis maupun seluruh aspek pengelolaan Perseroan sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaan penerapan GCG, Perseroan telah membentuk struktur GCG yang memadai dimana Perseroan mengklasifikasikan menjadi 2 (dua) organ yakni organ utama dan organ penunjang. Organ utama merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), yang merupakan organ tertinggi Perseroan, Dewan Komisaris, dan Direksi. Sedangkan, organ penunjang terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan secara independen serta memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan ukuran dan kompleksitas Perseroan.

Secara berkala, Perseroan terus melakukan evaluasi dan langkah perbaikan untuk meningkatkan penerapan GCG. Perseroan juga secara berkala memantau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk menjamin terpenuhinya kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pandangan atas Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sebagai bagian dalam penerapan GCG, Perseroan sudah memiliki kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran yang mencakup jenis pelanggaran, cara pengaduan, perlindungan,

Based on these projections, even though it is still in an unstable condition due to geopolitical tensions, the threat of a global recession, and the impact of climate change, the Board of Commissioners is optimistic that the strategy and business plan formulated by the Board of Directors can improve the Company's performance furthermore by growing quality financing receivables. The Board of Commissioners believes that the synergy between the management and positive support from the Company's employees will lead the Company towards achieving the stated performance targets.

The Board of Commissioners also considers that the business plan prepared by the Board of Directors is quite conservative. The Board of Commissioners believes that the business plan that has been prepared will be the driving force for improving performance amidst the relatively unstable global economic situation. The Board of Commissioners believes that the Board of Directors will continue to take corrective steps and adaptive strategies in facing future conditions so that the Company can continue to develop with a good performance.

GCG Implementation

The Company is fully committed to continuously improving the implementation of Good Corporate Governance ("GCG") in every business process and all aspects of the governance of the Company to provide added value to all stakeholders.

In GCG implementation, the Company established an adequate GCG structure that the Company classifies into 2 (two) organs, the main organs and supporting organs. The main organs refer to the provisions of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies consisting of the General Meeting of Shareholders ("GMS"), which is the highest organ of the Company, the Board of Commissioners, and the Board of Directors. Meanwhile, the supporting organs consist of the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Monitoring Committee.

The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners has been carried out in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. Members of the Board of Commissioners act and make decisions independently based on the competence and integrity in accordance with the size and complexity of the Company.

Periodically, the Company continues to evaluate and take corrective steps to improve the implementation of GCG. The Company also periodically monitors changes in the provisions of the laws and regulations that are set to ensure the fulfillment of the Company's compliance with the applicable laws and regulations.

Views on the Implementation of the Whistleblowing System

As part of the implementation of GCG, the Company already has a Whistleblowing System policy which covers the types of violations, complaints methods, protection, and guarantees for

dan jaminan kerahasiaan pelapor, serta penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan yang tepat.

Perseroan menyiapkan tata cara Sistem Pelaporan Pelanggaran untuk mendeteksi adanya pelanggaran, fungsi sistem pelaporan dan pengaduan ini diawasi dan dikelola oleh Unit Audit Internal.

Dewan Komisaris melalui Komite Audit terkait melakukan pemantauan atas proses dan penyelesaian dari setiap pengaduan atau pelaporan yang ada. Dengan mekanisme dan sistem yang telah diterapkan Perseroan, pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran diharapkan senantiasa mendukung pelaksanaan tugas pengawasan aktif dari Dewan Komisaris.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tahunan yang diadakan pada 29 Juli 2022, RUPS menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris. RUPS tersebut telah menyetujui mengangkat Roosniati Salihin sebagai Komisaris yang berlaku efektif sesuai dengan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Dengan ditutupnya RUPS tahunan Perseroan yang diadakan pada tanggal 29 Juli 2022, maka masa jabatan Gunawan Santoso sebagai Komisaris telah berakhir.

Hingga saat diterbitkannya Laporan Tahunan ini, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Takeshi Sasaki
Komisaris	: Roosniati Salihin
Komisaris Independen	: Mohammad Syahril

Frekuensi dan Metode Pemberian Saran Kepada Direksi

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah memberikan arahan dan saran yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris termasuk di antaranya pengawasan atas penerapan strategi Perseroan, melalui berbagai forum antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris;
2. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi; dan
3. Rapat bersama Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.

the confidentiality of the whistleblowers, as well as handling complaints and proper follow-up on complaints.

The Company prepares the procedures for the Whistleblowing System to detect violations, the function of this reporting and complaint system is supervised and managed by the Internal Audit Unit.

The Board of Commissioners through the relevant Audit Committee monitors the process and resolution of any existing complaints or reports. With the mechanisms and systems that have been implemented by the Company, the implementation of the Whistleblowing System is expected to always support the implementation of the active supervisory duties of the Board of Commissioners.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Based on the annual General Meeting of Shareholders ("GMS") held on 29 July 2022, the GMS has approved the appointment of members of the Board of Commissioners. The GMS has approved the appointment of Roosniati Salihin as Commissioner which will be effective in accordance with the Decree of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority ("OJK"). With the closing of the Company's Annual GMS which was held on July 29, 2022, Gunawan Santoso's term of office as Commissioner has ended.

Until the publication of this Annual Report, the composition of the Board of Commissioners of the Company is as follows:

President Commissioner	: Takeshi Sasaki
Commissioner	: Roosniati Salihin
Independent Commissioner	: Mohammad Syahril

Frequency and Method of Advice Submission to the Board of Directors

Throughout 2022, the Board of Commissioners provided direction and advice related to the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, including supervision of the implementation of the Company's strategy, through various forums as follows:

1. Board of Commissioners Meeting;
2. Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors; and
3. Meeting with the Committees under the Board of Commissioners.

Di tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 kali dan sebagai tambahan mengadakan 6 kali rapat bersama dengan Direksi.

Apresiasi

Akhir kata, perkenankan saya, mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemegang saham atas dukungan dan pengertiannya, serta jajaran manajemen atas dedikasinya. Kami berharap, ditengah pemulihan perekonomian nasional, Perseroan dapat terus meningkatkan kinerjanya secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

Jakarta, April 2023
Atas nama Dewan Komisaris
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

In 2022, the Board of Commissioners held 6 meetings of the Board of Commissioners and 6 joint meetings with the Board of Directors.

Appreciation

Finally, on behalf of the Board of Commissioners, allow me to express my deepest gratitude to the shareholders for their support and understanding, as well as the management for their dedication. We hope that, amid the recovery of the national economy, the Company can continuously improve its performance in the coming year.

Jakarta, April 2023
On behalf of the Board of Commissioners of
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk



Takeshi Sasaki
Komisaris Utama / President Commissioner

Laporan Direksi

The Board of Directors Report



**Konosuke
Mizuta**
Direktur Utama
President Director

Tahun 2022 merupakan tahun pemulihan yang masih rapuh karena terdapat kerentanan finansial yang signifikan akibat perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Perseroan mampu mengatasi ketidakpastian yang dihadapi dengan merumuskan strategi yang konservatif dan adaptif yang menyebabkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Perseroan akan terus meningkatkan piutang pembiayaan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, memperkuat *Credit Risk Management*, dan membangun fondasi sumber daya manusia yang tangguh melalui pengembangan *control self assessment*. Perseroan percaya strategi ini akan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan .

Year 2022 is the year of fragile recovery since there are significant financial vulnerabilities due to Russian-Ukrainian war that caused economic turmoil. The Company is able to cope with uncertainties faced by formulating the conservative and adaptive strategy which resulted in quite significant growth. The Company will continue increasing quality financing receivable sustainably by applying the aspect of prudence, strengthening Credit Risk Management, and building resilient human resource foundation through developing control self assessment. The Company believes this strategy will provide added value to stakeholders.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dear Shareholders and Stakeholders,

Ketidakpastian global merupakan salah satu tantangan yang dihadapkan pada tahun 2022. Di tengah upaya dan semangat untuk bangkit bersama pasca pandemi, dunia dihadapkan pada situasi yang tidak pasti sebagai implikasi dari konflik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Konflik ini berdampak pada dunia, stabilitas keamanan pertahanan dan pengaruhnya terhadap ekonomi, energi, pangan yang suatu saat akan memberikan dampak secara tidak langsung terhadap pertahanan dan keamanan. Perang ini menyebabkan terjadinya gangguan pada rantai pasok global sehingga terjadi kenaikan harga energi, komoditas, hingga pangan terhadap dunia secara keseluruhan.

Global uncertainty is one of the challenges faced in 2022. In the midst of efforts and enthusiasm to rise together after the pandemic, the world is faced with an uncertain situation as an implication of the prolonged Russia-Ukraine conflict. This conflict has an impact on the world, the stability of defense security and its impact on the economy, energy, food which one day will have an indirect impact on defense and security. This war caused disruption to global supply chains resulting in an increase in energy, commodity, and food prices for the world as a whole.

Pertumbuhan ekonomi global yang melambat pada tahun 2022 menjadi 3,2%, melemah lebih dari 1% dari yang diproyeksikan pada akhir tahun 2021, terutama disebabkan oleh perang agresif Rusia di Ukraina yang menyebabkan krisis ekonomi di banyak negara.

Global economic growth slowed in 2022 to 3.2%, weakening more than 1% from the projected at the end of 2021, mainly due to Russia's war of aggression in Ukraine which caused an economic crisis in many countries.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (“BPS”) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat. Pada triwulan IV 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tetap tinggi yakni 5,01% (yoy), di tengah pertumbuhan ekonomi global yang dalam tren melambat. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan tahun 2022 tercatat 5,31% (yoy), jauh meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 3,70% (yoy).

Pembiayaan kendaraan bermotor di perusahaan pembiayaan atau multi finance tumbuh positif sepanjang 2022. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (“Gaikindo”) merilis data penjualan mobil nasional hingga Desember 2022. Tercatat, penjualan mobil nasional mampu menembus 1 juta unit sepanjang tahun lalu.

Dari kategori *wholesales* (pabrik ke *dealer*), penjualan mobil nasional naik 18,1% year on year (yoy) menjadi 1.048.040 unit selama periode Januari-Desember 2022. Demikian pula dengan kategori ritel (*dealer* ke konsumen), yang naik 17,4% (yoy) menjadi 1.013.584 unit selama tahun 2022.

Perseroan merumuskan beberapa strategi untuk meningkatkan pembiayaan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Beberapa hal strategis yang telah dilakukan oleh Perusahaan pada tahun 2022, diantaranya yaitu :

1. Menjalankan program restrukturisasi yang selaras dengan Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank; penerapan *self assessment* terhadap kriteria debitur yang layak mendapat restrukturisasi.
2. Melakukan pengkinian atau penyesuaian terhadap kebijakan pembiayaan dan standar operasional prosedur, sesuai dengan karakteristik Perseroan, perubahan peraturan dan *best practice* yang diterapkan di industri pembiayaan namun dengan tetap memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan manajemen risiko;
3. Memperluas jaringan kerjasama dengan *dealer* untuk Unit Bisnis Ritel.
4. Melakukan pengembangan/perluasan kegiatan usaha pembiayaan kepada klien korporasi yaitu dengan melakukan kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan skema pembiayaan tagihan pembelian barang dan/atau jasa yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK dengan nomor persetujuannya No. S-175/NB.221/2019.
5. Mengembangkan Sumber Daya Manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan bagi karyawan.
6. Mengembangkan teknologi yaitu:
 - Peningkatan keamanan siber dari seluruh sistem yang digunakan Perseroan terutama sistem yang berhubungan dengan pihak luar. Perseroan telah meningkatkan keamanan siber pada perangkat lunak, perangkat keras, dan kesadaran karyawan akan bahaya siber.
 - Bersamaan dengan relokasi kantor pusat ke Menara Astra, Perseroan telah melakukan pemindahan pusat data perusahaan ke Data Center NTT dimana Perseroan menggunakan metode *Colocation* yang lebih efisien dari pusat data yang dikelola mandiri

Based on data from the Central Statistics Agency (“BPS”), Indonesia’s economic growth remains strong. In the fourth quarter of 2022, Indonesia’s economic growth remained high at 5.01% (yoy), amidst a slowing trend in global economic growth. With these developments, Indonesia’s overall growth in 2022 was recorded at 5.31% (yoy), much increased from the previous year’s achievement of 3.70% (yoy).

Vehicle financing at finance or multi finance companies grew positively throughout 2022. The Association of Indonesian Automotive Industries (“Gaikindo”) released data on national car sales until December 2022. It was recorded that national car sales were able to exceed 1 million units last year.

From the wholesales category (factories to dealers), national car sales rose 18.1% year on year (yoy) to 1,048,040 units during the January-December 2022 period. Likewise for the retail category (dealers to consumers), which rose 17.4% (yoy) to 1,013,584 units during 2022.

The Company formulated several strategies to increase financing while still applying the aspect of prudence. Several strategic things carried out by the Company in 2022 are as follows:

1. Carrying out a restructuring program in line with the Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of the 2019 Coronavirus Disease for Non-Bank Financial Services Institutions; implementation of self-assessment on the criteria of debtors eligible for restructuring.
2. Updating or adjusting the financing policies and standard operating procedures in accordance with the characteristics of the Company, changes to regulations and best practices applied in the financing industry, while still paying attention to and applying the principles of prudence and risk management;
3. Expanding the network of cooperation with dealers for Retail Business Units.
4. Developing/expanding financing business activities for corporate clients, namely by carrying out working capital financing business activities with a specific scheme on collection financing for the purchase of goods and/or services that have been approved by the OJK numbered No. S-175/NB.221/2019.
5. Developing Human Resources through various trainings for employees
6. Developing technology, namely:
 - Improvement of cyber security of all systems used by the Company, especially systems related to external parties. The Company has increased cyber security in software, hardware and employee awareness of cyber threats.
 - Simultaneously with the relocation of the head office to Menara Astra, the Company has moved its corporate data center to the NTT Data Center where the Company uses the Colocation method which is more efficient than independently managed data

serta Perseroan melakukan pemasangan peralatan yang mendukung koneksi nirkabel yang aman untuk akses data/internet di kantor pusat dan di rumah dalam mendukung *work from home* ("WFH").

- Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi yang tepat guna dan tepat sasaran yang berlandaskan transformasi digital untuk berbagai proses bisnis seperti *Digital Financing*, *Revamp Website* serta pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi sesuai dengan POJK 4-2021.

Perseroan menetapkan rencana bisnis secara konservatif untuk terus meningkatkan pertumbuhan portofolio pembiayaan dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini bertujuan untuk memberikan nilai lebih bagi para pemangku kepentingan. Dengan strategi pencapaian target yang telah dirancang tersebut, Perseroan optimis bahwa pada tahun 2023, Perseroan dapat terus meningkatkan kinerjanya di tengah-tengah ketidakpastian global yang diprediksikan akan terjadi di tahun 2023 mendatang.

Kinerja Perusahaan 2022

Dalam perspektif kinerja keuangan, Jumlah Aset Perseroan pada tahun 2022 mencapai Rp2,47 triliun, mengalami peningkatan sebesar 6,18% dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya. Jumlah Liabilitas pada tahun 2022 mencapai Rp 1,78 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 4,64% dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya. Sementara itu, Jumlah Ekuitas pada tahun 2022 mencapai Rp689,90 miliar, meningkat sebesar 10,34% dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya.

Selama tahun 2022, Perseroan berhasil membukukan Jumlah Pendapatan sebesar Rp333,06 miliar, jumlah ini meningkat sebesar 9,96% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah Beban Perseroan selama tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 5,77%, dari Rp294,72 miliar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp277,72 miliar. Dengan demikian, Perseroan membukukan Laba Bersih Tahun Berjalan pada tahun 2022 sebesar Rp62,05 miliar atau meningkat sebesar 898,58%.

Pada tahun 2022, jaringan usaha Perseroan didukung oleh 25 Kantor Cabang di beberapa kota besar yang tersebar di pulau Jawa, Kalimantan, Bali, Sumatera dan Sulawesi.

Target dan Realisasi

Dari sisi Neraca, pada tahun 2022 Perseroan mencatatkan Jumlah Aset sebesar Rp2,47 triliun, dimana target yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp2,72 triliun. Dari sisi Jumlah Pendapatan Perseroan selama tahun 2022 tercatat sebesar Rp333,06 miliar, yang juga berada dibawah target pendapatan yang ditetapkan yaitu sebesar Rp366,89 miliar. Realisasi Profitabilitas Perseroan selama tahun 2022 yang tercatat dalam Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp62,05 miliar melebihi target yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp52,53 miliar.

Prospek Usaha 2023

Berdasarkan data Pengawas Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan ("OJK IKNB"), industri perusahaan pembiayaan menorehkan kinerja positif yang tercermin dari

centers and the Company has installed equipment that supports secure wireless connections for data access/internet at head office and at home in support of work from home ("WFH").

- Increase the use of effective and targeted Information Technology based on digital transformation for various business processes such as Digital Financing, Website Revamp and the establishment of an Information Technology Steering Committee in accordance with POJK 4-2021.

The Company determines a conservative business plan to continue to increase the growth of its financing portfolio and uses the principle of prudence. This aims to provide added value to stakeholders. With the target achievement strategy that has been designed, the Company is optimistic that in 2023, the Company can continue to improve its performance amidst the global uncertainty that is predicted to occur in upcoming 2023.

Company Performance 2022

From a financial performance perspective, the Company's Total Assets in 2022 reached Rp2.47 trillion, an increase of 6.18% compared to the position in the previous year. Total Liabilities in 2022 reached Rp1.78 trillion, or an increase of 4.64% compared to the position in the previous year. Meanwhile, Total Equity in 2022 reached Rp689.90 billion, an increase of 10.34% compared to the position in the previous year.

During 2022, the Company managed to record Total Revenues of Rp333.06 billion, this amount increased by 9.96% compared to the previous year. The Company's Total Expenses in 2022 decreased by 5.77%, from Rp294.72 billion in 2021 to Rp277.72 billion. Thus, the Company recorded a Net Profit for the Year in 2022 of Rp62.05 billion or increased by 898.58%.

In 2022, the Company's business network is supported by 25 Branch Offices in several major cities spread across the islands of Java, Kalimantan, Bali, Sumatra and Sulawesi.

Target dan Realization

In terms of the Balance Sheet, in 2022 the Company recorded Total Assets of Rp2.47 trillion, where the previously set target was Rp2.72 trillion. In terms of the Company's Total Revenues in 2022, it was recorded at Rp333.06 billion, which was also below the revenue target set at Rp366.89 billion. The realization of the Company's Profitability in 2022 which was recorded in the Net Profit for the Year amounted to Rp62.05 billion, exceeding the previously set target of Rp52.53 billion.

Business Prospects 2023

Based on data from the Financial Services Authority's Non-Bank Financial Industry Supervisor ("OJK IKNB"), the finance company industry recorded a positive performance as reflected

piutang pembiayaan yang melonjak sebesar 12,96% (yoy), dimana perusahaan pembiayaan berhasil membukukan piutang Rp415.864 triliun pada bulan Desember 2022. Dari segi kualitas aset, industri perusahaan pembiayaan juga mengalami perkembangan yang signifikan dengan penurunan *Non Performing Financing* menjadi 2,32%.

OJK memperkirakan industri pembiayaan melanjutkan tren pertumbuhan positif pada tahun 2023, sebagaimana terjadi pada tahun 2022. Pertumbuhan terutama ditopang oleh sektor otomotif yang merupakan penopang utama industri pembiayaan Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 juga diprakirakan tetap kuat pada kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi. Prakiraan tersebut sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat pasca penghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ("PPKM"), membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing ("PMA"), serta berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional ("PSN").

Sepanjang tahun 2022, bank sentral Amerika Serikat ("AS") atau Federal Reserve ("The Fed") telah menaikkan suku bunga sebanyak tujuh kali atau dengan total kenaikan sebesar 425 basis poin. Sikap The Fed yang agresif itu didorong oleh tingkat inflasi yang terus merangkak naik. Bahkan, pada Agustus 2022, inflasi AS sempat menyentuh 11,4% dan menjadi posisi tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Tren kenaikan suku bunga ini pun pada gilirannya diikuti oleh Bank Indonesia yang mengerek BI-7 Days Reverse Repo Rate ("BI7DRR"). BI mulai mengikuti langkah The Fed untuk mengerek suku bunga demi menjaga stabilitas Rupiah dan inflasi. Dalam proyeksi ekonomi terbarunya, pejabat Fed memperkirakan kenaikan suku bunga menjadi 5,1% pada akhir 2023, sebelum turun menjadi 4,3% pada akhir 2024.

Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi global 2023 dapat mencapai 2,6%, sejalan dengan dampak positif pembukaan ekonomi Tiongkok dan penurunan disrupsi rantai pasok global. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat ("AS") dan Eropa lebih baik dari proyeksi sebelumnya dan diikuti oleh risiko resesi yang menurun. Perbaikan prospek ekonomi global tersebut diprakirakan menaikkan harga komoditas non-energi, di tengah harga minyak yang menurun akibat berkurangnya disrupsi rantai pasok. Perkembangan positif ekonomi global tersebut serta ekspektasi kenaikan upah karena keketatan pasar tenaga kerja di AS dan Eropa mengakibatkan proses penurunan inflasi global berjalan lebih lambat, sehingga mendorong kebijakan moneter ketat negara maju berlangsung lebih lama sepanjang 2023.

Pengetatan kebijakan moneter, ditambah munculnya kasus penutupan tiga bank di AS, meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global yang kemudian menahan aliran modal ke negara berkembang dan meningkatkan tekanan nilai tukar di berbagai negara. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah guna memitigasi ketidakpastian pasar keuangan global, termasuk dampak rambatan penutupan bank di AS terhadap pasar keuangan domestik dan nilai tukar Rupiah.

in financing receivables which jumped by 12.96% (yoy), where finance companies managed to record receivables of Rp415,864 trillion in the month December 2022. In terms of asset quality, the finance company industry also experienced significant development with a decrease in *Non Performing Financing* to 2.32%.

OJK estimates that the financing industry will continue its positive growth trend in 2023, as occurred in 2022. Growth will be mainly supported by the automotive sector which is the main pillar of the Indonesian financing industry.

National economic growth in 2023 is also predicted remain strong ranging in 4.5-5.3%, driven by the increased domestic demand, both household consumption and investment. Such prediction is in line with the increase in community mobility after the abolition of the Imposition of Restrictions on Community Activities ("PPKM") policy, improving business prospects, increasing inflows of Foreign Investment ("PMA"), and the completion of National Strategic Projects ("PSN").

Throughout 2022, the central bank of the United States ("US") or the Federal Reserve ("The Fed") has raised interest rates seven times or with a total increase of 425 basis points. The Fed's aggressive stance was driven by the steadily rising inflation rate. In fact, in August 2022, US inflation reached 11.4% and became the highest position in the last few decades. This trend of increasing interest rates was in turn followed by Bank Indonesia which raised the BI-7 Days Reverse Repo Rate ("BI7DRR"). BI began to follow the steps of the Fed to raise interest rates in order to maintain Rupiah stability and inflation. In their latest economic projections, Fed officials forecast a rate hike to 5.1% by the end of 2023, before dropping to 4.3% by the end of 2024.

Bank Indonesia projects global economic growth in 2023 to reach 2.6%, in line with the positive impact of China's economic opening and reduced disruptions on global supply chain. Economic growth in the United States ("US") and Europe is better than previous projections and is followed by a reduced risk of recession. The improvement in the global economic outlook is predicted to increase non-energy commodity prices, amidst declining oil prices due to reduced disruptions on supply chain. The positive developments in the global economy and expectations of wage increases due to the tight labor markets in the US and Europe have resulted in a slower process of reducing global inflation, thus pushing the tight monetary policies of developed countries to last longer throughout 2023.

Restriction on monetary policies, plus the closing of three banks in the US, has increased uncertainty in global financial markets which then restrain the capital flows to developing countries and increase pressure on exchange rates in various countries. Indonesia Central Bank continues to strengthen its Rupiah exchange rate stabilization policy to mitigate global financial market uncertainties, including the consequent impact of bank closures in the US on domestic financial markets and the Rupiah exchange rate.

Sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan bisnis ditengah tantangan perekonomian global, Perseroan akan menjalankan strategi membangun portofolio pembiayaan Ritel dan Korporasi yang berkualitas sebagai prioritas utama. Untuk mencapai hal tersebut, Perseroan mendukung melalui penyediaan dana bagi mereka yang memiliki kebutuhan finansial untuk tumbuh secara berkelanjutan dan prudent melalui penambahan produk- produk yang inovatif dan pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai proses bisnis.

Direksi akan terus melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap target-target yang telah disusun sebelumnya secara konservatif sehingga lebih dinamis, realistik dan adaptif agar dapat diterapkan dalam lingkungan ekonomi yang serba tidak pasti.

Penerapan Tata Kelola

Manajemen terus menjunjung tinggi komitmennya terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ("*Good Corporate Governance*" atau "GCG") terhadap seluruh aspek kegiatan operasional dan lini bisnis Perseroan dengan selalu berpedoman terhadap prinsip-prinsip GCG terkini agar pertumbuhan usaha dapat ditingkatkan dengan terus mengedepankan perbaikan yang berkesinambungan.

Manajemen juga terus mendorong untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dan budaya korporasi kepada seluruh insan Perseroan. Manajemen berkeyakinan bahwa dengan implementasi GCG secara terpadu, Perseroan dapat meningkatkan kinerjanya dengan tetap menjaga kelangsungan usaha Perseroan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan mengacu kepada Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan juncto Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Selain itu, sebagai perusahaan terbuka, Perseroan juga berpedoman

As an effort to increase business growth amidst the challenges of the global economy, the Company will carry out a strategy of building a quality Retail and Corporate financing portfolio as a top priority. To achieve this, the Company supports by providing funds for those who have financial needs to grow in a sustainable and prudent manner through the addition of innovative products and the use of information technology in various business processes.

The Board of Directors will continue to make adjustments toward the previously set targets in a conservative manner so that they would be more dynamic, realistic and adaptive, hence, they can be implemented in such an uncertain economic environment.

GCG Implementation

Management continues to uphold its commitment to the implementation of Good Corporate Governance ("GCG") in all aspects of the Company's operational activities and business lines by always being guided by the latest GCG principles so that business growth can be enhanced by continuing to prioritize improvements sustainable.

Management also continues to encourage the application of GCG principles and corporate culture to all employees of the Company. Management believes that with the integrated implementation of GCG, the Company can improve its performance while maintaining the Company's business continuity in a sustainable manner.

In its implementation, the Company refers to OJK Regulation No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies in conjunction with OJK Regulation No. 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to OJK Regulation No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies and OJK Circular Letter No. 15/SEOJK.05/2016 concerning Report on the Implementation of Good Corporate Governance for Financing Companies. In addition, as a public company, the Company is also guided by OJK

pada Peraturan OJK No. 21/POJK/04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Perubahan Komposisi Direksi

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi Perseroan. Hingga saat diterbitkannya Laporan Tahunan ini, susunan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Konosuke Mizuta
 Direktur : Shunsuke Kojima
 Direktur : Andi Harjono
 Direktur : Ade Rafida Saulina S
 Direktur : Yudi Gustiawan

Apresiasi

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan yang diberikan dan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas pengarahan yang selalu diberikan. Kami percaya dengan dukungan yang positif dan terus-menerus dari seluruh pemangku kepentingan, Perseroan akan terus dapat meningkatkan kinerjanya dan tumbuh secara berkesinambungan di tahun-tahun mendatang dan meningkatkan kinerjanya di tahun-tahun mendatang.

Jakarta, April 2023
 Atas nama Direksi
 PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Regulation No. 21/POJK/04/2015 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines and OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for the Governance of Public Companies.

Changes in the Composition of the Board of Directors

Throughout 2022, there was no change in the composition of the Company's Board of Directors. As of the publication of this Annual Report, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:

President Director : Konosuke Mizuta
 Director : Shunsuke Kojima
 Director : Andi Harjono
 Director : Ade Rafida Saulina S
 Director : Yudi Gustiawan

Appreciation

On this occasion, please allow us to express our gratitude to all Stakeholders for the trust given and to the Financial Services Authority for the guidance that is always given. We believe that with positive and continuous support from all stakeholders, the Company will continue to be able to improve its performance and grow sustainably in the coming years and improve its performance in the coming years.

Jakarta, April 2023
 On Behalf of the Board of Directors
 PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk



Konosuke Mizuta
 Direktur Utama / President Director

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

MIZUHO





Mizuho Leasing Indonesia

Nama Perseroan / Company's Name	PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Tanggal Pendirian / Establishment	21 Juli 1993
Alamat Kantor / Address	Menara Astra Lantai 32 Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220
Telepon / Phone	021- 50851848
Fax	021- 50851849
E-mail	investor@mizuho-ls.co.id
Website	www.mizuho-ls.co.id
Bidang Usaha / Line of Business	Industri Keuangan / Finance Industry Perusahaan Pembiayaan / Financial Institution
Pencatatan Saham / Stock Listing	25 Juni 2008 - Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk ("Perseroan") didirikan dengan nama PT Maxima Perdana Finance berdasarkan akta No. 43 tanggal 21 Juli 1993 dari Sri Nanning, S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-11503.HT.01.01.Th.93 tanggal 29 Oktober 1993 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 4 November 1994, Tambahan No. 8832.

Perseroan telah melakukan perubahan nama beberapa kali, terakhir dari PT Verena Multi Finance Tbk menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Verena Multi Finance Tbk No. 8 tanggal 19 September 2022 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068946.AH.01.02.Tahun 2022 Tanggal 24 September 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Alasan Perubahan Nama adalah untuk menyesuaikan dengan standar penamaan Pemegang Saham Pengendali Perseroan yaitu Mizuho Leasing Co. Ltd. dan berlaku efektif sejak tanggal 24 September 2022.

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk was established under the name PT Maxima Perdana Finance based on deed No. 43 dated July 21, 1993 from Sri Nanning, S.H., notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia under the Decree No. C2-11503.HT.01.01.Th.93 dated October 29, 1993 and was reported in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 88 November 4, 1994, Supplement No. 8832.

The company has changed its name several times, most recently from PT Verena Multi Finance Tbk became PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk based on the deed of Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Verena Multi Finance Tbk No. 8 dated 19 September 2022 from Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta. This change has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0068946.AH.01.02.Tahun 2022 dated September 24, 2022 concerning Approval of Amendment to the Articles of Association of a Limited Liability Company.

The reason for the name change is to comply with the naming standard of the Company's Controlling Shareholder, namely Mizuho Leasing Co. Ltd., effectively on September 24, 2022.

Perseroan, dengan nama sebelumnya yaitu PT Maxima Perdana Finance memperoleh izin usaha lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No.994/KMK.017/1993 tanggal 30 Desember 1993. Perseroan mulai beroperasi pada tanggal 21 Juni 2003, dengan izin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 Jo. No. KEP-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010 Jo. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.KEP-806/NB.11/2022 tanggal 12 Desember 2022.

Perseroan pertama kali mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 dengan jumlah saham sebanyak 460.000 lembar saham, kemudian pada tahun 2017 melakukan Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”) dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) dengan jumlah saham sebanyak 1.583.160.556 lembar saham dan pada tanggal 28 Desember 2018, Perseroan telah memperoleh surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk melaksanakan Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD (“PMHMETD II”) sebanyak 3.102.193.089 lembar saham dan pada bulan Januari 2019 Perseroan telah menerbitkan sebanyak 3.102.193.089 saham. Sampai dengan akhir tahun 2022 jumlah saham beredar Perseroan yang beredar adalah sebesar 5.687.353.997 saham.

Perseroan merupakan anak perusahaan dari Mizuho Leasing Co.,Ltd yang merupakan bagian dari Mizuho Financial Group salah satu lembaga keuangan ternama di Jepang. Kepemilikan saham Mizuho Leasing Company, Ltd 31 Desember 2022 yaitu sebesar 67,44%.

Pada tahun 2019, Perseroan juga melakukan penggabungan usaha dengan entitas asosiasi yaitu PT IBJ Verena Finance dimana PT IBJ Verena Finance menggabungkan diri kedalam Perseroan dan Perseroan menjadi *surviving entity*. Saat ini, kegiatan usaha utama Perseroan yaitu melakukan pembiayaan dibidang Ritel dan Korporasi.

Kegiatan Usaha Business Activities

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana tersebut dalam Akta No. 8 tanggal 19 September 2022 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068946. AH.01.02.Tahun 2022 Tanggal 24 September 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan utama Perseroan meliputi usaha pembiayaan:

1. Kegiatan Usaha Utama
 - Pembiayaan Investasi
 - Pembiayaan Modal Kerja
 - Pembiayaan Multiguna
 - Kegiatan Usaha Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK

The Company, under its previous name PT Maxima Perdana Finance, obtained business license for financial institution from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia with Decree No.994/KMK.017/1993 dated December 30, 1993. The company started operating on June 21, 2003, with a business license based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-161/KM.6/2004 dated 4 May 2004 Jo. No. KEP-654/KM.10/2010 dated 9 December 2010 Jo. Copy of Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (“OJK”) No.KEP-806/NB.11/2022 dated 12 December 2022.

The Company first listed its shares on the Indonesia Stock Exchange in 2008 with a total of 460,000 shares, then in 2017 the Company conducted a Limited Public Offering I and to issue pre-emptive rights (“Rights”) with a total of 1,583,160,556 shares. On December 28, 2018, the Company obtained effective statement from the Financial Services Authority (“OJK”) to conduct a Public Offering for Capital Increase by Giving Pre-emptive Rights II (“PMHMETD II”) of 3,102,193,089 shares and in January 2019 the Company has issued 3,102,193,089 shares. Therefore, by the end of 2022 the number of outstanding shares of the Company is 5,687,353,997 shares.

The Company was a subsidiary of Mizuho Leasing Co.,Ltd which was part of the Mizuho Financial Group, one of the leading financial institutions in Japan.The share ownership of Mizuho Leasing Company, Ltd as of December 31, 2022 is 67.44%.

In 2019, the Company merged with an associated entity, PT IBJ Verena Finance, where PT IBJ Verena Finance merged into the Company and the Company turn into a surviving entity. Currently, the Company’s main business activity was financing in the Retail and Corporate sectors.

The Company’s Articles of Association have been amended several times. The latest amendment to the Company’s Articles of Association is as stated in Deed No. 8 dated September 19, 2022 of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0068946. AH.01.02. Tahun 2022 Dated September 24, 2022 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of a Limited Liability Company.

In accordance with article 3 of the Company’s Articles of Association, the scope of the Company’s main activities includes

1. Main Business Activities
 - Investment Financing
 - Working Capital Financing
 - Multipurpose Financing
 - Other Financing Business Activities Based on OJK Approval

2. Selain kegiatan usaha utama diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa (*fee*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perseroan saat ini melaksanakan kegiatan pembiayaan, sebagai berikut:

1. Pembiayaan Ritel
2. Pembiayaan Korporasi

Produk & Layanan Product & Service

Perseroan bergerak di bisnis Ritel dan Korporasi dengan layanan Pembiayaan yaitu :

Pembiayaan Ritel

- **Pembiayaan Mobil Bekas**
Pembiayaan kepemilikan mobil merupakan solusi bagi Pelanggan untuk memiliki mobil impian. Kami memberikan pembiayaan mobil bekas kepada konsumen dengan cara menghubungi showroom yang bekerjasama dengan Perseroan.
- **Pembiayaan Multiguna**
Perseroan dapat memberikan pembiayaan untuk renovasi rumah, biaya perjalanan, biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya kesehatan dan biaya lainnya dengan menjaminkan BPKB atau sertifikat tanah/rumah.
- **Pembiayaan Alat Pertanian**
Fasilitas Pembiayaan untuk membantu para petani dengan pengadaan alat dan mesin pertanian untuk para petani yang selama ini mengalami kesulitan dalam mengajukan kredit pembelian alat dan mesin pertanian.

Pembiayaan Korporasi

- **Pembiayaan Investasi - Sewa Guna Usaha**
Perseroan memberikan jasa pembiayaan sewa guna usaha baik skema jual beli-langsung atau jual beli-balik dengan pembelian asset seperti mesin, peralatan konstruksi, IT, peralatan medis, dan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan korporasi ("*corporate customer*") dari Produsen/Distributor/*Dealer* dan menyewa guna usahakannya kepada pelanggan.

Kelebihan dari skema pembiayaan Sewa Guna Usaha adalah memungkinkan para pelanggan untuk mempercepat penyusutan aktiva tetap.

- **Pembiayaan Modal Kerja**
Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada pelanggan korporasi dalam memenuhi kebutuhan modal kerja jangka pendek dan mengatur arus kas agar lebih baik. Adapun produk pembiayaan fasilitas bisnis yang kami tawarkan sebagai berikut.
 - i. Pembiayaan piutang/hutang
 - ii. Pembiayaan tagihan
- **Jasa lainnya**
 1. Pembiayaan gedung
 2. Pembiayaan sindikasi

2. In addition to the main business activities above, the Company can carry out supporting business activities to conduct operating leases and/or fee-based activities as long as they do not conflict with the laws and regulations in the financial services sector.

The Company currently carries out financing activities, as follows:

1. Retail Financing
2. Corporate Financing

The Company is engaged in Retail and Corporate business with financing services, namely:

Retail Financing

- **Used Car Financing**
Car ownership financing is a solution for Customers to have dream car. The Company provides used car financing to customers by contacting the showroom partners.
- **Multipurpose Financing**
The Company can provide financing for home renovations, travel expenses, education costs, wedding expenses, medical expenses and other costs by pledging BPKB or land/house certificates.
- **Agriculture Financing**
Financing facility to help farmers with the procurement of agricultural tools and machinery for farmers who face difficulties in applying credit for the purchase of agricultural tools and machinery.

Corporate Financing

- **Investment Financing – Finance Lease**
The Company provides lease financing through direct lease or sale and lease back by purchases assets such as machinery, construction equipment, IT, medical equipment, and others that are needed by corporate customers from Manufacturers/Distributors/Dealers and lease them to customer.

The advantage of the Finance Lease financing scheme enables our Corporate customers to accelerate the depreciation of fixed assets.

- **Working Capital Financing**
Financing facilities are provided to the corporate customer to meet short-term working capital needs and better manage cash flows. The business facility financing products we offer are as follows.
 - i. Accounts Payable financing / Account Receivable financing
 - ii. Invoice financing
- **Other services**
 1. Building lease
 2. Syndicated financing

Jaringan Kantor Office Network

Kantor Pusat

Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6,
Jakarta 10220

Telp : 021- 50851848

Faksimili: 021- 50851849

Email : investor@mizuho-ls.co.id

Website : www.mizuho-ls.co.id

Kantor Cabang

Adalah Kantor Cabang Perseroan yang memiliki kewenangan:

- Memberikan persetujuan pembiayaan kepada calon konsumen.
- Menandatangani perjanjian atau kontrak pembiayaan dengan konsumen.

Per 31 Desember 2022, Perseroan telah memiliki 25 Kantor Cabang.

Head Office

Menara Astra 32nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5-6,
Jakarta 10220

Telp No. : 021- 50851848

Facsimile : 021- 50851849

Email : investor@mizuho-ls.co.id

Website : www.mizuho-ls.co.id

Branch Offices

Are the Branch Offices of the Company which have the authority:

- Provide financing approval to prospective customers.
- Sign financing agreements or contracts with consumers.

As of 31 December 2022, the Company has 25 Branch Offices.









No.	Lokasi Location	Alamat Address	Kontak Contact	Surat Izin Pembukaan Cabang Permit of Opening Branch
1.	Jakarta Pusat PECENONGAN	Komplek Rukan Red Top Blok A No. 3-3A Jl. Pecenongan 72 Kel. Kebon Kelapa - Kec. Gambir Jakarta Pusat	Telp : 021-352.4243 Fax : 021-352.4969	No.Kep-078/KM.10/2007 18-Apr-07
2.	Jakarta Utara KELAPA GADING	Jl. Bukit Gading Raya Blok A, Kav. No 17 Kel. Kelapa Gading Barat – Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara	Telp : 021-4584.9000 Fax : 021-4584.2200	No.Kep-420/KM.06/2004 11-Oct-04
3.	Jakarta Selatan LEBAK BULUS	Komp. Bona Indah Buss, Centre Jl. Karang Tengah Blk. B/1 No.8-W Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan	Telp : 021-2276.9281	No.Kep-S-1880/NB.111/2019 29-Apr-19
4.	Jakarta Timur BUARAN	Jl. Raden Inten II No. 53D RT.004 / RW.04 Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur	Telp : 021-223.221.10	No.Kep-145/KM.10/2012 20-Mar-12
5.	Banten TANGERANG	Ruko Tangerang City Business Park Blok B No.18 Jl. Jend. Sudirman No. 1 Cikokol Kel. Babakan - Kec. Tangerang Tangerang - Banten	Telp : 021-5578.1811 Fax : 021-5578.1774	No.Kep-278/KM.05/2005 29-Aug-05
6.	Banten GADING SERPONG	Ruko Mendrisio 1 Blok E no 09 Kel. Medang - Kec. Pagedangan Tangerang - Banten	Telp : 021-5959.9028	No.Kep-155/KM.10/2010 15-Mar-10
7.	Banten SERANG	Jl. Raya Petir KM. 2 No. 10 Kel. Cipocok Jaya - Kec. Cipocok Jaya Serang - Banten	Telp : 0254-4076.794	No.Kep-148/Km.10/2010 15-Mar-10
8.	Jawa Barat BEKASI	Ruko Festival Jl. Sultan Agung Kav. 19, RT 04 / RW 06 Kel. Medan Satria – Kec. Medan Satria Bekasi – Jawa Barat	Telp : 021 2918.2903	No.Kep-084/KM.10/2011 27-Jan-11
9.	Jawa Barat CIKARANG	Komp Ruko CBD Blok E1 Jl. Niaga Raya Kav. AA3, Jababeka Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan – Kab. Bekasi Bekasi - Jawa Barat	Telp : 021-2908.2848 Fax : 021-2908.2849	No.Kep-182/KM.10/2012 20-Apr-12
10.	Jawa Barat DEPOK	Komplek ITC Depok No. 29 Jl. Margonda Raya No. 56 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok – Jawa Barat	Telp : 021-776.4232	No.Kep-S-6188/NB-111/2017 21-Dec-12

No.	Lokasi Location	Alamat Address	Kontak Contact	Surat Izin Pembukaan Cabang Permit of Opening Branch
11	Jawa Barat BOGOR	Jl. Padjajaran Pulo Armin Rt.005 Rw. 04 No.28 C Kel. Baranangsiang – Kec. Bogor Timur Bogor – Jawa Barat	Telp : 0251-838.4020 / 0251-838.4026 Fax : 0251-8384028	No.Kep-189/KM.10/2007 01-Oct-07
12	Jawa Barat BANDUNG	Jl. Karawitan No. 27A RT.001 / RW.010 Kel. Turangga, Kec. Lengkong Bandung - 40264	Telp : 022-87353020	No.Kep-057/KM.05/2006 20-Feb-06
13.	Jambi JAMBI	Jl. Hayam Wuruk No.47 C Kel.Talang Jauh, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi	Telp : 0741 – 3620887 Fax : 0741-3619493	No.Kep-240/NB.111/2021 17-Dec-21
14.	Jawa Timur SURABAYA	Jl. Baratajaya XIX No. 54 B RT 009 / RW 005 Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng Surabaya - Jawa Timur	Telp : 031-9945.3772	No.Kep-420/KM.06.2004 11-Oct-04
15.	Jawa Timur KEDIRI	Jl. Urip Sumoharjo No. 167 B Kel. Ngronggo, Kec. Kediri, Kota Kediri - Jawa Timur	Telp : 0354.2809.990 Fax : 0354.2809.700	No.Kep-317/NB.111/2021 01-Dec-21
16.	Jawa Timur MALANG	Jl. Letjen S. Parman No. 56 - B3 Kel. Purwanto – Kec. Blimbing Malang - Jawa Timur	Telp : 0341-479.107/8 Fax : 0341-479.288	No.Kep-149/KM.10/2010 15-Mar-10
17.	Sumatera Utara MEDAN	Ruko Premiere 9 Jl. Sultan Iskandar Muda No. 83-83 A Kel. Babura - Medan Petisah Medan – Sumatera Utara 20112	Telp. : 061-456.2555 Fax. : 061-456.8550	No.Kep-278/KM.05/2005 29-Aug-05
18.	Sumatera Selatan PALEMBANG	Komp. Graha Dempo Mas Blok F5 Jl. Mayor H.M. Rasyad Nawawi No. 549, RT08 RW02, Kel. 9 Ilir - Kec. Ilir Timur II Palembang - Sumatera Selatan	Telp : 0711-359.292 Fax : 0711-366.828	No.Kep-045/KM.10/2007 27-Mar-07
19.	Riau PEKANBARU	Jl. Arifin Achmad No. 75 A-B, RT.001 / RW.015 Kel. Tengkreng Tengah - Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru - Riau	Telp : 0761-841.5689 Fax : 0761-841.7664	No.Kep-189/KM.10/2007 01-Oct-07
20.	Sulawesi Selatan MAKASSAR	Jl. Gunung Latimjong Komp Ruko Metro Square Blok C No. 38 Kel. Lariangbangi - Kec. Makassar Makassar - Sulawesi Selatan	Telp : 0411-363.4355 Fax : 0411-335.562	No.Kep-036/KM.10/2010 08-Jan-10
21.	Kalimantan Timur SAMARINDA	Jl. Abdul Wahab Syahrani No 28 Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu Samarinda - Kalimantan Timur	Telp : 0541-2526.384	No.Kep-99/NB.111/2020 27-Mar-20
22.	Jawa Timur LAMONGAN	Komp. Ruko Permata Kav. No.27 Jl. Panglima Sudirman. Kel. Sidokumpul, Kec. Lamongan Kab. Lamongan - Jawa Timur	Telp: 0322-3104062	No. Kep-155/NB.111/2022 12-Jul-22
23.	Bali DENPASAR	Jl. Gatot Subroto Timur No. 323 Ds. Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur Denpasar - Bali	Telp: 0361-4765651	No. Kep-204/NB.111/2022 02-Sep-22
24.	Lampung BANDAR LAMPUNG	Jl. Pangeran Antasari No. 162A Kel. Tanjung Baru, Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Telp: 0721 – 5606551	No. Kep-235/NB.111/2022 15-Nov-22
25.	Kalimantan Barat* PONTIANAK	Jl. A. Yani, Sentra Bisnis Komplek Ruko Mega Mall, Blok-H No.9, Kel. Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan, Pontianak - Kalimantan Barat	Telp: 0561-8242133	No. Kep-2/NB.021/2023 8-Feb-23

* Perseroan menerima Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat OJK No. S-148/NB.021/2023 Tanggal 11 Februari 2023 Perihal Penyampaian Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Tentang Izin Pembukaan Kantor Cabang PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Kota Pontianak.

* The Company received a copy of the Decree of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority based on OJK Letter No. S-148/NB.021/2023 dated on 11 February 2023 Regarding Submission of a Copy of the Decision of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Concerning the Permit to Open a Branch Office for PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk, Pontianak City.

Jejak Langkah Perseroan Company Milestones

<p>Perseroan didirikan pertama kali sebagai PT Maxima Perdana Finance.</p>		<p>The Company was first established as PT Maxima Perdana Finance.</p>
<p>Perseroan berubah nama menjadi PT Verena Oto Finance dengan fokus pada pembiayaan mobil.</p>		<p>The Company changed its name to PT Verena Oto Finance and focused on car financing.</p>
<p>Perseroan mengadakan Penawaran Umum Perdana, dengan kepemilikan Bank Panin sebesar 42,87%.</p>		<p>The Company conducted an Initial Public Offering, with Bank Panin ownership of 42.87%.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Perseroan mengembangkan pembiayaan mesin. Perseroan berubah nama menjadi PT Verena Multi Finance Tbk. 		<ul style="list-style-type: none"> Company expanded to include machinery financing. The Company changed its name to PT Verena Multi Finance Tbk.
<ul style="list-style-type: none"> Perseroan menerbitkan Obligasi Verena Multi Finance I Tahun 2011 sejumlah Rp300 miliar dalam 3 (tiga) seri. Perseroan menerbitkan Medium Term Notes ("MTN") sejumlah Rp200 miliar. 		<ul style="list-style-type: none"> The Company issued 2011 Verena Multi Finance Bond I Year 2011 the amount of Rp300 billion in 3 (three) series. The Company issued Rp200 billion Medium Term Notes (MTN).
<ul style="list-style-type: none"> Perseroan melunasi Obligasi Verena Multi Finance I tahun 2011 seri A sebesar Rp65 miliar. Perseroan mendapatkan izin untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I senilai Rp1 triliun. Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 sebesar Rp300 miliar dalam 3 (tiga) seri. 		<ul style="list-style-type: none"> The Company paid off Verena Multi Finance Bond I Year 2011 series A amounting to Rp65 billion. The Company obtained a permit to issue Shelf Registration Bonds I worth Rp1 trillion. The Company issued Verena Multi Finance Phase I Shelf Registration Bonds I Year 2012 amounting to Rp300 billion in 3 (three) series.
<ul style="list-style-type: none"> Perseroan melunasi Obligasi Verena Multi Finance I tahun 2011 seri B sebesar Rp135 miliar dan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 seri A sebesar Rp50 miliar. Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 sebesar Rp153 miliar dalam 2 (dua) seri. 		<ul style="list-style-type: none"> The Company paid off Verena Multi Finance Bond I Year 2011 series B amounting to Rp135 billion and Verena Multi Finance Phase I Shelf Registration Bonds 1 Year 2012 series A in the amount of Rp50 billion. The Company issued 2013 Verena Multi Finance Phase II Shelf Registration Bonds 1 Year 2013 amounting to Rp153 billion in 2 (two) series.
<ul style="list-style-type: none"> Perseroan melunasi Obligasi Verena Multi Finance I tahun 2011 seri C sebesar Rp300 miliar dan MTN Verena Multi Finance I tahun 2011 sebesar Rp200 miliar. Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 sebesar Rp135 miliar dalam 2 (dua) seri. 		<ul style="list-style-type: none"> The Company paid off Verena Multi Finance Bond I Year 2011 series C in the amount of Rp300 billion and MTN Verena Multi Finance I Year 2011 in the amount of Rp200 billion. The Company issued Verena Multi Finance Phase III Shelf Registration Bonds I Year 2014 in the amount of Rp135 billion in 2 (two) series.

Perseroan melunasi Obligasi Verena Multi Finance I tahun 2011 seri B sebesar Rp135 miliar dan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 seri B sebesar Rp227 miliar serta Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 seri A sebesar Rp3 miliar.

2015

The Company paid off Verena Multi Finance Bond I Year 2011 series B in the amount of Rp135 billion and Verena Multi Finance Phase I Shelf Registration Bonds I Year 2012 series B in the amount of Rp227 billion and Verena Multi Finance Phase III Shelf Registration Bonds I Year 2014 series A in the amount of Rp3 billion.

Perseroan melunasi Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 seri C sebesar Rp23 miliar dan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 seri A sebesar Rp113 miliar.

2016

The Company paid off Verena Multi Finance Phase I Shelf Registration Bonds I Year 2012 series C amounting to Rp23 billion and Verena Multi Finance Phase II Shelf Registration Bonds I Year 2013 series A amounting to Rp113 billion.

- Perseroan melunasi Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 seri B sebesar Rp40 miliar dan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 seri B sebesar Rp132 miliar.
- Perseroan memperoleh izin dan melaksanakan Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dengan dana yang diperoleh untuk penambahan modal senilai Rp177,3 miliar.
- Penerbitan MTN II Verena Multi Finance Tahun 2017 sebesar Rp100 miliar.

2017

- The Company paid off Verena Multi Finance Phase II Shelf Registration Bonds I Year 2013 series B in the amount of Rp40 billion and Verena Multi Finance Phase III Shelf Registration Bonds I Year 2014 series B in the amount of Rp132 billion.
- The Company obtained a license and carried out a Limited Public Offering I ("PUT I") to issue Pre-emptive Rights ("Rights") with funds obtained for additional capital of Rp177.3 billion.
- Issuance of MTN II Verena Multi Finance Year 2017 amounting to Rp100 billion.

- Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk melaksanakan aksi korporasi Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD II ("PMHMETD II").
- Susunan pemegang saham Perseroan, pada tanggal 5 Oktober 2018 mengalami perubahan dimana IBJ Leasing Co.,Ltd. (sekarang Mizuho Leasing Co.,Ltd) membeli seluruh saham Perseroan yang dimiliki oleh DEG - Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft mbH dengan mekanisme pasar modal melalui Bursa Efek Indonesia.

2018

- The Company obtained an effective statement from the Financial Services Authority ("OJK") to carry out corporate actions of Public Offering for Capital Increase by Giving Pre-emptive Rights II ("PMHMETD II").
- The composition of the Company's shareholders changed on October 5, 2018 in which IBJ Leasing Co.,Ltd. (now Mizuho Leasing Co.,Ltd) bought all shares owned by DEG - Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft mbH through a capital market mechanism via the Indonesia Stock Exchange.

- Perseroan melaksanakan PMHMETD II dengan dana yang diperoleh untuk penambahan modal senilai Rp434,3 miliar.
- Mizuho Leasing Co.,Ltd (d/h IBJ Leasing Co.,Ltd) menjadi Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan kepemilikan sebesar 67,44%.
- Penggabungan usaha dengan entitas asosiasi PT IBJ Verena Finance (IBJV), dimana Perseroan menjadi *surviving entity*.
- Perseroan melunasi MTN II Verena Multi Finance Tahun 2017 sebesar Rp100 miliar.

2019

- The Company carried out PMHMETD II with total funding obtained for additional capital of Rp434.3 billion.
- Mizuho Leasing Co.,Ltd (formerly IBJ Leasing Co.,Ltd) became the Controlling Shareholder of the Company with an ownership of 67.44%.
- Merger with associate entity PT IBJ Verena Finance (IBJV), whereas the Company becomes the surviving entity.
- The Company paid off MTN II Verena Multi Finance Year 2017 in the amount of Rp100 billion.

Perseroan berubah nama menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk dengan alamat Kantor Pusat baru di Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5-6, Jakarta 10220.

2022

The company changed its name to PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk with a new Head Office address at Menara Astra 32nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5-6, Jakarta 10220.

Visi Misi, dan Nilai Perseroan
Vision, Mission and Values of The Company



Visi
Vision

**“Menjadi Perusahaan yang Menciptakan
Dunia yang Berkelanjutan”**

“Be a Creator of a Sustainable World”



Misi
Mission

**“Menghubungkan Kebutuhan untuk
Menciptakan Masa Depan”**

“Connect Needs to Create the Future”



Nilai-Nilai Perseroan
Corporate Values

CHALLENGE

CREATE

CHANGE

COLLABORATE

**Melalui kolaborasi, kami akan menghadapi tantangan, membuat
perubahan, dan mempercepat penciptaan**

Through collaboration, we will take on challenges, enact change and
accelerate creation

Profil Direksi The Board of Directors Profile

KONOSUKE MIZUTA

Direktur Utama
President Director



Warga Negara Jepang, 57 tahun, berdomisili sementara di Jakarta. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juli 2022, beliau diangkat kembali sebagai Direktur Utama untuk periode 2022-2024. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Kwansai Gakuin University, Hyogo, Jepang, pada tahun 1990 dan memperoleh gelar Master in Leadership & Strategy dari London Business School Sloan, London, Inggris, pada tahun 2011.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 50.

Japanese citizen, 57 years old, domiciled temporarily in Jakarta. In accordance with the resolution of the Annual GMS on 29 July 2022, he was reappointed as President Director for the 2022-2024 period. He obtained a Bachelor of Economics degree from Kwansai Gakuin University, Hyogo, Japan in 1990 and obtained a Master in Leadership & Strategy from London Business School Sloan, London, England, in 2011.

The Disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 50.

*Terhitung sejak tanggal 24 September 2022, PT Verena Multi Finance Tbk telah berubah nama menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

*As of September 24 2022, PT Verena Multi Finance Tbk has changed its name to PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

**Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan No. 23 tanggal 17 Juli 2019 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan Akta Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkular IBJV No. 24 pada tanggal dan dari Notaris yang sama dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.10-0008953 tanggal 23 Juli 2019, efektif sejak tanggal 23 Juli 2019, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (d/h PT Verena Multi Finance Tbk) melakukan penggabungan usaha dengan entitas asosiasi yaitu PT IBJ Verena Finance dimana PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk menjadi *surviving entity*.

**Based on the Deed of Decision of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) No. 23 dated July 17 2019 from Notary Fathiah Helmi, S.H., and Deed of Circular IBJV Shareholders Decree No. 24 on the date and from the same Notary and has been recorded in the Legal Entity Administration System at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-AH.01.10-0008953 dated 23 July 2019, effective from 23 July 2019, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (formerly PT Verena Multi Finance Tbk) entered into a business merger with an associated entity, namely PT IBJ Verena Finance where PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk becomes a surviving entity.

Riwayat Pekerjaan Career History

2019 – to date	President Director PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk*
2017 – 2019	Director PT IBJ Verena Finance**
2017	Deputy General Manager, International Division, Tokyo, Head Office IBJ Leasing Co, Ltd. (now Mizuho Leasing Co, Ltd)
2015 – 2017	General Manager, International Trade Business Promotion Division, Tokyo, Head Office, Mizuho Bank, Ltd.
2011 – 2015	Deputy General Manager, Global Trade Finance Division, Europe Office, London, Mizuho Bank, Ltd.
2006 – 2009	Senior Manager, Corporate Banking Division No.18, Tokyo, Head Office, Mizuho Corporate Bank, Ltd.
1999 – 2006	Manager Bangkok Branch Mizuho Corporate Bank, Ltd.
1999	Manager International Coordination Division Tokyo, Head Office The Industrial Bank of Japan, Ltd.
1996 – 1999	Corporate Banking No. 9 Tokyo Head Office The Industrial Bank of Japan, Ltd.
1990 – 1996	Osaka Corporate Banking Division No. 3 Osaka Branch The Industrial Bank of Japan, Ltd.



SHUNSUKE KOJIMA

Direktur
Director

Warga Negara Jepang, 56 tahun, berdomisili sementara di Jakarta. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juli 2022, beliau diangkat kembali menjadi Direktur untuk periode 2022-2024. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Rikkyo, Tokyo, Jepang, pada tahun 1989. Beliau merupakan Direktur yang membawahi fungsi Akunting dan *Treasury*.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 50.

Japanese citizen, 56 years old, residing domiciled in Jakarta. In accordance with the resolution of the Annual GMS on 29 July 2022, he was reappointed as Director for the 2022-2024 period. Obtained his Bachelor of Economics degree from Rikkyo University, Tokyo, Japan, in 1989. He is the Director in charge of the Accounting and Treasury functions.

The Disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 50.

*Terhitung sejak tanggal 24 September 2022, PT Verena Multi Finance Tbk telah berubah nama menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

*As of September 24 2022, PT Verena Multi Finance Tbk has changed its name to PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

**Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan No. 23 tanggal 17 Juli 2019 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan Akta Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkular IBJV No. 24 pada tanggal dan dari Notaris yang sama dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.10-0008953 tanggal 23 Juli 2019, efektif sejak tanggal 23 Juli 2019, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (d/h PT Verena Multi Finance Tbk) melakukan penggabungan usaha dengan entitas asosiasi yaitu PT IBJ Verena Finance dimana PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk menjadi *surviving entity*.

**Based on the Deed of Decision of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) No. 23 dated July 17 2019 from Notary Fathiah Helmi, S.H., and Deed of Circular IBJV Shareholders Decree No. 24 on the date and from the same Notary and has been recorded in the Legal Entity Administration System at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-AH.01.10-0008953 dated 23 July 2019, effective from 23 July 2019, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (formerly PT Verena Multi Finance Tbk) entered into a merger with an associated entity, namely PT IBJ Verena Finance where PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk becomes a surviving entity.

Riwayat Pekerjaan Career History

2019 – to date	Director PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk*
2019	Deputy General Manager International Business Administration Department IBJ Leasing Co, Ltd. (now Mizuho Leasing Co, Ltd)
2016 – 2019	Deputy General Manager Corporate Business Department (Metropolitan Area No.1), IBJ Leasing Co, Ltd. (now Mizuho Leasing Co, Ltd)
2011 – 2016	Deputy General Manager International Department, IBJ Leasing Co, Ltd. (now Mizuho Leasing Co, Ltd)
2010 – 2011	Director PT IBJ Verena Finance**
2010	Vice Chairman of Establishment Preparation Committee of PT. IBJ Verena Finance, IBJ Leasing Co, Ltd. (now Mizuho Leasing Co, Ltd)
2002 – 2010	Deputy General Manager International Department IBJ Leasing Co., Ltd. Head Office (now Mizuho Leasing Co, Ltd)
2002	Senior Manager International Business Development Department, IBJ Leasing Co., Ltd, Head Office (now Mizuho Leasing Co, Ltd)
1999 – 2002	Director PT. Bumi Daya - IBJ Leasing
1998 – 1999	General Manager PT Bumi Daya – IBJ Leasing
1994 – 1998	Head Office Computer & OA Department Manager IBJ Leasing Co., Ltd (now Mizuho Leasing Co, Ltd)
1989 – 1994	Osaka Branch IBJ Leasing Co., Ltd (now Mizuho Leasing Co, Ltd)

ANDI HARJONO

Direktur
Director



Warga Negara Indonesia, 53 tahun, berdomisili di Jakarta. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juli 2022, beliau diangkat kembali sebagai Direktur untuk periode 2022-2024. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, pada tahun 1992 dan memperoleh gelar Master of International Management dari Thunderbird School of Global Management, Arizona, Amerika Serikat pada tahun 1994. Beliau merupakan Direktur yang membawahi fungsi HR, GA dan IT.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 50.

Indonesian citizen, 53 years old, domiciled in Jakarta. In accordance with the resolution of the Annual GMS on 29 July 2022, he was reappointed as Director for the 2022-2024 period. Obtained a Bachelor of Engineering degree from Trisakti University, Jakarta, Indonesia, in 1992 and a Master of International Management degree from Thunderbird School of Global Management, Arizona, United States, in 1994. He is the Director in charge of HR, GA and IT functions.

The Disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 50.

Riwayat Pekerjaan Career History

2019 – to date	Director PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk*
2016 – 2019	President Director PT Verena Multi Finance Tbk *
2007 – 2016	Director PT Verena Multi Finance Tbk*
2002 – 2007	Vice President PT Indofood Sukses Makmur Tbk Bogasari Flour Mills
2001 – 2002	Financial & Operational Advisor for Sekar Group PT Tri Panji Anugrah
1999 – 2001	Manager PT Tunas Sepadan Investama
1998 – 1999	Manager Carbonless Paper Export Marketing Division PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills
1995 – 1998	Finance & Accounting Manager PT Bentala Mahaya
1993	Finance Officer PT Astra Graphia Tbk

*Terhitung sejak tanggal 24 September 2022, PT Verena Multi Finance Tbk telah berubah nama menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

*As of September 24 2022, PT Verena Multi Finance Tbk has changed its name to PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk



ADE RAFIDA SAULINA S

Direktur
Director

Warga Negara Indonesia, 58 tahun, berdomisili di Tangerang. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juli 2022, beliau diangkat kembali menjadi Direktur untuk periode 2022-2024. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Nommensen, Medan, Indonesia pada tahun 1987. Beliau merupakan Direktur yang membawahi Unit Bisnis Korporasi.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 50.

Indonesian citizen, 58 years old, domiciled in Tangerang. In accordance with the resolution of the Annual GMS on 29 July 2022, he was reappointed as Director for the 2022-2024 period. She obtained a Bachelor of Accounting degree from Nommensen University, Medan, Indonesia in 1987. She is the Director in charge of the Corporate Business Unit.

The Disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 50.

Riwayat Pekerjaan Career History

2019 – to date	Director PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk*
2016 – 2019	Director PT IBJ Verena Finance**
2015 – 2016	Business Development General Manager PT IBJ Verena Finance**
2011 – 2015	Business Development Manager PT IBJ Verena Finance**
2006 – 2011	Business Analyst PT Sigma Cipta Caraka
1997 – 2006	Marketing Manager PT GE Finance Indonesia
1995 – 1997	Marketing Senior Executive PT GE Astra Finance
1989 – 1994	Marketing Officer PT Bumi Daya – IBJ Leasing
1986 – 1988	Chief Accountant PT Abdi Rakyat Bakti

*Terhitung sejak tanggal 24 September 2022, PT Verena Multi Finance Tbk telah berubah nama menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

*As of September 24 2022, PT Verena Multi Finance Tbk has changed its name to PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

**Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan No. 23 tanggal 17 Juli 2019 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan Akta Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkular IBJV No. 24 pada tanggal dan dari Notaris yang sama dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.10-0008953 tanggal 23 Juli 2019, efektif sejak tanggal 23 Juli 2019, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (d/h PT Verena Multi Finance Tbk) melakukan penggabungan usaha dengan entitas asosiasi yaitu PT IBJ Verena Finance dimana PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk menjadi *surviving entity*.

**Based on the Deed of Decision of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) No. 23 dated July 17 2019 from Notary Fathiah Helmi, S.H., and Deed of Circular IBJV Shareholders Decree No. 24 on the date and from the same Notary and has been recorded in the Legal Entity Administration System at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-AH.01.10-0008953 dated 23 July 2019, effective from 23 July 2019, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (formerly PT Verena Multi Finance Tbk) entered into a merger with an associated entity, namely PT IBJ Verena Finance where PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk becomes a surviving entity.

YUDI GUSTIAWAN

Direktur
Director



Warga Negara Indonesia, 49 tahun, berdomisili di Tangerang. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juli 2022, Beliau diangkat kembali sebagai Direktur untuk periode 2022 - 2024. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi INABA, Bandung, Indonesia, pada tahun 1996 dan memperoleh gelar Sarjana Statistik dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, pada tahun 1999, serta memperoleh gelar Magister Management dari Bina Nusantara Business School, Jakarta, Indonesia pada tahun 2015. Beliau merupakan Direktur yang membawahi Unit Bisnis Ritel.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 50.

Indonesian citizen, 49 years old, residing in Tangerang. In accordance with the resolution of the Annual GMS on 29 July 2022, he was reappointed as President Commissioner for the 2022-2024 period. He obtained a Bachelor of Accounting degree from the INABA College of Economics, Bandung, Indonesia, in 1996; obtained a Bachelor of Statistics from Padjadjaran University, Bandung, Indonesia, in 1999; and obtained a Master degree in Management from Bina Nusantara Business School, Jakarta, Indonesia in 2015. He is the Director in charge of the Retail Business Unit.

The Disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 50.

*Terhitung sejak tanggal 24 September 2022, PT Verena Multi Finance Tbk telah berubah nama menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

*As of September 24 2022, PT Verena Multi Finance Tbk has changed its name to PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Riwayat Pekerjaan Career History

2019 – to date	Director PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk*
2018 – 2019	Vice President Director PT Jtrust Olympindo Multifinance
2016 – 2018	President Director PT Olympindo Multifinance (now PT Jtrust Olympindo Multifinance)
2015 – 2016	Operations Director PT Radana Bhaskara Finance Tbk
2012 – 2014	Director of Strategic Support PT HD Finance Tbk (now PT Radana Bhaskara Finance Tbk)
2011 – 2012	Deputy Director of Strategic Support PT HD Finance Tbk (now PT Radana Bhaskara Finance Tbk)
2009 – 2011	Head of Business Support Division PT HD Finance Tbk (now PT Radana Bhaskara Finance Tbk)
2009	Head of Human Resources Division PT HD Finance (now PT Radana Bhaskara Finance Tbk)
2008 – 2009	Head of Human Resources Division (Caretaker) PT HD Finance (now PT Radana Bhaskara Finance Tbk)
2005 – 2009	Head of Operations Division PT HD Finance (now PT Radana Bhaskara Finance Tbk)
2002 – 2005	Accounting Manager PT Arta Boga Cemerlang
2001 – 2002	Regional Internal Auditor for Java Area II PT. Alfa Retailindo Tbk
1999 – 2001	PPIC (Production Planning & Inventory Control) PT. Ateja Tritunggal Corporation Padalarang

Profil Dewan Komisaris

The Board of Commissioners Profile



TAKESHI SASAKI

Komisaris Utama
President Commissioner

Warga Negara Jepang, 61 tahun, berdomisi di Jepang. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juli 2022, Beliau diangkat kembali sebagai Komisaris Utama untuk periode 2022-2024. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Seikei, Tokyo, Jepang, pada tahun 1984.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali, serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 50.

Japanese citizen, 61 years old, domiciled in Japan. In accordance with the resolution of the Annual GMS on 29 July 2022, he was reappointed as President Commissioner for the 2022-2024 period. He obtained a Bachelor of Economics degree from Seikei University, Tokyo, Japan, in 1984.

The Disclosure of affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 50.

Riwayat Pekerjaan Career History

2019 – to date	International Business Administration Department Mizuho Leasing Co., Ltd
2021 – to date	President Commissioner PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk*
2019 – 2021	Commissioner PT Verena Multi Finance Tbk*
2016 – 2019	General Manager of International Dept. IBJ Leasing Co., Ltd (now Mizuho Leasing Co., Ltd)
2009	President Japan-PNP Leasing & Finance Corp. (now PNB-Mizuho Leasing & Finance Corp.)
2006	General Manager of Computer & OA Dept. IBJ Leasing Co., Ltd (now Mizuho Leasing Co., Ltd)
2001	Executive Vice President Krung Thai IBJ Leasing Co, Ltd.
1989	Manager IBJ Leasing (USA) Inc.
1984	IBJ Leasing Co, Ltd. (now Mizuho Leasing Co., Ltd)

*Terhitung sejak tanggal 24 September 2022, PT Verena Multi Finance Tbk telah berubah nama menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

*As of September 24 2022, PT Verena Multi Finance Tbk has changed its name to PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

MOHAMMAD SYAHRIAL

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Warga Negara Indonesia, 56 tahun, berdomisili di Jakarta. Sesuai keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 17 Juli 2019, Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen terhitung sejak tanggal efektifnya penggabungan usaha yaitu tanggal 23 Juli 2019 untuk periode 2019-2021. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juli 2022, beliau diangkat kembali sebagai Komisaris Independen untuk periode 2022-2024. Memperoleh gelar Sarjana Corporate Finance dari Universitas Florida Atlantic, Florida, Amerika Serikat, pada tahun 1988 dan memperoleh gelar Master of Corporate Finance Investment dari Universitas Golden Gate, San Fransisco, Amerika Serikat, pada tahun 1989.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali, serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 50.

Indonesian Citizen, 56 years old, domiciled in Jakarta. In accordance with the decision of the Extraordinary GMS on 17 July 2019, he was appointed as Independent Commissioner as of the effective date of the business merger, namely 23 July 2019 for the 2019-2021 period. In accordance with the resolution of the Annual GMS on 29 July 2022, he was reappointed as Independent Commissioner for the 2022-2024 period. Obtained his Bachelor of Corporate Finance from Florida Atlantic University, Florida, USA, in 1988 and obtained his Master of Corporate Finance Investment from Golden Gate University, San Francisco, USA, in 1989.

The Disclosure of affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 50.

*Terhitung sejak tanggal 24 September 2022, PT Verena Multi Finance Tbk telah berubah nama menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

*As of September 24 2022, PT Verena Multi Finance Tbk has changed its name to PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

**Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan No. 23 tanggal 17 Juli 2019 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan Akta Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkular IBJV No. 24 pada tanggal dan dari Notaris yang sama dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.10-0008953 tanggal 23 Juli 2019, efektif sejak tanggal 23 Juli 2019, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (d/h PT Verena Multi Finance Tbk) melakukan penggabungan usaha dengan entitas asosiasi yaitu PT IBJ Verena Finance dimana PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk menjadi *surviving entity*.

**Based on the Deed of Decision of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) No. 23 dated July 17 2019 from Notary Fathiah Helmi, S.H., and Deed of Circular IBJV Shareholders Decree No. 24 on the date and from the same Notary and has been recorded in the Legal Entity Administration System at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-AH.01.10-0008953 dated 23 July 2019, effective from 23 July 2019, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (formerly PT Verena Multi Finance Tbk) entered into a merger with an associated entity, namely PT IBJ Verena Finance where PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk becomes a surviving entity.

Riwayat Pekerjaan Career History

2019 – to date	Independent Commissioner PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk*
2016 –to date	Chief Executive Officer Moya Holdings Asia Limited
2011 – to date	President Director PT Tamaris Hidro
2008 – to date	Managing Partner PT Nura Kapital
2010 – 2019	Independent Commissioner PT IBJ Verena Finance**
2008 – 2011	Commissioner PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
2004 – 2008	President Director PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
2003 – 2004	Commissioner PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2002 - 2003	Commissioner PT Bank Niaga Tbk
2002	Commissioner PT Bank Permata Tbk
1999 – 2004	Deputy Chairman AMK (2002 – 2004) Senior Vice President (2001 – 2002) Vice President (2000 – 2001) Assistant Vice President (1999 – 2000) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
1997 – 1999	Vice President Research PT Pentasena Artha Sentosa
1996 – 1997	Vice President Research PT Amsteel Securities Indonesia
1992 – 1996	Head Research IBJ Indonesia Bank
1990 - 1992	Analyst PT Sun Hung Kai
1988	Credit Officer Bank of America, San Fransisco (USA)



ROOSNIATI SALIHIN

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia, 75 tahun, berdomisili di Jakarta. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juli 2022, beliau diangkat sebagai Komisaris untuk periode 2022-2024. Beliau merupakan lulusan jurusan English Literature dari University of California, Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1968 dan jurusan Management dari Tokyo Business of School, Jepang pada tahun 1971.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali, serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 50.

Indonesian Citizen, 75 years old, domiciled in Indonesia. In accordance with the resolution of the Annual GMS on July 29, 2022, she was appointed as the Commissioner for the 2022-2024 period. She is a graduate of English Literature from University of California, Los Angeles, USA in 1968 and graduate of Management from Tokyo Business of School, Japan in 1971.

The Disclosure of affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 50.

Riwayat Pekerjaan Career History

2022 – to date	Commissioner PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk*
2020 – to date	President Commissioner PT Clipan Finance Indonesia Tbk
2007 – 2020	Commissioner PT Clipan Finance Indonesia Tbk
1997 – 2020	Deputy President Director PT Bank Pan Indonesia Tbk
1994 – 1997	Senior Excecutive Vice President PT Bank Pan Indonesia Tbk
1991 – 1994	Excecutive Vice President PT Bank Pan Indonesia Tbk
1986 – 1991	Division Head PT Bank Pan Indonesia Tbk
1983 – 1986	Chief Dealer PT Bank Pan Indonesia Tbk
1980 – 1983	Senior Dealer PT Bank Pan Indonesia Tbk
1977 - 1980	Dealer PT Bank Pan Indonesia Tbk
1974 - 1977	Junior Dealer PT Bank Pan Indonesia Tbk
1971 - 1974	Assistant Dealer PT Bank Pan Indonesia Tbk

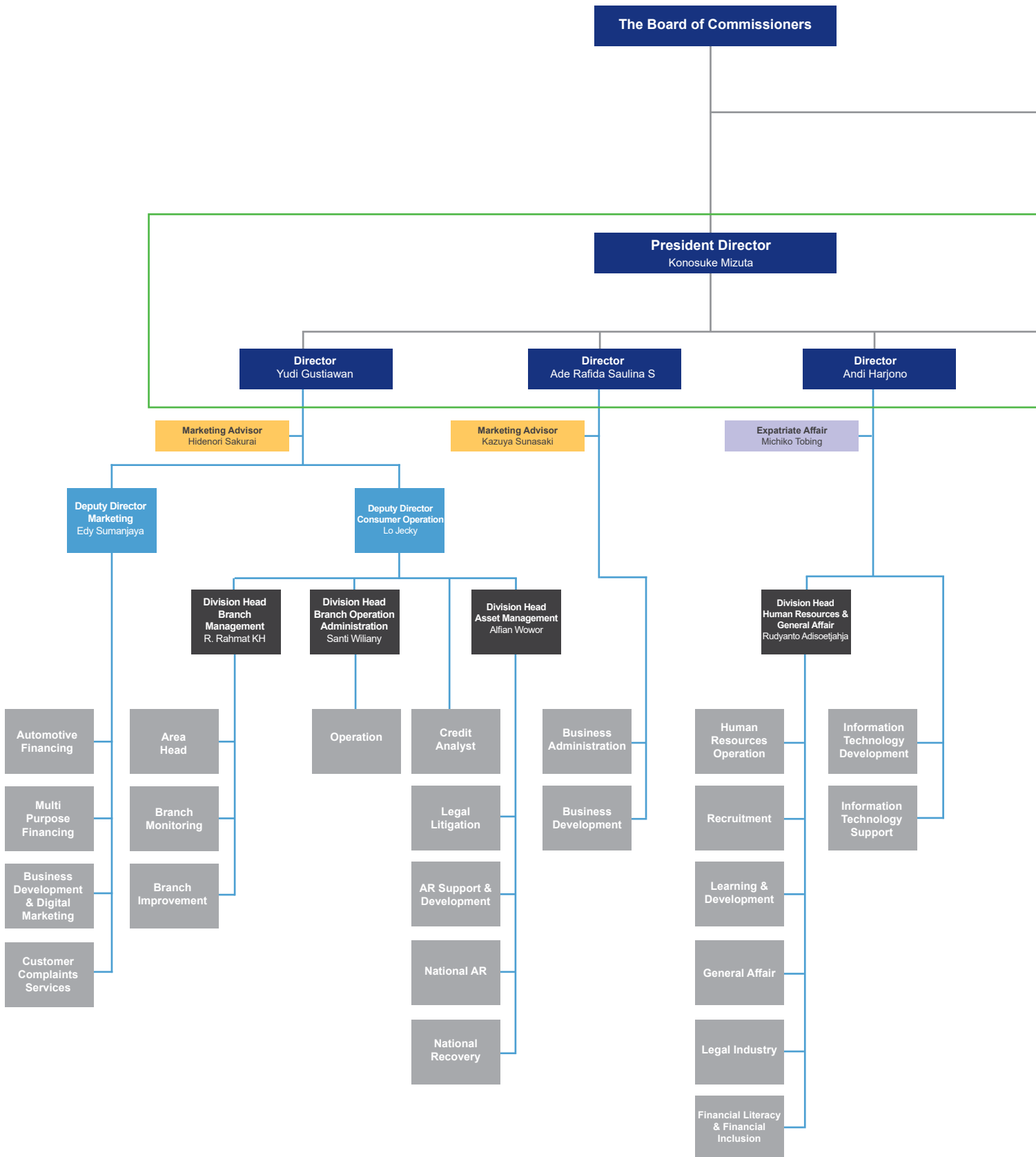
*Terhitung sejak tanggal 24 September 2022, PT Verena Multi Finance Tbk telah berubah nama menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

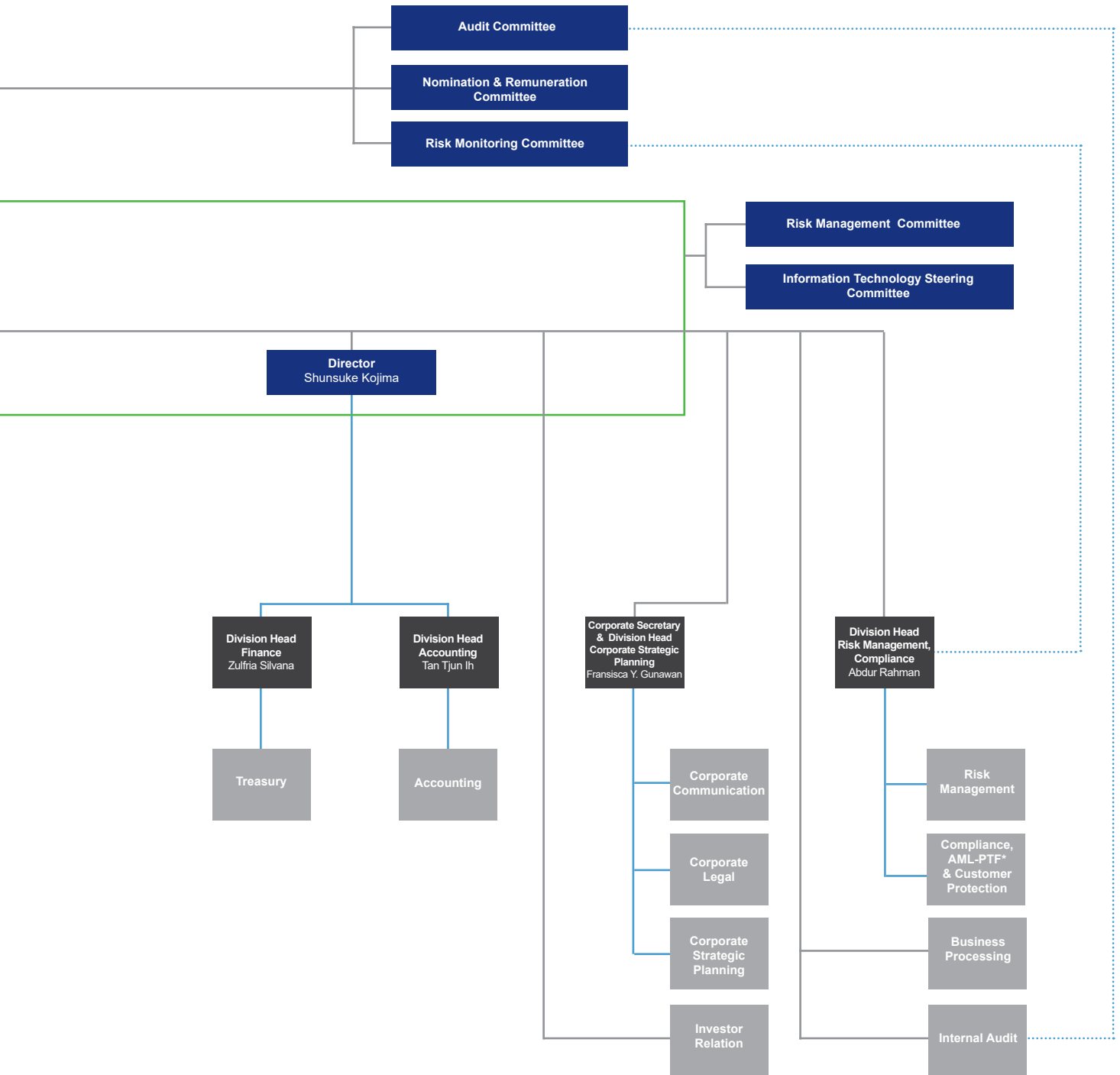
*As of September 24 2022, PT Verena Multi Finance Tbk has changed its name to PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk



Struktur Organisasi Organization Structure

Per 17 April 2023 / As of April 17, 2023





Notes :

* AML-PTF : Anti-Money Laundering and Prevention of The Terrorism Financing

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Affiliation Relationship of Members of The Board of Commissioners and The Board of Directors

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan Financial Relation with								Hubungan Keluarga dengan Family Relation with							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dewan Komisaris / Board of Commissioners																
Takeshi Sasaki*		√		√	√		√			√		√		√		√
Mohammad Syahril		√		√		√		√		√		√		√		√
Roosniati Salihin		√		√		√		√		√		√		√		√
Direksi / Board of Directors																
Konosuke Mizuta		√		√		√		√		√		√		√		√
Shunsuke Kojima		√		√		√		√		√		√		√		√
Andi Harjono		√		√		√		√		√		√		√		√
Ade Rafida Saulina S		√		√		√		√		√		√		√		√
Yudi Gustiawan		√		√		√		√		√		√		√		√

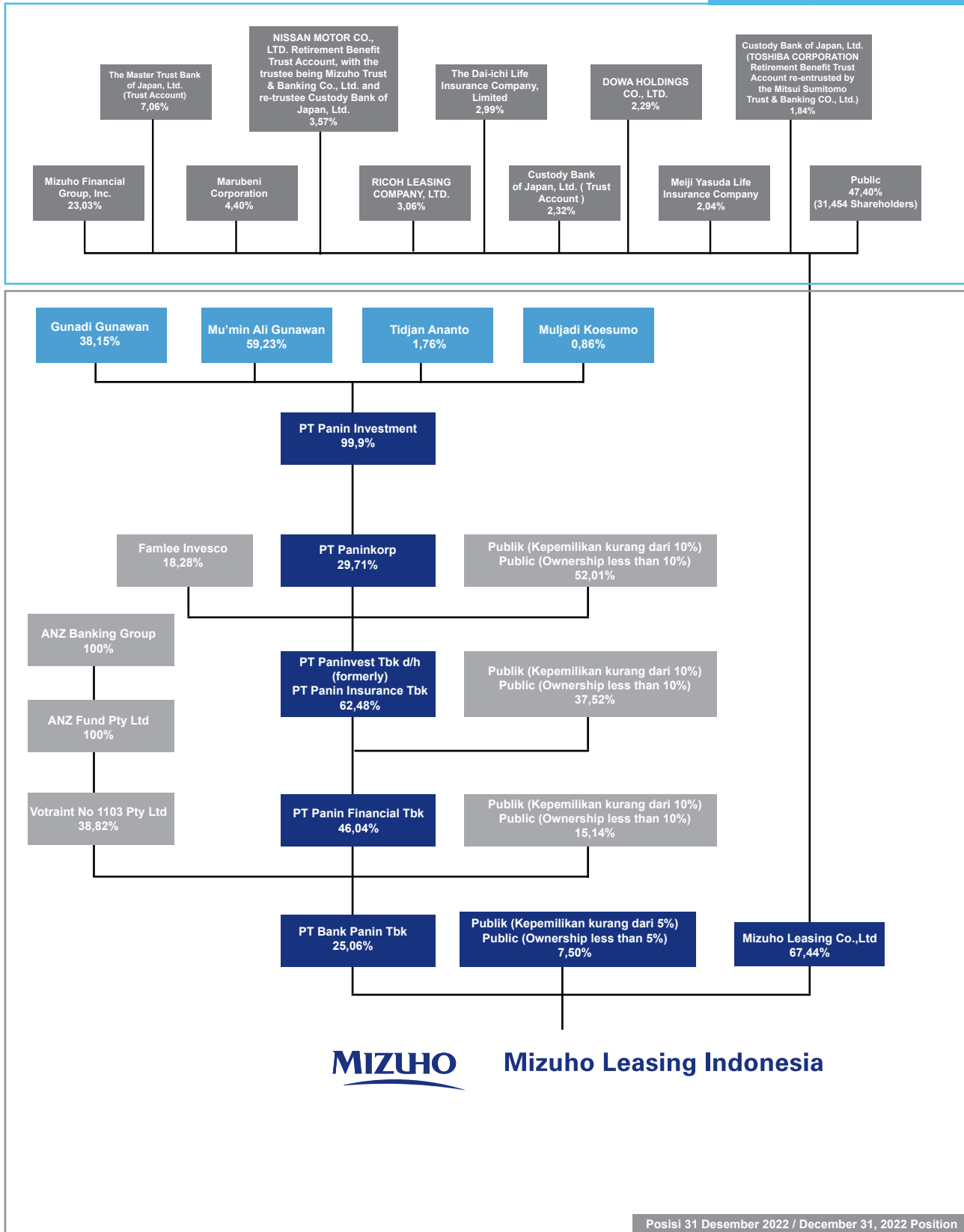
*) Takeshi Sasaki memiliki hubungan afiliasi yang bersifat keuangan dengan Mizuho Leasing Co., Ltd., selaku Pemegang Saham Pengendali dan salah satu Pemegang Saham Utama. Saat ini Beliau menjabat sebagai International Business Administration Department di Mizuho Leasing Co, Ltd.

*) Takeshi Sasaki has a financial affiliation relationship with Mizuho Leasing Co., Ltd, as the Controlling Shareholder and one of the Main Shareholders. Currently He serves as International Business Administration Department at Mizuho Leasing Co., Ltd.



Struktur Kepemilikan Saham Shareholding Structure

Posisi 30 September 2022 /
September 30, 2022 Position



○ Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Institutions & Professionals

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik / Public Accountant and Public Accountant Firm

Bayu M Dayat dan Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan

Bayu M Dayat and Public Accountant Firm Imelda & Partners
(member firm of Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte Global)

Kantor Pusat

The Plaza Office Tower, Lantai 32,
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30,
Jakarta Pusat 10350 - Indonesia
Telp. : +6221-50818000
Fax. : +6221-29928300

Notaris / Notary

Fathiah Helmi, SH

Graha Irama Lt.6 – Blok C
Jl. H.R Rasuna Said Kav 1–2 BI X–1
Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
Telp. : +6221-52907304

Biro Administrasi Efek / Share Registrar

PT Raya Saham Registra

Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47–48.
Jakarta Selatan 12930 - Indonesia
Telp. : +6221-2525666
Fax. : +6221-2525028
Email : rrsbae@registra.co.id
Website : www.registra.co.id

Kustodian / Custodian

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53
Jakarta Selatan 12190 - Indonesia
Telp. : +6221-52991099
Fax. : +6221-52991199
Website : www.ksei.co.id

Berikut ini adalah data jasa berkala yang diberikan oleh lembaga dan profesi penunjang sepanjang tahun 2022.

The following data concerns regular services provided by supporting institutions and professions during 2022.

Profesi Penunjang Supporting Professions	Jasa Yang Diberikan Services Provided	Imbal Jasa Fee	Periode Penugasan Period of Duty
Akuntan Publik Public Accountant	Audit Laporan Keuangan Posisi Desember 2022 Audit Financial Report Position December 2022	Rp1,637,250,000	2022
Notaris / Notary	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan Akta Deed Preparation Pengurusan ke Kementerian Hukum & HAM RI Preparations to Indonesian Ministry of Law and Human Rights 	Rp107,670,000	2022
Biro Administrasi Efek Share Registrar	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemeliharaan data saham Maintenance of share data Biaya administrasi e-RUPS e-GMS administration fee 	Rp55,000,000	2022

○ Informasi Entitas Anak Subsidiary Information

Per 31 Desember 2022, Perseroan tidak memiliki Entitas Anak.

As of December 31, 2022, The Company did not have any Subsidiaries.

Informasi Kepemilikan Saham Shareholding Information

Informasi kepemilikan saham per 31 Desember 2022, sebagai berikut :

Information on share ownership per December 31, 2022, was as follows:

Nama Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Percentage
Mizuho Leasing Co.,Ltd.	3,835,346,804	67.44
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1,425,482,304	25.06
Masyarakat	426,524,889	7.50
Total	5,687,353,997	100.00

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Share Ownership

Per 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022, tidak ada kepemilikan saham Perseroan oleh Dewan Komisaris maupun Direksi yang menjabat pada saat buku Laporan Tahunan ini diterbitkan.

As of January 1, 2022 to December 31, 2022, there was no ownership of the Company's shares by the Board of Commissioners or Directors who served at the time this Annual Report was published.

Daftar Pemegang Saham Berdasarkan Klasifikasi Shareholders Classification

Pemegang Saham Lokal Local Shareholders	Jumlah Pemegang Efek Number of Securities Holders	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Percentage
Individu Individual	1,275	114,079,959	2.01%
Institusi Institution	9	1,736,406,644	30.53%
Sub Total	1,284	1,850,486,603	32.54%
Pemegang Saham Asing Foreign Shareholders	Jumlah Pemegang Efek Number of Securities Holders	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Percentage
Individu Individual	3	130,500	0.00%
Institusi Institution	3	3,836,736,894	67.46%
Sub Total	6	3,836,867,394	67.46%
TOTAL	1,290	5,687,353,997	100.00%

Kronologis Pencatatan Saham Chronology of Shares Listing

Perseroan melakukan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada 25 Juni 2008 sejumlah 1.002.000.000 lembar saham melalui Penawaran Umum Perdana atas 460.000.000 lembar saham Perseroan kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp100,- per lembar saham dan harga penawaran sebesar Rp100,-. Penawaran Umum Perdana tersebut juga disertai dengan penerbitan 46.000.000 Waran Seri I. Berikut ini adalah kronologis pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia hingga akhir tahun buku.

The Company listed its initial shares on the Indonesia Stock Exchange on June 25, 2008 totaling 1,002,000,000 shares through an Initial Public Offering of 460,000,000 shares of the Company to the public with a nominal value of Rp100.- per share and an offer price of Rp100.-. The Initial Public Offering was also accompanied by the issuance of 46,000,000 Series I Warrants. The following is a chronology of the listing of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange until the end of the fiscal year.

Tanggal Date	Aksi Korporasi Corporate Actions	Nominal Nominal	Harga Pelaksanaan Exercised Price	Saham Tambahan Additional Shares	Jumlah Saham Number of Shares
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Before Initial Public Offering	Rp100	-	Rp100	542,000,000
25 Jun 2008	Penawaran Umum Perdana Initial Public Offering	Rp100	Rp100	460,000,000	1,002,000,000
4 Sep 2009	Konversi Waran Warrant Conversion	Rp100	Rp110	20	1,002,000,020
24 Jun 2010	Konversi Waran Warrant Conversion	Rp100	Rp110	332	1,002,000,352
18 May 2017	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	Rp100	Rp112	18,590	1,002,018,942
19 May 2017	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	Rp100	Rp112	101,958	1,002,120,900
22 May 2017	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	Rp100	Rp112	872,367	1,002,993,267
23 May 2017	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	Rp100	Rp112	4,702,146	1,007,695,413
24 May 2017	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	Rp100	Rp112	213,918,728	1,221,614,141
26 May 2017	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	Rp100	Rp112	467,477,166	1,689,091,307
29 May 2017	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	Rp100	Rp112	896,069,601	2,585,160,908
15 Jan 2019	Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD II Public Offering for Capital Increase by Giving Pre-emptive Rights II	Rp100	Rp140	283	2,585,161,191
16 Jan 2019	Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD II Public Offering for Capital Increase by Giving Pre-emptive Rights II	Rp100	Rp140	2,491	2,585,163,682
18 Jan 2019	Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD II Public Offering for Capital Increase by Giving Pre-emptive Rights II	Rp100	Rp140	2,522,210,381	5,107,374,063
21 Jan 2019	Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD II Public Offering for Capital Increase by Giving Pre-emptive Rights II	Rp100	Rp140	20	5,107,374,083
24 Jan 2019	Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD II Public Offering for Capital Increase by Giving Pre-emptive Rights II	Rp100	Rp140	579,979,914	5,687,353,997

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Other Securities Listings

Pada tahun 2022, Perseroan tidak menerbitkan atau mencatatkan efek lainnya. Berikut ini adalah kronologis pencatatan efek lainnya.

In 2022, the Company did not issue or list any other securities. The chronology of other securities listings were as follow.

No.	Obligasi Bonds	Seri Series	Nilai Amount	Bunga Interest	Jangka Waktu Tenor	Peringkat Rating	Jatuh Tempo Due Date	Status Status	Bursa Stock Exchange
1	Obligasi Verena Multi Finance I Tahun 2011 Verena Multi Finance Bond I Year 2011	A	Rp65 miliar/billion	9.5%	370 hari/days	idA (Single A)	22 Mar 2012	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
		B	Rp135 miliar/billion	10.5%	24 bulan/months	idA (Single A)	18 Mar 2013	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
		C	Rp300 miliar/billion	11.25%	36 bulan/months	idA (Single A)	18 Mar 2014	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
Total Rp500 miliar/billion									
2	Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 Verena Multi Finance Phase I Shelf Registration Bonds I Year 2012	A	Rp50 miliar/billion	7.25%	370 hari/days	idA (Single A)	21 Dec 2013	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
		B	Rp227 miliar/billion	9.00%	36 bulan/months	idA- (Single A Minus)	11 Dec 2015	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
		C	Rp23 miliar/billion	9.05%	48 bulan/months	idA- (Single A Minus)	11 Dec 2016	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
Total Rp300 miliar/billion									
3	Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 Verena Multi Finance Phase II Shelf Registration Bonds I Year 2013	A	Rp113 miliar/billion	11.84%	36 bulan/months	idA- (Single A Minus; Stable Outlook)	24 Dec 2016	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
		B	Rp40 miliar/billion	12.15%	48 bulan/months	idA- (Single A Minus; Stable Outlook)	24 Dec 2017	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
Total Rp153 miliar/billion									
4	Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 Verena Multi Finance Phase III Shelf Registration Bonds I Year 2014	A	Rp3 miliar/billion	11.00%	370 hari/days	idA- (Single A Minus)	29 Mar 2015	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
		B	Rp132 miliar/billion	12.55%	36 bulan/months	idA- (Single A Minus)	19 Mar 2017	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
Total Rp135 miliar/billion									

No.	Medium Term Notes (MTN)	Nilai Amount	Bunga Interest	Jangka Waktu Tenor	Peringkat Rating	Jatuh Tempo Due Date	Status Status	Bursa Stock Exchange
1	Medium Term Notes I Verena Multi Finance Tahun 2011 dengan Tingkat Bunga Tetap	Rp200 miliar/billion	11.00%	3 tahun/years	idA- (Single A Minus)	15 Dec 2014	Sudah Lunas /Paid	-
2	Medium Term Notes II Verena Multi Finance Tahun 2017	Rp.100 miliar/billion	10.00%	2 tahun/years	idA (Single A)	5 Dec 2019	Sudah Lunas /Paid	-

Sumber Daya Manusia Human Resources

Kunci sukses Perseroan untuk terus tumbuh dan menciptakan nilai jangka panjang secara maksimal terletak pada kemampuan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan talenta-talenta kompeten dan memiliki loyalitas tinggi.

Karena itu, Perseroan menyadari rekrutmen, pengembangan Sumber Daya Manusia ("SDM") dan kesempatan berkarier sangatlah penting dan memiliki peran penting dengan pertumbuhan dan kesuksesan Perseroan.

Untuk itu, penerapan budaya Perusahaan dalam bentuk penanaman nilai dan prinsip serta pelaksanaannya akan membawa manfaat tidak hanya terhadap Perseroan tetapi juga bagi individu karyawan. Perseroan secara terencana dan berkesinambungan melakukan pengembangan SDM dan potensi-potensinya, yaitu:

Perencanaan SDM

- Rekrutmen
- Pelatihan dan pengembangan potensi karyawan
- Kaderisasi dan *talent management*
- Penilaian pekerjaan, penghargaan, dan sanksi

Komposisi dan Jenjang Karyawan

Pada 2022, jumlah karyawan Perseroan bertambah dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 664 orang dari sebelumnya 614 orang. Detail dari struktur karyawan pada 2020, 2021 dan 2022 tersaji dalam gambaran di bawah ini:

The key factors toward the Company's success in maintaining its growth and creating maximum long-term values were based on the ability to attract, develop, and retain competent personnels with high loyalty.

Therefore, the Company realized that Recruitment, Human Resource development, and career opportunities are essential and played a major role to the Company's development and success.

For such objectives, the implementation of corporate culture by instilling values and principles, would bring benefits not only for the Company but also to them as individuals. The Company had planned and continuously developed HR and its potentials, namely:

HR Planning

- Recruitment
- Training and developing employee potential
- Regeneration and talent management
- Job assessments, rewarding employees achievements and sanctioning

Employee Composition and Level

In 2022, the number of the Company's employees increased from the previous year, namely to 664 people from the previous 614 people. The details of the employee structure in 2020, 2021 and 2022 are presented in the picture below:

Komposisi Menurut Jabatan Composition Based on Positions						
Jabatan Position	2020		2021		2022	
	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
<i>Deputy Director</i>	3	0.5%	3	0.5%	3	0.5%
<i>General Manager</i>	9	1.5%	10	1.6%	10	1.5%
<i>Manager</i>	49	8.3%	51	8.3%	56	8.4%
<i>Supervisor</i>	129	21.9%	130	21.2%	145	21.8%
<i>Officer</i>	361	61.2%	380	61.9%	410	61.7%
<i>Staff</i>	39	6.6%	40	6.5%	40	6.0%
Total	590	100.0%	614	100.0%	664	100.0%

Komposisi Menurut Jenjang Pendidikan
Composition Based on Academic Backgrounds

Pendidikan Academic Backgrounds	2020		2021		2022	
	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
S2 / Master	6	1.0%	5	0.8%	5	0.8%
S1 / Bachelor	350	59.3%	372	60.6%	419	63.1%
DIPLOMA	95	16.1%	91	14.8%	84	12.7%
SMU/SMK/SMEA/STM High School/Vocational School/Economic Vocational School/Technical High School	137	23.2%	144	23.5%	154	23.2%
SMP/SD Junior High School/ Elementary School	2	0.3%	2	0.3%	2	0.3%
Total	590	100.0%	614	100.0%	664	100.0%

Komposisi Menurut Jenjang Usia
Composition Based on Ages

Usia Ages	2020		2021		2022	
	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
18 - 25	64	10.8%	62	10.1%	59	8.9%
26 - 35	248	42.0%	251	40.9%	285	42.9%
36 - 45	221	37.5%	237	38.6%	247	37.2%
> 45	57	9.7%	64	10.4%	73	11.0%
Total	590	100.0%	614	100.0%	664	100.0%

Komposisi Menurut Status Kepegawaian
Composition Based on Employment Status

Status Kepegawaian Employment Status	2020		2021		2022	
	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
Pegawai Tetap / Permanent Employee	483	81.9%	496	80.8%	502	75.6%
Pegawai Kontrak / Contract Employee	107	18.1%	118	19.2%	162	24.4%
Total	590	100.0%	614	100.0%	664	100.0%

Komposisi Menurut Jenis Kelamin
Composition Base on Gender

Jenis Kelamin Gender	2020		2021		2022	
	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
Laki-laki / Male	454	76.9%	485	79.0%	526	79.2%
Perempuan / Female	136	23.1%	129	21.0%	138	20.8%
Total	590	100.0%	614	100.0%	664	100.0%

Pengembangan Kompetensi Karyawan

Perseroan senantiasa mengembangkan materi dan sarana pelatihan untuk semua pekerja. Beberapa metode yang digunakan dalam penyampaian materi-materi pelatihan, yaitu melalui *video learning*, *video conference* dan *e-learning*. Pengembangan SDM tidak hanya dilakukan melalui pelatihan tatap muka, baik secara langsung maupun virtual, namun juga melalui *on job training*, *tutoring*, *rotasi*, *coaching*, *counseling* dan *mentoring*. Materi-materi yang disiapkan tidak hanya berorientasi pada industri pembiayaan saja, namun juga materi *soft skills* seperti kepemimpinan, pengembangan kepribadian, dan komunikasi. Media *e-learning* menjadi salah satu solusi dan strategi yang ditempuh untuk pembelajaran yang berkelanjutan.

Perseroan senantiasa menyelenggarakan kegiatan alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing (“TKA”) kepada Tenaga Kerja Lokal lainnya guna proses didalam Alih Pengetahuan (*Transfer Knowledge*)

Berikut adalah program pelatihan yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2022:

Employee Development Trainings

The Company continues to develop training materials and tools for all employees. Several methods are used in the delivery of training materials, namely through video learning, video conferencing, e-learning. Human resource development is not only done through face-to-face training, both in person and virtual, but also through on-job training, tutoring, rotation, coaching, counseling, and mentoring. The materials prepared are not only oriented towards the financing industry, but also soft skills materials such as leadership, personality development, and communication. e-learning media is one of the solutions and strategies adopted for continuous learning.

The Company always organizes knowledge transfer activities for foreign workers (“TKA”) to other local workers for the process of Transfer Knowledge.

These were the training programs that had been carried out throughout the year of 2022:

No.	Klasifikasi Training Classification	Program	Peserta Participant
1	Pelatihan Perkenalan Induction Training	96	138
2	Pelatihan Teknis Technical Training	105	599
3	Pelatihan <i>Soft Skill</i> (Manajerial dan Kepemimpinan) Soft Skill Training (Managerial & Leadership)	10	90
4	Program Sertifikasi : Certification Program		
	4.1. Refreshment Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (“SPPI”) Dewan Komisaris dan Direksi 4.1. Refreshment - SPPI BOC & BOD	17	29
	4.2. Sertifikasi Dasar Manajerial SPPI 4.2. Basic Certification - SPPI Management	6	10
	4.3. Sertifikasi Profesi Penagihan SPPI 4.3. Professional Certification - SPPI Collection	4	32
	4.4. Sertifikasi Program Perencanaan Pengembangan Individu (“P3I”) 4.4. Certification - P3I	16	131
	Jumlah Total	254	1029

Teknologi Informasi Information Technology

Dukungan Teknologi Informasi

Seiring dengan bisnis Perseroan yang terus tumbuh, pengembangan Teknologi Informasi (“TI”) memberikan keunggulan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah dan berinovasi pada produk yang sudah ada serta mengefisienkan dan mengefektifkan proses bisnis. Selain itu, pengembangan TI turut serta memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi pelanggan Perseroan. Untuk itu, Perseroan selalu mengupayakan pengembangan TI yang didasari oleh kebutuhan

Information Technology Support

As the Company’s business continues to grow, the development of Information Technology (“IT”) provides advantages in providing services to customers and innovating existing products as well as streamlining business processes. In addition, IT development participates in providing security and comfort guarantees for the Company’s customers. For this reason, the Company strives for IT development that is based on needs in accordance with applicable provisions, regulations and laws. Currently, IT

sekaligus sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan undang-undang yang berlaku. Saat ini pengembangan TI memiliki peran dalam beberapa aspek Perseroan, yaitu:

- Mengoptimalkan dan mengefisienkan proses kerja serta meminimalisasi terjadinya kesalahan akibat kelalaian maupun penyalahgunaan wewenang.
- Informasi bisnis, baik data konsumen maupun data-data yang berhubungan dengan pihak ketiga, dapat tercatat secara benar dan tepat, yang berujung memberikan informasi secara *real time* sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan secara tepat dan cepat.

Pengembangan Teknologi Informasi

Saat ini, pengembangan TI yang dilakukan Perseroan disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan bisnis, serta merupakan bagian dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Pengembangan TI yang dilakukan Perseroan adalah untuk mengembangkan sistem TI yang dapat mendukung bisnis yang dijalankan oleh Perseroan sebagai langkah menuju transformasi *digital*. Juga Perseroan mendukung dan melengkapi karyawan untuk dapat melakukan pekerjaan dari rumah (*Work From Home – WFH*) selama pandemi berlangsung.

Pengembangan 2022

Seiring dengan perkembangan teknologi yang dimiliki, Perseroan menggunakan jasa pihak ketiga dan didukung dari *stakeholder*, maka Perseroan meningkatkan keamanan siber dan juga pengguna terhadap aplikasi:

1. Aplikasi *Mobile Order and Survey*
2. Aplikasi *Mobile Collection*
3. *Web monitoring Mobile Order dan Survey*
4. *Web monitoring Mobile Collection*
5. *API Payment Gateway*

Dan selain itu, bekerja sama dengan penyedia jasa TI untuk melakukan Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi (*Vulnerability Assessment and Penetration Test*) terhadap aplikasi maupun jaringan sistem:

1. Aplikasi *Mobile Order*
2. *Web Monitoring Order dan Survey*
3. *Webmail Zimbra*
4. *API Payment Channel*

Dan seiring dengan perkembangan Perseroan dan digitalisasi, Perseroan telah melakukan implementasi sebagai berikut:

1. *Microsite PinjamDana Katalog*
2. *Microsite PinjamDana Member*
3. Melakukan penyesuaian *website* Perseroan terhadap perubahan *format* dan desain terhadap standarisasi Perseroan
4. Melakukan perpindahan *Data Center* dari *On Premise* menjadi *Co-Location* untuk mendapatkan infrastruktur yang lebih baik dan keamanan akses yang lebih terjamin
5. Penyesuaian terhadap perubahan nama Perseroan yang berimbas pada sistem, dokumen, dan standar operasional.
6. Pengembangan metode pembayaran ke toko *online* dan Bank
7. Pemasangan perangkat keras / peralatan keamanan siber untuk menjaga keamanan sistem terutama dari data yang berasal dari pihak luar

development has a role in several aspects of the Company, namely:

- Optimizing and streamlining work processes and minimizing errors due to negligence or abuse of authority.
- Business information, both consumer data and data related to third parties can be recorded correctly and precisely, will provide real time information so that it can be the basis for making accurate and fast decisions.

Information Technology Development

Currently, IT development carried out by the Company is adjusted to the needs and business development and is part of the provisions of the Financial Services Authority (“OJK”). The IT development carried out by the Company is to develop an IT system that can support the business run by the Company as a step towards digital transformation. The Company also supports and equips employees to be able to do Work From Home (WFH) during the pandemic.

2022 Development

Along with the development of technology owned, the Company has used services of third parties and was supported by the stakeholders, the Company has upgraded the cyber security and also users of the application:

1. *Mobile Order and Survey Application*
2. *Mobile Collection Application*
3. *Web monitoring of Mobile Orders and Surveys*
4. *Web monitoring Mobile Collection*
5. *API Payment Gateways*

And besides that, engaged with IT service providers to carry out Vulnerability Assessments and Penetration Tests on application and network systems:

1. *Mobile Order Application*
2. *Web Monitoring Orders and Surveys*
3. *Zimbra Webmail*
4. *API Payment Channels*

And along with the development of the company and digitalization, the Company has implemented the following:

1. *Microsite PinjamDana Katalog*
2. *Microsite PinjamDana Member*
3. Revamped the Company’s website to changes in format and design to Company standards
4. Relocated the Data Center from On-Premise to Co-Location to get better infrastructure and more secure access
5. Made adjustments to changes in the name of the company which impact on systems, documents and operational standards
6. Development of payment methods to online stores and Banks
7. Installation of cyber security hardware/equipment to maintain system security, especially from data originating from external parties

- Pemutahiran perangkat lunak seperti *firewall* and *antivirus* pada *server* maupun komputer untuk mengimbangi perkembangan ancaman siber.

Perseroan saat ini dalam tahap pengembangan di beberapa bagian yaitu :

- Pembaharuan terhadap sistem HRIS (*Human Resources Information System*) dengan target implementasi pada tahun 2023.
- Penerapan ITSM (*Information Technology Service Management*).
- Pengembangan berkelanjutan terhadap *Microsite PinjamDana*.

Pengembangan ke Depan

Untuk mendukung pengembangan Perseroan dalam menuju digitalisasi, menunjang operasional Perseroan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen, Perseroan mempunyai rencana pengembangan untuk tahun 2023, yaitu:

- Mobile Application* untuk Konsumen.
- Penggunaan aplikasi pesan *WhatsApp* bisnis yang sudah terverifikasi untuk mendukung *Customer Relationship Management* khususnya penagihan.
- Penggunaan panggilan tatap muka (*Video Call*) dan GPS *Capture* untuk menunjang kebutuhan *Credit Management* sehingga menghasilkan analisa yang lebih akurat.
- Pengembangan aplikasi *mobile* untuk mitra jasa penagihan, sehingga dapat mempercepat dan memudahkan hubungan antara Perseroan dengan mitra jasa penagihan.
- Melakukan integrasi sistem pada proses yang dilakukan oleh Bisnis Unit Korporasi dan Retail menjadi 1 (satu) sistem.

- Updating software such as firewalls and antivirus on servers and computers to keep pace with the development of cyber threats.

The Company is currently in the development stage in several parts, namely:

- Upgrading the HRIS (Human Resources Information System) with a target of implementation in 2023.
- Implementation of ITSM (Information Technology Service Management).
- Continuous development of the PinjamDana Microsite.

Future Development

To anticipate the Company's development towards digitalization, support Company operations and provide better service to Customers, the Company has development plans for 2023, namely:

- Mobile Application for Customers,
- Using the WhatsApp business messaging application that has been verified to support Customer Relationship Management, especially collection.
- Use of face-to-face calls (Video Calls) and GPS Capture to support Credit Management needs to produce more accurate analysis.
- Development of mobile applications for collection service partners, so as to speed up and facilitate the relationship between the Company and collection service partners.
- Perform system integration in processes carried out by Corporate and Retail Business Units into 1 (one) system.

Keanggotaan Pada Asosiasi Association Membership

No.	Nama Asosiasi Association Name	Keterangan Description
1.	APPI	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Sebagai anggota No. 1191/JKT/05 Association of Indonesian Financing Companies As member No. 1191/JKT/05
2.	RAPINDO	PT. Rapi Utama Indonesia Sebagai anggota No.041/Rapindo-1/12/2022 PT. Indonesian Main Rapport As member No.041/Rapindo-1/12/2022
3.	ICSA	Indonesia Corporate Secretary Association Sebagai anggota No. 28417 Indonesia Corporate Secretary Association As member No. 28417



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION
AND ANALYSIS

MIZUHO



Uraian Per Segmen Review Per Segment

Ruang lingkup kegiatan utama Perseroan meliputi usaha pembiayaan:

1. Kegiatan Usaha Utama
 - Pembiayaan Investasi
 - Pembiayaan Modal Kerja
 - Pembiayaan Multiguna
 - Kegiatan Usaha Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK
2. Selain kegiatan usaha utama diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa (*fee*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perseroan memiliki 2 pilar bisnis, sebagai berikut:

1. Unit Bisnis Ritel
2. Unit Bisnis Korporasi

Izin usaha sebagai lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.994/ KMK.017/1993 tanggal 30 Desember 1993 yang kemudian telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 Jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010 Jo. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-806/NB.11/2022 tanggal 12 Desember 2022.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan nasional, Perseroan dapat meningkatkan kinerjanya secara signifikan pada tahun 2022 yang dapat dilihat dari peningkatan jumlah piutang dan pendapatan per uraian segmen usaha yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Total Piutang Pembiayaan / Total Financing Receivables

Keterangan Description	2020	2021	2022
Piutang Pembiayaan (dalam miliar Rupiah) Financing Receivables (in billion Rupiah)	2,431.53	2,089.64	2,183.49
Volume (dalam unit) Volume (in units)	15,916	15,208	17,089
Pendapatan Pembiayaan (dalam miliar Rupiah) Financing Revenues (in billion Rupiah)	256.69	254.26	270.35

The scope of the Company's main activities includes:

1. Main Business Activities
 - Investment Financing
 - Working Capital Financing
 - Multipurpose Financing
 - Other Financing Business Activities Based on OJK Approval
2. In addition to the main business activities above, the Company can carry out supporting business activities to conduct operating leases and/or fee-based activities as long as they do not conflict with the laws and regulations in the financial services sector.

The Company has 2 business pillars, as follows:

1. Retail Business Unit
2. Corporate Business Unit

The business license as a financial institution owned by the Company is as stated in the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.994 / KMK.017 / 1993 dated December 30, 1993 which has subsequently been amended by the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. Kep-161 / KM.6 / 2004 dated 4 May 2004 Jo. Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. Kep-654 / KM.10 / 2010 dated 9 December 2010 Jo. Copy of Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) No. KEP-806/NB.11/2022 dated December 12, 2022.

In the midst of global and national economic uncertainty, the Company can significantly improve its performance in 2022 which can be seen from the increase in total receivables and income per business segment description which can be seen in the table below.

Pembiayaan Konsumen / Consumer Financing

Keterangan Description	2020	2021	2022
Piutang Pembiayaan Konsumen (dalam miliar Rupiah) Consumer Financing Receivables (in billion Rupiah)	1,188.53	1,233.49	1,472.68
Volume (dalam unit) Volume (units)	15,425	14,691	16,768
Pendapatan Pembiayaan Konsumen (dalam miliar Rupiah) Consumer Financing Revenues (in billion Rupiah)	155.86	189.38	224.00

Sewa Pembiayaan / Finance Lease

Keterangan Description	2020	2021	2022
Piutang Sewa Pembiayaan (dalam miliar Rupiah) Finance Lease Receivables (in billion Rupiah)	1,243.00	856.15	710.81
Volume (dalam unit) Volume (units)	491	517	321
Pendapatan Sewa Pembiayaan (dalam miliar Rupiah) Finance Lease Revenues (in billion Rupiah)	100.83	64.88	46.35

Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

Review of Company Financial Performance

Aset

Per 31 Desember 2022, Perseroan mencatat total aset sebesar Rp2.466,67 miliar, naik sebesar 6,18% dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2021 Rp2.323,15 miliar. Kenaikan aset terutama disebabkan oleh peningkatan piutang pembiayaan konsumen. Selain piutang pembiayaan konsumen, kas dan setara kas, aset tetap, aset hak-guna, aset derivatif dan aset pajak tangguhan juga mengalami peningkatan, sementara piutang sewa pembiayaan dan piutang lain-lain mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021.

Piutang pembiayaan konsumen naik sebesar 20,49% dari Rp1.193,68 miliar naik menjadi Rp1.438,26 miliar sejalan dengan peningkatan piutang pembiayaan konsumen baru di tahun 2022. Kas dan setara kas naik sebesar 7,28% dari Rp95,64 miliar menjadi Rp102,60 miliar. Aset tetap naik sebesar 33,17% dari Rp39,82 miliar menjadi Rp53,03 miliar, sedangkan aset hak-guna naik sebesar 290,29% dari Rp8,65 miliar menjadi Rp33,76 miliar sehubungan dengan perpindahan Kantor Pusat ke Menara Astra, Sudirman. Aset derivative naik sebesar 9.126,32% dari Rp0,19 miliar menjadi Rp17,53 miliar. Aset pajak tangguhan naik sebesar 106,42% dari Rp5,61 miliar menjadi Rp11,58 miliar karena adanya penambahan cadangan penurunan nilai

Asset

As of 31 December 2022, the Company recorded total assets of Rp2.466.67 billion, an increase of 6.18% compared to the previous year as of 31 December 2021 of Rp2,323.15 billion. The increase mainly effected by an increasing in consumer financing receivables. Cash and cash equivalents fixed assets, right-of-use assets, derivative assets and deferred tax assets also increase, while finance lease receivables and other receivables decrease compared to 2021.

Consumer financing receivables increased by 20.49% from Rp1,193.68 billion to Rp1.438,26 billion in line with the increasing in new consumer financing in 2022. Cash and cash equivalents increased by 7.28% from Rp95.64 billion to Rp102.60 billion. Fixed assets increased by 33.17% from Rp39.82 billion to Rp53.03 billion, right-of use assets increased by 290.29% from Rp8.65 billion to Rp33.76 billion related to Head Office relocation to Menara Astra, Sudirman. Derivative assets increased by 9.126,32% from Rp 0.19 billion to Rp17.53 billion. Deferred tax assets increased by 106.42% from Rp5.61 billion to Rp11,58 billion related addition of impairment losses for finance lease receivables. While finance lease receivable

atas piutang sewa pembiayaan. Sedangkan piutang sewa pembiayaan turun sebesar 19,26% dari Rp835,78 miliar menjadi Rp674,83 miliar, dan piutang lain-lain turun sebesar 13,82% dari Rp91,74 miliar menjadi Rp79,06 miliar.

Rincian dan komposisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

decreased by 19.26% from Rp835.78 billion to 674.83 billion and other receivables decreased by 13.82% from Rp91.74 billion to Rp79.06 billion.

Details and composition of the Company's assets as at 31 December 2022 and 2021 are as follows:

(dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain / in billion Rupiah except otherwise stated)

Aset / Assets	2021	2022	Perubahan / Changes
Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalent	95.64	102.60	7.28%
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih / Consumer Financing Receivables - Net	1,193.68	1,438.26	20.49%
Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih / Finance Lease Receivables - Net	835.78	674.83	(19.26)%
Piutang lain-lain - Bersih / Other Receivables - Net	91.74	79.06	(13.82)%
Biaya Dibayar di Muka / Prepaid Expenses	1.02	1.75	71.57%
Aset Pajak Tangguhan / Deferred Tax Assets	5.61	11.58	106.42%
Aset Tetap - Bersih / Property and equipment - Net	39.82	53.03	33.17%
Aset Derivatif / Derivative Assets	0.19	17.53	9,126.32%
Aset Hak Guna - Bersih / Right-of-Use Assets - Net	8.65	33.76	290.29%
Aset Lain-lain / Other Assets	51.02	54.27	6.37%
Jumlah Aset / Total Assets	2,323.15	2,466.67	6.18%

Liabilitas dan Ekuitas

Per 31 Desember 2022, Perseroan mencatat total liabilitas sebesar Rp1.776,77 miliar, naik sebesar 4,64% dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.697,91 miliar. Kenaikan liabilitas terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank sebesar 3,01% dari Rp1.612,76 miliar menjadi Rp1.661,38 miliar sejalan dengan kenaikan piutang pembiayaan, kenaikan biaya masih harus di bayar sebesar 303,65% dari Rp3,56 miliar menjadi Rp14,37 miliar, dan kenaikan liabilitas sewa sebesar 496,77% dari Rp4,95 miliar menjadi Rp29,54 miliar sejalan dengan meningkatnya aset hak-guna sehubungan perpindahan Kantor Pusat ke Menara Astra. Sedangkan total ekuitas sebesar Rp689,90 miliar, naik sebesar 10,34% dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp625,24 miliar. Kenaikan ekuitas terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba sehubungan dengan laba bersih tahun berjalan tahun 2022.

Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Liability and equity

As of 31 December 2022, the Company recorded total liabilities of Rp1.776.77 billion, an increase of 4.64 % compared to the previous year as of 31 December 2021 of Rp1,697.91 billion. The increase in liabilities was due to the 3.01% increase in bank loan from Rp1,612.76 billion to Rp1,661.38 billion which in line with increasing in financing receivables, the increasing in accrued expenses by 303.65 % from Rp3.56 billion to Rp14.37 billion, and the increasing of lease liabilities by 496.77% from Rp4.95 billion to Rp29.54 billion in line with increasing of right-of-use assets in relation to the relocation of Head Office to Menara Astra. Meanwhile, total equity was Rp689.90 billion, increased by 10.34% compared to the previous year as of December 31, 2021, which was Rp625.24 billion. The increasing equity was mainly due to an increasing in connection with net profit for the year 2022.

Details of the Company's total liabilities as of December 31 2022 and 2021 as follows:

(dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain / in billion Rupiah except otherwise stated)

Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity	2021	2022	Perubahan Changes
Utang Bank / Bank Loans	1,612.76	1,661.38	3.01%
Utang Usaha / Trade Payables	0.85	0.71	(15.48)%
Liabilitas Derivatif / Derivative Liabilities	0.18	0	(100.00)%
Utang Lain-lain / Other Payables	61.92	56.11	(9.38)%
Biaya masih harus dibayar / Accrued Expenses	3.56	14.37	303.65%
Utang Pajak / Taxes Payable	2.00	2.25	11.94%
Liabilitas Sewa / Lease Liabilities	4.95	29.54	496.77%
Liabilitas Imbalan pasca-Kerja / Post-employment Benefits Liabilities	11.69	12.41	6.16%
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	1,697.91	1,776.77	4.64%
Jumlah Ekuitas / Total Equity	625.24	689.90	10.34%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity	2,323.15	2,466.67	6.18%

Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan

Jumlah laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp64,65 miliar, naik sebesar 1.072,18% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 rugi sebesar Rp6,65 miliar. Kenaikan terutama disebabkan kenaikan laba bersih Perseroan sebesar Rp62,05 miliar dan kenaikan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp2,60 miliar.

Total Comprehensive Income (Loss) For The Year

The Company's total comprehensive income for the year ended December 31, 2022 was Rp64.65 billion, an increase of 1,072.18% compared to the year ended December 31, 2021 which was net loss Rp6.65 billion. The increase was mainly due to the decrease in the Company's net profit of Rp62.05 billion and an increase in other comprehensive income of Rp2.60 billion.

(dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain / in billion Rupiah except otherwise stated)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (LANJUTAN) STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (CONTINUED)	2020	2021	2022
Beban / Expenses			
Bunga dan keuangan / Interest and financing charges	108.93	58.23	59.24
Umum dan administrasi / General and administrative	51.87	50.45	63.90
Kepegawaian / Personnel	89.62	92.07	102.96
Penyisihan kerugian penurunan nilai / Provision for impairment losses	59.93	93.38	49.55
Beban lain-lain / Other expenses	0.95	0.59	2.07
Jumlah beban / Total Expenses	311.30	294.72	277.72
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan / Profit (loss) before income tax	(1.57)	8.17	55.34
(Beban) Manfaat pajak penghasilan / Income Tax (Expense) Benefit	4.57	(15.94)	6.71
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / Net (loss) profit for the year	3.00	(7.77)	62.05
Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income			
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain / Total Other comprehensive income (loss)	0.34	1.12	2.60
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan / Total Comprehensive (Loss) Income for the Year	3.34	(6.65)	64.65
Laba (rugi) per saham (dalam Rupiah penuh) / Basic earning per share (in full Rupiah)	0.53	(1.37)	10.91

Pendapatan

Pendapatan Perseroan berasal dari pembiayaan konsumen, sewa pembiayaan, pendapatan administrasi, pendapatan penalti, pendapatan bunga, dan pendapatan lain-lain.

Per 31 Desember 2022, Perseroan mencatat total pendapatan sebesar Rp333,06 miliar, naik sebesar 9,96% dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp302,89 miliar. Kenaikan pendapatan terutama disebabkan kenaikan pendapatan lain-lain sebesar 139,66% dari Rp6,38 miliar menjadi Rp15,29 miliar terutama karena meningkatnya *recovery income*. Sementara itu pendapatan pembiayaan konsumen mengalami kenaikan sebesar 18,28% dari Rp189,38 miliar menjadi Rp224,00 miliar sejalan dengan kenaikan piutang pembiayaan konsumen.

Revenues

The Company's revenues is derived from consumer financing, finance leases, administration, penalty, interest income and other revenues.

As of December 31, 2022, the Company recorded total revenue of Rp333.06 billion, an increase of 9.96% compared to the previous year as of December 31, 2021 of Rp302.89 billion. The increase in revenue was mainly due to increased of other revenues which increased by 139.66% from Rp6.38 billion to Rp15.29 billion mainly due to increased of recovery income. Meanwhile consumer financing revenues increase by 18.28% from Rp189.38 billion to Rp224.00 billion in line with increase in consumer financing receivables.

(dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain / in billion Rupiah except otherwise stated)

Pendapatan / Revenues	2021	2022	Perubahan / Changes
Pembiayaan Konsumen / Consumer Financing	189.38	224.00	18.28%
Sewa Pembiayaan / Finance Lease	64.88	46.35	(28.56)%
Administrasi dan provisi / Administration and provision	29.45	32.45	10.19%
Penalti / Penalty	12.36	14.58	17.96%
Bunga / Interest	0.44	0.39	(11.36)%
Pendapatan Lain-lain / Other Income	6.38	15.29	139.66%
Jumlah / Total	302.89	333.06	9.96%

Beban

Beban Perseroan berasal dari penyisihan kerugian penurunan nilai, bunga dan keuangan, kepegawaian, umum dan administrasi, dan beban lain-lain.

Per 31 Desember 2022, Perseroan mencatat total beban Rp 277,72 miliar turun sebesar 5,77% dibandingkan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp294,72 miliar. Penurunan total beban terutama disebabkan oleh penyisihan kerugian penurunan nilai turun sebesar 46,94% menjadi Rp49,55 miliar dari Rp93,38 miliar sejalan membaiknya Non-Performing Loan di tahun 2022.

Sementara beban tenaga kerja dan beban umum dan administrasi mengalami kenaikan. Beban kepegawaian naik sebesar 26,66% dan beban umum dan administrasi naik sebesar 11,83%.

Expenses

The Company's expenses come from provision for impairment losses, interest and financing charge, labor, general and administration, and other expens.

As of December 31, 2022, the Company recorded total expenses of Rp277.72 billion, a decrease of 5.77% compared to December 31, 2021, which was Rp294.72 billion. The decrease in total expenses was mainly due to provision for impairment losses, which fell 46.94% become Rp49.55 billion from Rp93.38 billion to in line with the improvement of Non-Performing Loans in 2022.

Meanwhile, personnel expense and general administration expense was increased. Personell expense increased by 26.66% and general administration expense increased by 11.83%.

(dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain / in billion Rupiah except otherwise stated)

Beban / Expenses	2021	2022	Perubahan Changes
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai / Provision for impairment Losses	93.38	49.55	(46.94)%
Bunga dan Keuangan / Interest and Financing Charges	58.23	59.24	1.73%
Kepegawaian / Personnel	92.07	102.96	11.83%
Umum dan Administrasi / General and Administration	50.45	63.90	26.66%
Beban Lain-lain / Other Expense	0.59	2.07	250.85%
Jumlah / Total	294.72	277.72	(5.77)%

Arus Kas

Analisa arus kas untuk aktivitas operasi pada perusahaan pembiayaan berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain pada umumnya, yang mana nilai negatif atau penggunaan kas yang berlebihan terutama untuk pembiayaan baru menunjukkan kemampuan dari perusahaan pembiayaan tersebut dalam mendapatkan pembiayaan baru. Atau dengan kata lain, semakin besar penggunaan kas dari aktivitas operasi terutama pada pembiayaan baru mencerminkan pertumbuhan perusahaan tersebut semakin baik.

Cash Flows

Analysis of cash flows for operating activities in finance companies is different from other companies in general, where the negative value or excessive use of cash, especially for new financing shows the ability of the finance company to acquire new financing. In other words, the bigger the use of cash from operating activities, especially in new financing reflects better growth of the company.

(dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain / in billion Rupiah except otherwise stated)

Arus Kas / Cash Flows	2021	2022	Perubahan / Changes
Arus kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi / Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities	323.56	(3.65)	(101.13)%
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi / Cash Flows Used in Investing Activities	(9.50)	(24.04)	(153.05)%
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan / Net Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities	(349.99)	34.65	109.90%
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas / Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	(35.93)	6.96	119.37%
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun / Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	131.57	95.64	(27.31)%
Kas dan Setara Kas pada Akhir tahun / Cash and Cash Equivalents at End of the Year	95.64	102.60	7.28%

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp3,65 miliar turun 101,13% dibandingkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp323,56 miliar.

Penurunan arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan.

Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Arus Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp24,04 miliar naik 153,05% dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp9,50 miliar.

Kenaikan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi terutama disebabkan kenaikan perolehan aset tetap.

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Arus Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp34,65 miliar naik 109,90% dibandingkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp349,99 miliar.

Peningkatan arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan terutama karena penerimaan utang bank lebih besar daripada pembayaran utang bank, sejalan dengan kenaikan piutang pembiayaan.

Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities

Net cash flows have used in operating activities for the year ended December 31, 2022 was Rp3.65 billion, a decrease of 101.13% compared to net cash flows provided by operating activities for the year ended December 31, 2021 of Rp323.56 billion.

The decrease in net cash flows provided by (used in) operating activities was mainly due to the increased in cash paid in new consumer financing and finance lease.

Net Cash Flows Used in Investing Activities

Net cash flows used in investing activities for the year ended December 31, 2022 was Rp24.04 billion, increase of 153,05% compared to net cash flows used in investing activities for the year ended December 31, 2021 of Rp9.50 billion.

The increase in net cash flows used in investing activities was mainly due to a incline in acquisition of property and investment.

Net Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities

Net cash flows provided by financing activities for the year ended December 31, 2022 was Rp34.65 billion, an increase of 109.90% compared to net cash flows used in financing activities for the year ended December 31, 2021 of Rp349.99 billion.

The increase in net cash flows provided by (used in) financing activities was mainly due to receipt from bank loans is bigger than payment of bank loans, in line with a increasing in financing receivables.

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang Ability to Pay Liabilities and Receivables Collectability

Perseroan selalu memantau proyeksi arus kas dan ketersediaan dana untuk melunasi utang jangka pendek dan jangka panjang. Selama tahun 2022, Perseroan tidak memiliki tunggakan pembayaran pokok, bunga, ataupun pelanggaran lainnya berkaitan dengan utang bank. Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai dan agunan yang diterima dari *customer* telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Rincian umur piutang pembiayaan tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The Company always monitors cash flow projections and the availability of funds to pay off short-term and long-term debt. During 2022, the Company did not have arrears in payment of principal, interest, or other violations relating to bank loans. Management believes that the allowance for impairment losses and collateral received from costumers are adequate to cover possible losses from uncollectible receivables.

The details of the aging of financing receivables in 2022 and 2021 were as follows:

(dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain / in billion Rupiah except otherwise stated)

Umur / Age	2021		2022	
	Jumlah Amount	Persentase Percentage	Jumlah Amount	Persentase Percentage
Belum Jatuh Tempo / Not yet due	2,454.58	99.61%	2,588.87	99.01%
1-30 Hari / Days	1.95	0.08%	1.34	0.05%
31-60 Hari / Days	1.38	0.06%	1.29	0.05%
61-90 Hari / Days	1.08	0.04%	0.80	0.03%
Lebih dari 90 Hari / Over 90 Days	5.17	0.21%	20.06	0.77%
Jumlah / Total	2,464.16	100.00%	2,612.36	100.00%

Rasio Keuangan Yang Relevan Lainnya

Perseroan secara konsisten menjalankan aktivitas bisnis pembiayaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan taat kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta perundang-undangan yang berlaku. Perseroan mampu memenuhi rasio-rasio keuangan yang diatur oleh regulator.

Perbandingan kinerja rasio keuangan utama Perseroan dibandingkan dengan kinerja industri pembiayaan di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Other Relevant Financial Ratios

The Company consistently runs financing business activities in accordance with the principle of prudence and obedience to the Financial Services Authority regulations and applicable laws. The Company is able to meet financial ratios set by the regulator.

The comparison of the performance of the Company's main financial ratios compared to the performance of the industry in 2022 is as follows:

Rasio / Ratio	Industri / Industry	Perseroan / The Company
Financing Asset Ratio (FAR)	85.20%	85.67%
Rasio <i>Gearing</i> / Gearing Ratio	2.07x	2.42x
Rasio Modal Sendiri – Modal Disetor (MSMD) / Paid-up Capital - Equity Ratio	302.20%	121.12%
NPF- Net	2.32%	2.22%
Return on Asset (ROA)	5.67%	2.52%
Return on Equity (ROE)	14.38%	8.99%
Beban Operasional – Pendapatan Operasional (BOPO) / Operational Efficiency Ratio	75.64%	87.29%

Struktur Modal Capital Structure

Modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tahun 2022 sebesar Rp568,74 miliar, tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021.

The Company's issued and paid-up capital in 2022 amounted to Rp568.74 billion, did not increase compared to 2021.

(dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain / in billion Rupiah except otherwise stated)

Keterangan / Information	2021	2022	Perubahan / Changes
Utang Bank / Bank Loans	1,612.76	1,661.38	48.62
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / Issued and Fully Paid	568.74	568.74	-
Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-in Capital	97.58	97.58	-
Komponen Ekuitas Lain / Other Equity Components	(1.58)	1.03	2.61
Saldo Laba / Retained Earnings	(39.50)	22.55	62.05

Kebijakan Struktur Modal **Capital Structure Policy**

Manajemen Perseroan merancang struktur modal yang optimal dalam proses perencanaan modal dan memantau kebutuhan permodalan secara rutin. Struktur modal yang optimal akan senantiasa dipertahankan untuk memastikan tingkat permodalan yang kuat dan pada saat bersamaan tetap menyediakan ruang yang memadai untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

Dalam mengelola struktur modal, Perusahaan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.47/POJK.05/2020 tertanggal 26 November 2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.05/2018 tertanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang di antaranya mengatur ketentuan sebagai berikut:

- Ekuitas minimum Rp200 miliar;
- Ekuitas minimum 50% dari jumlah modal disetor; dan
- Rasio *Gearing*, yaitu rasio seluruh pinjaman terhadap ekuitas dikurangi pinjaman subordinasi dengan penyertaan sebesar maksimal 10 kali.

Perseroan telah memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana telah ditetapkan oleh regulasi tersebut, yaitu sebagai berikut:

The Company's management designs an optimal capital structure in the capital planning process and regularly monitors capital requirements. The optimal capital structure will always be maintained to ensure a strong capital level while at the same time providing adequate space to support business growth.

In managing capital structure, the Company refers to the Financial Services Authority Regulation of Republic of Indonesia No.47/POJK.05/2020 dated November 26, 2020 concerning Business Licensing and Institutional Sharia Financing Companies and Financial Services Authority Regulation No.35/POJK.05/2018 dated December 28, 2018 concerning the Financing of Businesses of a Financing Company, which regulates the following:

- Minimum equity of Rp200 billion;
- Minimum equity of 50% of the total paid-up capital; and
- Gearing Ratio, the ratio of all loans to equity minus subordinated loans with investments, a maximum of 10 times.

The Company has fulfilled the capital requirements as stipulated by the regulation, which are as follows:

Keterangan / Information	2021	2022
Ekuitas / Equity	Rp625.24 miliar / billion	Rp689.90 miliar / billion
Rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor/ Equity Ratio to Paid-up Capital	110.21%	121.12%
<i>Gearing ratio</i>	2.60x	2.42x

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal **Material Commitments to Capital Goods Investment**

Pada tahun 2022, Perseroan tidak mempunyai ikatan material terkait investasi barang modal.

In 2022, the Company has no material commitments related to capital goods investment.

Informasi dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan **Material information and Material facts that occurred after the date of the accountant's report**

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Tahunan ini, Perseroan tidak memiliki informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

As of the issuance date of this Annual Report, the Company has no material information and facts that occurred after the date of the accountant's report.

Prospek Usaha **Business Prospect**

Secara garis besar, prospek usaha di tahun 2023 masih positif sejalan dengan proyeksi perekonomian Indonesia yang masih akan positif. Namun, isu terkait potensi inflasi dan resesi masih menjadi perhatian Perseroan. Selain itu dinamika kebijakan dunia serta perkembangan isu geopolitik juga perlu diwaspadai dan dimitigasi.

Broadly speaking, business prospects in 2023 are still positive in line with the projected Indonesian economy which will remain positive. However, issues related to the potential for inflation and recession are still a concern of the Company. Apart from that, the dynamics of world policies and the development of geopolitical issues also need to be watched out for and mitigated.

Pemerintah tetap optimis dalam menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023, yang diperkirakan akan berada pada kisaran 4.9% - 5.2% dengan tingkat inflasi berkisar antara 3.25%-3.75%. Dalam industri pembiayaan, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia ("APPI") menargetkan pertumbuhan industri pembiayaan sebesar 5% - 6% di tahun 2023.

Angka pertumbuhan tersebut untuk Perseroan merupakan potensi yang cukup besar sehingga Manajemen optimis tahun 2023, Perseroan dapat memanfaatkan momentum tersebut dengan kinerja yang baik dan dengan pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan.

Sebagai upaya mencapai pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan ditengah ketidakpastian perekonomian, Perseroan akan menjalankan strategi dengan fokus pada pertumbuhan portofolio pembiayaan Ritel dan Korporasi yang berkualitas sebagai prioritas utama, menjaga ketersediaan likuiditas dalam memenuhi kewajiban finansial dan kebutuhan modal kerja, mendorong strategi pertumbuhan yang *prudent*, dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam menghadapi digitalisasi.

Direksi akan terus melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap target-target yang telah disusun sebelumnya sehingga lebih dinamis, realitis dan adaptif agar dapat diterapkan dalam menghadapi kondisi yang berkembang pada saat ini.

The government remains optimistic in targeting Indonesia's economic growth in 2023, which is expected to be in the range of 4.9% - 5.2% with an inflation rate ranging from 3.25% -3.75%. In the financing industry, the Association of Indonesian Financing Companies ("APPI") targets the growth of multifinance industry by 5% - 6% in 2023.

This growth figure for the Company represents a considerable potential so that Management is optimistic that in 2023, the Company can take advantage of this momentum with good performance and with sustainable business growth.

In an effort to achieve sustainable business growth amidst economic uncertainty, the Company will carry out a strategy focusing on growing a quality Retail and Corporate financing portfolio as a top priority, maintaining the availability of liquidity to meet financial obligations and working capital needs, encouraging a prudent growth strategy, and increasing use of information technology in the face of digitalization.

The Board of Directors will continue to make adjustments to the targets that have been prepared previously so that they are more dynamic, realistic and adaptive so that they can be implemented in dealing with the current developing conditions.

Unit Bisnis Korporasi & Unit Bisnis Ritel Corporate Business Unit & Retail Business Unit

Kegiatan pemasaran memegang peranan penting, baik untuk memperluas kegiatan usaha maupun untuk mempertahankan pangsa pasar dalam industri pembiayaan. Langkah-langkah pemasaran yang dilakukan Perseroan diklasifikasikan berdasarkan 2 (dua) pilar bisnis yaitu Unit Bisnis Ritel dan Unit Bisnis Korporasi.

Pembiayaan Korporasi

Di tengah momentum pemulihan perekonomian Indonesia pada tahun 2022 terjadi tekanan eksternal terhadap perekonomian Indonesia seperti terjadinya peningkatan suhu politik global sebagai akibat perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan kelangkaan beberapa bahan baku dan terganggunya pengiriman barang antar negara, dan masih tingginya penyebaran Covid-19 di negara Tiongkok yang menyebabkan Tiongkok masih melakukan *lockdown* di beberapa daerahnya, serta ekspektasi percepatan normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat yang menimbulkan inflasi yang tinggi dan kebijakan Bank Sentral Amerika yang menaikkan tingkat suku bunga Dolar AS, yang diikuti dengan kebijakan kenaikan tingkat suku bunga Rupiah oleh Bank Indonesia.

Marketing activities play an important role, both to expand business activities and to maintain market share in the financing industry. The marketing steps taken by the Company are classified based on 2 (two) business pillars, namely the Retail Business Unit and the Corporate Business Unit.

Corporate Financing

In the midst of the momentum of Indonesia's economic recovery in 2022, there were external pressures on the Indonesian economy, such as an increase in global political temperature as a result of the Russia-Ukraine war which caused scarcity of some raw materials and disruption of goods shipments between countries, and the still high spread of Covid-19 in China. which caused China to still carry out lockdowns in several of its regions, as well as expectations of accelerated normalization of the United States' monetary policy which resulted in high inflation and the policy of the Central Bank of America which raised US dollar interest rates, followed by a policy of increasing Rupiah interest rates by Indonesia Central Bank.

Hal ini menimbulkan ketidakpastian atas kondisi keuangan dan aktivitas ekonomi baik secara global pada umumnya maupun di Indonesia pada khususnya. Walaupun di tahun 2022 kondisi Pandemi Covid-19 secara menyeluruh di dunia ataupun di Indonesia mengalami perbaikan yang positif jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Walaupun masih adanya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat sesuai dengan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ("PPKM") yang berbeda di setiap daerah di Indonesia, hal ini berdampak pada kebanyakan pelanggan korporasi yang masih menunggu dan mengambil sikap berhati-hati untuk menjalankan rencana investasi dalam melakukan ekspansinya, sehingga penyaluran pembiayaan baru dengan skema jual dan sewa balik (*sale and lease back*) oleh Perusahaan juga mengalami penurunan.

Namun untuk dapat memenuhi rencana bisnis pembiayaan korporasi yang sudah ditargetkan, maka Unit Bisnis Korporasi melakukan pendekatan kepada pelanggan Korporasi yang memerlukan tambahan modal kerja sebagai akibat dari adanya kenaikan harga bahan baku dan biaya pengiriman barang produksi.

Selanjutnya Unit Bisnis Korporasi juga mendapatkan pelanggan baru yang bergerak di sektor transportasi produk makanan dan minuman, penyewaan kendaraan penumpang, dan pertambangan nikel yang diprediksi sektor-sektor usaha yang disebutkan diatas diperkirakan akan mengalami pertumbuhan usaha yang selanjutnya akan menunjang perbaikan perekonomian Indonesia. Dengan demikian Unit Bisnis Korporasi dapat merealisasikan, bahkan melampaui target yang diproyeksikan pada tahun 2022.

Pembiayaan Ritel

Langkah pemasaran untuk segmen bisnis Pembiayaan Ritel adalah dengan terus meningkatkan jalinan kerja sama dengan *dealer*, mitra strategis pembiayaan, dan pembukaan jaringan cabang baru.

Langkah pemasaran lainnya adalah menjalin hubungan baik dengan konsumen dengan berbagai metode peningkatan pelayanan yang bertujuan agar konsumen merasakan banyak keuntungan dan kemudahan yang dapat diperoleh melalui pembiayaan di Perseroan.

Adapun strategi pemasaran yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Fokus Kepada Portofolio Dengan Tingkat Pengembalian yang Wajar Sesuai Dengan Tingkat Risiko yang Ditentukan.

Perseroan memfokuskan aktivitas pembiayaannya pada aset yang memiliki tingkat pengembalian yang wajar sesuai dengan tingkat risiko yang telah ditentukan oleh Perseroan, namun dengan tetap memperhatikan kualitas dari aset tersebut.

This creates uncertainty over financial conditions and economic activities both globally in general and in Indonesia in particular. Even though in 2022 the conditions of the Covid-19 Pandemic as a whole in the world or in Indonesia experienced positive improvements when compared to 2021.

Even though there is still a policy of limiting community activities in accordance with the level of Enforcement of Restricting Community Activities ("PPKM") which is different in each region in Indonesia, this has an impact on most corporate customers who are still waiting and taking a cautious attitude to carry out investment plans in carrying out their expansion, so distribution of new financing under a sale and lease back scheme by the Company also experienced a decline.

However, in order to fulfill the corporate financing business plan that has been targeted, the Corporate Business Unit approaches Corporate customers who require additional working capital as a result of increases in raw material prices and costs of shipping production goods.

Furthermore, the Corporate Business Unit also gained new customers engaged in the transportation sector for food and beverage products, passenger vehicle rental, and nickel mining, which are predicted by the business sectors mentioned above to experience business growth which will further support the improvement of the Indonesian economy. Thus the Corporate Business Unit can realize, even exceed the target projected in 2022.

Retail Financing

The marketing step for the Retail Financing business segment is to continue to improve cooperation with dealers, strategic financing partners, and open new branch networks.

Another marketing step is to establish good relations with consumers with various methods of service improvement aimed at making consumers feel the many advantages and conveniences that can be obtained through financing at the Company.

The marketing strategies undertaken are as follows:

1. Focus on Portfolios with Reasonable Returns in Accordance with Specified Risk Levels.

The Company focuses its financing activities on assets that have a reasonable rate of return in accordance with the risk levels determined by the Company, while still paying attention to the quality of these assets.

2. Komitmen untuk Produktifitas dan Efisiensi

Penyempurnaan sistem dan prosedur secara terus menerus untuk meningkatkan produktifitas, mendukung aktivitas keuangan dan meningkatkan efisiensi.

3. Hubungan yang Kuat dan Erat

Perseroan sangat menyadari bahwa hubungan yang kuat dan erat dengan konsumen dan rekan usaha merupakan salah satu kunci kesuksesan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya menjaga hubungan baik serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan baik bagi konsumen maupun rekan usaha.

4. Perluasan Layanan Usaha

Dalam upaya untuk menjangkau dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen dan rekan usaha, Perseroan terus mengembangkan layanan usahanya agar dapat memenuhi kebutuhan keuangan konsumen dan rekan usaha.

5. Pengembangan Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia

Perseroan sangat memahami bahwa teknologi informasi dan sumber daya manusia memegang peranan penting untuk mendukung pertumbuhan Perseroan. Oleh karena itu, Perusahaan senantiasa berupaya untuk mengembangkan teknologi informasi dan sumber daya manusianya secara berkesinambungan.

6. Pengembangan Pemasaran Digital

Dalam upaya meningkatkan kegiatan pemasaran yang lebih efektif dan efisien, Perusahaan mempersiapkan langkah menuju pemasaran digital, baik secara langsung untuk pembiayaan konsumen maupun berkolaborasi dengan beberapa *marketplace* yang ada di Indonesia.

Pangsa pasar Perseroan terhadap industri pembiayaan secara nasional selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

2. Commitment to Productivity and Efficiency

Continuous improvement of systems and procedures to increase productivity, support financial activities and improve efficiency.

3. Strong and Tight Relationships

The Company is very aware that a strong and close relationship with consumers and business partners is one of the keys to the success of the Company. Therefore, the Company always strives to maintain good relations and increase the trust and satisfaction of both consumers and business partners.

4. Business Service Expansion

In an effort to reach and provide the best service for consumers and business partners, the Company continues to develop its business services in order to meet the financial needs of consumers and business partners.

5. Development of Information Technology and Human Resources

The Company fully understands that information technology and human resources play an important role in supporting the growth of the Company. Therefore, the Company always strives to develop its information technology and human resources on an ongoing basis.

6. Digital Marketing Development

In an effort to improve marketing activities that are more effective and efficient, the Company is preparing steps towards digital marketing, both directly for consumer financing and in collaboration with several marketplaces in Indonesia.

The Company's market share in the national financing industry for the last 3 (three) years is as follows:

(dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain / in billion Rupiah except otherwise stated)

Keterangan / Information		2020	2021	2022
Total Aset Total Asset	Industri Pembiayaan (triliun) Financing Industry (trillion)	Rp456.06	Rp433.11	Rp487.92
	Perseroan (triliun) The Company (trillion)	Rp2.68	Rp2.32	Rp2.47
	Pangsa Pasar* Market Share	0.59%	0.54%	0.51%
Total Piutang Pembiayaan - Bersih Total Financing Receivables - Net	Industri Pembiayaan (triliun) Financing Industry (trillion)	Rp358.23	Rp350.56	Rp397.12
	Perseroan (triliun) The Company (trillion)	Rp2.31	Rp2.03	Rp2.11
	Pangsa Pasar* Market Share*	0.64%	0.58%	0.53%

* Sumber: Statistik Lembaga Pembiayaan periode Desember 2022 dan diolah oleh Perseroan (Tanpa jenis Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah)

* Source: Multifinance Statistic for December 2022 and prepared by the Company (Excluding Sharia Financing)

Target dan Realisasi Tahun Buku Target and Realization of the Financial Year

Di tengah kondisi perlambatan ekonomi secara global dan di dalam negeri, yang berdampak terhadap melemahnya daya konsumsi masyarakat serta persaingan di industri pembiayaan yang semakin meningkat berdampak pada pencapaian target pembiayaan yang disalurkan Perseroan pada tahun 2022. Pencapaian, target dan proyeksi kinerja Perseroan adalah sebagai berikut :

In the midst of a global and domestic economic slowdown, which has an impact on the weakening of people's consumption power and increasing competition in the financing industry damaged the Company's achievement financing targets in 2022. Achievements, targets and projections of the Company's performance are as follows:

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

Keterangan / Information	Target 2022	Realisasi 2022 2022 Realization
Piutang Pembiayaan - Bersih / Financing Receivables - Net	2,395.55	2,113.09
Total Aset / Total Assets	2,720.20	2,466.67
Total Liabilitas / Total Liabilities	2,045.86	1,776.67
Pendapatan / Revenues	366.89	333.06
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income for The Year	52.53	64.65
Modal Ditempatkan & Disetor / Paid-up Capital	568.74	568.74
Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-up Capital	97.58	97.58
Total Ekuitas / Total Equity	632.98	689.90

Target 2023

Manajemen Perseroan telah menyusun rencana untuk tahun 2023 dengan mempertimbangkan perkembangan industri otomotif, kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian baik dari segi makro maupun mikro.

2023 Targets

The Company's management has drawn up a plan for 2023 by considering the development of the automotive industry, current economic conditions and economic projections both in macro and micro terms.

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

Keterangan / Information	Target 2023
Piutang Pembiayaan - Bersih / Financing Receivables - Net	2,542.89
Total Aset / Total Assets	3,109.06
Total Liabilitas / Total Liabilities	2,356.02
Pendapatan / Revenues	392.19
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income for The Year	72.41
Modal Ditempatkan & Disetor / Paid-up Capital	568.74
Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-up Capital	97.58
Total Ekuitas / Total Equity	753.04

Investasi Barang Modal yang Direalisasikan pada Tahun Buku Terakhir

Capital Goods Investment Realized at the End of Fiscal Year

Investasi barang modal yang dilakukan Perseroan sepanjang tahun 2022 dilakukan untuk menunjang kegiatan operasional. Investasi barang modal tersebut berupa bangunan, prasarana, kendaraan, peralatan, perabotan kantor, dan komputer. Adapun nilainya mencapai sebesar Rp25,00 miliar.

Capital goods investments made by the Company throughout 2022 were carried out to support operational activities. The investment in capital goods is in the form of buildings, infrastructure, vehicles, equipment, office furniture, and computers. The value reached Rp25.00 billion.

Dividen

Dividend

Memperhatikan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dan modal kerja dalam rangka pengembangan usaha maka Perseroan tidak membagikan dividen selama 2 tahun terakhir. Hal ini telah disetujui masing-masing dalam RUPST 30 Agustus 2021 dan RUPST tanggal 29 Juli 2022.

In regard to funding requirements needed for investment and working capital in the context of business development, the Company has not distributed dividends for the past 2 years. This was agreed at the AGMS on 30 August 2021, the AGMS on 29 July 2022.

Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dalam tunai kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Dengan tetap memperhatikan keuntungan dan/atau kondisi keuangan Perseroan dalam tahun buku yang bersangkutan serta dengan memperhatikan kebutuhan dana yang akan diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan memiliki kebijakan dividen kas atas laba bersih Perseroan mulai tahun buku 2018 setelah ketentuan-ketentuan diatas terpenuhi yaitu minimal 20% dari Laba Bersih setelah pajak.

The Company has a policy to pay dividends in cash to all Shareholders of the Company at least once in 1 (one) year. By taking into account the profit and / or financial condition of the Company in the relevant fiscal year and by taking into account the funding requirements that will be needed for investment in the context of business development as long as it does not conflict with the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, without prejudice to the right of the Company's GMS to determine others in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association. The Company has a cash dividend policy on the Company's net income starting in the fiscal year 2018 after the provisions of the above conditions are met, namely at least 20% of net profit after tax.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of Use of Funds from Public Offering

Pada tahun 2022, Perseroan tidak melakukan penawaran umum dan sudah tidak ada kewajiban penyampaian realisasi penggunaan dana.

In 2022, the Company does not do a public offering and there is no obligation to submit the realization of the use of funds.

Informasi Material Lainnya

Other Material Information

Informasi material terkait transaksi afiliasi sepanjang tahun 2022 telah dipaparkan di dalam Laporan Keuangan 31 Desember 2022 (Audited) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

Material information related to affiliated transactions throughout 2022 had been presented in the Financial Statements of 31 December, 2022 (Audited) which was an integral part of this Annual Report.

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat informasi material lainnya terkait dengan investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Throughout 2022, there was no other material information related to investments, expansions, divestments, business mergers/consolidations, acquisitions, debt/capital restructuring, and transactions containing conflicts of interest.

Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Changes to Laws and Regulation with Significant Effects

Sepanjang tahun 2022, tidak ada perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.

Throughout 2022, there was no change of regulation with significant effects toward the financial report.

Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policies

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan perusahaan, standar, interpretasi dan amandemen-amandemen atas PSAK yang relevan bagi Perusahaan, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

At the date of authorization of these company financial statements, the following standard, interpretation and amendments to PSAK relevant to the Company were issued but not effective, with early application permitted:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

Effective for periods beginning on or after January 1, 2023

- PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- PSAK 16 (amendemen) Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- PSAK 25 (amendemen) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi
- PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
- PSAK 46 (amendemen) Pajak Penghasilan: Pajak Tanggahan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal

- PSAK 1 (amendment) Presentation of financial statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current
- PSAK 16 (amendment) Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use
- PSAK 25 (amendment) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Accounting Estimates
- Amendments to PSAK 1 (amendment) Presentation of Financial Statements: Disclosure of Accounting Policies
- PSAK 46 (amendment) Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024

Effective for periods beginning on or after January 1, 2024

- PSAK 73 (amendemen) Sewa: Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik
- PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Penyajian Laporan Keuangan terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan

- PSAK 73 (amendment) Leases: Lease Liability in a Sale and Leaseback
- PSAK 1 (amendment) Presentation of financial statements: Non-current Liabilities with Covenants

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

As of the issuance date of the financial statements, the effects of adopting these standards, amendments and interpretations on the financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

TATA KELOLA PERSEROAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

MIZUHO



Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) **General Meeting of Shareholders (“GMS”)**

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menguraikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Peraturan mengenai RUPS juga terdapat di dalam UU PT Bab VI mengenai RUPS Pasal 75 sampai dengan Pasal 91.

Pemegang Saham memiliki hak untuk memperoleh keterangan berkaitan tentang Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang keterangan yang diminta tersebut berhubungan dengan mata acara rapat dalam RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Mata acara rapat lain-lain tidak berhak disetujui oleh RUPS, kecuali semua pemegang saham yang hadir atau wakilnya menyetujui adanya penambahan mata acara rapat.

Article 1 point 4 of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies (“UUPT”) describes the General Meeting of Shareholders (GMS) as a Company Organ that has authority not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits specified in this Law and/or the Articles of Association. Regulations regarding the GMS are also contained in the Company Law Chapter VI regarding GMS Article 75 through Article 91.

Shareholders have the right to obtain information related to the Company from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, as long as the information requested is related to the agenda meeting in the GMS and does not conflict with the interests of the Company. Other meeting agenda items are not entitled to be approved by the GMS, unless all shareholders present or their representatives agree to the addition of meeting agenda.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2022 **The Implementation of 2022 GMS**

Pada tahun 2022, Perseroan telah melaksanakan 2 (dua) kali RUPS. Pelaksanaan RUPS tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

In 2022, the Company held 2 (two) GMS. The details of 2022 GMS are as follows:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) **Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) tanggal 29 Juli 2022 diselenggarakan di Gedung Bank Panin Pusat Lantai 4, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270 pada pukul 14.04 – 14.53 WIB. RUPST telah memenuhi quorum karena dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili 5.260.829.108 saham atau 92,5% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan.

The Annual General Meeting (“AGMS”) of Shareholders on 29 July 2022 was held at Bank Panin Pusat Building, 4th Floor, Jl. General Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270 at 2.04 PM – 2.53 PM (Western Indonesian Time). The AGMS has fulfilled the quorum because it was attended by Shareholders representing 5,260,829,108 shares or 92.5% of all shares with valid voting rights that have been issued.

Hasil RUPST tanggal 29 Juli 2022, pada pokoknya menyetujui hal-hal sebagai berikut:

The results of the AGMS held on July 29, 2022, agreed in principle on the following matters:

Mata Acara Rapat Pertama :

First Meeting Agenda:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00096/2.1068/AU.1/09/0119-2/1/III/2022 tertanggal 7 Maret 2022 dengan pendapat Wajar, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan-

1. Accept and approve the Company's Annual Report for the fiscal year ended 31 December 2021, including the Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company;
2. Approve the ratification of the Financial Report for the fiscal year ended 31 December 2021 which was audited by Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners as contained in its report No.: 00096/2.1068/AU.1/09/0119-2/1/III/2022 dated 7 March 2022 with unqualified opinion, thus releasing members of the Board of Directors and Board of Commissioners of responsibility and any dependents (*acquit et de charge*) for the actions of management and supervision taken during the fiscal year of 2021, as long as all of their actions were reflected in the Financial Report for the fiscal year of 2021 except for

tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2021, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.

embezzlement, fraud and other criminal acts.

Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2021.

Second Meeting Agenda:

Approve to not distribute dividend for the fiscal year of 2021.

Mata Acara Rapat Ketiga :

1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Bayu M Dayat dan Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (**member firm of** Deloitte Asia Pasific dan Jaringan Deloitte Global), masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan batasan : (a) Terdaftar sebagai Akuntan Publik di OJK (b) terdapat Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan (c) memiliki pengalaman dalam audit perusahaan pembiayaan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui.

Third Meeting Agenda:

1. Approve to appoint Public Accountant Bayu M Dayat and Public Accountant Firm Imelda & Partners (member firm of Deloitte Asia Pasific and Deloitte Global Network), respectively as the Public Accountant and Public Accountant Firm to audit the Financial Report of the Company for the financial year that will end on 31 December 2022.
2. Approve to provide proxy and authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements, with respect to the appointment of the Public Accountant and Public Accountant Firm.
3. Approve to authorize the Board of Commissioners to appoint other Public Accountant and Public Accountant Firm in the event of the appointed Public Accountant and Public Accountant Firm for any reason unable to perform their duties, with limitations: (a) Registered as Public Accountant in OJK (b) there are recommendations from the Company's Audit Committee (c) has experience in auditing multifinance company and is affiliated with a recognized International Public Accounting Firm.

Mata Acara Rapat Keempat :

1. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan, yaitu Mizuho Leasing Company Limited dengan kepemilikan saham sebesar 67,44% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, untuk menentukan besarnya honorarium, bonus dan tunjangan tahun buku 2022 untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun buku 2022 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Fourth Meeting Agenda:

1. Approve to authorize the Controlling Shareholders of the Company, namely Mizuho Leasing Company Limited with a stake of 67.44% of shares issued by the Company, to determine the amount of honorarium, bonus and allowances of 2022 financial year for all members of the Company's Board of Commissioners with regard to the recommendation of the Company's Nomination & Remuneration Committee.
2. Approve to authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary, bonuses and allowances of 2022 for all members of the Company's Board of Directors with regard to the recommendation of the Company's Nomination & Remuneration Committee.

Mata Acara Rapat Kelima :

1. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut :
 - Menyetujui untuk mengangkat : Roosniati Salihin sebagai Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

Fifth Meeting Agenda:

1. Approved the appointment of members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company as follows:
 - Approve to appoint : Roosniati Salihin as Commissioner as of the closing of this Meeting.

- Menyetujui mengangkat kembali:
 - Takeshi Sasaki sebagai Komisaris Utama
 - Mohammad Syahril sebagai Komisaris Independen
 - Konosuke Mizuta sebagai Direktur Utama
 - Andi Harjono sebagai Direktur
 - Shunsuke Kojima sebagai Direktur
 - Ade Rafida Saulina S sebagai Direktur
 - Yudi Gustiawan sebagai Direktur

1. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- Takeshi Sasaki selaku Komisaris Utama
- Roosniati Salihin selaku Komisaris*)
- Mohammad Syahril selaku Komisaris Independen

DIREKSI

- Konosuke Mizuta sebagai Direktur Utama
- Andi Harjono sebagai Direktur
- Shunsuke Kojima sebagai Direktur
- Ade Rafida Saulina S sebagai Direktur
- Yudi Gustiawan sebagai Direktur

*) Bahwa pengangkatan Roosniati Salihin selaku Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Mata Acara Rapat Keenam :

1. Menyetujui perubahan Pasal 16 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya Pasal 16 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Bahan Mata Acara Rapat yang ditayangkan, dan menyatakan kembali seluruh Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana ternyata dalam lampiran Berita Acara Rapat.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam suatu akta

- Approve to re-appoint:
 - Takeshi Sasaki as President Commissioner
 - Mohammad Syahril as Independent Commissioner
 - Konosuke Mizuta as President Director
 - Andi Harjono as Director
 - Shunsuke Kojima as Director
 - Ade Rafida Saulina S as Director
 - Yudi Gustiawan as Director

1. Therefore as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year of 2024 which will be held in the year of 2025, with due regard to the provisions of the Capital Market and without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss it at any time, thus the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

- Takeshi Sasaki as President Commissioner
- Roosniati Salihin as Commissioner*)
- Mohammad Syahril as Independent Commissioner

BOARD OF DIRECTORS

- Konosuke Mizuta as President Director
- Andi Harjono as Director
- Shunsuke Kojima as Director
- Ade Rafida Saulina S as Director
- Yudi Gustiawan as Director

*) That the appointment of Roosniati Salihin as the Company's Commissioner is effective as the obtainment of the approval of the Financial Services Authority ("OJK") for the fit and proper test and in compliance with the applicable laws and regulations.

2. Approve to authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare the appointment of the member of the Board of Commissioners and the member of the Board of Directors of the Company in a separate deed in front of the Notary and to administer the notification as well as registration to the competent authority, and to undertake all necessary actions in connection therewith.

Sixth Meeting Agenda:

1. Approve the amendment of Article 16 paragraph 10 of the Company's Article of Association, henceforth Article 16 paragraph 10 of the Company's Article of Association reads as it appears in the Meeting Agenda Material which is broadcast, and restates all Article 16 of the Company's Article of Association as stated on the Minutes of Meeting's attachment.
2. Approve to authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare the amendment of the pertinent Company's Article of Association in a separate

tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

deed in front of the Notary and to administer the notification as well as the registration to the competent authority and to undertake all necessary actions in connection therewith.

Mata Acara Rapat Ketujuh :

1. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau Masyarakat melalui penerbitan efek selain efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum, yang demikian satu dan lain dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal, dan Persetujuan ini berlaku sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam tahun 2023.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada butir 1 diatas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal.

Seventh Meeting Agenda:

1. Approve to pledge more than 50% (fifty percent) or all of the net assets of the Company in order to obtain a loan facility that will be received by the Company from a bank, a venture capital company, a finance company, or an infrastructure financing company or Public through the issuance of securities other than equity type securities through a public offering, that is one and the other with the Capital Market terms and conditions and prevailing laws and regulations, especially the Capital Market Regulations, and this Approval is valid until the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023.
2. To authorize the Board of Directors to carry out any and all actions needed in connection with the said action in point 1 above, with regard to the approval of the Company's Board of Commissioners, with due observance of the terms and conditions of the Capital Market provisions and the prevailing laws and regulations, especially the Capital Market Regulations.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)

RUPSLB tanggal 19 September 2022 diselenggarakan di Gedung Bank Panin Pusat Lantai 4 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270 pada pukul 14.17 – 14.38 WIB. Rapat tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili 5.260.830.595 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 92,5004949% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

The EGMS - 19 September 2022 was held at Bank Panin Pusat Building, 4th Floor Jl. Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270 at 2.17 PM – 2.38 PM (Western Indonesian Time). The meeting was attended by Shareholders representing 5,260,830,595 shares, which have valid voting rights or equivalent to approximately 92.5004949% of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

Hasil RUPSLB tanggal 19 September 2022, pada pokoknya menyetujui hal-hal sebagai berikut:

The results of the EGMS on 19 September 2022, in principle agreed on the following matters:

Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut :
 - Menyetujui Perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

First Meeting Agenda:

1. Approved the changes to the Company's Articles of Association as follows:
 - Approved the amendment to Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, henceforth Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association reads as follows:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat.

NAME AND LOCATION

Article 1

1. This Limited Liability Company is named **PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk** (hereinafter referred to as the "**Company**"), domiciled in the Municipality of Central Jakarta.

- Menyetujui menyesuaikan KBLI 2020 dengan mengubah Pasal 3 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3**

4. Dalam maksud dan tujuan tersebut diatas, yang memiliki kesesuaian terdekat dengan KBLI 2020 (dua ribu dua puluh) adalah sebagai berikut:

Perusahaan Pembiayaan Konvensional

Kelompok ini mencakup usaha perusahaan pembiayaan yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi pembiayaan barang dan/atau jasa, yaitu: pembiayaan investasi; pembiayaan modal kerja; pembiayaan multiguna; dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain kegiatan usaha tersebut, perusahaan pembiayaan konvensional dalam kelompok ini dapat melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

2. Menyetujui menyusun kembali ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, untuk selanjutnya Pasal 1 dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam lampiran Berita Acara Rapat.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk menyatakan Perubahan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri dan meminta persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Mata Acara Rapat Kedua merupakan pemberitahuan perubahan alamat Kantor Pusat Perseroan semula beralamat di Gedung Bank Panin Lantai 3, Jalan Pecenongan Raya No. 84, Jakarta 10120 menjadi Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Jakarta 10220, dimana perubahan alamat tersebut tidak merubah tempat kedudukan Perseroan, yaitu Jakarta Pusat.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2021

Pada tahun 2021, Perseroan telah melaksanakan 1 kali RUPST. Seluruh keputusan pada RUPS tahun 2021 telah direalisasikan.

- Approved to adjust the 2020 KBLI by amending Article 3 paragraph 4 of the Company's Articles of Association to read as follows:

**PURPOSE AND OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES
Article 3**

4. In terms of the purposes and objectives mentioned above, those that have the closest conformity with the 2020 KBLI (two thousand and twenty) are as follows:

Conventional Financing Companies

This group includes business finance companies that are held conventionally, with business activities covering the financing of goods and/or services, namely: investment financing; working capital financing; multipurpose financing; and/or other financing business activities based on the approval of the Financial Services Authority. In addition to these business activities, conventional finance companies in this group can carry out operating leases and/or fee-based activities as long as they do not conflict with the provisions of laws and regulations in the financial services sector.

2. Approved rearranging the provisions of Article 1 and Article 3 of the Company's Articles of Association as referred to in number 1, henceforth Article 1 and Article 3 of the Company's Articles of Association become read as it appears in the attached Minutes of Meeting.
3. Approved the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions related to the resolutions of the Agenda of the Meeting including declaring the Amendment to Article 1 paragraph 1 and Article 3 paragraph 4 of the Company's Articles of Association in a separate Notary Deed and requesting approval for the amendment The Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

The Second Agenda of the Meeting is notification of the change of address of the Company's Head Office, which was originally located at Panin Bank Building, 3rd Floor, Jalan Pecenongan Raya No. 84, Jakarta 10120 to Menara Astra Floor 32, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Jakarta 10220, where the change in address does not change the domicile of the Company, namely Central Jakarta.

The Implementation of 2021 GMS

In 2021, the Company organized 1 AGMS. All decisions taken at the 2021 GMS were realized.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan badan Perseroan yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan baik secara khusus maupun umum sesuai dengan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris juga berwenang memberi nasihat kepada Direksi dalam segala hal terkait pengelolaan Perseroan. Anggota Dewan Komisaris ditunjuk dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Masa jabatan setiap anggota Dewan Komisaris berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ketiga setelah tanggal pengangkatan, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatannya.

The Board of Commissioners is a body of the Company that has the duty and authority to supervise both specifically and generally in accordance with the Articles of Association, the Board of Commissioners is also authorized to advise the Board of Directors in all matters related to the management of the Company. Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed through the General Meeting of Shareholders. The term of office of each member of the Board of Commissioners ends at the closing of the third Annual GMS after the date of appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss any member of the Board of Commissioners at any time before the end of his/her term of office.

Komposisi Dewan Komisaris

Board of Commissioners Composition

Nama Name	Jabatan Position	Uji Kemampuan & Kepatutan Fit & Proper Test
Takeshi Sasaki	Komisaris Utama President Commissioner	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-189/NB.11/2021 31 Maret 2021.
Gunawan Santoso*	Komisaris Commissioner	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-357357/NB.11/2019 27 Juni 2019
Roosniati Salihin**	Komisaris Commissioner	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-718/NB.11/2022 11 November 2022
Mohammad Syahrial	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-358/NB.11/2019 27 Juni 2019.

*Masa jabatan telah berakhir sejak ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juli 2022.

**The term of office has ended since the closing of the Company's Annual GMS for the 2021 Fiscal Year which will be held in July 29, 2022.

** Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tahunan yang diadakan pada 29 Juli 2022, RUPS menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris. RUPS tersebut telah menyetujui mengangkat Roosniati Salihin sebagai Komisaris yang berlaku efektif sesuai dengan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

**Based on the annual General Meeting of Shareholders ("GMS") held on 29 July 2022, the GMS approved the appointment of members of the Board of Commissioners. The GMS has approved the appointment of Roosniati Salihin as Commissioner which will be effective in accordance with the Decree of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority ("OJK").

Pedoman Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Pedoman yang dikaji ulang secara periodik atau dilakukan pengkinian disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman tersebut bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Dasar penyusunan Pedoman Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Juncto Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
3. Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan;

Board of Commissioners Charter

The Board of Commissioners has Charter which will be reviewed periodically or updated in accordance with the applicable laws and regulations. That Charter is binding for each members of the Board of Commissioners.

The basis for the preparation of the Board of Commissioners Charter are as follows:

1. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Company;
2. Financial Services Authority ("OJK") Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Company Juncto OJK Regulation Number 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to OJK Regulation Number 30/POJK.05/ 2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Company;
3. OJK Circular Letter Number 15/SEOJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance Implementation Report for Financing Company;

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
5. Anggaran Dasar Perseroan.

Struktur dan Keanggotaan Dewan Komisaris

1. Jumlah anggota Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang. Dengan susunan 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang merupakan Komisaris Independen.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang maka jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
5. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain, dan
 - anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perusahaan lain.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
9. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada Nomor (8) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
10. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Dewan Komisaris tersebut pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan anggaran dasar Perusahaan.

4. OJK Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; and
5. The Company's Articles of Association.

Structure and Membership of the Board of Commissioners

1. The number of Commissioners shall be at least 2 (two) persons. With the composition of 1 (one) President Commissioner and 1 (one) Independent Commissioner.
2. In the event that the Board of Commissioners consists of more than 2 (two) persons, the number of Independent Commissioners shall be at least 30% (thirty percent) of the total number of members of the Board of Commissioners.
3. At least 1 (one) member of the Board of Commissioners must reside in the territory of the Republic of Indonesia.
4. Any proposal for the appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders must consider the recommendations of the Board of Commissioners or the committee that carries out the nomination function.
5. Each member of the Board of Commissioners must meet the mandatory requirements to pass a fit and proper assessment in accordance with OJK Regulations regarding fit and proper assessment.
6. Members of the Board of Commissioners may hold concurrent positions as:
 - as a member of the Board of Directors at most 2 (two) other Issuers or Public Companies
 - as a member of the Board of Commissioners at most 2 (two) other Issuers or Public Companies
7. In the event that a member of the Board of Commissioners does not hold concurrent position as a member of the Board of Directors, the member of the Board of Commissioners concerned may concurrently serve as a member of the Board of Commissioners in a maximum of 3 (three) other Companies.
8. Members of the Board of Commissioners may concurrently serve as committee members in no more than 5 (five) committees in the Company where the person concerned also serves as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners.
9. Concurrent positions as a member of the committee as referred to in Number 8 can only be carried out as long as they do not conflict with other laws and regulations.
10. Members of the Board of Commissioners are appointed for a period commencing as of the date determined by the GMS which appointed them and ending at the closing of the 3rd (third) Annual GMS which was held after the date of the GMS that appointed the members of the Board of Commissioners at the end of 1 (one) term of office as referred to provisions 1 (one) term of office for a member of the Board of Commissioners is 3 (three) years, taking into account the laws and regulations in the Capital Market, however, without prejudice to the right of the GMS to dismiss the member of the Board of Commissioners at any time before his term of office ends, taking into account the applicable laws and regulations and the provisions of the Company's Articles of Association.

11. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
12. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - Meninggal dunia;
 - Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangundangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.
4. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
5. Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
6. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk:
 - Komite Audit
 - Komite Pemantau Risiko
 - Komite Remunerasi Dan Nominasi
8. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
9. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
 - pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
11. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka (10), apabila dapat membuktikan:

11. After their term of office end, the member of the Board of Commissioners may be re- appointed in accordance with a resolution of the GMS.
12. The term of office of a member of the Board of Commissioners automatically ends, if the member of the Board of Commissioners:
 - Pass away;
 - Be placed under interdiction based on a court decision; or
 - No longer fulfills the requirements of the prevailing laws by taking into account the regulations in the capital market.

Duties , Responsibility and Authorities of the Board of Commissioners

1. The Board of Commissioners is in charge of supervising and is responsible for supervising management policies and providing advice to the Directors.
2. Under certain conditions, the Board of Commissioners is required to hold an annual GMS and other GMS in accordance with their authority as stipulated in laws and regulations and the articles of association.
3. Supervise the Board of Directors in maintaining a balance of the interests of all parties.
4. Prepare reports on the activities of the Board of Commissioners which are part of the report on the implementation of Good Corporate Governance.
5. Monitor the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance
6. Members of the Board of Commissioners must carry out their duties and responsibilities in good faith, with full responsibility and prudence.
7. In order to support the effectiveness of carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners must establish:
 - Audit Committee
 - Risk Monitoring Committee
 - Remuneration and Nomination Committee
8. The Board of Commissioners is required to evaluate the performance of the committees that assist in carrying out their duties and responsibilities at the end of each financial year.
9. The Board of Commissioners together with the Board of Directors must prepare:
 - guidelines that bind each member of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
 - code of ethic that applicable for all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, employees/worker, as well as supporting organs owned by the Company, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
10. Each member of the Board of Commissioners is fully and jointly responsible for the Company's losses caused by the mistakes or negligence of members of the Board of Commissioners in carrying out their duties.
11. Members of the Board of Commissioners cannot be held accountable for the Company's losses as referred to in point (10), if they can prove:

- kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
12. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perusahaan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
 13. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perseroan secara lengkap dan tepat waktu.
 14. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perusahaan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
 15. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perseroan berlaku pula baginya.
 16. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 17. Komisaris Independen wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya:
 - pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan; dan/atau
 - keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.

Transparansi

Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan :

1. Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) baik pada Perseroan maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/

- the loss was not due to his fault or negligence;
 - has conducted management in good faith, full of responsibility and prudence for the benefit and in accordance with the aims and objectives of the Company;
 - has no conflict of interest, either directly or indirectly, for management actions that result in losses; And
 -
 - has taken action to prevent the loss from arising or continuing.
12. The Board of Commissioners at any time during office hours of the Company has the right to enter building and yards or other places used or controlled by the Company and has the right to examine all books, letters and other evidence, examine and match the condition of cash and others and has the right to know all actions that have been carried out by the Board of Directors.
 13. The Board of Commissioners are entitled to request an explanation from the Board of Directors regarding all matters that are asked and each member of the Board of Directors is obliged to provide an explanation regarding all matters that are asked by the Board of Commissioners and members of the Board of Commissioners are entitled to obtain information from the Board of Directors regarding the Company in a complete and timely manner.
 14. If all members of the Board of Directors are temporarily dismissed or if for any reason the Company does not have a single member of the Board of Directors, the Board of Commissioners are temporarily obliged to manage the Company. In such case the Board of Commissioners are entitled to grant temporary powers to one or more members of the Board of Commissioners at the expense of the Board of Commissioners.
 15. In the event that there is only one member of the Board of Commissioners, all duties and authorities given to the President Commissioner or members of the Board of Commissioners in the Company's Articles of Association shall also apply to him.
 16. At any time the Board of Commissioners based on a decision of the Board of Commissioners' Meeting may temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors from his position (their position) by stating the reasons, taking into account the provisions of The Company's Articles of Association and/or the prevailing laws and regulations.
 17. The Independent Commissioner is required to report to OJK no later than 10 (ten) calendar days after the discovery of:
 - violation of laws and regulations in the field of financing; and/or
 - circumstances or estimates of conditions that may endanger the continuity of the Company's business.

Transparency

Members of the Board of Directors are required to disclose:

1. Its share ownership which reaches 5% (five percent) both in the Company and in other companies, which domiciled inside and outside the country.
2. Financial and family relationship with other members of the Board of Commissioners, other members of the Board of

atau pemegang saham Perseroan.

3. Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Perseroan.
4. Jabatan mereka di perusahaan lain.

Nilai-Nilai

1. Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib mempunyai akhlak dan moral yang baik, mampu melaksanakan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan di nyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perseroan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan jabatannya pada Perseroan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.
5. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
6. Anggota Dewan Komisaris dilarang mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Persyaratan Komisaris Independen

Sesuai dengan yang diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.05/2014 Tanggal 19 November 2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.05/2020 Tanggal 29 April 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.05/2014 Tanggal 19 November 2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, diatur bahwa Komisaris Independen wajib memiliki persyaratan, sebagai berikut:

1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.
2. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada perusahaan lain yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.
3. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.

Directors, and/or shareholders of the Company.

3. Remuneration and facilities received from the Company.
4. Their positions in other companies.

Values

1. Members of the Board of Commissioners must have high integrity, ability, knowledge, experience according to their field of work and be able to communicate well.
2. Members of the Board of Commissioners must have good characters and morals, are able to carry out legal actions, have never been declared bankrupt or become members of the Board of Directors or Board of Commissioners who are found guilty of causing a company to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to the appointment and have never been punished for commit a crime that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector within 5 (five) years prior to appointment.
3. Members of the Board of Commissioners are prohibited from conducting transactions that have a conflict of interest with the activities of the Company where the said member of the Board of Commissioners serves.
4. Members of the Board of Commissioners are prohibited from using their positions in the Company where the said member of the Board of Commissioners serve for personal, family, and/or other party' interests that may harm or reduce the profits of the Company where the said member of the Board of Commissioners serve.
5. Members of the Board of Commissioners are prohibited from taking and/or receiving personal benefits either directly or indirectly from the Company's activities other than legitimate income.
6. Members of the Board of Commissioners are prohibited from interfering with the Company's operational activities which are the responsibility of the Board of Directors.

Independent Commissioner Requirements

As is stipulated in the Financial Services Authority Regulation No.30/POJK.05/2014 dated November 19, 2014 regarding Good Corporate Governance for Financing Companies juncto Financial Services Authority Regulation No.29/POJK.05/2020 dated April 29, 2020 regarding Amendments to Financial Services Authority Regulation No.30/POJK.05/2014 dated November 19, 2014 regarding Good Corporate Governance for Financing Companies, it is regulated that Independent Commissioners must have the following requirements:

1. is not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company in the following period.
2. has never served as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, member of the Sharia Supervisory Board (DPS) or held a position 1 (one) level below the Board of Directors in another company affiliated with the Company within the last 6 (six) month.
3. does not own shares either directly or indirectly of the Company.

4. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham Perseroan.
5. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
6. memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
7. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.
8. memiliki kewarganegaraan Indonesia.
9. berdomisili di Indonesia.
10. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

Fungsi dan Tugas Pokok Komisaris Independen

Komisaris Independen memiliki fungsi dan tugas, sebagai berikut:

1. Menjabat sebagai Ketua Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Komisaris Independen wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.

Kebijakan tentang Penilaian terhadap Kinerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

1. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja
 - a. **Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris**
Prosedur penilaian dilakukan dengan penilaian mandiri oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - b. **Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi**
Proses penilaian Direksi dilakukan secara kolektif dan individual dengan mempertimbangkan beberapa indikator dan kriteria penilaian *Key Performance Indicators* ("KPI") yang disepakati oleh anggota Direksi Perseroan. Sistem penilaian dilakukan bersama seluruh anggota Direksi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Kriteria yang digunakan
 - a. **Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris**
Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagaimana berikut:

4. does not have affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the shareholder of the Company.
5. does not have a business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.
6. understand the laws and regulations in the financing field and other relevant laws and regulations.
7. have sufficient knowledge of the financial condition of the Company where the said Independent Commissioner serves.
8. have Indonesian citizenship.
9. domiciled in Indonesia.
10. In the event that an Independent Commissioner serves on the Audit Committee, the relevant Independent Commissioner can only be reappointed to the Audit Committee for the next 1 (one) term of office of the Audit Committee.

Independent Commissioners Functions and Duties

The Independent Commissioner has the following functions and duties:

1. Serves as Chair of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Nomination and Remuneration Committee.
2. Perform supervisory functions to voice the interests of debtors, creditors, and other stakeholders.
3. Independent Commissioners must report to OJK no later than 10 (ten) calendar days from the discovery of violations of laws and regulations in the field of financing and/or circumstances or estimates of circumstances that may jeopardize the Company's business continuity.

Performance Assessment of the Members of the Board of Directors and Board of Commissioners

1. Performance Appraisal Implementation Procedure
 - a. **Procedures for the Implementation of the Board of Commissioners Performance Assessment**
The assessment procedure is carried out by using self-assessment method by the Board of Commissioners with due observance of recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.
 - b. **Procedures for the Implementation of the Board of Directors Performance Assessment**
The Board of Directors assessment process is carried out collectively and individually by taking into account several indicators and assessment criteria for Key Performance Indicators ("KPI") agreed upon by members of the Company's Board of Directors. The assessment system is carried out with all members of the Board of Directors to be submitted to the Board of Commissioners by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
2. Criteria used
 - a. **Board of Commissioners Performance Assessment Criteria**
Assessment of the performance of the Board of Commissioners includes the following matters:

- Kehadiran dalam rapat internal Dewan Komisaris;
- Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi;
- Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dengan Komite;
- Kehadiran dalam rapat Komite; dan
- Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

b. Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian terhadap kinerja Direksi mencakup hal-hal sebagaimana berikut:

- Pelaksanaan dari Visi dan Misi Perseroan;
- Terlaksananya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan
- Terlaksananya pencapaian Rencana Bisnis Tahunan ("RBT"); dan
- Terlaksananya pengawasan atas tindak lanjut rekomendasi audit internal, auditor eksternal atau pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Pihak yang melakukan penilaian

Dewan Komisaris

- Pihak yang terlibat di dalam penilaian kinerja Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Direksi

- Pihak yang terlibat di dalam penilaian kinerja Direksi adalah Direksi, Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Rapat Dewan Komisaris

- Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.
- Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (a), butir (b) dan butir (c) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada butir (a), butir (b), butir (c) dan butir (e) wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan

- Attendance at internal Board of Commissioners meetings;
- Attendance at Board of Commissioners meetings with the Board of Directors;
- Attendance at Board of Commissioners meetings with Committees;
- Attendance at Committee meetings; and
- Implementation of the principles of *Good Corporate Governance*.

b. Board of Directors Performance Assessment Criteria

Assessment of the performance of the Board of Directors includes the following matters:

- Implementation of the Company's Vision and Mission;
- Implementation of *Good Corporate Governance* in every business activity of the Company
- Achievement of the Annual Business Plan ("RBT"); and
- Implementation of supervision on the follow-up of internal audit recommendations, external auditors or supervision of the Financial Services Authority.

3. The party conducting the assessment

Board of Commissioners

- The parties involved in evaluating the performance of the Board of Commissioners are the Board of Commissioners with due observance of recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.

Board of Directors

- The parties involved in evaluating the performance of the Board of Directors are the Board of Directors and the Board of Commissioners with due observance of recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.

Board of Commissioners Meetings

- Meetings of the Board of Commissioners can be held at any time if deemed necessary by one or more members of the Board of Commissioners or at a written request from the Board of Directors or at the request of 1 (one) or more Shareholders jointly representing 1/10 (one tenth) or more of the total all shares that have been issued by the Company with valid voting rights.
- Meetings of the Board of Commissioners are held regularly at least 1 (one) time in 2 (two) months.
- Members of the Board of Commissioners must attend at least 75% (seventy five percent) of the Board of Commissioners' meetings in a period of 1 (one) year.
- The Board of Commissioners meeting referred to in point (a), point (b) and point (c) can be held if it is attended by a majority of all members of the Board of Commissioners.
- The Board of Commissioners must hold regular meetings with the Board of Directors at least 1 (one) time in 4 (four) months.
- The presence of members of the Board of Commissioners at the meetings referred to in points (a), points (b), points (c) and points (e) must be disclosed in the Company's Annual

Perusahaan.

- g. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam butir (b) dan butir (e) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 - h. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir (g) bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 - i. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada butir (g), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
 - j. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Dewan Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
 - k. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
 - l. Pemanggilan Rapat harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
 - m. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perusahaan dicatatkan, atau ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dan hasil keputusan Rapat disetujui oleh semua anggota Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 - n. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
 - o. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
 - p. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
 - q. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam satu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam
- Report.
 - g. The Board of Commissioners must schedule the meeting referred to in point (b) and point (e) for the following year before the end of the financial year.
 - h. At the scheduled meeting as referred to in point (g), the meeting materials shall be submitted to the participants no later than 5 (five) days before the meeting is held.
 - i. In the event that a meeting is held outside the schedule that has been prepared as referred to in point (g), the meeting materials shall be submitted to the meeting participants no later than before the meeting is held.
 - j. Invitation to the meeting of the Board of Commissioners is carried out by the Main Commissioner. In the event that the Main Commissioner is absent for any reason, which does not need to be proven to a third party, then a member of the Board of Commissioners has the right and authority to call for a meeting of the Board of Commissioners.
 - k. Invitations to the meeting of the Board of Commissioners are sent by any means in written form, which summons must be sent to members of the Board of Commissioners no later than 5 (five) calendar days before the meeting is held or in a shorter time in urgent circumstances, namely no later than 1 (one) year. one) calendar day before the Meeting excluding the date of the summons and the date of the Meeting, the urgency is determined by the President Commissioner. If all members of the Board of Commissioners are present at the meeting, no prior summons is required
 - l. The summons for the meeting must include the meeting agenda, date, time and place of the meeting.
 - m. Meetings of the Board of Commissioners are held at the domicile of the Company or at the place of business activity or at the domicile of the Stock Exchange where the Company's shares are listed, or at other places within the territory of the Republic of Indonesia. If all members of the Board of Commissioners are present or represented and the results of the Meeting are approved by all members of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners' meeting can be held at another place as determined by the Board of Commissioners and the meeting has the right to make valid and binding decisions.
 - n. The meeting of the Board of Commissioners is chaired by the Main Commissioner, if the Main Commissioner is absent or unable to attend the meeting which does not need to be proven to a third party, then the meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners who is elected by and from the members of the Board of Commissioners present at the meeting.
 - o. A member of the Board of Commissioners can only be represented at a meeting of the Board of Commissioners by another member of the Board of Commissioners based on a power of attorney.
 - p. Each member of the Board of Commissioners has the right to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Commissioners he represents.
 - q. Each member of the Board of Commissioners who personally in any way either directly or indirectly has an interest in a proposed transaction, contract or contract, in which the Company becomes one of the parties must

mana Perusahaan menjadialah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

- r. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- s. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- t. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam butir(a), butir (b) dan butir (c) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- u. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam butir (e) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- v. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan Rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat (dissenting opinions) tersebut.
- w. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris.
- x. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada butir (t) dan butir (u), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- y. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada butir (t) dan butir (u) wajib didokumentasikan oleh Perusahaan.

state the nature of the interest in a Board of Commissioners Meeting and is not entitled to participate in voting on matters related to the transaction or contract, unless the meeting of the Board of Commissioners determines otherwise.

- r. Voting regarding individuals is carried out by means of closed ballots without a signature, while voting on other matters is carried out verbally unless the Chairperson of the Meeting determines otherwise without any objection from those present.
- s. Decision-making at the Board of Commissioners' meeting must be made based on deliberation for consensus. In the event that a consensus decision is not reached, the decision is made based on the majority vote.
- t. The results of the meeting referred to in point (a), point (b) and point (c) must be recorded in the minutes of the meeting, signed by all members of the Board of Commissioners who are present, and submitted to all members of the Board of Commissioners.
- u. The results of the meeting referred to in point (e) must be recorded in the minutes of the meeting, signed by the attending members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, and submitted to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.
- v. Dissenting opinions that occur in the decisions of the Board of Commissioners Meeting must be clearly stated in the minutes of the Board of Commissioners meeting along with the reasons for the dissenting opinions.
- w. Members of the Company's Board of Commissioners who are present or not present at the meeting of the Board of Commissioners are entitled to receive a copy of the minutes of the meeting of the Board of Commissioners.
- x. In the event that a member of the Board of Commissioners does not sign the results of the meeting referred to in point (t) and point (u), the person concerned must state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting.
- y. The minutes of meeting referred to in point (t) and point (u) must be documented by the Company.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Tahun 2022

Frequency of Board of Commissioners Meeting Year 2022

Nama Name	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting		Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Joint Board of Commissioners Meeting with Board of Directors	
	Kehadiran Attendance	Rasio Kehadiran Attendance Ratio	Kehadiran Attendance	Rasio Kehadiran Attendance Ratio
Takeshi Sasaki	6/6	100.00%	6/6	100.00%
Gunawan Santoso*	4/4	100.00%	4/4	100.00%
Roosniati Salihin**	-	-	-	-
Mohammad Syahrial	6/6	100.00%	6/6	100.00%

*Masa jabatan telah berakhir sejak ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022 pada tanggal 29 Juli 2022

*The term of office has ended since the closing of the Company's Annual GMS for the 2021 Fiscal Year which will be held in 2022 on July 29, 2022

** Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tahunan yang diadakan pada 29 Juli 2022, RUPS menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris. RUPS tersebut telah menyetujui mengangkat Roosniati Salihin sebagai Komisaris yang berlaku efektif sesuai dengan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

**Based on the annual General Meeting of Shareholders ("GMS") held on 29 July 2022, the GMS approved the appointment of members of the Board of Commissioners. The GMS has approved the appointment of Roosniati Salihin as Commissioner which will be effective in accordance with the Decree of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority ("OJK").

Pelatihan Dewan Komisaris

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, maka sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah mengikuti pelatihan-pelatihan, antara lain:

Board of Commissioners Trainings

In order to expand their knowledge and competence, throughout 2022, the Board of Commissioners had participated in several trainings, including:

Nama Name	Pelatihan Dewan Komisaris / The Board of Commissioners Trainings		
	Pelatihan / Trainings	Tanggal / Date	Penyelenggara / Organizer
Takeshi Sasaki	<i>The Impact Of Climate Change On Financing Aspects And Insurance Premiums Based On Green Economy.</i> Dampak Perubahan Iklim Terhadap Aspek Pembiayaan Dan Premi Asuransi Berbasis Ekonomi Hijau.	24 Feb 2022	Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Roosniati Salihin*	<i>Banking Agility - Building Resilience And Growing From Failure.</i> Ketangkasan Perbankan - Membangun Ketahanan Dan Bertumbuh Dari Kegagalan.	14 Jul 2022	Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Mohammad Syahrial	Peluang Dan Tantangan Implementasi Blockchain Diindustri Jasa Keuangan. Opportunities and Challenges of Blockchain Implementation in the Financial Services Industry.	24 Mar 2022	Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

*Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tahunan yang diadakan pada 29 Juli 2022, RUPS menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris. RUPS tersebut telah menyetujui mengangkat Roosniati Salihin sebagai Komisaris yang berlaku efektif sesuai dengan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

*Based on the annual General Meeting of Shareholders ("GMS") held on 29 July 2022, the GMS approved the appointment of members of the Board of Commissioners. The GMS has approved the appointment of Roosniati Salihin as Commissioner which will be effective in accordance with the Decree of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority ("OJK").

Penilaian Kinerja Komite-Komite yang Berada di Bawah Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris telah membentuk beberapa Komite yang berada di bawahnya yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko.

Sepanjang tahun 2022, Komite Audit telah melakukan tinjauan dan evaluasi atas pelaksanaan audit yang telah dilaksanakan oleh audit eksternal, memberikan rekomendasi penunjukan audit eksternal, melakukan evaluasi untuk memastikan proses audit internal dan eksternal dilaksanakan secara independen dan objektif.

Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan penilaian kinerja, program pengembangan kemampuan, menganalisa penerapan kebijakan dan program remunerasi, dan rekomendasi kebijakan Sumber Daya Manusia.

Komite Pemantau Risiko telah melakukan pemantauan dan penelaahan atas profil risiko Perseroan dan penerapan kepatuhan Perseroan.

Berdasarkan pembahasan realisasi kerja, Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh komite yang berada di bawah Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup baik.

Direksi Board of Directors

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Komposisi Direksi

Nama Name	Jabatan Position	Uji Kemampuan & Kepatutan Fit & Proper Test
Konosuke Mizuta	Direktur Utama President Director	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-354/NB.11/2019 tanggal 27 Juni 2019
Shunsuke Kojima	Direktur Director	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-363/NB.11/2019 tanggal 27 Juni 2019
Andi Harjono	Direktur Director	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-355/NB.11/2019 tanggal 27 Juni 2019
Ade Rafida Saulina S.	Direktur Director	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-361/NB.11/2019 tanggal 27 Juni 2019
Yudi Gustiawan	Direktur Director	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-653/NB.11/2019 tanggal 5 November 2019

Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners

In order to support the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners established several Committees under it, namely the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee and the Risk Monitoring Committee.

Throughout 2022, the Audit Committee has reviewed and evaluated the implementation of audits carried out by external audits, provided recommendations for the appointment of external audits, carried out evaluations to ensure that the internal and external audit processes were carried out independently and objectively.

The Nomination and Remuneration Committee has conducted performance assessments, capacity building programs, analyzed the implementation of remuneration policies and programs and recommended Human Resources policies.

The Risk Monitoring Committee has monitored and reviewed the Company's risk profile and the implementation of the Company's compliance.

Based on the discussion of work realization, the Board of Commissioners considers that all committees under the Board of Commissioners has carried out their duties and responsibilities quite well.

The Board of Directors is an organ of the Company that is authorized and fully responsible for the management of the Company for the interests of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company and represents the Company, both inside and outside the court, in accordance with the provisions of the Articles of Association.

Board of Directors Composition

Pedoman Direksi

Direksi memiliki Pedoman yang dikaji ulang secara periodik atau dilakukan pengkinian disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman tersebut bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.

Dasar penyusunan Pedoman Direksi sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Juncto Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
3. Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan;
4. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
5. Anggaran Dasar Perseroan.

Struktur dan Keanggotaan Direksi

1. Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang. Dengan susunan 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.
2. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia (lebih dari 50% jumlah anggota Direksi).
4. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
5. Seluruh anggota Direksi harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.
6. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.
7. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain.
8. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan:
 - a. sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perusahaan lain;
 - b. sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris;
9. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat mereka pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa

Board of Directors Charter

The Board of Directors has Charter which will be reviewed periodically or updated in accordance with the applicable laws and regulations. That Charter is binding for each members of the Board of Directors.

The basis for the preparation of the Board of Directors Charter are as follows:

1. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Company;
2. Financial Services Authority (“OJK”) Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Company Juncto OJK Regulation Number 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to OJK Regulation Number 30/POJK.05/ 2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Company;
3. OJK Circular Letter Number 15/SEOJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance Implementation Report for Financing Company
4. OJK Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; and
5. The Company’s Articles of Association.

Directors Structure and Membership

1. The number of members of the Board of Directors is at least 3 (three) people. With the composition of 1 (one) President Director and 2 (two) Directors.
2. All members of the Board of Directors must be domiciled in the territory of the Republic of Indonesia.
3. The majority of members of the Board of Directors must be Indonesian citizens (more than 50% of the total members of the Board of Directors).
4. Any proposed appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders must take into account the recommendations of the Board of Commissioners or the committee that carries out the nomination function.
5. All members of the Board of Directors must have relevant knowledge to their position.
6. Each member of the Board of Directors must meet the requirements to pass the fit and proper test in accordance with OJK Regulations regarding the fit and proper test.
7. Members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as Directors in other companies.
8. Members of the Board of Directors may hold concurrent positions:
 - a. as a member of the Board of Commissioners in at most 3 (three) other companies;
 - b. as a member of the Committee in at most 5 (five) committees in the Issuer or Public Company where the person concerned also serves as a member of the Board of Commissioners;
9. Members of the Board of Directors are appointed for a period commencing as of the date determined by the GMS which appointed them and ending at the closing of the 3rd (third) Annual GMS which was held after the date of the GMS that appointed them at the end of 1 (one) term of office as referred to provisions 1 (one) term of office

jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar.

10. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
11. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
12. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang, maka selambat lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan yang berlaku, Anggota Direksi memiliki Tugas Tanggung Jawab dan Wewenang sebagai berikut :

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Anggota Direksi Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan internal Perseroan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
 - a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

of members of the Board of Directors is 3 (three) years, taking into account of laws and regulations in the Capital Market, however, without prejudice to the right of the GMS to dismiss the member of the Board of Directors at any time before his term of office ends, taking into account the the applicable laws and regulations and the provisions of the Company's Articles of Association.

10. After their term of office end, the member of the Board of Directors may be reappointed in accordance with a resolution of the GMS.
11. The term of office of a member of the Board of Directors automatically ends, if the member of the Board of Directors:
 - a. Pass away;
 - b. Be placed under interdiction based on a court resolution or
 - c. No longer fulfills the requirements of the prevailing laws by taking into account the regulations in the capital market.
12. If the position of a member of the Board of Directors is vacant due to any reason that causes the number of members of the Board of Directors to be less than 3 (three) people, then at the latest 90 (ninety) calendar days after the vacancy, a GMS must be held for filling the vacancy, taking into account the prevailing laws and regulations in the Capital Market.

Duties , Responsibility and Authorities

Referring to the Company's Articles of Association and the provisions of the applicable laws and regulations, members of the Board of Directors have the following Duties, Responsibilities and Authorities:

1. The Board of Directors is in charge of carrying out and being responsible for the management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company set out in the Articles of Association.
2. Members of the Company's Board of Directors must comply with laws and regulations, the Company's Articles of Association and the Company's internal regulations. In carrying out the duties and responsibilities of management, the Board of Directors is required to hold an annual GMS and other GMS as stipulated in the laws and regulations and the Articles of Association.
3. Each member of the Board of Directors must carry out their duties and responsibilities in good faith, full of responsibility and prudence.
4. In order to support the effectiveness of carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors may form a committee.
5. In the event that a committee is formed, the Board of Directors is required to evaluate the performance of the committee at the end of each financial year.
6. The Board of Directors together with the Board of Commissioners must prepare:
 - a. Guidelines that bind each member of the Board of Directors and Board of Commissioners, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
 - b. The code of ethics that applies to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, employees/employees, and supporting organs of the Company, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
 8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka (7), apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
 9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam angka (10) di bawah ini.
 10. Direksi mewakili Perseroan sebagaimana yang terdapat pada angka (9), akan tetapi dengan pembatasan untuk:
 - a. menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perseroan dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau
 - b. mengalihkan atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih piutang Perseroan yang telah dihapusbukukan, melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau
 - c. menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan/menjaminkan kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - d. memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah;
 - e. memperoleh atau melepaskan penyertaan modal pada perusahaan lain;
 - f. memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) untuk kepentingan pihak lain;
 - g. menerima pinjaman uang dari siapapun;
 - h. memberikan pinjaman uang kepada siapapun kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal. Ketentuan pada angka (10) ini tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam angka (11) dibawah ini.
 11. Perbuatan hukum untuk (1) mengalihkan atau melepaskan hak atau (2) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik
7. Each member of the Board of Directors is fully and jointly responsible for the Company's losses caused by errors or negligence of members of the Board of Directors in carrying out their duties.
 8. Members of the Board of Directors cannot be held accountable for the Company's losses as referred to in number (7), if they can prove:
 - a. the loss was not due to his fault or negligence.
 - b. has conducted management in good faith, full of responsibility and prudence for the benefit and in accordance with the aims and objectives of the Company.
 - c. has no conflict of interest, either directly or indirectly, for management actions that result in losses, and
 - d. has taken action to prevent the loss from arising or continuing.
 9. The Board of Directors represents the Company legally and directly both inside and outside the court on all matters and in all events, binds the Company with other parties and other parties with the Company and carries out all actions, both regarding management and ownership, with the limitations as specified in number (10) below.
 10. The Board of Directors represents the Company as stated in number (9), but with restrictions for:
 - a. writing off or removing the Company's receivables from the books in excess of the amount determined from time to time by the Board of Commissioners; or
 - b. transfer or release the Company's rights to collect the Company's receivables that have been written off, exceeding the amount determined from time to time by the Board of Commissioners; or
 - c. selling or transferring or releasing rights, or pledging/guaranteeing the Company's assets, either in one transaction or in several transactions that are independent or related to one another, in an amount exceeding the amount determined from time to time by the Board of Commissioners;
 - d. Obtain immovable property in any way, including land rights;
 - e. obtaining or releasing equity participation in other companies;
 - f. provide corporate guarantees for the benefit of other parties;
 - g. accept a loan from anyone;
 - h. lend money to anyone except in the context of carrying out the Company's business activities.

must obtain prior written approval from or the deed in question is also signed by the Board of Commissioners, this approval can be given to carry out one action or more than one action and from time to time it can be reviewed again, taking into account the regulations in the Capital Market sector. The provisions in number (10) do not reduce what is specified in number (11) below.
 11. Legal actions to (1) transfer or release rights or (2) make debt guarantees for all or most of the Company's assets, namely with a value of more than 50% (fifty percent) of the total net worth of the Company in 1 (one) transaction or more, whether related to each other or not and the transaction referred to is a

yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

12. Perbuatan hukum:
 - a. Untuk melakukan Transaksi Material, tunduk pada Peraturan OJK yang mengatur tentang Transaksi Material dan perubahan kegiatan usaha dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Untuk melakukan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan tunduk pada Peraturan OJK yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan kepentingan dan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
15. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
17. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana angka (16) diatas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

transfer of the Company's net assets that occurs within a period of 1 (one) financial year, must obtain approval from the GMS with the terms and conditions that apply.

12. Legal action:
 - a. to carry out Material Transactions, comply with OJK Regulations governing Material Transactions and changes in business activities with due observance of the provisions in the applicable laws and regulations.
 - b. to carry out Affiliated Transactions and Conflicts of Interest subject to OJK Regulations governing Affiliated Transactions and Conflicts of Interest and with due observance of the provisions in the applicable laws and regulations.
13. a. The President Director has the rights and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company;
 - b. In the event that the President Director is absent or unable to attend for any reason whatsoever, which does not need to be proven to the third party, then 2 (two) other members of the Board of Directors has the rights and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.
14. Distribution of duties and authorities of each member of the Board of Directors is determined by the GMS, in the event that the GMS does not determine, then distribution of duties and authorities of each member of the Directors is determined based on the resolution of Meeting of the Board of Directors.
15. If something is occurred where the Company's interests conflict with the personal interests of a member of the Board of Directors, then the Company will be represented by another member of the Board of Directors who has no conflict of interest and in the event that the Company has conflict of interest with the interests of all members of the Board of Directors, then in this case the Company will be represented by the Board of Commissioners or someone who is appointed by the Board of Commissioners. In the event that there is no member of the Board of Commissioners, the GMS appoints one or more persons to represent the Company in performing the tasks as mentioned above.
16. The member of the Board of Directors is not authorized to represent the Company if:
 - a. there is a case in the court between the Company and the relevant member of the Board of Directors; and
 - b. The relevant member of the Board of Directors concerned has a conflict of interests with the Company's interest.
17. In the event that there is a conditions as referred to item (16) above, those entitled to represent the Company are:
 - a. other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest with the Company;
 - b. the Board of Commissioners in case all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company; or
 - c. other parties appointed by the GMS in the event that all members of the Board of

Transparansi

Anggota Direksi wajib mengungkapkan :

1. Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) baik pada Perseroan maupun pada Perseroan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham Perseroan.
3. Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Perseroan.
4. Jabatan mereka di Perseroan lain.

Nilai-Nilai

1. Anggota Direksi wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Anggota Direksi wajib mempunyai akhlak dan moral yang baik, mampu melaksanakan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
3. Anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perseroan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.
4. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan jabatannya pada Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi Perseroan maupun anak perusahaannya.
5. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

Rapat Direksi

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Rapat Direksi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
3. Anggota Direksi wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.
4. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada nomor (1), nomor (2) dan nomor (3) dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
5. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
6. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada nomor (1), nomor (2), nomor (3) dan nomor (5) wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

Transparency

Members of the Board of Directors are required to disclose:

1. Its share ownership which reaches 5% (five percent) both in the Company and in other companies, domiciled inside and outside the country.
2. Financial and family relationships with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, and/or shareholders of the Company.
3. Remuneration and facilities received from the Company.
4. Their position in other companies.

Values

1. Members of the Board of Directors must have high integrity, ability, knowledge, experience according to their field of work and be able to communicate well.
2. Members of the Board of Directors must have good characters and morals, are able to carry out legal actions, have never been declared bankrupt or become members of the Board of Directors or Board of Commissioners who are found guilty of causing a company to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to the appointment and has never been convicted for committing an act crimes that was detrimental to state finances and/or related to the financial sector within 5 (five) years prior to appointment.
3. Members of the Board of Directors are prohibited from conducting transactions that have a conflict of interest with the activities of the Company where the said member of the Board of Directors serves.
4. Members of the Board of Directors are prohibited from using their positions in the Company for personal, family, and/or other party' interests that may harm or reduce the profits and reputation of the Company and its subsidiaries.
5. Members of the Board of Directors are prohibited from taking and/or receiving personal benefits either directly or indirectly from the Company's activities other than legitimate income.

The Board of Directors Meetings

1. Meetings of the Board of Directors can be held at any time if deemed necessary by one or more members of the Board of Directors or at a written request from the Board of Commissioners or at the written request of 1 (one) or more Shareholders who jointly represent 1/10 (one tenth) or more of the the total number of shares issued by the Company with valid voting rights.
2. Meetings of the Board of Directors are held regularly at least 1 (one) time every month.
3. Members of the Board of Directors must attend at least 50% (fifty percent) of the Board of Directors meetings in a period of 1 (one) year.
4. The Board of Directors meeting as referred to in number (1), number (2) and number (3) can be held, valid and has the right to make binding decisions if attended by more than 1/2 (one half) of the total members of the Board of Directors present or represented at the meeting .
5. The Board of Directors must hold regular meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners at least 1 (one) time in 4 (four) months.
6. The presence of members of the Board of Directors at the meeting referred to in number (1), number (2), number (3) and number (5) must be disclosed in the Company's Annual Report.

7. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam nomor (2) dan nomor (5) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 8. Bahan rapat yang sudah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada nomor (7) harus dibagikan kepada peserta rapat minimal 5 (lima) hari sebelum rapat dilaksanakan.
 9. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada nomor (7) , bahan rapat harus dibagikan kepada peserta paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
 10. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Direksi. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, maka pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 11. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
 12. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili dan hasil keputusan Rapat disetujui oleh semua anggota Direksi, Rapat Direksi dapat diadakan di tempat lain sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 13. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.
 14. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
 15. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
7. The Board of Directors must schedule the meeting referred to in number (2) and number (5) for the following year before the end of the financial year.
 8. Scheduled meeting materials as referred to in number (7) must be distributed to meeting participants at least 5 (five) days before the meeting is held.
 9. In the event that a meeting is held outside the schedule that has been prepared as referred to in number (7), meeting materials must be distributed to participants no later than before the meeting is held.
 10. Invitation to the meeting of the Board of Directors is carried out by the President Director. In the event that the President Director is absent for any reason, which does not need to be proven to a third party, then a member of the Board of Directors has the right and authority to call for a meeting of the Board of Directors. Invitations for the Board of Directors' Meeting must be submitted by any means in written form delivered to each member of the Board of Directors no later than 5 (five) calendar days before the Meeting is held, excluding the date of the Invitation and the date of the Meeting. If all members of the Board of Directors are present or represented, then the summons is not required and the meeting of the Board of Directors has the right to make valid and binding decisions.
 11. The summons must include the meeting agenda, date, time and place of the meeting.
 12. Meetings of the Board of Directors are held at the domicile of the Company or at the place of business activity or at the domicile of the Stock Exchange where the Company's shares are listed, or at other places within the territory of the Republic of Indonesia. If all members of the Board of Directors are present or represented and the results of the meeting are approved by all members of the Board of Directors, the Board of Directors meeting can be held at another place as determined by the Board of Directors and the meeting has the right to make valid and binding decisions.
 13. The Board of Directors meeting is chaired by the President Director. In the event that the President Director is absent or unable to attend the Board of Directors Meeting for any reason, which does not need to be proven to a third party, then a member of the Board of Directors who is present and elected at the Board of Directors Meeting may chair the Board of Directors Meeting.
 14. A member of the Board of Directors can be represented at a meeting of the Board of Directors only by another member of the Board of Directors based on a power of attorney.
 15. a. Each member of the Board of Directors present has the right to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Directors he represents.
b. Each member of the Board of Directors who personally in any way either directly or indirectly has an interest in a proposed transaction, contract or contract, in which the Company is one of the parties must state the nature of the interest in a Board of Directors Meeting and is not entitled to participate in voting on matters related to the transaction or contract, unless the Board of Directors Meeting determines otherwise.

16. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari ½ (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
17. Hasil Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam nomor (1), nomor (2) dan nomor (3) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
18. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
19. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan Rapat Direksi, maka yang bersangkutan wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.
20. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada nomor (17) dan nomor (18), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
21. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada nomor (17) dan nomor (18) wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
22. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
23. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
24. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/ atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
16. The decision making of the Board of Directors meeting is carried out based on deliberation for consensus. In the event that deliberation for consensus does not occur, decisions are made based on a majority vote, which is approved by more than ½ (one-half) of the members of the Board of Directors present.
17. The results of the Board of Directors meeting as referred to in number (1), number (2) and number (3) must be recorded in the minutes of the meeting, signed by all members of the Board of Directors who are present and submitted to all members of the Board of Directors.
18. The results of the meeting between the Board of Directors and the Board of Commissioners must be recorded in the minutes of the meeting, signed by all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who are present and submitted to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.
19. Dissenting opinions that occur in the decisions of the Board of Directors Meeting, the parties concerned must be clearly stated in the minutes of the Board of Directors meeting along with the reasons for the dissenting opinions.
20. In the event that a member of the Board of Directors and/ or member of the Board of Commissioners does not sign the results of the meeting referred to in number (17) and number (18), the person concerned must state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting.
21. The minutes of meeting referred to in number (17) and number (18) must be documented by the Company.
22. The minutes of the Board of Directors' meeting are valid evidence regarding the decisions taken at the relevant Board of Directors meeting, both for members of the Board of Directors and for third parties.
23. The Board of Directors can also make valid and binding decisions without holding a Board of Directors Meeting, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing about the proposals concerned and all members of the Board of Directors give their approval regarding the proposals submitted in writing and sign the agreement. Decisions taken in this way have the same legal force as decisions taken legally at a meeting of the Board of Directors.
24. Board of Directors Meetings can also be held via teleconference, video conference, or other electronic media facilities that allow all Directors Meeting participants to see and/or hear each other directly and participate in the Board of Directors Meeting, provided that the minutes of the Meeting using a conference telephone or equipment Similar communications will be made in writing and circulated among all members of the Board of Directors participating in the meeting, to be signed. Decisions taken in this way have the same power as decisions taken legally at a Board of Directors meeting.

Frekuensi Rapat Direksi Tahun 2022

Frequency of Board of Directors Meeting Year 2022

Nama Name	Rapat Direksi Board of Directors Meeting		Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Joint Board of Directors Meeting with Board of Commissioners	
	Kehadiran Attendance	Rasio Kehadiran Attendance Ratio	Kehadiran Attendance	Rasio Kehadiran Attendance Ratio
Konosuke Mizuta	12/12	100.00%	6/6	100.00%
Shunsuke Kojima	12/12	100.00%	6/6	100.00%
Andi Harjono	12/12	100.00%	6/6	100.00%
Ade Rafida Saulina S.	11/12	92.00%	6/6	100.00%
Yudi Gustiawan	12/12	100.00%	6/6	100.00%

Pelatihan Direksi

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, maka sepanjang tahun 2022, Direksi telah mengikuti pelatihan-pelatihan, antara lain:

Board of Directors Trainings

In order to expand their knowledge and competence, throughout 2022, the Board of Directors had participated in several trainings, including:

Pelatihan Direksi / The Board of Directors Trainings			
Nama / Name	Pelatihan / Trainings	Tanggal / Date	Penyelenggara / Organizer
Konosuke Mizuta	<i>The Impact of ESG on The Performance of The Financial Services Industry</i>	27 Jan 2022	Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
	<i>The Impact of Climate Change on Financing Aspects and Insurance Premiums Based on Green Economy</i>	24 Feb 2022	Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Andi Harjono	Kesiapan Industri Jasa Keuangan Dalam Mendukung Literasi Digital Konsumen Jasa Keuangan Readiness of the Financial Services Industry in Supporting Financial Services Consumer Digital Literacy	13 Jan 2022	Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
	<i>The Impact of ESG on The Performance of The Financial Services Industry</i>	27 Jan 2022	Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
	Memperkuat Industri Jasa Keuangan Melalui Bela Negara Strengthening the Financial Services Industry through Defending the State	3 Feb 2022	Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
	<i>Indonesia - Japan Cybersecurity Webinar 2022</i>	9 Feb 2022	Japan Information Technology Services Industry Association ("JISA")
	Perlindungan Konsumen Terhadap Pinjol dan Investasi Ilegal Consumer Protection Against Online Loans and Illegal Investments	10 Feb 2022	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia ("LPPPI")
	Dari Bank Hybrid Menuju Bank Digital From Hybrid Bank To Digital Bank	17 Feb 2022	Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
	<i>The Impact of Climate Change on Financing Aspects and Insurance Premiums Based on Green Economy</i>	24 Feb 2022	Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
	Tantangan & Mitigasi Kejahatan Serta Peningkatan Keamanan Siber di Industri Jasa Keuangan Crime Challenges & Mitigation and Increasing Cybersecurity in the Financial Services Industry	10 Mar 2022	Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Peluang dan Tantangan Implementasi <i>Blockchain</i> Diindustri Jasa Keuangan Opportunities and Challenges of Blockchain Implementation in the Financial Services Industry	24 Mar 2022	Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")	

Pelatihan Direksi / The Board of Directors Trainings

Nama / Name	Pelatihan / Trainings	Tanggal / Date	Penyelenggara / Organizer
	Peran <i>Regtech</i> dalam Mendukung Kinerja Lembaga Jasa Keuangan The Role of <i>Regtech</i> in Supporting the Performance of Financial Services Institutions	31 Mar 2022	Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
	<i>Preventing & Combating Financial Crime in Financial Services Industry</i>	9 Jun 2022	Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
	Peran Digitalisasi dalam Mendorong Peningkatan Inklusi Keuangan The Role of Digitalization in Increasing Financial Inclusion	23 Jun 2022	Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
	Penanganan Insiden Keamanan Siber di Sektor Jasa Keuangan Handling Cyber Security Incidents in Financial Services Sector	18 Aug 2022	Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
	Menciptakan Stabilitas Sistem Keuangan Melalui Pengembangan IJK yang Sehat, Efisien & Berintegritas Creating Financial System Stability Through the Development of a Healthy, Efficient & Integrity FSI	4 Nov 2022	Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Ade Rafida Saulina	<i>The Impact of ESG on The Performance of The Financial Services Industry.</i>	27 Jan 2022	Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
	Dari Bank Hybrid Menuju Bank Digital From Hybrid Bank to Digital Bank	17 Feb 2022	Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
	<i>Building Resilient Sustainable Finance</i>	18 Feb 2022	Bank Indonesia
	Arah Kebijakan Indonesia dan Tantangan Dalam Mewujudkan <i>Green Economy</i> Indonesia’s Policy Directions and Challenges in Realizing a Green Economy	22- 23 Feb 2022	Bisnis Indonesia
	<i>The Impact of Climate Change on Financing Aspects and Insurance Premiums Based on Green Economy</i>	24 Feb 2022	Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
	Kesiapan Industri Jasa Keuangan Syariah Dalam Mendukung Sustainable Finance Readiness of The Sharia Financial Services Industry in Supporting Sustainable Finance	17 Mar 2022	Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Shunsuke Kojima	<i>The Impact of Climate Change on Financing Aspects And Insurance Premiums Based on Green Economy</i>	24 Feb 2022	Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
	<i>How To Measure Successful Digital Financial Services/ Return on Digital Investment</i>	4 Aug 2022	Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Yudi Gustiawan	<i>The Impact of ESG on The Performance of The Financial Services Industry</i>	27 Jan 2022	Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
	Memperkuat Industri Jasa Keuangan Melalui Bela Negara Strengthening the Financial Services Industry through Defending the State	3 Feb 2022	Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
	Dari Bank Hybrid Menuju Bank Digital From Hybrid Bank To Digital Bank	17 Feb 2022	Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
	<i>The Impact of Climate Change on Financing Aspects And Insurance Premiums Based on Green Economy</i>	24 Feb 2022	Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
	Peluang dan Tantangan Implementasi <i>Blockchain</i> Diindustri Jasa Keuangan Opportunities and Challenges of Blockchain Implementation in the Financial Services Industry	24 Mar 2022	Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
	Peran Digitalisasi dalam Mendorong Peningkatan Inklusi Keuangan The Role of Digitalization in Increasing Financial Inclusion	23 Jun 2022	Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
	<i>Credit Analysis of Social and Environmental Risks</i>	3 - 4 Nov 2022	PT Sarana Mutu Edukasi Indonesia

Prosedur dan Dasar Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Procedure and Basis for Determining the Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

Prosedur dan Dasar Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Prosedur dan dasar penetapan remunerasi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Menelaah remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industri pembiayaan.
2. Dengan memperhitungkan kinerja Perseroan dan melakukan penilaian secara mandiri oleh Dewan Komisaris, selanjutnya, disampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk dilakukan pembahasan dan menyiapkan rekomendasi.
3. Rekomendasi disampaikan kepada Komisaris Utama untuk dibahas lebih lanjut dan disetujui oleh Pemegang Saham Pengendali berdasarkan Keputusan RUPST memberikan kewenangan kepada Pemegang Saham Pengendali.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris sudah termasuk fasilitas lain dalam bentuk natura.

Procedure and Basis for Determination of Commissioners Remuneration

The procedure and basis for determining the remuneration of the Board of Commissioners are as follows:

1. Review the remuneration prevailing in the industry in accordance with the business activities of similar companies and the business scale of Companies in the financing industry.
2. By taking into account the Company's performance and conducting an independent assessment by the Board of Commissioners, then, submitted to the Nomination and Remuneration Committee for discussion and preparing recommendations.
3. Recommendations are submitted to the President Commissioner for further discussion and approval by the Controlling Shareholders based on the AGMS Resolution authorizing the Controlling Shareholders.

The Board of Commissioners Remuneration

Remuneration for all members of the Board of Commissioners includes other facilities in kind.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners Remuneration Structure		
Jumlah Dewan Komisaris Number of the Board of Commissioners	Remunerasi*) Remuneration*)	Fasilitas lain dalam bentuk Natura**) Benefit in Kind**)
3	Rp802,247,660,-	Rp42,376,565,-

Keterangan:

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura

**) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya

***) Remunerasi tersebut sudah termasuk fasilitas lain dalam bentuk natura

Description:

*) Includes salaries and other fixed income: benefits, stock-based compensation, bonus and other benefit in kind.

**) Housing, transportation, health insurance, etc.

***) Said remuneration also included other facilities in the form of natura

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam satu tahun Remuneration Amount Per Person in one year	Jumlah Dewan Komisaris Number of the Board of Commissioners
Di atas Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) Above Rp. 2,000,000,000 (two billion rupiah)	-
Di atas Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Above IDR 1,000,000,000 (one billion rupiah)	-
Di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) From Rp. 500,000,000 (five hundred million rupiah) to Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah)	-
Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke bawah Below Rp 500,000,000 (five hundred million rupiah)	3

Remunerasi yang diperoleh oleh Dewan Komisaris sudah meliputi fasilitas lain dalam bentuk natura, ada 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang mendapatkan remunerasi dengan nilai di bawah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun.

The remuneration received by the Board of Commissioners included other facilities in the form of natura, there are 3 members of the Board of Commissioners who received remunerations with the value worth below Rp500,000,000 (five hundred million rupiah) in one year.

Prosedur dan Dasar Penetapan Remunerasi Direksi

Prosedur dan dasar penetapan remunerasi Direksi adalah sebagai berikut:

- Menelaah remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industri pembiayaan.
- Dengan memperhatikan inflasi, kondisi keuangan Perseroan dan memperhitungkan kinerja dan kontribusi tiap-tiap individu, dilakukan pembahasan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menyiapkan rekomendasi.
- Rekomendasi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dibahas lebih lanjut dan disetujui, berdasarkan Keputusan RUPST, dimana memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris.

Struktur Remunerasi Direksi

Remunerasi bagi seluruh anggota Direksi sudah termasuk fasilitas lain dalam bentuk natura.

Procedure and Basis for Determination of the Board of Directors Remuneration

The procedure and basis for determining the remuneration of the Board of Directors are as follows:

- Review the prevailing remuneration in the industry in accordance with the business activities of similar companies and the business scale of Company in the financing industry.
- By taking into account inflation, the Company's financial condition and taking into account the performance and contribution of each individual, a discussion is conducted by the Nomination and Remuneration Committee to prepare recommendations.
- Recommendations are submitted to the Board of Commissioners for further discussion and approval, based on the AGMS Resolution authorizing the Board of Commissioners.

Structure The Board of Directors Remuneration

Remuneration for all members of the Board of Directors includes other facilities in kind.

Struktur Remunerasi Direksi Board of Directors Remuneration Structure		
Jumlah Direksi Number of the Board of Directors	Remunerasi*) Remuneration*)	Fasilitas lain dalam bentuk Natura**) Benefit in Kind**)
5	Rp7,421,152,972,-	Rp226,111,163,-

Keterangan:

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura

**) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya

***) Remunerasi tersebut sudah termasuk fasilitas lain dalam bentuk natura

Description:

*) Includes salaries and other fixed income: benefits, stock-based compensation, bonus and other benefit in kind.

**) Housing, transportation, health insurance, etc.

***) Said remuneration also included other facilities in the form of natura

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam satu tahun Remuneration Amount Per Person in one year	Jumlah Direksi Number of the Board of Directors
Di atas Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) Above Rp. 2,000,000,000 (two billion rupiah)	2
Di atas Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Above IDR 1,000,000,000 (one billion rupiah)	-
Di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) From Rp. 500,000,000 (five hundred million rupiah) to Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah)	3
Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke bawah Below Rp 500,000,000 (five hundred million rupiah)	-

Remunerasi yang diperoleh oleh anggota Direksi sudah meliputi fasilitas lain dalam bentuk natura, ada 2 orang anggota Direksi yang mendapatkan remunerasi dengan nilai di atas Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dalam satu tahun dan 3 orang anggota Direksi yang mendapatkan remunerasi dengan nilai diatas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

The remuneration received by the members of the Board of Directors also included other facilities in the form of natura, there are 2 members of the Board of Directors who received remunerations with the value above Rp2,000,000,000,- (two billion rupiah) in one year and there are 3 members of the Board of Directors who received remunerations with the value above Rp500,000,000,- (five hundred million rupiah) to Rp1,000,000,000,- (one billion rupiah).

Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris Committees Under the Board of Commissioners

Dalam mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris didukung oleh organ pendukung yaitu :

1. Komite Audit
2. Komite Nominasi dan Remunerasi
3. Komite Pemantau Risiko

Sepanjang 2022, Komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik, sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.

In supporting the effective implementation of duties and responsibilities, the Board of Commissioners is supported by supporting organs, namely:

1. Audit Committee
2. Nomination and Remuneration Committee
3. Risk Monitoring Committee

Throughout 2022, the Committees under the Board of Commissioners have performed their work well, in accordance with their respective functions and duties.

Komite Audit Audit Committee

Komite Audit adalah komite yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.

Periode dan Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Ketentuan yang berlaku menjelaskan bahwa masa jabatan Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 dan Piagam Komite Audit, serta dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Masa tugas anggota komite yang diangkat di antara masa jabatan Dewan Komisaris akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris tersebut.

Independensi Komite Audit

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta bekerja berdasarkan Pedoman Kerja Komite Audit yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Independensi anggota Komite Audit Perseroan, dapat dilihat dari data hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, dan kepemilikan saham pada perusahaan pembiayaan lainnya dari tiap-tiap anggota Komite Audit, dimana tiap-tiap anggota tidak memiliki hubungan afiliasi.

Piagam Komite Audit

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dari Komite Audit, maka Perseroan telah menyusun Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 009/BOC-MLI/LEGAL/IX/2022 tanggal 26 September 2022 yang dapat diakses melalui *website* Perseroan.

Dasar Hukum

- POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014

The Audit Committee is a committee tasked with assisting the Board of Commissioners in monitoring and ensuring the effectiveness of the internal control system and the implementation of the duties of internal auditors and external auditors by monitoring and evaluating the planning and implementation of audits in order to assess the adequacy of internal controls including the financial reporting process.

Period and Term of Office of the Audit Committee Members

The applicable provisions explain that the term of office of the Audit Committee may not exceed the term of office of the Board of Commissioners in accordance with POJK No. 55/POJK.04/2015 and the Audit Committee Charter, and may be re-elected for only one subsequent period. The term of office of committee members appointed between the terms of office of the Board of Commissioners will end at the same time as the end of the term of office of the Board of Commissioners.

Audit Committee Independence

The Audit Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities and works based on the Audit Committee Charter been approved by the Board of Commissioners. The independence of members of the Company's Audit Committee is proven with the data of family relations, finance, management, and share ownership in other financing companies that shows that all members of the Committee have no affiliation.

Audit Committee Charter

In supporting the implementation of the duties of the Audit Committee, the Company has prepared an Audit Committee Charter based on the Board of Commissioners Decree Number 009/BOC-MLI/LEGAL/IX/2022 dated 26 September 2022 which can be accessed through the Company's website.

Legal Basis

- POJK No. 55 / POJK.04 / 2015 concerning the Formation and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee.
- POJK No. 33 / POJK.04 / 2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
- The Financial Services Authority Regulation Number 30/

tanggal 19 November 2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi perusahaan pembiayaan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tanggal 29 April 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi perusahaan pembiayaan

- Anggaran Dasar Perseroan tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

POJK.05/2014 dated 19 November 2014 concerning Good Corporate Governance for finance company jo. the Financial Services Authority Regulation Number 29/POJK.05/2020 dated 29 April 2020 concerning Changes of The Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.05/2014 dated 19 November 2014 concerning Good Corporate Governance for finance company

- The Company's Articles of Association concerning the duties and authorities of the Board of Commissioners.

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan Financial Relation with							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Komite Audit / Audit Committee								
Mohammad Syahrial		√		√		√		√
Gregory O.K. Ongko		√		√		√		√
Bondan Anugrah*		√		√		√		√
Brantas**		√		√		√		√

Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Family Relation with							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Komite Audit / Audit Committee								
Mohammad Syahrial		√		√		√		√
Gregory O.K. Ongko		√		√		√		√
Bondan Anugrah*		√		√		√		√
Brantas**		√		√		√		√

Nama Name	Kepengurusan dan Kepemilikan di Perusahaan Pembiayaan lain Management and Ownership in Other Financing Companies					
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As a Member of Board of Commissioners		Sebagai Anggota Direksi As a Member of Board of Directors		Sebagai Pemegang Saham As a Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Komite Audit / Audit Committee						
Mohammad Syahrial		√		√		√
Gregory O.K. Ongko		√		√		√
Bondan Anugrah*		√		√		√
Brantas**		√		√		√

*Masa jabatan telah berakhir sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.003/BOC-MLI/LEGAL/III/23 tentang penetapan anggota Komite Audit yang berlaku efektif sejak 1 April 2023

*The term of office has ended effectively from 1 April 2023 in accordance with the Board of Commissioners Decree of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.003/BOC-MLI/LEGAL/III/23 regarding the appointment of members of the Audit Committee

**Anggota Komite Audit yang efektif menjabat sejak tanggal 1 April 2023 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.003/BOC-MLI/LEGAL/III/23 tentang penetapan anggota Komite Audit

**Member of the Audit Committee who have served effectively since April 1, 2023 based on a Board of Commissioners Decree of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.003/BOC-MLI/LEGAL/III/23 regarding the appointment of members of the Audit Committee

Persyaratan Keanggotaan

Berpatokan pada Piagam Komite Audit yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris, anggota Komite Audit memiliki beberapa persyaratan, sebagai berikut:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
6. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
7. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan setelah diperoleh saham tersebut.
9. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.
10. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Audit

Terkait fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi :
 - a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Member's Requirements

Based on the Audit Committee Charter established by the Board of Commissioners, the Audit Committee members have several requirements, as follows:

1. Must have high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with the field of work, and be able to communicate well.
2. Must understand financial reports, company business especially those related to the services or business activities of Issuers or Public Companies, audit processes, risk management, and laws and regulations in the Capital Market sector as well as other relevant laws and regulations.
3. Willing to improve competency continuously through education and training.
4. Must have at least 1 (one) member with educational background and expertise in accounting and finance.
5. Not working in a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, Public Appraisal Service Office or other party providing assurance services, non assurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Issuer or Public Company concerned within 6 (six) last month.
6. Not working or having the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for the Independent Commissioner.
7. Does not own shares directly or indirectly in Issuers or Public Companies.
8. In the event that a member of the Audit Committee acquires shares of an Issuer or Public Company, either directly or indirectly as a result of a legal event, the shares must be transferred to another party within a maximum period of 6 (six) months after the shares were acquired.
9. Does not have affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Main Shareholders of Issuers or Public Companies.
10. Does not have a business relationship, either directly or indirectly, related to the business activities of the Issuer or Public Company.

Duties, Responsibilities and Authority of the Audit Committee

Regarding its function, the Audit Committee has duties and responsibilities, as follows:

1. The Audit Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities.
2. In carrying out its functions, the Audit Committee has duties and responsibilities that at least include :
 - a. Reviewing the financial information that will be issued by the Issuer or Public Company to the public and/or the authorities, including financial reports, projections, and other reports related to the financial information of the Issuer or Public Company.

- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit memiliki wewenang, sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Susunan, Profil dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Audit

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/BOC-VMF/LEGAL/III/21 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Audit maka susunan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut :

- b. Reviewing compliance with laws and regulations related to the activities of the Issuer or Public Company.
- c. Provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the accountant on the services provided.
- d. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an Accountant based on independence, scope of assignment, and service fees.
- e. Reviewing the implementation of the audit by the internal auditor and supervising the implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of the internal auditor.
- f. Reviewing the risk management implementation activities carried out by the Board of Directors, if the Issuer or Public Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners.
- g. Reviewing complaints related to the accounting and financial reporting processes of Issuers or Public Companies.
- h. Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest in Issuers or Public Companies.
- i. Maintain the confidentiality of documents, data and information of Issuers or Public Companies.

In carrying out its duties, the Audit Committee has the following authorities

- a. Access documents, data, and information of Issuers or Public Companies regarding employees, funds, assets, and necessary company resources.
- b. Communicate directly with employees, including the Board of Directors and those who carry out the functions of internal audit, risk management, and Accountants regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee.
- c. Involve independent parties other than members of the Audit Committee as needed to assist in carrying out their duties (if needed).
- d. Carry out other powers given by the Board of Commissioners.

Composition, Profile and Work Experience of Audit Committee Members

In accordance with the Decree of the Board of Commissioners of No. 003/BOC-VMF/LEGAL/III/21 concerning the Determination of the Audit Committee Membership, the composition of the Audit Committee members is as follows:

MOHAMMAD SYAHRAL

Ketua Komite Audit / Chairman of the Audit Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris.

His profile is available in the Board of Commissioners Profile.

GREGORY O.K. ONGKO

Anggota Komite Audit / Member of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Memperoleh gelar sarjana B.SB.A. *Accounting dari Creighton University*, Amerika pada tahun 1982, memperoleh gelar master M.B.A Business Management dari Creighton University, Amerika pada tahun 1984, dan memperoleh gelar master M.B.A *Management Information System* dari University of Dallas, Amerika pada tahun 1986.

Indonesian citizen, 61 years old. He/She obtained a B.SB.A. degree in Accounting at Creighton University, USA in 1982. He obtained an M.B.A Business master's degree in Management at Creighton University, USA in 1984, and finally he obtained an M.B.A master's degree in Management Information System at University of Dallas, USA in 1986.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2020 - to date *Member of the Audit Committee*
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk*

2012 – to date *Co-Founder* Vickery Christian Academy
Yayasan Pendidikan Vickery

2011 *VP, Finance Accounting, HRD GA*
PT Kabelindo Murni Tbk

2002 – 2010 *Co-Founder* Morning Star Academy
Yayasan Bintang Pagi
PT Trivium Konsultan Pendidikan

2003 – 2006 *Property Consultant, Franchise Owner*
Paddy's Property

2002 – 2004 *Co-Owner*
Eurocafe Restaurant Food Outlet

1999 – 2001 *Division Head - Investor Relations*
PT Tunas Sepadan Investama

1999 *General manager/Division Head*
Asia Plup & Paper Company

1998 *Operation Director*
PT Hexa Prakarsa Utama

1986 – 1998 *General Manager – Marketing Division*
Bentala Sanggrahan Group

1995 – 1996 *Marketing Director*
Rainbow Hills Development

1994 – 1995 *Administration & Resources Manager*
Mega Guna Group, Holding Company

1988 – 1994 *Market Development Representative*
IBM Indonesia

1988 *Internal Auditor*
Arco Indonesia Incorporated

1987 – 1988 *Financial Officer*
Robert S. Allan and Associates, Inc

1985 – 1987 *Auditor*
Hawthorne Suites

*) Terhitung sejak tanggal 24 September 2022, PT Verena Multi Finance Tbk telah berubah nama menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

*) As of September 24 2022, PT Verena Multi Finance Tbk has changed its name to PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

BONDAN ANUGRAH*

Anggota Komite Audit / Member of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Trisakti, pada tahun 1998.

Indonesian citizen, 45 years old. Obtained a degree in economics from Trisakti University, in 1998.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2016 – 2023 *Member of the Audit Committee*
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk**

2013 – to date *Finance, Tax & Accounting Manager*
PT Sekawan Intiperkasa

2011 – 2013 *Finance & Accounting Manager*
PT Cendana Wangi Energy

2008 – 2011 *Finance & Accounting Manager*
PT Global Madya Kencana

2004 – 2008 *Accounting Section Head*
PT Verena Oto Finance

2000 – 2004 *Accounting Supervisor*
PT Dos Ni Roha

*) Masa jabatan telah berakhir sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.003/BOC-MLI/LEGAL/III/23 tentang penetapan anggota Komite Audit yang berlaku efektif sejak 1 April 2023

*) The term of office has ended effectively from 1 April 2023 in accordance with the Board of Commissioners Decree of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.003/BOC-MLI/LEGAL/III/23 regarding the appointment of members of the Audit Committee

**) Terhitung sejak tanggal 24 September 2022, PT Verena Multi Finance Tbk telah berubah nama menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

**) As of September 24 2022, PT Verena Multi Finance Tbk has changed its name to PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Pada tanggal 31 Maret 2023 telah terjadi perubahan susunan anggota Komite Audit sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.003/BOC-MLI/LEGAL/III/23 tentang penetapan anggota Komite Audit yang berlaku efektif sejak 1 April 2023, maka susunan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

On March 31, 2023 there has been a change in the composition of the members of the Audit Committee in accordance with the Decree of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.003/BOC-MLI/LEGAL/III/23 concerning the appointment of members of the Audit Committee which is effective from April 1, 2023, then The composition of the members of the Audit Committee is as follows:

MOHAMMAD SYAHRIAL

Ketua Komite Audit / Chairman of the Audit Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris.

His profile is available in the Board of Commissioners Profile.

GREGORY O.K. ONGKO

Anggota Komite Audit / Member of the Audit Committee

Profil beliau tersedia pada halaman sebelumnya.

His profile is available in the previous page.

BRANTAS*

Anggota Komite Audit / Member of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia, 39 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari STEI Indonesia, pada tahun 2007.

Indonesian citizen, 39 years old. Obtained his Bachelor of Accounting degree from STEI Indonesia, in 2007.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2023 – to date *Member of the Audit Committee*
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

2021 – to date *Investigation Auditor Manager*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk

2017 – 2021 *Investigation Auditor Manager*
PT Bank Syariah Mandiri

2013 – 2016 *General Auditor*
PT Bank Syariah Mandiri

2012 – 2013 *Supervisor Internal Auditor*
PT Graha Kerindo Utama

2011 – 2012 *Audit Manager*
Apotek Roxy Group

2010 – 2010 *Credit Marketing Officer*
PT Summit Oto Finance

2007 – 2010 *Senior Independent Control Unit*
PT Summit Oto Finance

2007 – 2007 *Junior Auditor*
Public Accountant Firm Dolly Bambang Sudarmadji & Dadang

*) Anggota Komite Audit yang efektif menjabat sejak tanggal 1 April 2023 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.003/BOC-MLI/LEGAL/III/23 tentang penetapan anggota Komite Audit

*) Member of the Audit Committee who have served effectively since April 1, 2023 based on a Board of Commissioners Decree of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.003/BOC-MLI/LEGAL/III/23 regarding the appointment of members of the Audit Committee

Pendidikan dan/atau Pelatihan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas anggota Komite Audit pada tahun 2022, Komite Audit Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan atas peraturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas hasil audit.

Education and/or Training

To improve the knowledge and quality of Audit Committee members in 2022, the Company's Audit Committee continues to keep abreast of applicable regulations. This is done to continuously improve the quality of audit results.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun 2022 tertuang dalam rapat-rapat berkala dan telah dipaparkan didalam pembahasan mengenai Rapat Komite Audit.

Implementation of Audit Committee Activities

The implementation of Audit Committee activities in 2022 is contained in regular meetings and has been described in the discussion of Audit Committee Meetings.

Rapat Komite Audit

Kebijakan mengenai pelaksanaan Rapat Audit dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Audit Committee Meeting

The policy regarding the implementation of the Audit Meeting can be described as follows:

1. The Audit Committee holds regular meetings at least 1 (one) time in 3 (three) months.
2. Audit Committee meetings can be held if attended by more than 1/2 (one half) of the total members.
3. Audit Committee meeting decisions are taken based on deliberation for consensus.
4. Each meeting of the Audit Committee is stated in the minutes of the meeting, including if there is a difference of opinion, which is signed by all members of the Audit Committee present and submitted to the Board of Commissioners.

Frekuensi Rapat Komite Audit

Audit Committee Meeting Frequency

Rapat Komite Audit / Audit Committee Meetings			
Nama / Name	Kehadiran / Attendance	Frekuensi / Frequency	Rasio Kehadiran / Attendance Ratio
Mohammad Syahril	5	5	100%
Gregory O.K. Ongko	5	5	100%
Bondan Anugerah*	5	5	100%
Brantas**	-	-	-

*) Masa jabatan telah berakhir sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.003/BOC-MLI/LEGAL/III/23 tentang penetapan anggota Komite Audit yang berlaku efektif sejak 1 April 2023

*) The term of office has ended effectively from 1 April 2023 in accordance with the Board of Commissioners Decree of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.003/BOC-MLI/LEGAL/III/23 regarding the appointment of members of the Audit Committee

**) Anggota Komite Audit yang efektif menjabat sejak tanggal 1 April 2023 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.003/BOC-MLI/LEGAL/III/23 tentang penetapan anggota Komite Audit

**) Member of the Audit Committee who have served effectively since April 1, 2023 based on a Board of Commissioners Decree of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.003/BOC-MLI/LEGAL/III/23 regarding the appointment of members of the Audit Committee

Uraian Rapat Komite Audit / Audit Committee Meetings Description		
No.	Tanggal / Date	Agenda / Program
1.	14 Feb 2022	Pembahasan hasil pemeriksaan Eksternal Audit BDO dengan Komite Audit untuk tahun buku 2021 Discussion of BDO External Audit results with the Audit Committee for the 2021 financial year
2.	18 Mar 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan hasil pemeriksaan Internal Audit per akhir Februari 2022 Discussion of Internal Audit examination results as of the end of February 2022 • Evaluasi atas pemeriksaan eksternal Audit tahun buku 2021 Evaluation of the external audit examination for the 2021 fiscal year • Analisa Laporan Keuangan per Februari 2022. Analysis of Financial Statements as of February 2022.
3.	03 Aug 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan hasil pemeriksaan Internal Audit Discussion of Internal Audit examination results • Analisa Laporan Keuangan per akhir Juli 2022 Analysis of Financial Statements as of the end of July 2022
4.	22 Oct 2022	Pertemuan komite Audit dengan Eksternal Audit Deloitte terkait pemaparan perencanaan Audit tahun buku 2022 Audit committee meeting with External Auditor (Deloitte) regarding the presentation of the Audit planning for the 2022 financial year
5.	27 Dec 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan hasil pencapaian & pemeriksaan Internal Audit tahun 2022 Presentation of results of Internal Audit achievements & inspections in 2022 • Penjelasan rencana kerja Internal Audit tahun 2023 Explanation of the Internal Audit Work Plan for 2023 • Analisa Laporan Keuangan per 30 November 2022 Analysis of Financial Statements as of 30 November 2022

Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination dan Remuneration Committee

Komite Nominasi & Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Periode Masa Jabatan Anggota Komite Nominasi & Remunerasi

Ketentuan yang berlaku menjelaskan bahwa masa jabatan Komite Nominasi & Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014 dan Pedoman Komite Nominasi & Remunerasi, serta dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Masa tugas anggota Komite yang diangkat di antara masa jabatan Dewan Komisaris akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris tersebut.

Independensi Komite Nominasi & Remunerasi

Komite Nominasi & Remunerasi bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta bekerja berdasarkan Pedoman Kerja Komite Nominasi & Remunerasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Independensi anggota Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan, dapat dilihat dari data hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, dan kepemilikan saham pada perusahaan pembiayaan lainnya dari tiap-tiap anggota Komite Nominasi & Remunerasi dimana tiap-tiap anggota tidak memiliki hubungan afiliasi.

The Nomination & Remuneration Committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners in assisting to carry out the functions and duties of the Board of Commissioners regarding the Nomination and Remuneration of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

Period and Term of Office of The Nomination & Remuneration Committee

The applicable provisions explain that the term of office of the Nomination & Remuneration Committee may not exceed the term of office of the Board of Commissioners in accordance with POJK No. 34/POJK.04/2014 and the Nomination & Remuneration Committee Charter, and may be re-elected for only one subsequent period. The term of office of Committee members appointed between the terms of office of the Board of Commissioners will end at the same time as the end of the term of office of the Board of Commissioners.

Nomination & Remuneration Committee Independence

Nomination & Remuneration Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities and works based on the Nomination & Remuneration Committee Charter been approved by the Board of Commissioners. The independence of members of the Company's Nomination & Remuneration Committee is proven with the data of family relations, finance, management, and share ownership in other financing companies that shows that all members of the Committee have no affiliation.

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan Financial Relation with							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Komite Nominasi & Remunerasi / Nomination & Remuneration Committee								
Mohammad Syahril		√		√		√		√
Takeshi Sasaki*		√		√		√		√
Rudyanto Adisoetjahja		√		√		√		√

*) Takeshi Sasaki memiliki hubungan afiliasi yang bersifat keuangan dengan Mizuho Leasing Co., Ltd., selaku Pemegang Saham Pengendali dan salah satu Pemegang Saham Utama. Saat ini Beliau menjabat sebagai International Business Administration Department di Mizuho Leasing Co., Ltd.

*) Takeshi Sasaki has a financial affiliation relationship with Mizuho Leasing Co., Ltd, as the Controlling Shareholder and one of the Main Shareholders. Currently he serves as International Business Administration Department at Mizuho Leasing Co., Ltd.

Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Family Relation with							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Komite Nominasi & Remunerasi / Nomination & Remuneration Committee								
Mohammad Syahril		√		√		√		√
Takeshi Sasaki		√		√		√		√
Rudyanto Adisoetjahja		√		√		√		√

Nama Name	Kepengurusan dan Kepemilikan di Perusahaan Pembiayaan lain Management and Ownership in Other Financing Companies					
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As a Member of Board of Commissioners		Sebagai Anggota Direksi As a Member of Board of Directors		Sebagai Pemegang Saham As a Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Komite Nominasi & Remunerasi / Nomination & Remuneration Committee						
Mohammad Syahril		√		√		√
Takeshi Sasaki		√		√		√
Rudyanto Adisoetjahja		√		√		√

Pedoman Komite Nominasi & Remunerasi

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dari Komite Nominasi & Remunerasi, maka Perseroan telah memiliki Pedoman Nominasi & Remunerasi yang dapat diakses melalui *website* Perseroan.

Dasar Hukum

- POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.05/2014 Tanggal 19 November 2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.05/2020 Tanggal 29 April 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.05/2014 Tanggal 19 November 2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan
- Anggaran Dasar Perseroan tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

Persyaratan Keanggotaan

Berpatokan pada Pedoman Komite Nominasi & Remunerasi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris, anggota Komite Nominasi & Remunerasi memiliki beberapa persyaratan, sebagai berikut:

- Komite Nominasi & Remunerasi merupakan anggota Dewan Komisaris.
- Komite Nominasi & Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggotanya adalah anggota Dewan Komisaris.
- Anggota Direksi tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi & Remunerasi.
- Anggota Komite Nominasi & Remunerasi diangkat oleh Keputusan Dewan Komisaris.
- Anggota Komite Nominasi & Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
- Anggota Komite Nominasi & Remunerasi, wajib: 1. Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik; 2. Memiliki pengetahuan yang baik dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia; dan 3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Nomination & Remuneration Committee Charter

In supporting the implementation of the duties of the Nomination & Remuneration Committee, the Company has a Nomination & Remuneration Charter which can be accessed through the Company's website.

Legal Basis

- POJK No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.
- POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
- The Financial Services Authority Regulation No.30/POJK.05/2014 dated 19 November 2014 concerning Good Corporate Governance for Finance Company jo. the Financial Services Authority Regulation No.29/POJK.05/2020 dated 29 April 2020 concerning Changes of The Financial Services Authority Regulation No.30/POJK.05/2014 dated November 19, 2014 concerning Good Corporate Governance for Finance Company
- The Company's Articles of Association concerning the duties and authorities of the Board of Commissioners.

Member's Requirements

Based on the Nomination & Remuneration Committee Charter established by the Board of Commissioners, members of the Nomination & Remuneration Committee have several requirements, as follows:

- The Nomination & Remuneration Committee is a member of the Board of Commissioners.
- The Nomination & Remuneration Committee is chaired by an Independent Commissioner and 2 (two) of its members are members of the Board of Commissioners.
- Members of the Board of Directors cannot be members of the Nomination & Remuneration Committee.
- Members of the Nomination & Remuneration Committee are appointed by a resolution of the Board of Commissioners.
- Members of the Nomination & Remuneration Committee are appointed for a specific term of office and may be reappointed.
- Nomination & Remuneration Committee members must: 1. Have integrity, morals, and good character; 2. Have good knowledge in the field of human resource management; and 3. Have adequate knowledge of laws and regulations in the field of labor and other related laws and regulations.

- g. Setiap anggota Komite Nominasi & Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Nominasi & Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya komite ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Dalam mekanisme pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki rincian tugas dan tanggung jawab sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 Tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi Komite Nominasi, sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan tugasnya komite ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Dalam mekanisme pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Terkait dengan fungsi Komite Nominasi, sebagai berikut:
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - b. Terkait dengan fungsi Komite Remunerasi, sebagai berikut:
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Struktur Remunerasi;
 - b) Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c) Besaran atas Remunerasi.
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi

- g. Each member of the Nomination & Remuneration Committee is prohibited from taking personal benefits either directly or indirectly from the Company's activities other than legitimate income.

Duties, Responsibilities and Authorities of the Nomination & Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee shall act independently in carrying out its duties. In carrying out its duties, this committee is responsible to the Board of Commissioners.

In the mechanism of implementing its duties, the Nomination and Remuneration Committee has detailed duties and responsibilities as also stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 34/POJK.04/2014 Dated December 8, 2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, as follows:

Related to the functions of the Nomination Committee, as follows:

1. The Nomination and Remuneration Committee is required to act independently in carrying out its duties.
2. In carrying out its duties, this committee is responsible to the Board of Commissioners.
3. In the mechanism of carrying out its duties, the Nomination and Remuneration Committee has detailed duties and responsibilities as follows:
 - a. Related to the function of the Nomination Committee, as follows:
 1. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - a. Composition of the positions of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - b. Policies and criteria required in the nomination process; and
 - c. Performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 2. Assist the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or members the Board of Commissioners is based on the benchmarks that have been prepared as evaluation material;
 3. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding capability development programs members of the Board of Directors and/ or members of the Board of Commissioners; and
 4. Provide proposals for candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or members of the Board Commissioner to be submitted to the GMS.
 - b. In relation to the functions of the Remuneration Committee, as follows:
 1. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - a) Remuneration Structure;
 - b) Policy on Remuneration; and
 - c) Amount of Remuneration.
 2. Assist the Board of Commissioners in assessing performance in accordance with the remuneration

yang di terima tiap – tiap anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.

received by each member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners.

Susunan, Profil dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Nominasi & Remunerasi

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004/BOC-VMF/LEGAL/III/21 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Nominasi & Remunerasi maka susunan anggota Komite Nominasi & Remunerasi adalah sebagai berikut :

MOHAMMAD SYAHRIAL

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris.
His profile is available in the Board of Commissioners Profile.

Composition, Profile and Work Experience of Nomination & Remuneration Committee Members

In accordance with the Decree of the Board of Commissioners No. 004/BOC-VMF/LEGAL/III/21 dated 31 March 2021 concerning Determination of Composition of Members of the Nomination & Remuneration Committee, the composition of members of the Nomination & Remuneration Committee is as follows:

TAKESHI SASAKI

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris.
Her profile is available in the Board of Commissioners Profile.

RUDYANTO ADISOETJAHJA

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Member of the Nomination and Remuneration Committee

Warga negara Indonesia, 54 tahun, memperoleh gelar sarjana Arsitektur dari Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1993.

Indonesian citizen, 54 years old, obtained a bachelor's degree in Architecture from the Indonesian Christian University in 1993.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2021 – to date Head of Human Resources & General Affair Division
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk*

2013 – 2015 Head of Human Resources & General Affair Division
PT Verena Multi Finance Tbk*

2018 – 2021 Head of Human Resources Operation & General Affair Division
PT Verena Multi Finance Tbk*

2011 – 2012 Head of Human Resources & General Affair Division
PT HD Finance (now PT Radana Bhaskara Finance Tbk)

2017 – 2018 Head of Human Resources & General Affair Division
PT Verena Multi Finance Tbk*

2008 – 2011 Human Resources & General Affair Manager
PT Tumbakmas Niagasakti

2015 – 2017 Head of Marketing & Business Development Division
PT Verena Multi Finance Tbk*

1994 – 2007 Regional Manager Indonesia Bagian Barat & Human Resources Development Manager
PT Rodamas

*) Terhitung sejak tanggal 24 September 2022, PT Verena Multi Finance Tbk telah berubah nama menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
*) As of September 24 2022, PT Verena Multi Finance Tbk has changed its name to PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Pendidikan dan/atau Pelatihan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan atas peraturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas kinerja yang dihasilkan.

Education and /or Training

To improve the knowledge and quality of the Nomination and Remuneration Committee members in 2022, the Company's Nomination and Remuneration Committee continues to follow the development of applicable regulations. This is done to continuously improve the quality of the resulting performance.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi & Remunerasi

Pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi & Remunerasi pada tahun 2022 tertuang dalam rapat-rapat berkala dan telah dipaparkan didalam pembahasan mengenai Rapat Komite Nominasi & Remunerasi.

The Implementation of Nomination & Remuneration Committee Activities

The implementation of the Nomination & Remuneration Committee activities in 2022 is contained in periodic meetings and has been described in the discussion of the Nomination & Remuneration Committee Meeting.

Rapat Komite Nominasi & Remunerasi

- Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite

Nomination & Remuneration Committee Meeting

- Nomination and Remuneration Committee meetings are held periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months.
- The Nomination and Remuneration Committee meeting can only be held if:
 - Attended by a majority of the members of the

Nominasi dan Remunerasi; dan

- b. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil melalui mekanisme yang diatur dalam pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
7. Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

Nomination and Remuneration Committee;

- b. and one of the majority of the members of the Nomination and Remuneration Committee as referred to in letter a is the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee.
3. Nomination and Remuneration Committee meeting decisions are made based on deliberation and consensus.
4. In the event that a decision based on deliberation and consensus is not reached, the decision is made based on a majority vote.
5. If in the decision making by voting occurs the same number of votes, decisions are taken through the mechanism regulated in the guidelines of the Nomination and Remuneration Committee.
6. In the event that there is a difference of opinion in the decision-making process, the difference of opinion must be contained in the minutes of the meeting along with the reasons for the difference of opinion.
7. The results of the Nomination and Remuneration Committee meeting must be stated in the minutes of the meeting and documented by the Issuer or Public Company
8. Minutes of the Nomination and Remuneration Committee meetings must be submitted in writing to the Board of Commissioners.

Frekuensi Rapat Komite Nominasi & Remunerasi

Nomination & Remuneration Committee Meeting Frequency

Rapat Komite Nominasi & Remunerasi / Nomination & Remuneration Committee Meetings			
Nama / Name	Kehadiran / Attendance	Frekuensi / Frequency	Rasio Kehadiran / Attendance Ratio
Mohammad Syahril	3	3	100%
Takeshi Sasaki	3	3	100%
Rudyanto Adisoetjahja	2	3	66,7%

Uraian Rapat Komite Nominasi & Remunerasi / Nomination & Remuneration Committee Meetings Description		
No.	Tanggal / Date	Agenda / Program
1.	18 Apr 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar penentuan honorarium anggota Dewan Komisaris Basis for determining the honorarium of members of the Board of Commissioners • Dasar penentuan gaji anggota Direksi Basis for determining the salary of members of the Board of Directors • Lainnya Other
2.	04 Aug 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), tanggal 29 Juli 2022, mengenai rekomendasi komite Resolution of the annual general meeting of shareholders (AGMS), dated July 29, 2022, regarding committee recommendations • Rekomendasi honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Recommendation of honorarium for members of the Board of Commissioners • Rekomendasi gaji untuk anggota Direksi Salary recommendation for members of the Board of Directors • Poin refreshment anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Refreshment points for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners • Lainnya Other
3.	15 Nov 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar penentuan struktur bonus untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun buku 2022 Basis for determining the bonus structure for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors for the financial year 2022 • Poin refreshment anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Refreshment points for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors

Uraian Rapat Komite Nominasi & Remunerasi / Nomination & Remuneration Committee Meetings Description

No.	Tanggal / Date	Agenda / Program
		<ul style="list-style-type: none"> Program pengembangan kemampuan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada tahun 2023 Capacity building program for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors in 2023 Kewajiban pelatihan atau seminar bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada tahun 2023 Training or seminar obligations for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors in 2023 Rencana tugas Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2023 Nomination and Remuneration committee task plan in 2023 Lainnya Others

Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait penerapan Manajemen Risiko.

Periode dan Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Ketentuan yang berlaku menjelaskan bahwa masa jabatan Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris, serta dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Masa tugas anggota Komite yang diangkat di antara masa jabatan Dewan Komisaris akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris tersebut.

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta bekerja berdasarkan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Independensi anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan, dapat dilihat dari data hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, dan kepemilikan saham pada perusahaan pembiayaan lainnya dari tiap-tiap anggota Komite Pemantau Risiko dimana tiap-tiap anggota tidak memiliki hubungan afiliasi.

Pedoman Komite Pemantau Risiko

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dari Komite Pemantau Risiko, maka Perseroan telah memiliki Pedoman Nominasi & Remunerasi yang dapat diakses melalui *website* Perseroan.

Dasar Hukum

- Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan OJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
- Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
- Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan

The Risk Monitoring Committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners in assisting the functions and duties of the Board of Commissioners regarding the implementation of Risk Management.

Period and Term of Office of The Risk Monitoring Committee Member

The prevailing regulations clarify that the term of office of the Risk Monitoring Committee shall not exceed the term of office of the Board of Commissioners, and may be re-elected only for one subsequent period. The term of office of Committee members appointed between the terms of office of the Board of Commissioners will end at the same time as the end of the term of office of the Board of Commissioners.

Risk Monitoring Committee Independence

Risk Monitoring Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities and works based on the Risk Monitoring Committee Charter been approved by the Board of Commissioners. The independence of members of the Company's Risk Monitoring Committee is proven with the data of family relations, finance, management, and share ownership in other financing companies that shows that all members of the Committee have no affiliation.

Risk Monitoring Committee Charter

In supporting the implementation of the duties of the Risk Monitoring Committee, the Company has a Nomination & Remuneration Charter which can be accessed through the Company's website.

Legal Basis

- OJK Regulation Number 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to OJK Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Governance for Financing Companies.
- OJK Regulation Number 44/POJK.05/2020 concerning Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions.
- OJK Regulation Number 28/POJK.05/2020 concerning Assessment of the Soundness of Non-Bank Financial Services Institutions.
- OJK Circular Letter Number 7/SEOJK.05/2021 concerning the Implementation of Risk Management for Financing

- Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Surat Edaran OJK Nomor 11/ SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- Anggaran Dasar Perseroan tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.
- Companies and Sharia Financing Companies.
- OJK Circular Letter Number 11/ SEOJK.05/2020 concerning Assessment of the Soundness Level of Financing Companies and Sharia Financing Companies.
- The Company's Articles of Association concerning the duties and authorities of the Board of Commissioners.

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan Financial Relation with							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Komite Pemantau Risiko / Risk Monitoring Committee								
Mohammad Syahril		√		√		√		√
Gregory O.K. Ongko		√		√		√		√
Hideki Takemoto*		√		√		√		√

Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Family Relation with							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Komite Pemantau Risiko / Risk Monitoring Committee								
Mohammad Syahril		√		√		√		√
Gregory O.K. Ongko		√		√		√		√
Hideki Takemoto*		√		√		√		√

Nama Name	Kepengurusan dan Kepemilikan di Perusahaan Pembiayaan lain Management and Ownership in Other Financing Companies					
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As a Member of Board of Commissioners		Sebagai Anggota Direksi As a Member of Board of Directors		Sebagai Pemegang Saham As a Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Komite Pemantau Risiko / Risk Monitoring Committee						
Mohammad Syahril		√		√		√
Gregory O.K. Ongko		√		√		√
Hideki Takemoto*		√		√		√

*) Masa jabatan telah berakhir sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.004/BOC-MLI/LEGAL/III/23 tentang penetapan anggota Komite Pemantau Risiko yang berlaku efektif sejak 1 April 2023

*) The term of office has ended effectively from 1 April 2023 in accordance with the Board of Commissioners Decree of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.004/BOC-MLI/LEGAL/III/23 regarding the appointment of members of the Risk Monitoring Committee

Persyaratan Keanggotaan

Berpatokan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta *best practices* yang diterapkan di Perusahaan Pembiayaan, anggota Komite Pemantau Risiko memiliki beberapa persyaratan, sebagai berikut:

- Persyaratan Umum**
 - Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
 - Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan Otoritas Jasa Keuangan, pasar modal, dan peraturan lainnya yang relevan.
 - Mampu bekerja sama dan menyediakan waktu yang

Member's Requirements

Based on the prevailing rules and regulations as well as best practices applied in Financing Companies, members of the Risk Monitoring Committee have several requirements, as follows:

- General Requirements**
 - Have good integrity, character and morals, adequate skills, knowledge and experience in accordance with their educational background, and be able to communicate well.
 - Have adequate knowledge of the regulations of the Financial Services Authority, capital markets, and other relevant regulations.
 - Able to cooperate and devote sufficient time to the

- cukup untuk melaksanakan tugasnya.
4. Tidak memiliki keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terhadap Perseroan.
- b. Persyaratan Kompetensi
1. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai Ketua.
 2. 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan/atau manajemen risiko yang berkedudukan sebagai anggota.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Pemantau Risiko

1. Komite Pemantau Risiko wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan tugasnya komite ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Dalam mekanisme pelaksanaan tugasnya, Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perseroan.
 - b. Melakukan evaluasi Pedoman Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi.
 - c. Melakukan evaluasi Laporan hasil penilaian sendiri terhadap tingkat kesehatan Perusahaan.

Susunan, Profil dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Pemantau Risiko

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/BOC-VMF/LEGAL/III/21 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko maka susunan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

MOHAMMAD SYAHRIAL

Ketua Komite Pemantau Risiko
Chairman of the Risk Monitoring Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris.
His profile is available in the Board of Commissioners Profile.

HIDEKI TAKEMOTO*

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Warga Negara Jepang, 55 tahun. Memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Kyoto, pada tahun 1989.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2019 – 2023 *Senior General Manager
Internal Audit, ICU, Business Risk Management,
Compliance, APU&PPT
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk***

2018 – 2019 *Deputy General Manager International
Department
IBJ Leasing Co. Ltd
(Now Mizuho Leasing, Co. Ltd.)*

2017 – 2018 *Senior Manager
Internal Audit Department
Mizuho Bank*

task.

4. Has no personal relationship that may cause a conflict of interest with the Company.

b. Competency Requirements

1. (one) Independent Commissioner who serves as Chairman.
2. (one) independent party with expertise in finance and/ or risk management who serves as a member.

Duties, Responsibilities and Authorities of the Risk Monitoring Committee

1. The Risk Monitoring Committee is required to act independently in carrying out its duties.
2. In carrying out its duties, this committee is responsible to the Board of Commissioners.
3. In the mechanism of carrying out its duties, the Risk Monitoring Committee has detailed duties and responsibilities as follows:
 - a. Evaluate the conformity between risk management policies and the implementation of Company policies.
 - b. Evaluating the Risk Management Guidelines prepared by the Board of Directors.
 - c. Evaluating the self-assessment report on the Company's soundness level.

Composition, Profile and Work Experience of Risk Monitoring Committee Members

In accordance with the Decree of the Board of Commissioners No. 005/BOC-VMF/LEGAL/III/21 dated March 31, 2021 concerning the Determination of the Members of the Risk Monitoring Committee, the composition Risk Monitoring Committee members are as follows:

GREGORY O.K. ONGKO

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Komite Audit.
His profile is available in the Audit Committee Profile.

Japanese citizen, 55 years old. Obtained a degree in law from Kyoto University, in 1989.

2014 – 2017 *Joint General Manager
International Corporate & Institute Business
Department
Mizuho Bank*

2011 – 2014 *Deputy President Director
PT Bank Mizuho Indonesia*

2008 – 2011 *Senior Manager, Asia Division
Mizuho Bank*

2006 – 2008 *Senior Manager New Delhi Branch
Mizuho Bank*

*Masa jabatan telah berakhir sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.004/BOC-MLI/LEGAL/III/23 tentang penetapan anggota Komite Pemantau Risiko yang berlaku efektif sejak 1 April 2023

*The term of office has ended effectively from 1 April 2023 in accordance with the Board of Commissioners Decree of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.004/BOC-MLI/LEGAL/III/23 regarding the appointment of members of the Risk Monitoring Committee

**Terhitung sejak tanggal 24 September 2022, PT Verena Multi Finance Tbk telah berubah nama menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
**As of September 24 2022, PT Verena Multi Finance Tbk has changed its name to PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Pada tanggal 31 Maret 2023 telah terjadi perubahan susunan anggota Komite Pemantau Risiko sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.004/BOC-MLI/LEGAL/III/23 tentang penetapan anggota Komite Pemantau Risiko yang berlaku efektif sejak 1 April 2023, maka susunan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

On March 31, 2023 there has been a change in the composition of the members of the Risk Monitoring Committee in accordance with the Decree of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.004/BOC-MLI/LEGAL/III/23 concerning the determination of members of the Risk Monitoring Committee which is effective from April 1, 2023, then the composition of the members of the Risk Monitoring Committee is as follows:

MOHAMMAD SYAHRAL

Ketua Komite Pemantau Risiko
Chairman of the Risk Monitoring Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris.
His profile is available in the Board of Commissioners Profile.

GREGORY O.K. ONGKO

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Komite Audit.
His profile is available in the Audit Committee Profile.

Pendidikan dan/atau Pelatihan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas anggota Komite Pemantau Risiko pada tahun 2022, Pemantau Risiko Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan atas peraturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas kinerja yang dihasilkan.

Education and/or Training

To improve the knowledge and quality of members of the Risk Monitoring Committee in 2022, the Company's Risk Monitor continues to follow developments in applicable regulations. This is done to continuously improve the quality of the resulting performance.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko pada tahun 2022 tertuang dalam rapat-rapat berkala dan telah dipaparkan di dalam pembahasan mengenai Rapat Komite Pemantau Risiko.

Implementation of Risk Management Committee Activities

The implementation of the Risk Monitoring Committee activities in 2022 is contained in regular meetings and has been described in the discussion of the Risk Monitoring Committee Meeting.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Kebijakan mengenai pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.
2. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
3. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko harus terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko harus dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite Pemantau Risiko harus dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
7. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.
8. Risalah rapat Komite Pemantau Risiko wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

Risk Monitoring Committee Meeting

The policy regarding the implementation of the Risk Monitoring Committee Meeting can be described as follows:

1. Risk Monitoring Committee meetings are held periodically at least 4 (four) times a year.
2. Meetings of the Risk Monitoring Committee can only be held if attended by at least 51% (fifty-one percent) of the total members of the Risk Monitoring Committee.
3. Risk Monitoring Committee meeting decisions are made based on deliberation and consensus.
4. In the event that a decision based on deliberation and consensus is not reached, the decision is made based on the majority vote.
5. The results of the meeting of the Risk Monitoring Committee must be stated in the minutes of the meeting and documented in accordance with the laws and regulations.
6. Dissenting opinions that occur in the Risk Monitoring Committee meeting must be clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons for the difference of opinion.
7. The results of the meeting of the Risk Monitoring Committee must be stated in the minutes of the meeting and documented by the Company.
8. Minutes of the Risk Monitoring Committee meeting must be submitted in writing to the Board of Commissioners.

Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Meeting Frequency

Rapat Komite Pemantau Risiko / Risk Monitoring Committee Meetings			
Nama / Name	Kehadiran / Attendance	Frekuensi / Frequency	Rasio Kehadiran / Attendance Ratio
Mohammad Syahril	4	4	100%
Gregory O.K. Ongko	4	4	100%
Hideki Takemoto*	4	4	100%

*Masa jabatan telah berakhir sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.004/BOC-MLI/LEGAL/III/23 tentang penetapan anggota Komite Pemantau Risiko yang berlaku efektif sejak 1 April 2023

*The term of office has ended effectively from 1 April 2023 in accordance with the Board of Commissioners Decree of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.004/BOC-MLI/LEGAL/III/23 regarding the appointment of members of the Risk Monitoring Committee

Uraian Rapat Komite Pemantau Risiko / Risk Monitoring Committee Meetings Description		
No.	Tanggal / Date	Agenda / Program
1.	25 Mar 2022	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Soundness Level Report Proyek CSA (<i>Control Self-Assessment</i>) CSA (Control Self-Assessment) Project
2.	28 Jun 2022	<ul style="list-style-type: none"> Update progres proyek CSA (<i>Control Self-Assessment</i>) CSA (Control Self-Assessment) Project progress updates Sosialisasi POJK No. 6/POJK.07/2022: Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Socialization of POJK No. 6/POJK.07/2022: Consumer and General Public Protection Within the Financial Services Sector (POJK Consumer Protection) Update penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan TI Update the implementation of Risk Management in the use of IT
3.	18 Oct 2022	<ul style="list-style-type: none"> Review Credit Scoring Credit Scoring Review Action Plan Peraturan OJK No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Action Plan to The OJK Regulation No.6/POJK.07/2022 on Consumer and General Public Protection Within the Financial Services Sector Piagam Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Charter
4.	22 Dec 2022	<ul style="list-style-type: none"> Update progres proyek CSA (<i>Control Self-Assessment</i>) CSA (Control Self-Assessment) Project progress updates Report APU PPT 2022 Report APU PPT 2022 Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Personal Data Protection Law

Komite Pendukung Pelaksanaan Tugas Direksi Supporting Committee for Implementing the Duties of the Board of Directors

Dalam mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi didukung oleh organ pendukung yaitu Komite Manajemen Risiko dan Komite Pengarah Teknologi Informasi.

In supporting the effective implementation of duties and responsibilities, the Board of Directors is supported by supporting organs, namely the Risk Management Committee and Information Technology Steering Committee.

Penilaian Kinerja Komite dan Unit Kerja yang Berada di Bawah Direksi Performance Assessment of Committees and Work Units under the Board of Directors

Direksi membentuk komite-komite di bawah Direksi untuk mendukung pelaksanaan tugas kepengurusannya. Komite-komite yang dibentuk diaktifkan sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan dan ketentuan regulasi, yang diharapkan dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi operasional. Direksi menilai bahwa selama 2022 komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif.

The Board of Directors established committees under the Board of Directors to support the implementation of its management duties. The established committees are activated in accordance with the Company's business needs and regulatory requirements, which are expected to create operational effectiveness and efficiency. The Board of Directors considers that during 2022 the committees have carried out their duties and responsibilities effectively.

Sepanjang tahun 2022, Komite Manajemen Risiko telah melakukan tinjauan dan evaluasi atas penerapan Manajemen Risiko serta menerima laporan profil risiko yang disusun dan disampaikan oleh fungsi manajemen risiko.

Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melakukan program pengembangan Teknologi Informasi serta melakukan pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi.

Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee

Sebagai implementasi dari POJK NO.44/POJK.05/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, maka pada tahun 2021 melalui Surat Keputusan Direksi Nomor DIR0013/SKD/VIII/2021 telah dibentuk Komite Manajemen Risiko Perseroan dengan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua

Direktur Utama

Anggota Tetap

- Seluruh anggota Direksi selain Direktur Utama
- Senior Manager Manajemen Risiko, Kepatuhan, APU-PPT, IA & IC
- Kepala Divisi Manajemen Risiko & Compliance
- Kepala Departemen Manajemen Risiko
- Kepala Departemen Audit Internal & IC

Anggota Tidak Tetap

- Deputi Direktur terkait
- Kepala Divisi dan Departemen terkait

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait Manajemen Risiko, yang paling sedikit meliputi :

1. Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko, termasuk tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
2. Melakukan perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko, antara lain menyempurnakan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Perseroan yang memengaruhi kecukupan pendanaan, profil risiko Perseroan, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi;
3. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti penyaluran pembiayaan yang dilakukan, pengambilan posisi risiko, atau pengambilan eksposur risiko yang melampaui *limit* yang telah ditetapkan; dan
4. Menerima laporan profil risiko yang disusun dan disampaikan oleh fungsi manajemen risiko.

Throughout 2022, the Risk Management Committee has conducted a review and evaluating the implementation of Risk Management as well as receiving risk profile reports prepared and delivered by the risk management function.

The Information Technology Steering Committee has implemented an Information Technology development program and monitored Information Technology performance and efforts to improve Information Technology performance.

As an implementation of POJK NO.44/POJK.05/2020 dated August 28, 2020 concerning the Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions, in 2021 through the Decree of the Board of Directors Number DIR0013/SKD/VIII/2021, the Company's Risk Management Committee was formed with the following membership:

Chairman

President Director

Permanent Member

- All members of the Board of Directors other than the President Director
- Senior Manager Risk Management, Compliance, APU-PPT, IA & IC
- Head of Risk Management & Compliance Division
- Head of Risk Management Department
- Head of Internal Audit & IC Department

Non-Permanent Member

- Related Deputy Director
- Head of related Divisions and Departments

The authority and responsibility of the Risk Management Committee is to provide recommendations to the President Director regarding Risk Management, which at least includes:

1. Develop policies, strategies, and guidelines for the implementation of Risk Management, including the level of Risk taken (*risk appetite*) and Risk tolerance (*risk tolerance*), Risk Management framework and contingency plans to anticipate the occurrence of abnormal conditions;
2. Make improvements or adjustments to the implementation of Risk Management based on the results of the evaluation of the implementation of Risk Management, including improving the Risk Management process periodically or incidentally as a result of a change in the Company's external and internal conditions that affect the adequacy of funding, the Company's Risk profile, and ineffective implementation Risk Management based on evaluation results;
3. Determine matters related to business decisions that deviate from normal procedures, such as disbursing financing, taking Risk positions, or taking Risk exposures that exceed the predetermined limit; and
4. Receive risk profile reports compiled and submitted by the Risk Management Function.

Selanjutnya pada tahun 2021 melalui Surat Keputusan Direksi Nomor DIR-0014/SKD/VIII/2021 Perseroan telah menetapkan Pemberlakuan Pedoman Manajemen Risiko yang akan menjadi panduan bagi penanggung jawab penerapan Manajemen Risiko di PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Furthermore, in 2021 through the Decree of the Board of Directors Number DIR-0014/SKD/VIII/2021 the Company has determined the Implementation of Risk Management Guidelines which will serve as a guide for those in charge of implementing Risk Management at PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk in carrying out their duties and responsibilities.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2022 Komite telah melakukan 4 (empat) kali rapat dengan tingkat kehadiran anggota tetap sebesar 100%.

Risk Management Committee Meetings

During 2022 the Committee has conducted 4 (four) meetings with a permanent member attendance rate of 100%.

Uraian Rapat Komite Manajemen Risiko / Risk Management Committee Meetings Description		
No.	Tanggal / Date	Agenda / Program
1.	07 Mar 2022	<ul style="list-style-type: none"> Matriks Risiko Risk Matrix Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan 2021 The Assessment Report of Soundness Level 2021
2.	11 Jul 2022	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi POJK No. 6/POJK.07/2022: Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen) Socialization of POJK No. 6/POJK.07/2022: Consumer and General Public Protection Within the Financial Services Sector (POJK Consumer Protection) Data Base/Sistem <i>Politically Exposed Person</i> ("PEP") Politically Exposed Person ("PEP") Database/System
3.	10 Oct 2022	<ul style="list-style-type: none"> Review Credit Scoring Credit Scoring Review Action Plan Peraturan OJK No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Action Plan to The OJK Regulation No.6/POJK.07/2022 on Consumer and General Public Protection Within the Financial Services Sector
4.	20 Dec 2022	<ul style="list-style-type: none"> Update progres proyek CSA (<i>Control Self-Assessment</i>) CSA (Control Self-Assessment) Project progress updates Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Personal Data Protection Law

Komite Pengarah Teknologi Informasi Information Technology Steering Committee

Sebagai implementasi dari POJK NO.4/POJK.05/2021 tertanggal 9 Maret 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, maka pada tahun 2022 melalui Surat Keputusan Direksi Nomor DIR-001/SKD/III/2022 telah dibentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan dengan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua

Direktur Utama

Anggota

- Seluruh Direktur
- Seluruh Deputi Direktur
- Senior Manager Manajemen Risiko, Kepatuhan, APU-PPT, IA & IC
- Seluruh Kepala Divisi
- Kepala Departemen Teknologi Informasi
- Kepala Departemen Manajemen Risiko
- Kepala Departemen Audit Internal & IC

As the implementation of POJK NO. 4/POJK.05/2021 dated March 9, 2021 concerning Implementation of Risk Management on the Use of Information Technology by Non-Bank Financial Services Institutions, then in 2022 through the Decree of the Board of Directors Number DIR- 001/SKD/III/2022 a Company Information Technology Steering Committee has been established with the following memberships :

Chairman

President Director

Member

- All Director
- All Deputy Director
- Senior Manager Risk Management, Compliance, APU-PPT, IA & IC
- All of the Division Head
- Head of Information Technology Department
- Head of Risk Management Department
- Head of Internal Audit & IC Department

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait Teknologi Informasi, yang paling sedikit meliputi :

1. Rencana pengembangan Teknologi Informasi yang sejalan dengan kegiatan usaha perusahaan;
2. Perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi;
3. Memastikan kesesuaian proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana pengembangan Teknologi Informasi;
4. Memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan proyek Teknologi Informasi yang disetujui;
5. Memastikan kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Perseroan;
6. Memastikan efektivitas mitigasi risiko atas investasi Perseroan pada sektor Teknologi Informasi agar investasi Perseroan pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Perseroan;
7. Melakukan pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi;
8. Melakukan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu; dan
9. Memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya Teknologi Informasi yang dimiliki Perseroan.

The authority and responsibility of the IT Steering Committee is to provide recommendations to the Board of Directors related to Information Technology, which at least includes:

1. Information Technology development plans that are in line with the company's business activities;
2. Formulation of Information Technology policies and procedures;
3. Ensure the conformity of the approved Information Technology projects with Information Technology development plans;
4. Ensure the conformity of the implementation of Information Technology projects with the approved Information Technology projects;
5. Ensure the conformity of Information Technology with the needs of management information systems as well as the needs of Company's business activities;
6. Ensure the effectiveness of risk mitigation on the company's investment in the Information Technology sector so that the Company's investment in the Information Technology sector will contribute to the achievement of Company's business objectives;
7. Monitoring of Information Technology performance and efforts to improve Information Technology performance;
8. Make efforts to resolve various problems related to Information Technology that cannot be resolved by Information Technology operator and user work units in and effective, efficient and timely manner; and
9. Ensure the adequacy and allocation of Information Technology resources owned by the Company.

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Selama tahun 2022 Komite telah melakukan 3 (tiga) kali rapat dengan tingkat kehadiran anggota tetap sebesar 100%.

Information Technology Steering Committee Meetings

During 2022 the Committee has conducted 3 (tiga) meetings with a permanent member attendance rate of 100%.

Uraian Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi / Information Technology Steering Committee Description

No.	Tanggal / Date	Agenda / Program
1.	25 Apr 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Gambaran KPTI Overview of ITSC • Rencana Proyek-Proyek 2022 Projects Plan in 2022
2.	24 Oct 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan untuk Penggunaan Perangkat Lunak Anti Pencucian Uang The Needs for The Use of Anti Money Laundering Software • Realisasi Proyek 2022 Projects 2022 Realization • Rencana Proyek 2023 Project 2023 Plan
3.	20 Dec 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Proyek Berjalan Running Projects • Perbaikan IT Cabang IT Branch Improvement • Sistem CBU CBU System • Rencana Proyek S1-2023 Project Plan S1-2023

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi. Sekretaris Perusahaan berada di bawah Direksi dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi atas permasalahan yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan kepatuhan atas ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, khususnya peraturan pasar modal, dan kegiatan lain yang merupakan agenda kegiatan resmi dari Perseroan.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan surat penunjukan No. DIR-001/TK-CORSEC/SKD/XII/21 tertanggal 1 Desember 2021, Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Fransisca Yuliana Gunawan.

Corporate Secretary is an individual in charge of a work unit that carries out the function of Corporate Secretary. The Corporate Secretary is appointed and dismissed based on the decision of the Board of Directors. The Corporate Secretary is subordinate to the Board of Directors and is responsible for the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors on issues related to Good Corporate Governance and compliance with the provisions of applicable laws and regulations, particularly capital market regulations, and other activities that constitute the official agenda of the Company.

Corporate Secretary Profile

In accordance to letter of appointment No. DIR-001/TK-CORSEC/SKDXII/21 dated December 1, 2021, Corporate Secretary is held by Fransisca Yuliana Gunawan.

FRANSISCA YULIANA GUNAWAN

Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia, 40 tahun, berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 1 Desember 2021. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, pada tahun 2006. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi lain, dan Pemegang Saham.

Indonesian citizen, 40 years old, domiciled in Jakarta. She has been appointed as Corporate Secretary since 1 December 2021. She obtained Bachelor of Economic from Tarumanagara University, Jakarta, Indonesia, in 2006. She has no affiliation with other Members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors and Shareholders.

Riwayat Pekerjaan Career History

2021 – to date	<i>Corporate Secretary, Corporate Strategic Planning Division Head & Investor Relation</i> PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk*	2012	<i>Corporate Finance</i> PT Victoria Securities Indonesia
2021	<i>Corporate Strategic Planning Department Head Investor Relation</i> PT Verena Multi Finance Tbk*	2011 – 2012	<i>Corporate Finance</i> PT Victoria Investama Tbk (f.k.a PT Victoria Sekuritas)
2016 – 2021	<i>Investor Relation</i> PT Verena Multi Finance Tbk*	2007 – 2011	<i>Corporate Finance</i> PT Kresna Graha Sekurindo Tbk.
2013 – 2015	<i>Corporate Secretary Section Head</i> PT Bank Victoria International Tbk		

*) Terhitung sejak tanggal 24 September 2022, PT Verena Multi Finance Tbk telah berubah nama menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

*) As of September 24 2022, PT Verena Multi Finance Tbk has changed its name to PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi dan tugas, di antaranya:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Functions and Duties of the Corporate Secretary

Referring to the Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, the Corporate Secretary has functions and duties, including:

1. Keeping abreast of capital market developments, especially the prevailing laws and regulations in the Capital Market.

2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs *website* Perseroan.
 - Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu.
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.
 - Pelaksanaan program orientasi bagi Direksi dan/ atau Dewan Komisaris Perseroan.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Memelihara dan menjamin komunikasi yang intensif dengan para investor.

Kegiatan Sekretaris Perusahaan Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, Sekretaris Perusahaan telah melakukan beberapa kegiatan, di antaranya:

1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 29 Juli 2022 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 19 September 2022.
2. Menyelenggarakan Paparan Publik Tahunan pada tanggal 2 Desember 2022.
3. Review dan melakukan sosialisasi peraturan baru yang diterbitkan oleh regulator di tahun 2022 (OJK dan BEI) dalam penerapan peraturan tersebut di Perseroan.
4. Memantau dan memperbaharui website Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan dan keterbukaan informasi kepada publik.
5. Menyiapkan dan melaporkan laporan berkala Perseroan, baik melalui surat maupun Laporan elektronik (*e-reporting* IDXnet dan SPE-OJK), kepada regulator (OJK dan BEI) serta kepada para pihak terkait.
6. Penyampaian keterbukaan informasi kepada publik yang disampaikan melalui surat atau Laporan elektronik (*e-reporting* IDXnet dan SPE-OJK) kepada para Pemangku Kepentingan dan Pemegang Saham.

Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2022, guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti pelatihan-pelatihan sebagai berikut :

2. Provide input to the Board of Directors and Board of Commissioners to comply with the provisions of laws and regulations in the capital market.
3. Assist the Board of Directors and Board of Commissioners in the implementation of corporate governance which includes:
 - Information disclosure to the public, including the availability of information on the Company's website.
 - Timely submission of reports to OJK.
 - Organization and documentation of the General Meeting of Shareholders.
 - Organization and documentation of Board of Directors and/or Board of Commissioners meetings.
 - Implementation of orientation program for the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.
4. As a liaison between the Company and shareholders, the Financial Services Authority, and other stakeholders.
5. Maintain and ensure intensive communication with investors.

Activities of the Corporate Secretary in 2022

Throughout 2022, the Corporate Secretary has carried out several activities, including:

1. Annual General Meeting of Shareholders on July 29, 2022 and Extraordinary General Meeting of Shareholders on September 19, 2022.
2. Held the Annual Public Expose on December 2, 2022.
3. Reviewed and socialized new regulations issued by regulators in 2022 (OJK and IDX) in the application of these regulations in the Company.
4. Monitored and updated the Company's website in accordance with regulatory requirements and information disclosure to the public.
5. Prepared and reported the Company's periodic reports, both by mail and electronic reports (*e-reporting* IDXnet and SPE-OJK), to regulators (OJK and IDX) and to related parties.
6. Submission of information disclosure to the public submitted by mail or electronic reports (*e-reporting* IDXnet and SPE-OJK) to Stakeholders and Shareholders.

Education and Training of Corporate Secretary

Throughout 2022, in order to improve knowledge and understanding in order to assist the implementation of duties and responsibilities, the Corporate Secretary has attended the following trainings:

Pelatihan Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary Trainings

Pelatihan / Trainings	Tanggal / Date	Penyelenggara / Organizer
Webinar <i>"The Impact of ESG on the Performance of the Financial Services Industry"</i>	Zoom 27 Jan 2022	Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Webinar <i>"The Impact of Climate Change on Financing Aspects and Insurance Premiums Based on Green Economy"</i>	Zoom 24 Feb 2022	Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Pendalaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Enhancement of the Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities	Zoom 24 Feb 2022	Indonesia Corporate Secretary Association ("ICSA")
Pendalaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Enhancement of the Financial Services Authority Regulation Number 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Transactions with Conflicts of Interest	Zoom 22 Mar 2022	Indonesia Corporate Secretary Association ("ICSA")
Pendalaman POJK 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik Enhancement of POJK 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies	Zoom 16 Jun 2022	Indonesia Corporate Secretary Association ("ICSA")
Workshop <i>"One Step Closer to Your Goals: Be a Good Negotiator & Lobbyist"</i>	Zoom 9 Sep 2022	Indonesia Corporate Secretary Association ("ICSA")
Mengkaji Dampak Implementasi PSAK Baru (71,72 dan 73) terhadap Laporan Keuangan Perusahaan Assessing the Impact of the New PSAK Implementation (71,72 and 73) to the Company's Financial Statements	Zoom 28 Sep 2022	Indonesia Corporate Secretary Association ("ICSA")

Unit Audit Internal

Internal Audit Unit

Unit Audit Internal merupakan unit independen internal yang membantu Dewan Komisaris dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, serta memastikan manajemen yang efektif dan transparan. Unit tersebut melakukan pemeriksaan, penilaian, evaluasi, dan memberikan rekomendasi berkaitan dengan kegiatan unit usaha dan sistem pengendalian internal.

Profil Kepala Audit Internal

Berdasarkan surat penunjukan oleh Direksi Perseroan No.002/HRD&GA/SKD//2020 tertanggal 15 Januari 2020, Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh:

The Internal Audit Unit is an internal independent unit that assists the Board of Commissioners in implementing GCG principles, as well as ensuring effective and transparent management. The unit conducts inspection, assessment, evaluation, and provides recommendations related to business unit activities and internal control systems.

Head of Internal Audit Profile

Based on the appointment letter by the Company's Board of Directors No.002/HRD&GA/SKD//2020 dated January 15, 2020, the Head of Internal Audit Unit is held by:

GUNTUR SUNARYO PUTRO

Kepala Unit Audit Internal / Head of Internal Audit

Warga negara Indonesia, 32 tahun, berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta tahun 2013.

Indonesian citizen, 32 years old, domiciled in Jakarta. Obtained a bachelor's degree in Economics from the Indonesian College of Economics, Jakarta in 2013.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2020 – to date	<i>Audit Internal Department Head</i> PT Verena Multi Finance Tbk*	2014 – 2016	<i>Audit Officer</i> PT Verena Multi Finance Tbk*
2019 – to date	<i>Independent Control Department Head</i> PT Verena Multi Finance Tbk*	2014	<i>Audit Officer</i> PT Ahad Detha Utama
2016 – 2019	<i>Internal Audit Section Head</i> PT Verena Multi Finance Tbk*		

*) Terhitung sejak tanggal 24 September 2022, PT Verena Multi Finance Tbk telah berubah nama menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
*) As of September 24 2022, PT Verena Multi Finance Tbk has changed its name to PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Pendidikan dan Pelatihan Internal Audit

Sepanjang tahun 2022, guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Internal Audit telah mengikuti pelatihan/seminar/workshop sebagai berikut:

Internal Audit Education and Training

Throughout 2022, in order to improve knowledge and understanding in order to assist the implementation of duties and responsibilities, Internal Audit has participated in the following training/seminars/workshops:

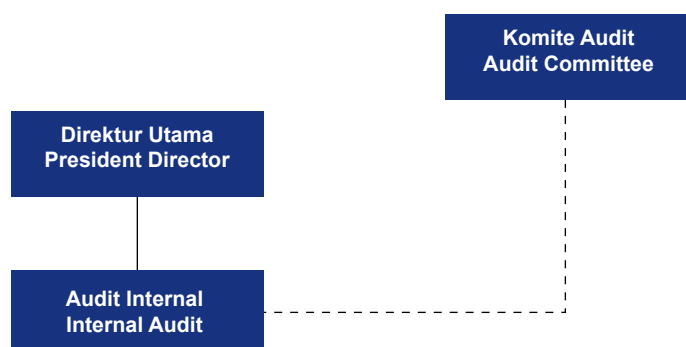
Pelatihan Unit Audit Internal / Internal Audit Unit Trainings		
Pelatihan / Trainings	Tanggal / Date	Penyelenggara / Organizer
Tool & Techniques New IA	07 - 10 Nov 2022	The Institute of Internal Auditors ("IIA")
Audit Report	5-6 Dec 2022	The Institute of Internal Auditors ("IIA")
Data Analysis For IA	7-8 Dec 2022	The Institute of Internal Auditors ("IIA")

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Internal Audit Unit Structure and Position

The Structure and Position of the Internal Audit Unit Company Tbk are as follows:



Piagam, Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

Sesuai ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Piagam Audit Internal Perseroan telah disahkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 26 September 2022.

Unit ini memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1. Menyusun rencana audit yang fleksibel, menggunakan metode perencanaan berbasis risiko dan pengendalian yang diidentifikasi manajemen.
2. Melaksanakan perencanaan audit tahunan yang telah disetujui, termasuk tugas khusus yang diminta oleh manajemen dan komite audit.
3. Menjaga staf audit sehingga senantiasa profesional, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai, serta melakukan sertifikasi profesional untuk dapat memenuhi persyaratan didalam piagam.
4. Melaksanakan jasa konsultasi, selain dari jasa *assurance* audit internal, untuk membantu manajemen dalam upaya mencapai tujuannya. Contoh jasa konsultasi tersebut antara lain mencakup: fasilitasi, desain proses, pelatihan, dan pemberian advis.
5. Mengevaluasi dan menilai kemungkinan penggabungan/konsolidasi fungsi, perubahan jasa, proses, operasi, dan proses pengendalian sehubungan dengan Standar Profesional Audit Internal.
6. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
7. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan/ atau Komite Audit.
8. Menetapkan dan memastikan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk memonitor dan memastikan bahwa proses perbaikan telah dilakukan secara efektif dan efisien.
9. Melakukan investigasi terhadap dugaan fraud yang terjadi di dalam Perseroan termasuk koordinasi dengan unit kerja lain dalam melakukan investigasi.

Pelaksanaan Tugas Unit Audit Internal

Selama tahun 2022, Unit Audit Internal telah melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemeriksaan/audit terhadap jalannya sistem pengendalian internal dalam rangka tata kelola Perusahaan sesuai SOP, Kebijakan dan Peraturan Perseroan yang berlaku;
2. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap efektifitas sistem dan prosedur sehubungan dengan risiko Perseroan;
3. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa;
4. Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan/ atau Komite Audit;
5. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan, menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang telah dilaksanakan;

Charter, Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit

In accordance with the provisions of the Financial Services Authority regulation No.56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Preparation of Internal Audit Unit Charter, the Company's Internal Audit Charter has been ratified by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners on September 26, 2022.

This unit has the following duties and responsibilities:

1. Develop a flexible audit plan, using risk-based planning methods and controls identified by the management.
2. Carry out the approved annual audit plan, including special assignments requested by the management and the audit committee.
3. Maintain audit staff to be professional, possess adequate knowledge, skills, and experience, as well as conduct professional certification to meet the requirements of the charter.
4. Perform consulting services, other than internal audit assurance services, to assist management in achieving its objectives. Examples of such consulting services include: facilitation, process design, training, and providing advice.
5. Evaluate and assess the possibility of merging/consolidating functions, changing services, processes, operations, and control processes in relation to the Internal Audit Professional Standards.
6. Provide suggestions for improvement and objective information about the activities examined at all levels of management.
7. Prepare an audit report and submit the report to the President Director and the Board of Commissioners and/or the Audit Committee.
8. Establish and ensure a follow-up process for inspection results to monitor and ensure that the improvement process has been carried out regularly effective and efficient.
9. Conducting investigations into alleged fraud that occurred within the Company, including coordinating with other work units in carrying out investigations.

Implementation of Internal Audit Unit Duties

During 2022, the Internal Audit Unit has carried out the following tasks:

1. Carry out checks/audits on the operation of the internal control system in the context of corporate governance in accordance with the applicable SOPs, Company policies and regulations;
2. To analyze and evaluate the effectiveness of systems and procedures in relation to the Company's risks;
3. Provide suggestions for improvement and objective information about the activities examined;
4. Prepare an Audit Report and submit the report to the President Director and the Board of Commissioners and/ or Audit Committee;
5. Monitor, analyze and report on the implementation of follow-up improvements that have been suggested, develop a program to evaluate the quality of internal audit activities that was carried out;

6. Bekerjasama dengan Komite Audit; dan
7. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal Perseroan yang ditugaskan Direktur Utama.

6. Cooperate with the Audit Committee; and
7. Carry out special tasks within the scope of the Company's internal control assigned by the President Director.

Pengendalian Internal Internal Control

Uraian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal bagi Perseroan adalah suatu sistem usaha atau sosial yang diterapkan oleh Perseroan yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan Perseroan agar melakukan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi Perseroan sehingga efisiensi dan kebijakan manajemen terpenuhi.

Sistem pengendalian internal yang efektif bagi Perseroan merupakan unsur penting dalam pengelolaan Perseroan. Perseroan yang efektif adalah Perseroan yang dapat membantu manajemen untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin tersedianya laporan keuangan dan laporan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu, dan memenuhi efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha.

Pengendalian internal diterapkan oleh Perseroan untuk menjamin tercapainya, sebagai berikut:

1. Keandalan pelaporan keuangan.
2. Efektivitas dan efisiensi operasi.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Hal tersebut dicapai oleh Perseroan dengan tujuan, sebagai berikut:

- Kepatuhan
Menjamin bahwa semua kegiatan usaha Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun kebijakan dan prosedur internal yang ditetapkan oleh Perseroan.
- Informasi
Menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu, dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Operasional
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Perseroan dari risiko kerugian.

Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Perseroan terus berupaya untuk memastikan sistem pengendalian sudah berjalan secara efektif. Untuk itu Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing individu.
2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit.
3. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Description of the Internal Control System

Internal control system for the Company is a business or social system implemented by the Company which includes organizational structures, methods, and measures to maintain and direct the Company to carry out activities in accordance with the Company's Vision and Mission so that efficiency and management policies are fulfilled.

An effective internal control system for the Company is an important element in the management of the Company. An effective Company is a Company that can help management to improve compliance with applicable laws and regulations, ensure the availability of correct, complete and timely financial reports and management reports, and fulfill the efficiency and effectiveness of business activities.

Internal control is implemented by the Company to ensure the achievement of the following:

1. Reliability of financial reporting.
2. Effectiveness and efficiency of operations.
3. Compliance with applicable laws and regulations.

This is achieved by the Company with the following objectives:

- Compliance
Ensures that all of the Company's business activities have been carried out in accordance with the prevailing laws and regulations, both provisions determined by the government and internal policies and procedures established by the Company.
- Information
Providing correct, complete, timely, and relevant reports required in order to make informed and accountable decisions.
- Operational
Improve effectiveness and efficiency in using assets and other resources in order to protect the Company from the risk of loss.

Effectiveness of the Internal Control System

The Company continues to strive to ensure that the control system is running effectively. For that, the Company does the following:

1. An organizational structure that clearly describes the duties and responsibilities of each individual.
2. Establishment of authority and responsibility for monitoring compliance with policies, procedures and limits.
3. Adequacy of procedures to ensure compliance with applicable laws and regulations.

4. Kesesuaian antara sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Perseroan.
5. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
6. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu.
7. Kaji ulang yang efektif, independen dan objektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Perseroan.
8. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen.
9. Dokumentasi prosedur operasional, temuan audit serta tanggapan pengurus Perseroan terhadap hasil audit.
10. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan Perseroan yang bersifat material dan tindakan pengurus Perseroan untuk memperbaikinya.

Sistem Manajemen Risiko Risk Management System

Manajemen risiko merupakan aspek yang penting dalam memastikan kelangsungan usaha. Terkait hal itu, Perseroan terus meningkatkan kebijakan manajemen risiko dalam identifikasi, pemantauan, pengendalian, dan pengelolaan risiko. Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko adalah untuk menjaga dan melindungi Perseroan melalui pengelolaan risiko kerugian yang mungkin timbul dari berbagai aktivitas usaha, serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Perseroan senantiasa berusaha membentuk dan mengembangkan budaya risiko yang kuat, penerapan praktik GCG, dan kepatuhan terhadap regulasi, yang tentunya harus didukung infrastruktur yang memadai serta proses bisnis yang terstruktur dan sehat.

Pelaksanaan Manajemen Risiko Perseroan merujuk kepada Peraturan OJK No.44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.

Penerapan Manajemen Risiko di Perseroan meliputi:

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Kecukupan Kebijakan, dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.
4. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan.

4. The suitability of the internal control system with the type and level of risk inherent in the Company's business activities.
5. Establishment of reporting lines and clear separation of functions from operational work units with work units that carry out control functions.
6. Accurate and timely reporting of financial and operational activities.
7. Effective, independent and objective review of the Company's operational policies, framework and procedures.
8. Adequate testing and review of management information systems.
9. Documentation of operational procedures, audit findings and the Company's management response to the audit results.
10. Periodic and continuous verification and review of the handling of the Company's material weaknesses and the actions of the Company's management to correct them.

Risk management is an important aspect in ensuring business continuity. In this regard, the Company continues to improve its risk management policies in identifying, monitoring, controlling and managing risks. The main purpose of implementing risk management is to maintain and protect the Company through managing the risk of losses that may arise from business activities, as well as maintaining the risk level in accordance with the predetermined provisions.

The Company strives to establish and develop a strong risk culture, GCG practices and compliance with regulations, which must be supported by adequate infrastructure and healthy business processes.

The implementation of the Company's Risk Management refers to OJK Regulation No.44/POJK.05/2020 concerning the Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions and OJK Circular Letter No.7/SEOJK.05/2021 concerning the Implementation of Risk Management for financing companies and sharia financing companies.

Risk Management Implementation at the Company are as follow:

1. Active Supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners.
2. Adequacy of risk management policies and procedures as well as risk limit setting.
3. Adequacy of Risk Identification, Measurement, Control, and Monitoring Processes, as well as Risk Management Information System.
4. Comprehensive Internal Control System.

Compliance Risk

Compliance Risk is the risk that the Company does not comply with and/or does not implement what is regulated by the laws and regulations.

Perseroan mempunyai komitmen yang kuat untuk senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mitigasi Risiko Kepatuhan

1. Perseroan memastikan tidak ada perilaku atau aktivitas Perseroan yang menyimpang dari atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perseroan memastikan tidak ada perilaku atau aktivitas Perseroan yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.

Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Kelemahan aspek yuridis tersebut disebabkan antara lain oleh:

1. Kelemahan perjanjian akibat tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian dan pengikatan jaminan secara sempurna.
2. Ketidadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Perseroan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Adanya tuntutan hukum.

Mitigasi Risiko Hukum

1. Secara periodik Perseroan melakukan evaluasi Legal document untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.
2. Perseroan sudah memiliki Departemen Litigasi untuk menangani kasus-kasus hukum.

Risiko Strategis

Risiko Strategis adalah potensi kegagalan dalam mencapai tujuan Perseroan akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan/atau kurang responsifnya terhadap perubahan eksternal.

Mitigasi Risiko Strategis

1. Pengelolaan risiko strategis dimulai dengan pembuatan rencana bisnis untuk mengoptimalkan potensi pendapatan Perseroan.
2. Perseroan memastikan bahwa struktur organisasi, infrastruktur, kondisi keuangan, permodalan, SDM dan kompetensi manajerial, serta sistem dan pengendalian yang ada telah sesuai dan memadai untuk mendukung implementasi strategi dan rencana bisnis Perseroan. Secara berkala dilakukan analisis pencapaian target-target yang telah ditetapkan untuk dapat ditentukan tindak lanjutnya.
3. Setiap Divisi/Departemen memiliki rencana dan strategi bisnis yang disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Melakukan evaluasi atas strategi pembiayaan dan pemasaran, operasi, teknologi informasi, dan peningkatan kompetensi karyawan.

The Company has a strong commitment to comply with the laws and regulations and always takes preventive measures to prevent the violation of the applicable laws and regulations.

Compliance Risk Mitigation

1. The Company ensures that there is no behavior or activity of the Company that deviates from or violates the prevailing laws and regulations.
2. The Company ensures that there is no behavior or activity that deviates or violates the generally accepted standards.

Legal Risk

Legal Risk is the risk that arises as a result of lawsuits and/or the weakness of the juridical aspect.

The weakness of the juridical aspect is caused by the following:

1. Weaknesses in the agreement due to not fulfilling the legal requirements of an agreement and binding collateral perfectly.
2. The absence and/or changes in laws and regulations that cause a transaction that has been carried out by the Company to be against the law.
3. A Lawsuit.

Legal Risk Mitigation

1. The company periodically evaluates Legal documents to ensure compliance with applicable regulations.
2. The Company has formed a Litigation Department to handle legal cases.

Strategic Risk

Strategic risk is the potential failure to achieve the Company's objectives due to inadequacy or failure in planning, determining and implementing strategies, making appropriate business decisions, and/or being less responsive to external changes.

Strategic Risk Mitigation

1. Strategic risk management begins with drawing up a business plan to optimize the Company's income potential.
2. The Company ensures that the organizational structure, infrastructure, financial condition, capital, HR and managerial competence, as well as the existing systems and controls are adequate to support the implementation of the Company's strategies and business plans. The Company also periodically carries out an analysis of the targets to determine the follow-up actions.
3. Each Division/Department has a business plan and strategy that is approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners.
4. Evaluate the strategy of financing and marketing, operations, information technology, and improve employee competence.

Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan karena kekurangan dan kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem ataupun permasalahan-permasalahan yang berdampak pada operasi Perseroan.

Penanganan risiko operasional dalam Perseroan dilakukan dengan 3 (tiga) langkah, yaitu:

- Pengidentifikasian risiko
- Pengukuran risiko
- Manajemen, pengawasan dan pengendalian risiko

Ketiga langkah di atas merupakan satu kesatuan proses yang tidak terpisahkan.

Mitigasi Risiko Operasional

1. Pengertian yang jelas oleh semua lini yang terkait terhadap risiko yang melekat pada setiap tahapan proses kegiatan operasional yang berhubungan terutama dengan persetujuan dan pencairan pembiayaan, pelayanan konsumen, pencatatan pembukuan dan penyusunan laporan.
2. Pembagian tugas yang jelas dan terpisah antara pelaksana dan kontrol. Sebagai pelaksana, aktivitas yang dikerjakan berdasarkan *Standard Operating Procedures* (SOP) baku Perseroan, sedangkan fungsi kontrol memastikan aktivitas sudah memenuhi persyaratan yang digariskan oleh SOP.
3. Perseroan menggunakan Sistem Teknologi Informasi yang handal agar kelangsungan dan kelancaran pengoperasian sistem dapat terjamin. Perseroan sudah menerapkan sistem *online* dan *real time* sehingga dengan demikian pihak manajemen dapat memonitor seluruh aktivitas operasional secara langsung, dan dengan cepat dapat mengambil keputusan strategis dan tepat untuk memitigasi kemungkinan risiko yang terjadi akibat kelalaian, tidak berfungsinya sistem, maupun penyimpangan dari pelaksanaan SOP dan/atau kebijakan Perseroan.
4. Perseroan menerapkan *Risk Control Self Assessment* (RCSA), suatu konsep manajemen risiko yang dibentuk berdasarkan SOP yang berlaku dalam Perseroan, untuk menelaah dan mengukur besarnya potensi risiko-risiko yang berlangsung selama proses internal untuk menghasilkan status risiko operasional, dan dilaporkan secara periodik.
5. Perseroan senantiasa mengembangkan kemampuan dan pengetahuan karyawannya dengan berbagai pelatihan melalui Mizuho Learning Center ("MLC") agar dapat menekan seminimal mungkin frekuensi *human error* dan sistem operasional serta dampak kerugian finansial yang mungkin terjadi.
6. Memastikan bahwa semua lini yang terkait telah memahami risiko pada setiap tahap kegiatan operasional terutama yang berhubungan dengan persetujuan dan pencairan kredit, pelayanan konsumen, pembukuan, dan penyusunan laporan.
7. Memisahkan tugas pelaksana dan kontrol secara tegas. Pelaksana bekerja berdasarkan SOP, sedangkan kontrol memastikan bahwa aktivitas pelaksanaan telah sesuai dengan SOP.

Operational Risk

Operational risk is the risk caused by shortcomings and failures of internal processes, human errors, system failures or problems that could bring impact to the Company's operations.

The operational risks in the Company are handled through 3 (three) steps as follows:

- Risk identification
- Risk measurement
- Risk management, supervision and control

The three steps above are inseparable unified processes.

Operational Risk Mitigation

1. A clear understanding by all lines concerned regarding the risk inherent in each stage of the processes of operational activities relating primarily to the approval and disbursement of financing, customer service, book keeping and reporting.
2. A clear separation of duties between executors and overseers. Executors, carry out activities based on the Company's Standard Operating Procedures (SOP), while the oversight functions ensure that the activities are done in accordance with the requirements outlined by the SOP.
3. The Company uses a reliable Information Technology System so that the continuity and smooth operation of the system can be guaranteed. The Company has implemented an online and real time system so that management can monitor all operational activities directly, and can quickly make strategic and appropriate decisions to mitigate possible risks that occur due to negligence, system malfunctions, or deviations from SOP implementation and/or Company policy.
4. The Company implements a Risk Control Self Assessment (RCSA), a concept of risk management, which was established based on applicable Standard Operating Procedures in the Company, to examine and measure the extent of potential risks occurring throughout the internal processes in order to generate operational risk status, and is reported periodically.
5. The Company always develops the skills and knowledge of its employees with various trainings through the Mizuho Learning Center ("MLC") in order to minimize the frequency of human errors and operational systems as well as the impact of possible financial losses.
6. Ensure that all related lines understand the risks that may occur at every stage of operational activities, especially those related to credit approval and disbursement, customer service, bookkeeping, and reporting.
7. Strictly separate executive and supervision duties. The executors work according to the SOP, while the supervisors ensure that the activities are in accordance with the SOP.

8. Proses pencatatan transaksi keuangan (*accounting*) dilakukan melalui sistem *built in control* yang berjenjang dan terintegrasi.
9. Membuat *back-up* melalui *Disaster Recovery Center* ("DRC") atas data-data operasional untuk menghindari terganggunya kegiatan operasional jika seluruh data hilang akibat gangguan sistem, kebakaran, banjir, huru-hara, atau gempa bumi.

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan / atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Risiko Pasar antara lain meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko ekuitas. Manajemen risiko pada risiko pasar dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan Perseroan.

Mitigasi Risiko Pasar

1. Perseroan menerapkan *natural hedging* untuk antisipasi pinjaman dan pembiayaan dengan mata uang yang sama. *Natural hedging* adalah menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran sehingga tidak terjadi lonjakan keperluan kas. Salah satu cara untuk mengimbangi long exposure terus menerus yang sudah diantisipasi terhadap mata uang tertentu adalah mendapatkan utang berdenominasi mata uang tersebut.
2. Perseroan menggunakan instrumen derivatif yaitu *swap cross currency* untuk meminimalisir risiko nilai tukar. Melalui *swap cross currency*, Perseroan setuju untuk mempertukarkan pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dengan pinjaman dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar yang spesifik pada tanggal dimulainya transaksi, di mana kontrak tersebut memenuhi kriteria dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas.
3. Perseroan menggunakan instrumen derivatif yaitu *swap suku bunga* untuk meminimalisir risiko suku bunga. Kontrak *swap suku bunga* mempertukarkan tingkat suku bunga mengambang dengan tingkat suku bunga tetap, dimana kontrak tersebut ditujukan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko kerugian pada akun aset ataupun liabilitas Perusahaan akibat perubahan suku bunga. Perusahaan mengelola risiko suku bunga dengan menggunakan instrumen derivatif yaitu *swap suku bunga*. Melalui *swap suku bunga*, Perusahaan setuju untuk mempertukarkan selisih antara suku bunga tetap dengan suku bunga mengambang yang dihitung sesuai dengan nilai nosional yang telah disepakati. Nilai wajar dari *swap suku bunga* pada akhir periode pelaporan ditentukan dengan mendiskonto nilai arus kas di masa yang akan datang dengan menggunakan kurva pada akhir periode pelaporan dan risiko kredit yang melekat pada kontrak. Nilai rata-rata suku bunga ditentukan dari nilai saldo pada akhir periode pelaporan. Kontrak *swap suku bunga* mempertukarkan tingkat suku bunga mengambang dengan tingkat suku bunga tetap, dimana kontrak tersebut ditujukan dan efektif sebagai instrument lindung nilai arus kas.

8. The process of recording financial transactions (*accounting*) is carried out through a tiered and integrated built-in control system.
9. Make backups through the Disaster Recovery Center ("DRC") of operational data to avoid disruption of operational activities if all data is lost due to system disruption, fire, flood, riot or earthquake.

Market Risk

Market Risk is risk in the position of assets, liabilities, equity, and / or administrative accounts including derivative transactions due to overall changes in market conditions. Market Risk includes, among others, interest rate risk, exchange rate risk and equity risk. Market Risk Management is carried out to minimize the possibility of negative impacts due to changes in market conditions on the Company's assets and capital

Market Risk Mitigation

1. The Company applies natural hedging to anticipate loans and financing in the same currency. Natural hedging is balancing income and expenses so there is no spike in cash needs. One way to offset the anticipated continuous long exposure to a particular currency is to acquire debt denominated in that currency.
2. The Company uses derivative instruments called cross currency swaps to minimize exchange rate risk. Through cross currency swaps, the Company agreed to exchange loans in foreign currency with loans in Rupiah using a specific exchange rate on the transaction date, in which the contract meets the criteria and is effective as a cash flow hedging instrument.
3. The Company uses derivative instruments called interest rate swaps to minimize interest rate risk. Interest rate swap contracts exchange a floating interest rate with a fixed rate, in which the contract is intended and effective as a cash flow hedging instrument.

Interest Risk

Interest risk is the risk of loss in the Company's financial assets or liabilities due to changes in interest rates. The Company manages interest rate risk using derivative instruments, which is interest rate swaps. Through an interest rate swap, the Company agrees to exchange the difference between a fixed interest rate and a floating interest rate calculated according to the agreed notional value. The fair value of interest rate swaps at the end of the reporting period is determined by discounting the value of future cash flows using a curve at the end of the reporting period and credit risk attached to the contract. The average value of the interest rate is determined from the balance value at the end of the reporting period. An interest rate swap contract exchanges a floating interest rate with a fixed rate, which is designated and effective as a cash flow hedge instrument.

Risiko Mata Uang

Perseroan terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama karena transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing seperti penyaluran piutang pembiayaan dan penerimaan pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing. Perseroan mengelola eksposur mata uang asing dengan mencocokkan, sebanyak mungkin, penerimaan dan pembayaran dalam masing-masing individu mata uang.

Risiko nilai tukar terhadap mata uang asing adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas di masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi dikarenakan adanya perubahan nilai tukar terhadap mata uang asing. Eksposur risiko Perseroan terhadap nilai tukar berasal dari kas di bank, piutang sewa pembiayaan, aset lain-lain, utang bank, utang pemegang saham, biaya masih harus dibayar dan utang lain-lain.

Pada risiko ini, Perseroan mengelola risiko dengan menyesuaikan kondisi mata uang piutang sewa pembiayaan dengan mata uang pendanaan pinjaman yang ditetapkan oleh bank. Perseroan mengelola risiko nilai tukar dengan menggunakan instrumen derivatif yaitu *swap cross currency*.

Melalui *swap cross currency*, Perseroan setuju untuk mempertukarkan pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dengan pinjaman dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar yang spesifik pada tanggal dimulainya transaksi, di mana kontrak tersebut memenuhi kriteria dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas.

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi liabilititas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Manajemen Risiko pada risiko likuiditas dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Perseroan dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas.

Mitigasi Risiko Likuiditas

1. Mempererat hubungan dengan sumber dana, yaitu bank-bank pemerintah, swasta, dan asing, serta menjaga kredibilitasnya dan dapat memperoleh dana yang lebih besar dengan tingkat bunga yang lebih kompetitif.
2. Bekerja sama dengan beberapa bank nasional, bank pemerintah, dan bank asing untuk memperoleh berbagai fasilitas pinjaman termasuk pinjaman dalam skema, *demand loan*, dan *term loan*. Perseroan mengharuskan plafon pinjaman sebesar minimal 110% (seratus sepuluh persen) dari jumlah dana yang dibutuhkan.
3. Menjaga saldo kas yang memadai setiap hari untuk menutupi kebutuhan dana pada hari tersebut, serta memperoleh dana dari Pinjaman Rekening Koran ("PRK") untuk memenuhi kebutuhan dana selama 5 (lima) hari kerja.
4. Menerapkan kebijakan pengaturan arus kas yang ketat sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan dana.
5. Menagih pinjaman secara efektif untuk meminimalkan tunggakan dan menjaga perputaran kas yang sesuai dengan rencana operasional.

Currency Risk

The Company is exposed to the effects of fluctuations in foreign exchange rates mainly due to transactions of denominated foreign currencies such as distribution of finance lease receivables and receipt of loans denominated in foreign currencies. The Company manages foreign currency exposure by matching receipts and payments in each individual currency, as much as possible.

Exchange rate risk against foreign currencies is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in the exchange rate of foreign currencies. The Company's risk exposure to the exchange rate comes from cash in banks, finance lease receivables, other assets, bank loans, loan from shareholder, accrued expenses and other payables.

At this risk, the Company manages risk by adjusting the condition of the finance lease receivables with the loan funding currency specified by the bank. The Company manages exchange rate risk by using a derivative instrument, namely cross currency swap.

Through cross currency swaps, the Company agrees to exchange loans received in foreign currencies for loans in Rupiah using a specific exchange rate at the date of commencement of the transaction, where the contract meets the criteria and is effective as a cash flow hedge instrument.

Liquidity Risk

Liquidity Risk is the risk due to the Company's inability to meet its maturing liabilities from cash flow funding sources and/or from liquid assets that can be easily converted into cash, without disrupting the Company's activities and financial condition.

Risk Management on Liquidity Risk is carried out to minimize the possibility of the Company's inability to obtain cash flow funding sources.

Liquidity Risk Mitigation

1. Strengthen relationships with sources of funds, namely state, private, and foreign banks, as well as maintaining their credibility to obtain larger funds with more competitive interest rates.
2. Cooperate with national banks, state banks, and foreign banks to obtain loan facilities including loans under, demand loans, and term loans. The Company requires a loan ceiling of at least 110% (one hundred and ten percent) of the required amount of funds.
3. Maintain an adequate cash balance every day to cover the need for funds on that day, and obtain funds from an Overdraft Loan to meet the need for funds for 5 (five) working days.
4. Implement a strict cash flow regulation policy so that there is no excess or shortage of funds.
5. Collect loans effectively to minimize arrears and maintain cash flow in accordance with operational plans.

6. Menerapkan jadwal pembayaran yang optimal kepada vendor sehingga arus kas tidak terganggu.
7. Menganalisis dan memantau pengeluaran dana untuk kegiatan operasional dan belanja modal.
8. Menagih pinjaman secara efektif untuk meminimalkan tunggakan dan menjaga perputaran kas yang sesuai dengan rencana operasional.
9. Menganalisis dan memantau pengeluaran dana untuk kegiatan operasional dan belanja modal.
10. Melakukan efisiensi biaya di setiap bagian tanpa mengurangi efektivitas kegiatan operasional.
11. Menyediakan metode pembayaran debit otomatis dan kartu debit dengan bekerja sama dengan bank-bank pemerintah, swasta, dan lokal utama.
12. Merencanakan dan mengatur pemasukan dana dari angsuran konsumen dan pencairan dana bank dan pengeluaran dana ke *dealer/showroom/vendor/supplier*, pembayaran kewajiban ke bank, dan meminimalisasi dana yang tidak digunakan.
13. Perseroan mengelola risiko likuiditas untuk memastikan bahwa Perseroan akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan usaha, selain memaksimalkan keuntungan para Pemegang Saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur antara lain risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

Risiko kredit terdapat pada seluruh aktivitas Perseroan yang kinerjanya bergantung pada kinerja debitur, kinerja pihak lawan (*counterparty*), dan/atau penerbit (*issuer*). Secara langsung, Perseroan menghadapi risiko seandainya debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melunasi kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara debitur dengan Perseroan.

Mitigasi Risiko Kredit

1. Perseroan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit yang ketat antara lain survei calon konsumen, verifikasi data konsumen dan persyaratan uang muka yang berlaku. Prinsip 6C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy, Constraint*) sudah merupakan standar dalam setiap analisis kelayakan konsumen. Juga pemilihan dan analisis *dealer/showroom/vendor* merupakan kesatuan dari analisis persetujuan proses pembiayaan.
2. Analisis calon *customer* dan pemantauan *customer* secara menyeluruh. Perseroan menggunakan jasa survei eksternal untuk validasi informasi calon *customer* dan survei yang telah dilakukan oleh *Credit Marketing Officer* ("CMO") tanpa mengurangi kecepatan dalam mengambil keputusan persetujuan pembiayaan. Perseroan pun melakukan pemantauan karakteristik pembayaran angsuran dari *customer*, status jaminan, dan kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi sumber penghasilan *customer* sehingga *customer* yang akan bermasalah dapat diantisipasi lebih awal.

6. Implement optimal payment schedules to vendors so that cash flow is not disrupted.
7. Analyze and monitor the expenditure of funds for operational activities and capital expenditures.
8. Collect loans effectively to minimize arrears and maintain cash flow in accordance with operational plans.
9. Analyze and monitor the expenditure of funds for operational activities and capital expenditures.
10. Carry out cost efficiency in each section without reducing the effectiveness of operational activities.
11. Provide automatic debit and debit card payment methods in collaboration with government, private and major local banks.
12. Plan and manage the inflow of funds from consumer installments and disbursement of bank funds and disbursement of funds to dealers/showrooms/vendors, payment of obligations to banks of the Company, and minimize unused funds.
13. The Company manages liquidity risk to ensure their sustainability in addition to maximizing shareholder returns through optimizing debt and equity balances.

Credit Risk

Credit risk is the risk due to the failure of other parties to fulfill their obligations to the Company, including credit risk due to debtor failure, such as credit concentration risk, counterparty credit risk, and settlement risk.

Credit risk exists in all of the Company's activities whose performance depends on the performance of the debtor, the counterparty, and/or the issuer. The Company directly faces the risk if debtors are unable to fulfill their obligations in repaying the credit in accordance with the agreement.

Credit Risk Mitigation

1. The Company prioritizes the aspect prudence of in giving a strict credit process, including surveys of prospective customers, verification of consumer data and applicable down payment requirements. The 6C principle (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy, Constraint*) has become the standard in every consumer feasibility analysis. Also, *dealer/showroom/vendor* selection and analysis is an integral part of the financing approval process analysis.
2. Analysis of potential customer and thorough customer monitoring. The Company uses external survey services to validate prospective customer information and surveys carried out *Credit Marketing Officer* ("CMO") without reducing the speed in making financing approval decisions. The Company also monitors the characteristics of installment payments from customer, collateral status, and conditions that can affect customer' sources of income so that problematic customer can be anticipated early.

3. Untuk pembiayaan *retail* dan *corporate*, proses pembiayaan yang dijalankan ketat, mulai dari survei calon *customer*, verifikasi data *customer*, hingga pemberian uang muka sesuai ketentuan yang berlaku, agar risiko yang mungkin timbul dapat dikendalikan dengan baik.
 4. Perseroan juga melakukan analisa terhadap *dealer/showroom/vendor*. Setiap *dealer/showroom/vendor* yang menjadi rekanan Perseroan dibuatkan perjanjian kerja samanya.
 5. Melaksanakan strategi penagihan yang efektif dan efisien dengan mewajibkan *customer* untuk melakukan pembayaran angsuran melalui metode pembayaran yang telah ditetapkan, serta mengingatkan *customer* atas tagihan yang akan jatuh tempo melalui *Short Message Service* ("SMS"). Perseroan melakukan penagihan (*desk collection, field collection, remedial*) jika *customer* melanggar kontrak pembiayaan dan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, untuk mengantisipasi dan mencegah piutang yang tidak tertagih yang dapat menurunkan *margin* usaha.
 6. Memperkuat pengawasan internal dengan mendayagunakan tim audit internal dan *Independent Control Unit* untuk memantau seluruh aktivitas di kantor pusat dan cabang. Setiap penyimpangan ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai peraturan Perseroan dan dicegah dengan menyesuaikan SOP.
 7. Menganalisis dan memantau calon *customer* secara menyeluruh, baik dengan tim survei internal maupun eksternal, melakukan validasi informasi dari calon *customer* dan survei yang telah dilakukan tanpa mempengaruhi proses persetujuan kredit, serta karakteristik pembayaran angsuran oleh *customer*, status jaminan dan kondisi-kondisi lainnya yang dapat mempengaruhi sumber penghasilan *customer* sehingga masalah dideteksi lebih dini.
 8. Untuk pembiayaan korporasi, Perseroan menerapkan kebijakan hanya akan bertransaksi dengan rekanan yang memiliki kelayakan kredit dan mendapatkan jaminan yang memadai, bila sesuai, sebagai sarana mengurangi risiko kerugian atau tunggakan. Perseroan hanya bertransaksi dengan entitas, tergantung pada rating kreditnya, yang mana pemegang saham melakukan bisnis, entitas yang memberikan jaminan memadai, induk perusahaan, pelanggan prospektif dan entitas-entitas yang ditunjuk oleh Mizuho Leasing Co., Ltd.
 9. Perseroan juga menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Jasa Keuangan.
3. For the retail and corporate, the financing process is very strict, starting from surveys of potential customers, verification of customers data, to providing advances according to applicable regulations, so that risks that may arise can be properly controlled.
 4. The Company also conducts analysis on dealers/showrooms/vendors. Each dealer/showroom/vendor partnering with the Company has a cooperation agreement.
 5. Implement an effective and efficient billing strategy by requiring customers to make installment payments through predetermined payment methods, as well as reminding customers of bills that will be due through the Short Message System ("SMS"). The Company collects (*desk collection, field collection, remedial*) if the customers violates the financing contract and does not have good faith to settle their obligations, to anticipate and prevent uncollectible receivables that can reduce operating margins.
 6. Strengthen internal control by utilizing the internal audit team and Independent Control Unit to monitor all activities at the head office and branches. Every violation is followed up and sanctioned according to the Company's regulations and prevented by complying with the SOPs.
 7. Analyze and monitor prospective customers thoroughly, both with internal and external survey teams, validate information from prospective customers and surveys carried out without affecting the credit approval process, as well as the characteristics of installment payments by customers, collateral status and other conditions that may affect sources of customers income so that problems are detected early.
 8. For corporate financing, the Company implements a policy of only transacting with partners that have credit worthiness and obtain adequate collateral, if suitable, as a means of reducing the risk of loss or arrears. The Company only transacts with entities, depending on their credit rating, in which the shareholders do business, entities providing adequate collaterals, holding companies, prospective customers and entities appointed by Mizuho Leasing Co., Ltd.
 9. The Company also implements the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing programs as regulated in Financial Services Authority Regulation Number 23/POJK.01/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.01/2017 concerning Implementation of Anti- Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing program. Terrorism Financing by Financial Services Providers in the Financial Services Sector.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko reputasi timbul karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perseroan yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi Perseroan yang kurang efektif.

Mitigasi Risiko Reputasi:

1. Perseroan memiliki UP3T dengan standar maksimal penyelesaian keluhan 20 hari kerja.
2. Perseroan mempunyai unit yang bertugas melakukan *monitoring* pemberitaan terkait Perseroan di media.

Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Perseroan terus berupaya untuk penerapan manajemen risiko Perseroan berjalan secara efektif. Perseroan memandang pengelolaan risiko sangatlah penting. Tugas utama dari Satuan Kerja Manajemen Risiko adalah melakukan analisa untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi Perseroan, merumuskan tingkat risiko serta kebijakan pengelolaan risiko untuk menjaga tingkat risiko Perseroan.

Untuk itu Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Perseroan melakukan penilaian sendiri terhadap tingkat kesehatan Perseroan berdasarkan POJK No.28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan SEOJK No.11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah. Salah satu faktor dalam Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan adalah penilaian Faktor Profil Risiko. Penilaian Profil Risiko ini di klasifikasikan berdasarkan 8 (delapan) tipe risiko yang kemudian dilaporkan kepada regulator setiap tahunnya. Penilaian ini mencakup penilaian Risiko Inheren dan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko.
2. Perseroan membentuk Komite Manajemen Risiko sebagai bentuk implementasi dari pengawasan aktif Direksi terhadap penerapan manajemen risiko di Perseroan. Komite Manajemen Risiko dibentuk untuk memastikan penerapan manajemen risiko dilakukan secara konsisten dan efektif di Perseroan.
3. Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab mengevaluasi pengelolaan risiko serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Reputational Risk

Reputational Risk is the risk due to a decrease in the level of stakeholder trust originating from negative perceptions of the Company. Reputation risk arises due to negative media coverage and/or rumors about the Company, as well as the Company's ineffective communication strategy

Reputational Risk Mitigation:

1. The Company has UP3T with a maximum standard of complaint resolution of 20 working days.
2. The Company has a unit tasked with monitoring news related to the company in the media.

Effectiveness of Risk Management System

The Company strives to implement risk management effectively. To the Company, risk management is very important. The main task of the Risk Management Unit is to conduct analysis to identify the risks faced by the Company, formulate risk levels and risk management policies to maintain the Company's risk levels.

To that end, the Company does the following:

1. The Company conducts its own soundness assessment based on OJK Regulation No.28/POJK.05/2020 concerning Assessment of the Soundness of the Non-Bank Financial Services Institutions and OJK Circular letter No.11/SEOJK.05/2020 concerning Assessment of the Soundness of Financing Companies and Sharia Financing Companies. One of the factors used in the Company's Soundness Assessment is the assessment of the Risk Profile Factor. This Risk Profile Assessment is classified based on 8 (eight) types of risk which are then reported to the regulator every year. This assessment includes an assessment of Inherent Risk and an assessment of the Quality of Risk Management Implementation.
2. The Company established a Risk Management Committee as a form of implementation of the active supervision of the Board of Directors on the implementation of risk management in the Company. The Risk Management Committee was formed to ensure the implementation of risk management is carried out consistently and effectively in the Company.
3. The Risk Monitoring Committee has duties and responsibilities to evaluate risk management and provide recommendations to the Board of Commissioners.

Sanksi Administratif **Administrative Sanction**

Sepanjang tahun 2022, Perseroan tidak mendapatkan sanksi apa pun dari Otoritas Jasa Keuangan maupun dari regulator lainnya.

Throughout 2022, the Company did not receive any sanctions from the Financial Services Authority nor from other regulators.

Litigasi **Litigation**

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Tahunan ini, Perseroan tidak menghadapi perkara hukum yang berdampak material.

As of the issuance date of this Annual Report, the Company has not faced any legal cases with any material impact.

Kode Etik **Code of Conducts**

Kode etik dan budaya Perseroan merupakan bagian dari prioritas utama bagi insan Perseroan dalam menjaga tanggung jawab dan profesionalisme kerja serta kepercayaan dari konsumen. Pelaksanaan kode etik merupakan bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Kode etik menjadi pedoman dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Perseroan dan etika bisnis yang antara lain mengatur tentang, sebagai berikut:

The Company's code of conduct and culture are top priority for the Company's employees in maintaining work responsibilities and professionalism to gain the trust of the consumers. The code of conduct is part of the implementation of Good Corporate Governance. The code of conduct serves as a guideline for actions that adhere to the Company's values and business ethics, which regulates the following:

Nepotisme

Karyawan Perseroan dilarang untuk melibatkan diri dalam suatu transaksi apabila memiliki hubungan saudara/keluarga dengan rekan usaha, konsumen atau karyawan lain yang terlibat dalam transaksi tersebut. Jika karyawan memiliki hubungan saudara/keluarga dengan karyawan lain, maka karyawan tersebut wajib untuk melaporkan hal tersebut kepada Divisi HR & GA untuk menghindari benturan kepentingan.

Nepotism

The Company's employees are prohibited from engaging in a transaction if they have a family relationship with business partners, customers or other employees involved in the transaction. If the employee has a family relationship with another employee, the employee is required to report the matter to the HR & GA Division to avoid conflicts of interest.

Usaha Pribadi

Karyawan dilarang untuk terlibat dalam usaha pribadi di lingkungan kantor karena mengganggu aktivitas kerja dan dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.

Personal Business

Employees are prohibited from engaging in personal business in the office environment because it interferes with work activities and can lead to abuse of authority and office facilities for personal gain.

Kerahasiaan

Karyawan wajib untuk merahasiakan seluruh informasi rahasia Perseroan, termasuk rencana dan strategi Perseroan, informasi mengenai pemasaran, keuangan, kegiatan operasional dan informasi strategis lainnya, sejak karyawan dalam masa percobaan/kontrak hingga tidak lagi bekerja sebagai karyawan Perseroan.

Confidentiality

Employees are required to keep all confidential information of the Company, including the Company's plans and strategies, information about marketing, financial, operational activities and other strategic information from the moment the employee is on probation/contract until he/she no longer works in the Company.

Persaingan yang Sehat

Perseroan selalu mendukung persaingan usaha yang sehat dalam melaksanakan seluruh kegiatan usahanya. Seluruh kegiatan usaha dan kegiatan karyawan harus berdasarkan persaingan yang sehat yang berlandaskan etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Seluruh karyawan wajib untuk mengupayakan agar hal tersebut dilaksanakan dan diwujudkan karena akan berdampak terhadap reputasi dan pertumbuhan Perseroan. Ketentuan mengenai kode etik ini tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. HRD-001/SK-PK/XI/05 tertanggal 1 Januari 2006 tentang Kode Etik Bisnis dan Etika Kerja Perseroan, yang memuat tentang:

Fair Competition

The Company always supports fair competition in all of its business activities. All business activities and employee activities must be based on fair competition that adheres to ethics and morals in the community. All employees are required to implement and realize this principle, for the impact that it has on the Company's reputation and growth. Provisions regarding the code of conduct are contained in the Decree of the Board of Commissioners No. HRD-001/SK-PK/ XI/05 dated January 1, 2006 concerning the Code of Business Conduct and Work Ethics of The Company, which consists of:

1. Saluran Komunikasi.
2. Tanggung Jawab Utama Karyawan.
3. Perlindungan terhadap Harta Milik Perusahaan.
4. Hubungan dengan Pemasok, Pelanggan, dan Mitra Usaha.
5. Interaksi dengan Pemerintah.
6. Menerapkan Kode Etik pada Setiap Aktivitas Pekerja.
7. Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik.

Ketentuan mengenai penerapan kode etik ini berlaku bagi seluruh jajaran Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan.

Guna mendukung penerapan Kode Etik, Perusahaan telah melakukan sosialisasi Kode Etik kepada seluruh karyawan Perusahaan dan bagi karyawan baru di sosialisasikan pada saat training Orientasi Karyawan Baru. Seluruh karyawan wajib mematuhi semua isi dari Kode Etik tersebut, dan apabila ada Pelanggaran yang dilakukan maka akan menerima sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan apabila diperlukan bila pelanggaran itu menyangkut hal yang masuk kategori tindakan melawan hukum akan diserahkan/dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan Direksi Share Ownership Program by Employees and Board of Directors

Pada tahun 2022, belum terdapat kajian terkait program kepemilikan saham oleh pegawai dan Direksi.

1. Communication Channels.
2. Main Responsibilities of Employees.
3. Protection of Company Assets.
4. Relationships with Suppliers, Customers and Business Partners.
5. Interaction with the Government.
6. The application of the Code of Conduct in Every Employees Activity.
7. Sanctions for Code Violations.

The code of conduct apply to all levels of the Board of Commissioners, Board of Directors and employees.

In order to support the implementation of the Code of Conducts, the Company has disseminated the Code of Conducts to all Company employees and socializes it to new employees during the New Employee Orientation training. Every employee must obey the rules contained in the Code of Conducts, should there is a violation, he/she will receive sanctions in accordance with applicable regulations and by any means necessary, if the violation involves unlawful acts, he/she would be submitted/ reported to the authorities.

In 2022, there was no study of share ownership program by employees and the Board of Directors.

Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System

Sistem pelaporan pelanggaran adalah sistem penyampaian informasi terkait terjadinya penyimpangan pada proses bisnis Perseroan. Penyimpangan yang dimaksud bisa berupa *fraud* ataupun *non-fraud* yang terjadi di unit-unit kerja Perseroan, baik di Kantor Pusat ataupun di Kantor Layanan/Jaringan.

Perseroan menyiapkan tata cara sistem pelaporan pelanggaran untuk mendeteksi adanya penyimpangan yang mungkin terjadi di dalam Perseroan. Sistem pelaporan ini memungkinkan pelapor tidak hanya dari karyawan internal namun juga dari pihak eksternal atau *intermediary* dan masyarakat umum yang memiliki kepentingan dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung. Identitas pelapor bersifat rahasia dan laporan dapat disampaikan oleh pelapor tanpa mencantumkan identitasnya (anonim).

Untuk setiap laporan mengenai penyimpangan, Perseroan menyediakan media pelaporan, baik melalui email whistle@mizuho-ls.co.id, maupun media lain seperti faks, telepon, serta surat kepada Unit Audit Internal Perseroan. Selain itu, Direksi dan Dewan Komisaris juga dapat menerima pengaduan secara tertulis dan sarana telekomunikasi lainnya mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan usaha Perseroan, termasuk juga pengaduan dugaan terjadinya penyimpangan.

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, Perseroan akan memberikan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan bagi pelapor meliputi, sebagai berikut:

1. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan.

The violation reporting system is a system for submitting information related to violations in the Company's business processes. The violations in question can be in the form of fraud or non-fraud that occurs in the Company's work units, both at the Head Office and at the Service/Branch Office.

The Company has prepared a violation reporting system to detect any violations that may occur within the Company. This reporting system allows reporters not only from employees but also from external parties or intermediaries and the general public who have an interest in the Company either directly or indirectly. The identity of the reporter is confidential and the report can be submitted by the reporter without stating his/her identity (anonymous).

For any reports of violations, the Company provides reporting media, either through email whistle@mizuho-ls.co.id, or other media such as fax, telephone, and letter to the Company's Internal Audit Unit. In addition, the Board of Directors and Board of Commissioners can also receive complaints in writing and other means of telecommunication regarding various matters related to the Company's business, including reports of alleged violations.

For reports that are proven true, the Company will provide protection for the whistleblower. Protection for whistleblowers includes, as follows:

1. Guarantee the confidentiality of the reporter's identity and the contents of the report submitted.

2. Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman dan intimidasi kepada pelapor.

2. Guarantee of protection against possible threats and intimidation to the whistleblower.

Pada tahun 2022, jumlah pengaduan yang masuk dan diproses sebagai berikut:

In 2022, the number of reports received and processed is as follows:

Parameter Parameters	Jumlah Laporan Total Report	Laporan Terbukti Proven Report	Karyawan Terlibat Employees Involved	Sanksi Punishment
Pengaduan yang ditindaklanjuti untuk investigasi Complaints are followed up for investigation	7	3	3	3
Pengaduan yang tidak dilanjutkan untuk investigasi Complaints that were not forwarded for investigation	1	-	-	-

Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Guidelines on The Implementation of Good Corporate Governance

Peseroan menerapkan dan melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ("GCG") sebagaimana diwajibkan oleh OJK dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, sebagai mana telah dirubah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

The Company implements and implements Good Corporate Governance ("GCG") as required by the OJK in the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies, as amended through the Financial Services Authority Regulation Number 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies.

Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.05/2016 Tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, Perseroan melaporkan Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, meliputi aspek :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Internal.
3. Penanganan benturan kepentingan.
4. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.
5. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal.
6. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai.
7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan perusahaan yang belum diungkap dalam laporan lainnya.
8. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.
9. Pengungkapan kepemilikan saham bagi anggota Direksi

Transparency Implementation of Good Corporate Governance

In accordance with OJK Circular No. 15/SEOJK.05/2016 Concerning Reports on the Implementation of Good Corporate Governance for Finance Companies, the Company reports Transparency on the Implementation of Good Corporate Governance, covering aspects of:

1. Implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
2. Completion and implementation of duties of the Audit Committee or functions that assist the Board of Commissioners in monitoring and ensuring the effectiveness of the Internal Control System.
3. Handling conflict of interest.
4. Implementation of the compliance function, internal auditors and external auditors.
5. Implementation of Risk Management and Internal Control Systems.
6. Implementation of remuneration policies and other facilities for members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees.
7. Transparency of the company's financial and non-financial conditions that have not been disclosed in other reports.
8. Long term plan as well as work plan and annual budget.
9. Disclosure of share ownership for members of the Board

dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.

10. Pengungkapan hal-hal penting lainnya.
11. Laporan Strategi *Anti Fraud*.
12. Sistem *Whistleblowing*.

Hasil Laporan Penerapan Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, tidak terdapat kekurangan sehingga tidak memerlukan rencana tindak (*action plan*) atas kekurangan penerapan tata kelola.

Tingkat Kesehatan Perusahaan Faktor Tata Kelola

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan telah melakukan penilaian sendiri tingkat kesehatan untuk posisi 31 Desember 2022 dengan Risk Based Non-Bank Rating (RBNBR) dan hasil nilai Peringkat Komposit, yaitu PK-1.

Nilai ini membuktikan kesehatan Perseroan yang sangat baik sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif signifikan yang disebabkan oleh perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari faktor penilaian, antara lain penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.

Dari aspek faktor Tata Kelola, Pelaksanaan Tata Kelola dinilai pada peringkat 1 yang mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang secara umum sangat baik.

of Directors and Board of Commissioners who reach 5% (five percent) or more, which includes the type and number of shares.

10. Disclosure of other important matters.
11. Anti-fraud Strategy Report.
12. Whistleblowing System.

The results of the Report on the Implementation of Transparency in the Implementation of Good Corporate Governance, there are no deficiencies so that there is no need for an action plan for deficiencies in the implementation of governance.

Soundness Level the Company GCG Factor

In accordance with OJK Regulation No. 28/POJK.05/2020 concerning Soundness Level Assessment of Financial Services Institutions and OJK Circular Letter No. 11/SEOJK.05/2020 concerning Soundness Level Assessment of Financing Companies and Sharia Financing Companies, the Company has conducted a Soundness level self-assessment for the position of December 31, 2022 with Risk Based Non-Bank Rating (RBNBR) and the resulting Composite Rating value, namely PK-1.

This score proves the Company's soundness is very good so that it is considered very capable of facing significant negative influences caused by changes in business conditions and other external factors. This is reflected in the assessment factors, including the implementation of Good Corporate Governance, risk profile, profitability, and capitalization which are generally very good. In the event that there are weaknesses, they are generally not significant.

From the aspect of Governance factor, the Governance Implementation is rated at 1 which reflects that the Company's management has implemented good corporate governance which is generally very good.

Hasil Penilaian Sendiri Untuk Tata Kelola Perusahaan / Self Assessment on Corporate Governance

Peringkat / Rank	Keterangan / Description
1	<p>Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Sangat Baik sesuai dengan kriteria/indikator. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Perseroan.</p> <p>Implementation of Excellent Corporate Governance in accordance with the criterias / indicators. If there were any problems in the implementation, they were insignificant and can be immediately resolved with the normal actions by the Company's Management.</p>

Sangat Baik / Excellent

Penetapan peringkat faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan berdasarkan analisis atas:

- a. Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perseroan;
- b. Kecukupan Tata Kelola atas struktur (*governance structure*), proses (*governance process*), dan hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) pada Perseroan; dan
- c. Informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

Parameter atau indikator penilaian faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

The determination of the Good Corporate Governance factor rating is based on the above analysis:

- a. Implementation of Good Corporate Governance principles in the Company;
- b. The adequacy of governance structure, governance process, and governance outcome of the implementation of governance in the Company; and
- c. Other information related to the Company's governance based on relevant data and information.

Parameters or indicators of assessment of Good Corporate Governance factors include:

1. Implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemegang Saham atau yang setara.
4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
5. Penanganan benturan kepentingan.
6. Penerapan fungsi kepatuhan Perseroan.
7. Penerapan fungsi audit internal .
8. Penerapan fungsi audit eksternal.
9. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal.
10. Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan, laporan pelaksanaan tata kelola Perseroan yang baik dan pelaporan internal.
11. Hasil analisis penilaian sendiri (*self assessment*) oleh Perseroan menunjukkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sangat sesuai dengan kriteria/ indikator.

Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Perseroan.

Analisis

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan efektif dan memenuhi prinsip-prinsip GCG. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen, memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan ukuran dan kompleksitas Perseroan serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, serta Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisaris terselenggara secara efektif.
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dinilai baik mengingat pelaksanaan tugas-tugas Komite Audit dan fungsi lain telah berjalan efektif, rekomendasi Komite Audit dan fungsi lain bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan keputusan Dewan Komisaris, serta pelaksanaan rapat-rapat Komite Audit dan fungsi lainnya telah berjalan sesuai pedoman kerja masing-masing.
3. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal. Fungsi kepatuhan telah memenuhi kriteria kepatuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Perseroan telah memiliki pedoman audit internal sesuai yang ditetapkan OJK serta dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan audit eksternal telah berjalan efektif, hal ini tercermin dari pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (*member firm of Deloitte Asia Pasific* dan Jaringan Deloitte Global) telah sesuai dengan persyaratan umum

2. Implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners.
3. Implementation of duties and responsibilities of Shareholders or equivalent.
4. Completeness and implementation of the Committee's duties.
5. Handling conflict of interest.
6. Implementation of the Company's compliance function.
7. Implementation of internal audit function.
8. Implementation of external audit function.
9. Implementation of risk management including internal control system.
10. Transparency of financial and non-financial conditions, reports on the implementation of good corporate governance and internal reporting.
11. The results of the self-assessment analysis by the Company show that the implementation of Good Corporate Governance is in accordance with the criteria/indicators.

This is reflected in the very adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. If there are weaknesses in the implementation of Good Corporate Governance principles, then in general these weaknesses are not significant and can be immediately resolved with normal actions by the Company's Management.

Analysis

1. The implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, Board of Commissioners has been carried out effectively and fulfills the principles of GCG. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners are able to act and make decisions independently, have competence and integrity in accordance with the size and complexity of the Company and have fulfilled the applicable regulations. In addition, the Board of Directors Meetings, Board of Commissioners Meetings, and Joint Meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners are effectively organized.
2. The completeness and implementation of the duties of the Audit Committee or functions that assist the Board of Commissioners in monitoring and ensuring the effectiveness of the internal control system is considered good considering that the implementation of the duties of the Audit Committee and other functions has been effective, the recommendations of the Audit Committee and other functions are useful and can be used as a reference for the Board of Commissioners' decisions, and the implementation of Audit Committee meetings and other functions has been carried out in accordance with their respective work guidelines.
3. Implementation of compliance function, internal auditor, and external auditor. The compliance function has met the compliance criteria in accordance with the prevailing laws and regulations. The Company has an internal audit guideline as stipulated by OJK and is implemented effectively and efficiently. The implementation of external audits has been effective, this is reflected in the implementation of audits by Imelda & Partners (member firm of Deloitte Asia Pasifik and Deloitte Global Network) in accordance with the general requirements set out in the provisions as well as

yang ditetapkan dalam ketentuan serta kualitas dan cakupan hasil audit yang sangat baik. Selain itu, Kantor Akuntan Publik bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya sesuai kriteria yang ditetapkan.

4. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal telah berjalan baik dan efektif sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Perseroan, serta risiko-risiko yang dihadapinya. Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
5. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Perseroan selalu transparan dalam menyampaikan kondisi keuangan dan non-keuangan Perseroan. Laporan tersebut disampaikan secara lengkap, akurat, relevan, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan disusun dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian, dan ketentuan peraturan yang berlaku.
8. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih.
9. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, sehingga setiap pengambilan keputusan Direksi dilaksanakan secara independen dan profesional serta sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, sehingga setiap pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris dilaksanakan secara independen dan profesional serta sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada OJK telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

the excellent quality and coverage of the audit results. In addition, the Public Accounting Firm acted independently in carrying out its duties in accordance with the established criteria.

4. The implementation of risk management and internal control systems has been running well and effectively in accordance with the objectives, size and complexity of the Company's business, as well as the risks it faces. The Board of Commissioners and Board of Directors have actively supervised the implementation of risk management policies and strategies.
5. Implementation of remuneration policies and other facilities has been well implemented in accordance with the prevailing laws and regulations.
6. The Company is always transparent in conveying the Company's financial and non-financial conditions. The report is submitted in a complete, accurate, relevant and timely manner in accordance with applicable regulations.
7. Long-term plans and annual work plans and budgets are prepared by taking into account external and internal factors, aspect of prudence, and applicable regulatory provisions.
8. Disclosure of share ownership of members of the Board of Directors and Board of Commissioners reaching 5% (five percent) or more.
9. All members of the Board of Directors do not have financial and family relationships with the other member of the Board of Directors, so that every decision-making of the Board of Directors is carried out independently and professionally and in accordance with applicable regulations.
10. All members of the Board of Commissioners have no financial and family relationships with the other member of the Board of Commissioners, so that any decision making by the Board of Commissioners is carried out independently and professionally and in accordance with applicable regulations.
11. Disclosure of other important matters to the OJK has been carried out properly in accordance with applicable rules and regulations.

Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing

Perseroan menerapkan Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("APU dan PPT") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan menugaskan unit kesatuan kerja Kepatuhan sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT. Pejabat Program APU dan PPT dibantu oleh Kepala Kantor Cabang dalam penerapan program APU dan PPT di kantor cabang. Pejabat Program APU dan PPT ditetapkan bagian dari struktur organisasi dan bertanggung jawab kepada Direksi.

The Company implements the Guidelines for Implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing ("APU and PPT") Program in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 23/POJK.01/2019 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.01/2017 concerning Implementation and Anti-Money Laundering Prevention of Terrorism Program by Financial Service Providers in the Financial Services Sector.

In its implementation, the Company assigns the Compliance work unit as the person in charge of implementing the APU and PPT programs. The APU and PPT Program Officer is assisted by the Head of the Branch Office in implementing the APU and PPT program at the branch office. The APU and PPT Program Officers are assigned as part of the organizational structure and are responsible to the Board of Directors.

Tugas dari penanggung jawab penerapan program APU dan PPT:

1. Menyusun dan melakukan pengkinian pedoman penerapan program APU dan PPT.
2. Memastikan adanya sistem informasi dan prosedur identifikasi nasabah yang memadai, termasuk memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT.
3. Memantau rekening atau *customer account* dan pelaksanaan transaksi *customer*.
4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi nasabah untuk memastikan ada tidaknya Transaksi Keuangan Mencurigakan ("TKM") dan/atau Transaksi Keuangan Tunai ("TKT") yang disampaikan oleh unit kerja yang ditugaskan.
5. Menyusun laporan TKM dan/atau TKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencucian uang dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan terorisme yang wajib dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ("PPATK").

Sepanjang tahun 2022, beberapa langkah dan kebijakan dalam implementasi APU dan PPT, yaitu :

1. Ikut mengimplementasikan aplikasi elektronik GoAML untuk Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan ("LTKM") dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai ("LTKT") kepada PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan).
2. Pelaporan penyaluran pembiayaan setiap triwulan kepada PPATK ("SIPESAT").
3. Turut berperan aktif dalam menyediakan informasi nasabah terkait permintaan PPATK dan KPK.
4. Melakukan pelaporan rencana dan realisasi pengkinian data nasabah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menggunakan sistem pelaporan APOLO.
5. Menindaklanjuti permintaan dari Mabes Polri dan OJK terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).
6. Mengikuti sosialisasi dari PPATK tentang aplikasi Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR), sebuah aplikasi baru dari PPATK yang akan digunakan oleh Lembaga Jasa Keuangan sebagai media pertukaran dan pengelolaan informasi mengenai terduga Pendanaan Terorisme antara PPATK, Pemangku Kepentingan dan/atau Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
7. Melakukan permohonan sebagai pengguna aplikasi Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR).
8. Mengadakan pelatihan dan sosialisasi pada tanggal 20 – 21 Juli 2022 berkerjasama dengan PPATK dengan materi penerapan program APU dan PPT. Pelatihan dan sosialisasi ini diikuti oleh karyawan Kantor Pusat maupun Kantor Cabang khususnya untuk *Area Head, Marketing, Audit Internal* dan Unit Bisnis Korporasi.
9. Menyempurnakan Formulir Aplikasi Pembiayaan yang akan digunakan oleh *Frontliner* dalam melakukan *Customer Due Diligence* (CDD).

Duties of the person in charge of implementing the APU and PPT programs:

1. Prepare and update guidelines for the implementation of the APU and PPT programs.
2. Ensuring that there is an adequate information system and customer identification procedure, including ensuring that forms relating to customers have accommodated the data required in the implementation of the APU and PPT programs.
3. Monitor accounts or customer accounts and execution of customer transactions.
4. Evaluate the results of monitoring and analysis of customer transactions to ensure whether there are Suspicious Financial Transactions ("TKM") and/or Cash Financial Transactions ("TKT") submitted by the assigned work unit.
5. Prepare TKM and/or TKT reports in accordance with the provisions of the laws and regulations regarding money laundering and/or the provisions of the laws and regulations regarding the financing of terrorism which must be reported to the Financial Transaction Reports and Analysis Center ("PPATK").

Throughout 2022, several steps and policies in the implementation of APU and PPT, namely:

1. Participate in implementing in the electronic application Suspicious Financial Transaction Reports ("LTKM") and Cash Financial Transaction Reports ("LTKT") to PPATK (Financial Transaction Reporting and Analysis Center).
2. Quarterly reporting of financing distribution to PPATK ("SIPESAT").
3. Also plays an active role in providing customer information related to PPATK and KPK requests.
4. Reporting plans and realization of updating customer data in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation using the APOLO reporting system.
5. Following up on requests from the Police Headquarters and OJK regarding List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT).
6. Following the socialization from PPATK regarding the application Suspected Terrorism Funding Information System (SIPENDAR), a new application from PPATK which will be used by Financial Services Institutions as a medium for exchanging and managing information regarding suspected Terrorism Funding between PPATK, Stakeholders and/or Financial Service Providers (PJK) to optimize efforts to prevent and eradicate Terrorism Financing Acts.
7. Make an application as a user of the Terrorism Financing Suspected Information System (SIPENDAR) application.
8. Holding training and outreach on July 20-21 2022 in collaboration with PPATK with material on implementing the APU and PPT programs. This training and socialization was attended by employees of the Head Offices and Branch Offices, especially for Area Heads, Marketing, Audit and Corporate Business Units.
9. Refine the Financing Application Form to be used by Frontliners in conducting Customer Due Diligence (CDD).

○ Kebijakan Antikorupsi **Anti-Corruption Policy**

Korupsi merupakan tindak pidana dan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang sangat merugikan keuangan negara. Oleh sebab itu, Perseroan mendukung penuh ketegasan Pemerintah untuk memberantas korupsi di segala lini. Kebijakan anti korupsi merujuk pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk memperkuat dukungan anti korupsi, Perseroan telah mengatur larangan korupsi dalam Kode Etik Perseroan, yang di dalamnya antara lain mengatur kebijakan tentang hadiah dan sumbangan (donasi) yang tidak dibenarkan. Untuk itu, seluruh pengurus dan karyawan Perseroan tidak dibenarkan secara hukum dan etika usaha menerima dan memberi hadiah, sumbangan dalam bentuk uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan, dan fasilitas lainnya (gratifikasi) yang diterima di dalam maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik sesuai Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 B ayat (1). Sejalan dengan dukungan terhadap anti korupsi, Perseroan juga telah memiliki kebijakan terkait anti suap.

Dalam hal ini, Perusahaan mendefinisikan suap sebagai segala bentuk uang, komisi, pinjaman, hadiah, kenikmatan, fasilitas dan apapun yang bernilai manfaat ekonomi, yang diberikan atau diminta, sebagai kompensasi secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau sikap yang memihak. Setiap bentuk pelanggaran atas larangan suap tersebut di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

○ Perlindungan Konsumen **Customer Protection**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan tanggal 18 April 2022. Peraturan ini menggantikan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

POJK tersebut di atas bertujuan untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, perlu mendorong konsumen sektor jasa keuangan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang baik, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan. Saat ini sektor jasa keuangan yang dalam perkembangannya semakin kompleks dan dinamis, memerlukan penguatan pengaturan terhadap perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan.

Dalam rangka mewujudkan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat yang efektif, menjaga kepercayaan Konsumen, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Penyedia Jasa Keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan

Corruption is a criminal acts and an extraordinary crime that is very detrimental to state finances. Therefore, the Company fully supports the government's firmness to eradicate corruption on all fronts. The anti-corruption policy refers to Law No.20 of 2001 on the Amendment to Law No.31 of 1999 on the Eradication of Corruption. To strengthen anti-corruption support, the Company has regulated the prohibition of corruption in the Company's Code of Conduct, which among others regulates the policy on gifts and donations that are not justified. For this reason, all management and employees of the Company are not allowed by law and business ethics to receive and give gifts, donations in the form of money, goods, discounts, commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, medical treatment, and other facilities (gratuities) received inside or outside the country and which are carried out using electronic means or without electronic means in accordance with Law No. 20 of 2001 Article 12 B paragraph (1). In line with its support for anti-corruption, the Company also has an anti-bribery policy.

In this regard, the Company defines bribery as any form of money, commission, loan, gift, enjoyment, facility and anything of economic benefit, given or requested, as direct or indirect compensation, with the intention of obtaining preferential treatment or favorable attitude. Any violation of the prohibition of bribery mentioned above will be subject to sanctions in accordance with applicable regulations.

The Financial Services Authority (OJK) has issued OJK Regulation Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector which on April 18, 2022. This regulation replaces OJK Regulation Number 1/POJK .07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector.

The POJK mentioned above aims to create a financial system that grows in a sustainable, stable manner and is able to protect the interests of customers and society. it is necessary to encourage customers in the financial services sector to create a good customers protection system, increase customers and community empowerment, and raise awareness of financial service business actors. Currently, the financial services sector, which is developing increasingly complex and dynamic, requires strengthening of regulations on the protection of customers and the public in the financial services sector.

In order to realize effective Consumer and Community Protection, maintain Consumer trust, and ensure compliance with statutory provisions, Financial Service Providers must comply with the principles of consumer and public protection, namely adequate education, information disclosure and transparency, fair

masyarakat yaitu edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset, privasi, dan data konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Pemenuhan prinsip-prinsip tersebut dilakukan dalam kegiatan desain, penyediaan dan penyampaian informasi, pemasaran, penyusunan perjanjian, pemberian layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan dan sengketa Konsumen.

1. Pelaksanaan Program Perlindungan Konsumen

- a. **Penyampaian Kepada Direksi**
Menyampaikan penjelasan kepada Direksi pada Rapat Direksi tentang substansi POJK Perlindungan Konsumen.
- b. **Pembentukan Fungsi Perlindungan Konsumen**
Sesuai dengan POJK Perlindungan Konsumen, bahwa Perusahaan wajib memiliki fungsi atau unit untuk pelaksanaan ketentuan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, maka telah dibentuk Fungsi Perlindungan Konsumen yang berada di unit Kepatuhan.
- c. **Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Perlindungan Konsumen.**
Perusahaan menyusun Kebijakan dan Prosedur Perlindungan Konsumen Perseroan menyesuaikan dengan POJK Perlindungan Konsumen.
- d. **Sosialisasi Internal**
Dilakukan sosialisasi kepada unit-unit yang terlibat pada Perlindungan Konsumen tentang substansi POJK Perlindungan Konsumen.
- e. **Penyusunan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)**
Memberikan masukan kepada Departemen *Marketing Development* dalam penyusunan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) sesuai ketentuan POJK Perlindungan Konsumen dan Pedoman Standar Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan OJK.
- f. **Mencantumkan Pernyataan Bahwa Perusahaan Berizin Dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan**
Sesuai dengan pasal 21 POJK Perlindungan Konsumen, maka Perusahaan melakukan penggantian pernyataan pada setiap penawaran, ringkasan informasi produk dan/atau layanan, promosi, atau iklan produk dan/atau layanan, dari pernyataan "terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan" menjadi "berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan" tanpa mencantumkan logo OJK.

treatment and responsible business conduct, asset protection, privacy and Customers data, as well as effective and efficient handling of complaints and dispute resolution.

Fulfillment of these principles is carried out in design activities, providing and delivering information, marketing, drafting agreements, providing services for the use of products and/or services, as well as handling and resolving consumer complaints and disputes.

1. Implementation of the Consumer Protection Program

- a. **Submission to the Board of Directors**
Delivering an explanation to the Board of Directors at the Board of Directors meeting regarding the substance of the POJK on Consumer Protection.
- b. **Formation of Consumer Protection Function**
In accordance with the POJK Consumer Protection, that companies are required to have a function or unit for implementing Consumer and Community Protection provisions, a Consumer Protection Function has been established in the Compliance unit.
- c. **Compilation of Consumer Protection Policies and Procedures.**
The Company prepares the Company's Consumer Protection Policies and Procedures according to the POJK Consumer Protection.
- d. **Internal Socialization**
Dissemination was carried out to the units involved in Consumer Protection regarding the substance of the POJK Consumer Protection.
- e. **Compilation of Product and Service Information Summary (RIPLAY)**
Provide input to the Marketing Development Department in the preparation of Product and Service Information Summary (RIPLAY) in accordance with POJK Consumer Protection provisions and Guidelines for Standard Summary of Information on Products and Services in the Financial Services Sector issued by OJK
- f. **Include a statement that the Company is Licensed and Supervised by the Financial Services Authority**
In accordance with article 21 of the POJK Consumer Protection, the Company changes statements on each offer, summary of product and/or service information, promotions, or advertisements for products and/or services, from the statement "registered and supervised by the Financial Services Authority" to "Licensed and supervised by the Financial Services Authority" without including the OJK logo.

2. Pelatihan/Sosialisasi Perlindungan Konsumen

OJK telah mengadakan sosialisasi dengan terbitnya POJK Perlindungan Konsumen. Perseroan melalui unit Kepatuhan menghadiri sosialisasi yang diadakan oleh OJK ini melalui media *online*. Selain sosialisasi yang diadakan oleh OJK, Perseroan melalui unit yang terlibat dalam Perlindungan Konsumen juga mengikuti sosialisasi Perlindungan Konsumen yang diadakan oleh pihak lain secara media *online*.

2. Consumer Protection Training/Socialization

OJK has held socialization with the publication of POJK Costumers Protection. The Company through the Compliance unit attended the socialization held by OJK through online media. In addition to socialization held by OJK, the Company through units involved in CostumersProtection also participated in Costumers Protection socialization held by other parties via online media.

No.	Tema Sosialisasi / Socialization Theme	Tanggal / Date	Penyelenggara / Organizer
1	Focus Group Discussion (FGD) Terkait POJK Nomor 6 / POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen & Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Focus Group Discussion (FGD) Related to POJK Number 6 / POJK.07/2022 Concerning Consumer & Community Protection in the Financial Services Sector.	5 Jul 2022	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia ("APPI")
2	Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Market Conduct Di Sektor Jasa Keuangan. The Role of the Financial Services Authority in Supervising Market Conduct in the Financial Services Sector.	2 Aug 2022	Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
3	Webinar Sosialisasi Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Socialization Webinar of OJK Regulation Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector.	9 Aug 2022	Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
4	POJK NO.6/POJK.07/2022 : Panduan Penerapan Interpretasi dan Implementasi Regulasi Terkait Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. POJK NO.6/POJK.07/2022 : Guidelines for the Implementation of Interpretation and Implementation of Regulations Related to Consumer and Community Protection.	12 Aug 2022	Lembaga Pengembangan Profesi Risiko, Manajemen, dan Gagasan ("LPP RMG")
5	Sosialisasi Pelaksanaan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tahun 2022 oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Socialization of 2022 Self-Assessment Implementation by Financial Service Providers (PUJK).	6-7 Sep 2022	Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
6	Webinar Perlindungan Konsumen di Era Digital. Webinar on Consumer Protection in the Digital Age.	6 Oct 2022	OJK Institute

Rekomendasi Dalam Penerapan Pedoman GCG Recommendation On GCG Implementation

Berikut ini adalah status rekomendasi dalam Penerapan Pedoman GCG Perusahaan Terbuka sesuai Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

The following is the recommendation status in the Implementation of GCG Guidelines for Public Company in accordance with OJK Circular No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Corporate Governance Guidelines for Public Company.

Hubungan Perusahaan Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham The relationships between The Company with Shareholders In Ensuring the Rights of Shareholders	
Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Increased the Value of General Meeting of Shareholders (GMS) Implementation	
Rekomendasi / Recommendation	
<p>Perusahaan memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.</p> <p>Keterangan : TELAH DITERAPKAN Perseroan telah memiliki prosedur pengambilan suara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 13 butir 10 Anggaran Dasar Perseroan, tiap saham memberikan hak kepada pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara. Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan. Kedua, mereka yang memberikan suara abstain akan diminta mengangkat tangan, dan Mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dinyatakan sebagai menyetujui usul keputusan RUPS dan kepada mereka tidak dimintakan untuk mengangkat tangan. Notaris akan melaksanakan perhitungan dan melaporkan hasil pemungutan suara tersebut, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan menyampaikan kepada Pemimpin Rapat. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, tapi tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. 	<p>The Company had methods or technical procedures for poll (<i>voting</i>), either open or closed that promoted the independence and the interests of shareholders.</p> <p>Description : APPLIED The Company has the following voting procedures:</p> <ol style="list-style-type: none"> In accordance with Article 12 paragraph 13 number 10 of the Company's Articles of Association, every share gives the owner the right to issue 1 (one) vote. Decision making is carried out with deliberations for consensus. If there are shareholders or their proxies who do not agree, then the decision will be decided with voting. If voting is called, it will be carried out verbally, by raising hands with the following procedure: <ol style="list-style-type: none"> First, those who disagree will be asked to raise their hands. Second, those who vote abstained will be asked to raise their hands, and Those who did not raise their hands in the first and second stages were declared as agreeing to the GMS decision and they were not asked to raise their hands. The notary will carry out the calculation and report the results of the vote in accordance with the Company's Articles of Association and submit it to the Chairperson of the Meeting. Shareholders with voting rights who attend the meeting but do not vote (abstain) are considered to vote the same as the majority vote of shareholders who vote.
Rekomendasi / Recommendation	
<p>Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.</p> <p>Keterangan : DIJELASKAN RUPS Tahunan yang diadakan oleh Perseroan di tahun 2022, dihadiri oleh 2 (dua) anggota Dewan Komisaris dan seluruh anggota Direksi.</p>	<p>All members of both the Board of Directors and the Board of Commissioners attended the Annual General Meeting of Shareholders.</p> <p>Description : ELABORATED The Annual GMS held by the Company in 2022 was attended by 2 (two) members of the Board of Commissioners and all of the members of the Board of Directors.</p>
Rekomendasi / Recommendation	
<p>Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun</p> <p>Keterangan : TELAH DITERAPKAN Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perseroan.</p>	<p>Minutes of meeting of the GMS were available in the website of the Company for at least one (1) year.</p> <p>Description : APPLIED A summary of the GMS minutes is available on the Company's website.</p>

Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan dengan Pemegang Saham atau Investor
Improved the Quality of Company Communications with Shareholders or investors

Rekomendasi / Recommendation

Perusahaan terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.

The Public Company had methods or a policy of communication with shareholders or investors.

Keterangan : **TELAH DITERAPKAN**

Saat ini, komunikasi dengan pemegang saham atau investor seperti laporan keuangan berkala, laporan tahunan, keterbukaan informasi, pelaksanaan tata kelola melalui situs web Perseroan.

Description : **APPLIED**

At present, communication with shareholders or investors such as periodic financial reports, annual reports, information disclosure, governance implementation is carried out through the Company's website.

Rekomendasi / Recommendation

Perusahaan terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web.

The Public Company revealed its communication policy with Shareholders or investors in website.

Keterangan : **TELAH DITERAPKAN**

Untuk kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor, maka komunikasi dilakukan melalui situs web Perseroan.

Description : **APPLIED**

For equality to all shareholders or investors, communication is carried out through the Company's website.

Fungsi dan Peran Dewan Komisaris
The Functions and Roles of the Board of Commissioners

Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris
Strengthened the Membership and Compositions of the Board of Commissioners

Rekomendasi / Recommendation

Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan.

Determination of the number of members of the Board of Commissioners considered the condition of the Company.

Keterangan : **TELAH DITERAPKAN**

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tahunan yang diadakan pada 29 Juli 2022, RUPS menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris. RUPS tersebut telah menyetujui mengangkat Roosniati Salihin sebagai Komisaris yang berlaku efektif sesuai dengan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Description : **APPLIED**

Based on the annual General Meeting of Shareholders ("GMS") held on 29 July 2022, the GMS approved the appointment of members of the Board of Commissioners. The GMS has approved the appointment of Roosniati Salihin as Commissioner which will be effective in accordance with the Decree of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority ("OJK").

Dengan ditutupnya RUPS tahunan Perseroan yang diadakan pada tanggal 29 Juli 2022, maka masa jabatan Gunawan Santoso sebagai Komisaris telah berakhir.

With the closing of the Company's Annual GMS which was held on July 29, 2022, Gunawan Santoso's term of office as Commissioner has ended.

Hingga saat diterbitkannya Laporan Tahunan ini, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Until the publication of this Annual Report, the composition of the Board of Commissioners of the Company is as follows:

Komisaris Utama : Takeshi Sasaki
Komisaris : Roosniati Salihin
Komisaris Independen : Mohammad Syahril

President Commissioner : Takeshi Sasaki
Commissioner : Roosniati Salihin
Independent Commissioner : Mohammad Syahril

Rekomendasi / Recommendation	
<p>Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.</p>	<p>Determination of the composition of the Board of Commissioners by considering the competence, knowledge and experience required.</p>

Keterangan : TELAH DITERAPKAN

Dengan latar belakang industri otomotif dan perbankan, maka keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dari anggota Dewan Komisaris Perseroan sudah memenuhi kebutuhan bisnis pembiayaan

Description : APPLIED

With backgrounds in automotive and banking industry, the expertise, knowledge and experience of members of the Company's Board of Commissioners fulfilled the financing business needs.

Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Improved the Quality of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Rekomendasi / Recommendation	
<p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p>	<p>The Board of Commissioners has a self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Commissioners.</p>

Keterangan : TELAH DITERAPKAN

Perseroan sudah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi, yang saat ini sedang menyusun kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris secara kolegal.

Description : APPLIED

The Company has formed a Nomination and Remuneration Committee, which is currently preparing a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners as whole.

Rekomendasi / Recommendation	
<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan.</p>	<p>Self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Commissioners was disclosed in the Annual Report of the Company.</p>

Keterangan : TELAH DITERAPKAN

Perseroan sudah memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Dewan Komisaris.

Description : APPLIED

The Company has designed a self-assessment policy for the Board of Commissioners.

Rekomendasi / Recommendation	
<p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p>	<p>The Board of Commissioners had a policy related to the resignation of members of the Board of Commissioners when involved in financial crimes.</p>

Keterangan : DIJELASKAN

Perseroan saat ini sedang menyusun kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.

Description : ELABORATED

The Company is currently designing a policy related to the resignation of members of the Board of Commissioners when involved in financial crimes.

Rekomendasi / Recommendation	
<p>Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.</p>	<p>The Board of Commissioners or committee that ran the Nomination and Remuneration function developed succession policies in the Nomination process of members of the Board of Directors.</p>

Keterangan : TELAH DITERAPKAN

Salah satu tugas dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS.

Description : APPLIED

One of the tasks of the Company's Nomination and Remuneration Committee is to review and propose candidates who qualify as members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors to the Board of Commissioners to be presented at the GMS.

Fungsi dan Peran Direksi
Functions and Role of The Board of Directors

Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi
Strengthened Membership and Composition of the Board of Directors

Rekomendasi / Recommendation	
<p>Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.</p>	<p>Determination of the number of Board of Directors members by considering the condition of the Company and decision making effectiveness.</p>

Keterangan : TELAH DITERAPKAN

Jumlah anggota Direksi Perseroan adalah 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut:

Description : APPLIED

The number of members of the Company's Board of Directors is 5 (five) people, with the following composition:

- Direktur Utama : Konosuke Mizuta
- Direktur : Shunsuke Kojima
- Direktur : Andi Harjono
- Direktur : Ade Rafida Saulina S
- Direktur : Yudi Gustiawan

- President Director : Konosuke Mizuta
- Director : Shunsuke Kojima
- Director : Andi Harjono
- Director : Ade Rafida Saulina S
- Director : Yudi Gustiawan

Jumlah Direksi sudah sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta mempertimbangkan kondisi Perseroan, pemenuhan kebutuhan bisnis dan efektivitas pengambilan keputusan Direksi.

The number of Directors is in accordance with POJK No. 33/POJK.04/2014 Concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and taking into account the condition of the Company, fulfillment of business needs and effectiveness of the Board of Directors decision making.

Rekomendasi / Recommendation

Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.

Determination of the composition of the Board of Directors members considering the diversity of skills, knowledge and experience required.

Keterangan : **TELAH DITERAPKAN**

Dengan latar belakang dari industri otomotif, pembiayaan ritel, pembiayaan korporasi, dan keuangan, maka keahlian, pengetahuan dan pengalaman dari anggota Direksi Perseroan sudah memenuhi kebutuhan bisnis pembiayaan.

Description : **APPLIED**

With a background in automotive, retail financing, corporate financing, and finance, the expertise, knowledge and experience of the Company's Board of Directors fulfilled the financing business needs.

Rekomendasi / Recommendation

Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.

Member of the Board of Directors were in charge in accounting or financial has expertise and / or knowledge in the field of accounting.

Keterangan : **TELAH DITERAPKAN**

Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki pengetahuan di bidang akuntansi.

Description : **APPLIED**

Member of the Board of Directors who are in charge of accounting or finance has expertise in accounting.

Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Improved the Quality of Duties and Responsibilities of Directors

Rekomendasi / Recommendation

Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.

The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.

Keterangan : **DIJELASKAN**

Perseroan sudah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi, yang saat ini sedang menyusun kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi secara kolegal sehingga tiap-tiap anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan.

Description : **ELABORATED**

The Company already has a Nomination and Remuneration Committee, which is currently developing a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors collegially so that each member of the Board of Directors can contribute to continuously to improve the performance of the Board of Directors.

Rekomendasi / Recommendation

Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan.

Policy assessment (self-assessment) to assess the performance of the Board of Directors expressed through the annual report of the Company.

Keterangan : **DIJELASKAN**

Kinerja Direksi selalu diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan dan Perusahaan saat ini sedang menyusun kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan.

Description : **ELABORATED**

The performance of the Board of Directors is always disclosed through the Company's Annual Report and the Company is currently developing a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors disclosed through the Company's Annual Report.

Rekomendasi / Recommendation

Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.

The Board of Directors had policies related to the resignation of the Board of Directors members if they were involved in financial crimes.

Keterangan : **DIJELASKAN**

Perseroan saat ini sedang menyusun kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.

Description : **ELABORATED**

The Company is currently designing a policy related to the resignation of members of the Board of Directors when involved in financial crimes.

Partisipasi Pemangku Kepentingan
Participation of Stakeholders

Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan
Increased Aspects of Corporate Governance through Stakeholder Participation

Rekomendasi / Recommendation

Perusahaan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*.

The Company had a policy to prevent insider trading.

Keterangan : **TELAH DITERAPKAN**

Untuk meminimalisasi terjadinya *insider trading*, melalui kebijakan pencegahan, dimana Perseroan menunjuk fungsi tertentu yang mengelola data/informasi yang bersifat rahasia.

Description : **APPLIED**

To minimize insider trading through preventive policies, where the Company appoints certain functions that manage confidential data/information.

Rekomendasi / Recommendation

Perusahaan terbuka memiliki kebijakan anti-korupsi dan anti-*fraud*.

The Company had a policy of anti-corruption and anti-fraud.

Keterangan : **TELAH DITERAPKAN**

Perseroan sudah memiliki kebijakan terhadap *fraud*, gratifikasi, serta praktik korupsi, baik memberi maupun menerima dari pihak lain.

Description : **APPLIED**

The Company has made a policy on fraud, gratuity, and corrupt practices, both giving and receiving from other parties.

Rekomendasi / Recommendation

Perusahaan memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor*.

The company has a policy regarding the selection and capacity building of the suppliers or vendors.

Keterangan : **TELAH DITERAPKAN**

Kebijakan tersebut tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Perseroan mempunyai komitmen yang kuat untuk bekerja sama dengan *Dealer/Showroom/Vendor* secara bertanggung jawab dan menjunjung tinggi etika bisnis, dengan senantiasa:

- Menggunakan cara-cara yang benar sesuai dengan ketentuan hukum dalam bertransaksi dengan *Dealer/ Showroom/Vendor*;
- Menghormati dan mematuhi semua ketentuan dalam perjanjian kerja sama yang telah disepakati.

Description : **APPLIED**

The policy is stated in the Corporate Governance Guidelines. The Company has a strong commitment to collaborate with Dealers/ Showrooms/Vendors responsibly and uphold business ethics, by always:

- Use methods in accordance with legal provisions in dealing with Dealers/Showrooms/Vendors;
- Respect and comply with all provisions in the agreed cooperation agreement.

Rekomendasi / Recommendation

Perusahaan memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.

The Company had a policy on the fulfillment of the rights of creditors.

Keterangan : **TELAH DITERAPKAN**

Kebijakan tersebut tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Kerja sama dengan kreditur sebagai mitra usaha dilaksanakan dengan prinsip saling percaya, kesamaan hak, dan saling menguntungkan.

Description : **APPLIED**

The policy is stated in the Corporate Governance Guidelines. Cooperation with creditors as business partners is carried out with the principles of mutual trust, equal rights, and mutual benefit.

Rekomendasi / Recommendation

Perusahaan terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*.

The Public Company had a policy of whistleblowing systems.

Keterangan : **TELAH DITERAPKAN**

Perseroan sudah memiliki kebijakan sistem *whistleblowing* yang mencakup jenis pelanggaran, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, dan tindak lanjut pengaduan.

Description : **APPLIED**

The Company has a whistleblowing system policy that covers the types of violations, procedures of complaints, protection and guarantee of reporters confidentiality, complaints handling, and follow-up on complaints.

Rekomendasi / Recommendation

Perusahaan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.

The Public Company had a policy of long-term incentives for Board of Directors and employees.

Keterangan : **TELAH DITERAPKAN**

Perseroan telah memiliki kebijakan pemberian insentif bagi karyawan yang telah bekerja 5 (lima) tahun dan kelipatannya.

Description : **APPLIED**

The Company has a policy of providing incentives for employees who have worked 5 (five) years.

Keterbukaan Informasi
Information Disclosure

Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi
Improved the Implementation of Information Disclosure

Rekomendasi / Recommendation

Perusahaan terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.

The Public Company utilized the use of information technology more widely besides Website as a media openness of The Company.

Keterangan : **TELAH DITERAPKAN**

Keterbukaan informasi dilakukan melalui situs web Perseroan, website Bursa Efek Indonesia ("IDXnet"), Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan media koran sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Description : **APPLIED**

Disclosure of information is carried out through the Company's website, website of the Indonesia Stock Exchange ("IDXnet"), Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") and newspaper media as regulated in the applicable laws and regulations.

Rekomendasi / Recommendation

Laporan Tahunan Perusahaan mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan melalui pemegang saham utama dan pengendali.

Annual Report had disclosed the ultimate beneficiary owners in the ownership of Company shares at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of the final beneficial owner in the Company's ownership through the main shareholder and controller.

Keterangan : **TELAH DITERAPKAN**

Dalam Laporan Tahunan Perseroan telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan Perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.

Description : **APPLIED**

In the Annual Report the Company revealed the final beneficial owner in the ownership of a public company share of at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of the final beneficial owner in the ownership of a publicly listed company through the main and controlling shareholders.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN

SOCIAL & ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

MIZUHO



○ **Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan** Corporate Social Responsibility Commitment and Policy

Perseroan berkomitmen untuk selalu menjalankan usahanya dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan operasional kantor, Perseroan senantiasa berusaha melindungi dampak keuangan, lingkungan dan sosial dengan bantuan kebijakan yang relevan. Perseroan memiliki Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (“RAKB”), yang secara khusus memandu berbagai langkah perlindungan lingkungan dan sosial serta memastikan bahwa para pemangku kepentingan dapat benar-benar merasakan manfaat berkelanjutan dari operasi dan bisnis Perseroan.

The Company is committed to always run its business by maintaining the balance on economic, social and environmental aspects. Therefore, in carrying out its business, the Company always tries to maintain economic, environmental and social impacts with the help of relevant policies. The company has a Sustainable Finance Action Plan (“RAKB”), which specifically guides various environmental and social protection measures and ensures that stakeholders can truly experience sustainable benefits from our operations and business.

○ **Visi Misi, dan Nilai Perseroan** Vision, Mission and Values of The Company

Visi

Vision

“Menjadi Perusahaan yang Menciptakan Dunia yang Berkelanjutan”
“Be a Creator of a Sustainable World”

Misi

Mission

“Menghubungkan Kebutuhan untuk Menciptakan Masa Depan”
“Connect Needs to Create the Future”

Nilai-nilai Perseroan

Corporate Values

CHALLENGE

CREATE

CHANGE

COLLABORATE

Melalui kolaborasi, kami akan menghadapi tantangan, membuat perubahan, dan mempercepat penciptaan

Through collaboration, we will take on challenges, enact change and accelerate creation

○ **Profil Perusahaan** Company Profile

Data profil Perusahaan dapat ditemukan pada halaman 30.

The Company profile data can be found on page 30.

Penjelasan Strategi Keberlanjutan Elaboration on Sustainability Strategy

Ringkasan Eksekutif

Perkembangan kondisi sosial dan lingkungan yang dialami secara global saat ini telah merubah paradigma pembangunan bangsa-bangsa yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata, namun juga perlu memperhatikan aspek sosial, pemerataan kesejahteraan serta kelangsungan lingkungan hidup yang menjadi dambaan manusia.

Sejalan dengan hal itu Indonesia telah berkomitmen untuk mengembangkan sistem perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Lembaga Jasa Keuangan sebagai salah satu sektor yang berkontribusi dalam pembangunan nasional perlu juga berpartisipasi dalam penerapan keuangan berkelanjutan. Pengembangan sistem perekonomian yang selaras tersebut membutuhkan dukungan pendanaan dari lembaga jasa keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagai institusi yang melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan juga telah menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia tahun 2015 – 2019 pada bulan Desember 2014.

Sebagai kelanjutan, di tahun 2021 OJK telah menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025) sebagai panduan untuk mempercepat penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola di Indonesia yang berfokus pada penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan secara komprehensif, dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan mendorong pengembangan kerja sama dengan pihak lain. Selanjutnya melalui Siaran Pers tanggal 5 Oktober 2021 Otoritas Jasa Keuangan juga telah mengumumkan pembentukan *Task Force* Keuangan Berkelanjutan di Sektor Jasa Keuangan ("SJK").

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk sebagai salah satu Lembaga Jasa Keuangan dan sekaligus Perusahaan Publik menyadari pentingnya masalah pengelolaan keuangan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip *triple bottom line (profit-people-planet)* dalam kegiatan usahanya, dimana antara kepentingan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, ketiganya perlu berjalan dengan selaras. PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk berkomitmen untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usahanya.

Sebagai Implementasi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk Tahun 2020, 2021 dan 2022 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta menyusun Laporan Keberlanjutan untuk Tahun 2020 dan 2021 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia serta di-*upload* di *website* Perseroan.

Executive Summary

The development of social and environmental conditions experienced globally at this time has changed the paradigm of development of the nations that are not only based on economic growth, but also needs to pay attention to the social aspects, equitable distribution of welfare and environmental sustainability which are human desires.

In line with the above, Indonesia has committed to develop a national economic system that promotes harmony between economic, social and environmental aspects. Financial Services Institutions as one of the sectors that contribute to national development also need to participate in the implementation of sustainable finance. The development of a harmonized economic system requires funding support from financial service institutions.

In connection with this the Financial Services Authority (OJK) as an institution that conducts regulation and supervision in the financial services sector has issued OJK Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies. Previously, the Financial Services Authority had also issued a Sustainable Finance Roadmap in Indonesia for 2015 – 2019 in December 2014.

As a continuation, in 2021 the OJK has issued a Phase II Sustainable Finance Roadmap (2021 – 2025) as a guide to accelerate the application of environmental, social and governance principles in Indonesia which focuses on creating a comprehensive sustainable financial ecosystem, involving all parties related and encourage the development of cooperation with other parties. Furthermore, through a Press Release on 5 October 2021, the Financial Services Authority ("OJK") has also announced the formation of a Sustainable Finance Task Force in the Financial Services Sector ("SJK").

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk as one of the Financial Services Institutions and at the same time a Public Company realizes the importance of sustainable financial management issues by applying the triple bottom line (profit-people-planet) principle in its business activities, where the interests of economic, social and environmental aspects, all three need to work in harmony. PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk is committed to implementing Sustainable Finance in its business activities.

As Implementation PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk has prepared a Sustainable Finance Action Plan for 2020, 2021 and 2022 which has been submitted to the Financial Services Authority and prepared a Sustainability Report for 2020 and 2021 which has been submitted to the Financial Services Authority and PT Bursa Efek Indonesia and also uploaded on the Company's website.

Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Achievements of Sustainable Finance Action Plan

Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan di tahun 2020, 2021, dan 2022 PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

The achievements of the Sustainable Finance Action Plan in 2020, 2021 and 2022 of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk are as follows:

Rencana Aktivitas Activity Plan	Indikator Pencapaian Achievement Indicator	Realisasi Waktu Pelaksanaan Actual Implementation Time	Pencapaian Actual Achievement
<p>Seminar konsep dasar Keuangan Berkelanjutan kepada sebagian besar pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) dan karyawan di tingkat manajerial/ pengambil keputusan.</p> <p>Seminar on the basic concepts of Sustainable Finance to most of the management (Board of Commissioners and Board of Directors) and employees at the managerial/decision-making level.</p>	<p>80% dari Dewan Komisaris, Direksi, Deputy Direktur dan Kepala Divisi telah mengikuti seminar Keuangan Berkelanjutan.</p> <p>80% of the Board of Commissioners, Board of Directors, Deputy Directors and Division Heads have attended the Sustainable Finance seminar.</p>	<p>Triwulan III 2020 Quarter III 2020</p>	<p>100% dari Dewan Komisaris, Direksi, Deputy Direktur dan Kepala Divisi telah mengikuti seminar Keuangan Berkelanjutan.</p> <p>100% of the Board of Commissioners, Board of Directors, Deputy Directors and Division Heads have attended the Sustainable Finance seminar.</p>
<p>Pelaksanaan edukasi internal kepada karyawan kunci di Kantor Pusat bekerja sama dengan pihak eksternal.</p> <p>Implementation of internal education for key employees at the head office in collaboration with external parties.</p>	<p>75% dari <i>Department Head</i> dan <i>Section Head</i> telah mengikuti training Keuangan Berkelanjutan.</p> <p>75% of Department Heads and Section Heads have attended Sustainable Finance training.</p>	<p>Triwulan IV 2020 Quarter IV 2020</p>	<p>100% dari <i>Department Head</i> dan <i>Section Head</i> telah mengikuti training Keuangan Berkelanjutan (hanya dilakukan oleh pihak internal tanpa melibatkan pihak eksternal).</p> <p>100% of Department Heads and Section Heads have participated in Sustainable Finance training (only carried out by internal parties without involving external parties).</p>
<p>Melakukan program pelatihan terkait Keuangan Berkelanjutan kepada Cabang.</p> <p>Conduct training programs related to Sustainable Finance for Branches.</p>	<p>Sebanyak 50% dari Cabang telah mengikuti pelatihan Keuangan Berkelanjutan.</p> <p>50% of the Branches have attended Sustainable Finance training.</p>	<p>Triwulan III 2021 Quarter III 2021</p>	<p>Pelatihan <i>awareness</i> Keuangan Berkelanjutan telah dilakukan kepada 18 orang kepala kantor cabang (100% dari cabang) pada bulan September 2021 melalui media Zoom.</p> <p>Sustainable Finance awareness training was conducted for 18 branch heads (100% of branches) in September 2021 via Zoom media.</p>
<p>Peningkatan kapasitas manajemen risiko analis kredit untuk sektor usaha yang memiliki risiko sosial dan lingkungan hidup yang tinggi bagi anggota Komite Kredit.</p> <p>Increasing the risk management capacity of credit analysts for business sectors that have high social and environmental risks for members of the Credit Committee.</p>	<p>Sebanyak 50% dari anggota Komite Kredit telah mengikuti training terkait manajemen risiko sosial dan lingkungan.</p> <p>As many as 50% of the members of the Credit Committee have attended training related to social and environmental risk management</p>	<p>Triwulan IV 2022 Quarter IV 2022</p>	<p>Telah dilakukan training analisa kredit terkait manajemen risiko sosial dan lingkungan terhadap 31 (tiga puluh satu) orang dari unit business korporasi dan unit business retail, termasuk cabang-cabang pada bulan November 2022 melalui media Zoom.</p> <p>Credit analysis training has been carried out related to social and environmental risk management for 31 (thirty one) people from the corporate business unit and retail business unit, including branches in November 2022 via Zoom media.</p>

○ Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Objective of Sustainable Finance Action Plan

Berkaitan dengan komitmen untuk menerapkan keuangan berkelanjutan, Perseroan menargetkan untuk mencapai Visi Keuangan Berkelanjutan pada tahun 2024 dengan mempertimbangkan baik faktor eksternal maupun faktor internal seperti kondisi keuangan, kapasitas teknis dan kapasitas organisasi.

Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan adalah sebagai berikut: “ **Menjadi Perusahaan yang Menciptakan Dunia yang Berkelanjutan dengan menyelaraskan aspek sosial dan lingkungan**”

Untuk mencapai tujuan tersebut Perseroan mengimplementasikan strategi antara lain :

- Dukungan penuh manajemen dalam penerapan keuangan berkelanjutan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan tata kelola dalam kegiatan usaha Perseroan;
- Peran aktif karyawan yang memiliki *skill* yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya maupun kompetensi penerapan keuangan berkelanjutan sesuai jenjang tugasnya;
- Memperhatikan aspek sosial baik secara internal untuk mewujudkan misi Perseroan dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, maupun secara eksternal lingkungan sosial Kantor Pusat dan Cabang sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Perseroan dan menjaga risiko reputasi;
- Memperhatikan aspek ramah lingkungan di internal Perseroan dengan berbagai upaya untuk efisiensi energi, efisiensi penggunaan air, kertas dan plastik.

In relation to the commitment to implement sustainable finance, Company targeted to achieve the sustainable finance vision in the year of 2024 by considering internal and external factors such as financial condition, technical capacity, and the organization capacity.

The objective of The Company's Sustainable Finance Action Plan are as follows : “ **Be a Creator of a Sustainable World by Aligning Social and Environmental Aspects**”

To achieve this goal the Company implements strategies as follows:

- Full support of Managements in implementing sustainable finance by balancing economic, social, environmental and governance aspects in Company's business activities;
- The active role of employees who have the skills needed to carry out their duties and as well as the competence in the implementation of sustainable finance in accordance with their level of duties;
- Paying attention to social aspects and internally to realize the Company's mission in developing competent human resources, as well as externally the social environment of the Head Office and Branches to increase public trust in the Company and maintain reputation risk;
- Paying attention to environmental friendly aspects within the Company with various efforts for energy efficiency, efficient use of water, paper and plastic.

○ Program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Objective of Sustainable Finance Action Plan

Langkah strategis PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk dalam upaya internalisasi prinsip keuangan Keuangan Berkelanjutan dalam rencana, kegiatan usaha dan pengembangan produk secara umum dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :

- | | |
|--------------------------------|---|
| a. Tahap Persiapan | : Selama 2 (dua) tahun, yaitu 2020 - 2021 |
| b. Tahap Implementasi Awal | : Selama 2 (dua) tahun, yaitu 2022 - 2023 |
| c. Tahap Implementasi Lanjutan | : Selama 1 (satu) tahun, yaitu 2024 |

Tema dan program pada setiap tahapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

The strategic steps of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk in an effort to internalize financial principles of Sustainable Finance in plans, business activities and product development in general are divided into 3 (three) stages, namely :

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| a. Preparation Phase | : For 2 (two) years, 2020 - 2021 |
| b. Initial Implementation Phase | : For 2 (two) years, 2022 - 2023 |
| c. Advance Implementation Phase | : For 1 (one) year, 2024 |

Themes and programs at each of these phases can be described as follows:

	Tahap Persiapan Preparation Phase		Tahap Implementasi Awal Initial Implementation Phase		Tahap Implementasi Lanjutan Advanced Implementation Phase
	2020	2021	2022	2023	2024
Tema Utama Main Themes	Persiapan Dasar untuk Penerapan Keuangan Berkelanjutan.		Persiapan Infrastruktur Keuangan Berkelanjutan		Pengembangan Portfolio Keuangan Berkelanjutan
	Basic Preparations for Sustainable Finance Implementation.		Sustainable Finance Infrastructures Preparation		Sustainable Finance Portfolio Development
Program	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas terkait Keuangan Berkelanjutan kepada sebagian besar pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) dan karyawan di tingkat manajerial / pengambil keputusan Capacity building related to Sustainable Finance to most of the management (BOC and BOD) and employees at managerial/decision-making level Pelaksanaan edukasi internal kepada karyawan kunci di kantor pusat bekerja sama dengan pihak eksternal Implementation of internal education to key employees at head office in collaboration with external parties 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kajian dalam rangka penyusunan Pedoman Perusahaan Keuangan Berkelanjutan Carrying out assessment in term of preparation of Company's Guidelines for Sustainable Finance Peningkatan kapasitas manajemen risiko analis kredit untuk sektor usaha yang memiliki risiko sosial dan lingkungan hidup yang tinggi bagi kepada Anggota Komite Kredit Improving risk management capacity of credit analysts for business sectors with high social and environmental risk to Credit Committee Member Melakukan program pelatihan terkait Keuangan Berkelanjutan kepada Cabang. Conducting training programs related to Sustainable Finance to Branches 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan berbagai kajian antara lain : Carrying out various assessments, including : <ul style="list-style-type: none"> Permintaan pasar terhadap produk dan/ atau jasa Keuangan Berkelanjutan Market demand for Sustainable Finance products and/or services Kesesuaian produk dan/ atau jasa yang sudah ada dengan kriteria kegiatan usaha berkelanjutan Conformity of existing products and/ or services with the sustainable business activity criteria Pengembangan produk dan/ atau jasa Keuangan Berkelanjutan Development of Sustainable products and/or finance services Integrasi manajemen risiko sosial, lingkungan hidup dan tata kelola dalam aktivitas bisnis perusahaan Risk management Integration of social, environmental and governance in the Company's business activities Penyesuaian klasifikasi kegiatan usaha Perusahaan Adjustment of Company's business activity classification Penyusunan Pedoman Perusahaan Keuangan Berkelanjutan yang mendukung praktek ramah lingkungan dalam kegiatan operasional perusahaan Preparation of Company's Guidelines for Sustainable Finance that support environmental friendly practices in the Company's operational activity 	<ul style="list-style-type: none"> Refreshment Program Keuangan Berkelanjutan di cabang kepada anggota Komite Kredit Sustainable Finance Refreshment Program in branches to Credit Committee members Inisiasi portofolio produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan Initiation of portofolio of Sustainable Finance products and/or services Risiko sosial, lingkungan hidup dan tata kelola telah terintegrasi dalam aktivitas bisnis Perusahaan Social, environmental and governance risk has been integrated into Company's business activities Pelaksanaan edukasi nasabah terkait produk dan/ atau jasa Keuangan Berkelanjutan Conducting customer education related to Sustainable Finance products and/or services Pelatihan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan kepada Credit Marketing Officer di cabang Training of Sustainable Finance products and/or services to Credit Marketing Officers in branches 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan portofolio produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan Increasing portfolio of Sustainable Finance products and/or services Pengembangan sistem pelaporan Keuangan Berkelanjutan Development of Sustainable Finance Reporting System

Tema Utama Main Themes	Tahap Persiapan Preparation Phase		Tahap Implementasi Awal Initial Implementation Phase		Tahap Implementasi Lanjutan Advanced Implementation Phase
	2020	2021	2022	2023	2024
	Persiapan Dasar untuk Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Basic Preparations for Sustainable Finance Implementation.		Persiapan Infrastruktur Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance Infrastructures Preparation		Pengembangan Portfolio Keuangan Berkelanjutan Sustainable Portfolio Development
Program			<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan SOP Keuangan Berkelanjutan Preparation of SOP of Sustainable Finance 		

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 5 (Lima) Tahun 5 (Five) Years Sustainable Finance Action Plan

No	Tahun Year	Target Kegiatan Prioritas Priority Activity Targets	Indikator Keberhasilan Success Indicator
1	2020	<p>Peningkatan kapasitas terkait Keuangan Berkelanjutan kepada sebagian besar pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) dan karyawan di tingkat manajerial / pengambil keputusan. Capacity building related to Sustainable Finance to most of the management (BOD and BOC) and employees at managerial level/decision-making level.</p> <p>Pelaksanaan edukasi internal kepada karyawan kunci di Kantor Pusat bekerja sama dengan pihak eksternal. Implementation of internal education to key employees at head office in collaboration with external parties.</p>	<p>80% dari Dewan Komisaris, Direksi, Deputi Direktur dan Kepala Divisi telah mengikuti seminar Keuangan Berkelanjutan. 80% of BOD, BOC, Deputy Directors and Division Head have attended the Sustainable Seminar.</p> <p>75% dari <i>Department Head dan Section Head</i> telah mengikuti training Keuangan Berkelanjutan. 75% of Department Heads and Section Heads have attended the Sustainable training.</p>
2	2021	<p>Melakukan kajian dalam rangka penyusunan Pedoman Perusahaan Keuangan Berkelanjutan. Carrying out assessment in term of preparation of the Company's Guidelines on Sustainable Finance.</p> <p>Peningkatan kapasitas analis manajemen risiko kredit untuk sektor usaha yang memiliki risiko sosial dan lingkungan hidup yang tinggi bagi anggota Komite Kredit. Improving risk management capacity of credit analysts for business sectors with high social and environmental risk to Credit Committee members.</p> <p>Melakukan program pelatihan terkait Keuangan Berkelanjutan kepada Cabang. Conducting training programs related to Sustainable Finance to Branches.</p>	<p>Draft Pedoman Perusahaan tentang Keuangan Berkelanjutan telah tersedia dan sudah direview oleh Direksi. The draft of Company Guidelines on Sustainable Finance is available and has been reviewed by the Board of Directors.</p> <p>Sebanyak 50% dari anggota Komite Kredit telah mengikuti training terkait AMDAL/ manajemen risiko sosial dan lingkungan 50% of Credit Committe members have attended the training related to social and environmental risk management.</p> <p>Sebanyak 50% dari Cabang telah mengikuti pelatihan Keuangan Berkelanjutan. 50% of Branches have attended the Sustainable Finance training.</p>
3	2022	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan berbagai kajian antara lain : Carying out various assessments, including : <ul style="list-style-type: none"> Permintaan pasar terhadap produk dan/ atau jasa Keuangan Berkelanjutan. Market demand for Sustainable Finance products and/or services. Kesesuaian produk dan/atau jasa yang sudah ada dengan kriteria kegiatan usaha berkelanjutan. Conformity of sustainable products and/ or services. Pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan. Development of Sustainanable Finance products and/or services. 	<p>Telah dilakukan kajian terkait pembiayaan ke sektor-sektor yang mendukung program Keuangan Berkelanjutan. Study has been carried out related to financing to sectors that support the Sustainable Finance program.</p>

No	Tahun Year	Target Kegiatan Prioritas Priority Activity Targets	Indikator Keberhasilan Success Indicator
		<ul style="list-style-type: none"> Integrasi manajemen risiko sosial, lingkungan hidup dan tata kelola dalam aktivitas bisnis perusahaan. Risk Management Integration of social, environmental and governance in the Company's business activities. <p>Penyesuaian Klasifikasi kegiatan usaha Perusahaan. Adjustment of Company's business activity classification.</p> <p>Penyusunan Pedoman Perusahaan Keuangan Berkelanjutan yang mendukung praktek ramah lingkungan dalam kegiatan operasional perusahaan Preparation of Company's Guidelines for Sustainable Finance that support environmentally friendly practices in the Company's operational activity.</p> <p>Penyusunan SOP Keuangan Berkelanjutan Preparation of SOP of Sustainable Finance.</p>	<p>Disesuaikannya klasifikasi kegiatan usaha Perusahaan sesuai Keuangan Berkelanjutan. Adjusted classification of Company's business activity in accordance with Sustainable Finance.</p> <p>Disusunnya pedoman internal terkait praktek ramah lingkungan dalam kegiatan operasional Perusahaan. Established internal guidelines related to environmentally friendly practices in Company's operational activities.</p> <p><i>Standard Operasional Procedure (SOP)</i> Keuangan Berkelanjutan telah disetujui Direksi. Standard Operating Procedure (SOP) of Sustainable Finance has been approved by Board of Directors.</p>
4	2023	<p>Refreshment Program Keuangan Berkelanjutan di cabang kepada anggota Komite Kredit. Sustainable Finance Refreshment Program in branches to Credit Committee members.</p> <p>Inisiasi portofolio produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan. Initiation of portfolio of Sustainable Finance products and/or services.</p> <p>Risiko sosial, lingkungan hidup dan tata kelola telah terintegrasi dalam aktivitas bisnis Perusahaan. Social, environmental and governance risk has been integrated into the Company's business activities.</p> <p>Pelaksanaan edukasi nasabah terkait produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan Conducting customer education related to Sustainable Finance products and/or services</p> <p>Pelatihan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan kepada Credit Marketing Officer di Cabang Training of Sustainable Finance products and/or services to Credit Marketing Officers in branches</p>	<p>Sebanyak 50% dari anggota Komite Kredit telah mengikuti <i>refreshment</i> program. 50% of Credit Committee members have attended the refreshment program.</p> <p>Peluncuran produk pembiayaan berkelanjutan. Launching of Sustainable Finance products.</p> <p>SOP mengenai integrasi risiko sosial, lingkungan dan tata kelola dalam kegiatan pembiayaan sektor Keuangan Berkelanjutan telah diimplementasikan. SOP on integration of social, environmental and governance risks in the financing activities in the Sustainable Finance sector has been implemented.</p> <p>Pembuatan media komunikasi atas produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan Making a communication media of sustainable finance products and/or services</p> <p>80% dari total Credit Marketing Officer telah mengikuti pelatihan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di Cabang. 80% of total Credit Marketing Officers have attended the training on Sustainable Finance products and/or services held at branches</p>
5	2024	<p>Peningkatan portofolio produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan Increasing portfolio of Sustainable Finance products and/or services</p> <p>Pengembangan sistem pelaporan Keuangan Berkelanjutan Development of Sustainable Finance reporting system</p>	<p>Jumlah pembiayaan berkelanjutan pada akhir tahun 2024 yaitu sebesar 5% dari total portofolio Amount of sustainable financing at the end of 2024 will be 5% of the total portfolio</p> <p>Diluncurkannya sistem pengawasan dan pelaporan Penerapan Keuangan Berkelanjutan Launched the supervision and reporting system on Sustainable Finance Implementation</p>

Perusahaan melakukan penyesuaian terhadap Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 5 Tahun, dikarenakan pada kurun waktu tahun 2020, 2021 dan 2022 tidak seluruh program yang telah disusun dapat terlaksana atau terealisasi. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan seluruh dunia pada tahun 2020 dan 2021 serta masih berlanjut hingga tahun 2022, dan status pandemi Covid-19 belum dicabut oleh Pemerintah sehingga menyebabkan kegiatan bisnis dan operasional perusahaan menjadi terganggu, walaupun kondisi tahun 2022 mulai membaik.

The company made adjustments to the 5-year Sustainable Finance Action Plan, because in 2020, 2021 and 2022 not all programs that had been prepared could be implemented or realized. This is due to the Covid-19 pandemic that hit Indonesia and the whole world in 2020 and 2021 and still continue until 2022, and the status of the Covid-19 pandemic has not been revoked by the Government, causing the company's business and operational activities to be disrupted, even though conditions in 2022 is started to improve.

Perusahaan juga masih memfokuskan kepada peningkatan kapasitas pemahaman internal tentang Keuangan Berkelanjutan dalam rangka mempersiapkan Perusahaan untuk melanjutkan ke Tahap implementasi lanjutan. Oleh karena itu Perusahaan melakukan penundaan rencana yang telah disusun ke tahun berikutnya.

The Company is also still focusing to enhance the internal capacity of Sustainable Finance in order to prepare the Company to move on to the implementation phase. Therefore the Company has postponed the plans that have been prepared to the next year.

Target prioritas Kegiatan : Persiapan Infrastruktur Keuangan Berkelanjutan Activity priority targets : Sustainable Financing Infrastructure Preparation			
Triwulan Quarter	Uraian Aktivitas Description of Activity	Tujuan Aktivitas Purpose of Activity	Indikator Pencapaian Achievement Indicator
Triwulan I 2023 Quarter I 2023	Finalisasi Kebijakan dan SOP Keuangan Berkelanjutan Finalization of Sustainable Finance Policy and SOP	Dilakukan penyelesaian penyusunan Kebijakan dan SOP Keuangan Berkelanjutan dengan bantuan pihak ketiga yang memiliki keahlian di bidang Keuangan Berkelanjutan Completion of the preparation of Sustainable Finance Policy and SOP with the assistance of a third party who has expertise in the field of Sustainable Finance	Kebijakan dan SOP Keuangan Berkelanjutan telah disetujui Direksi The Sustainable Finance Policy and SOP have been approved by the Board of Directors
Triwulan II 2023 Quarter II 2023	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan berbagai kajian antara lain : To conduct various assessment, among others : <ul style="list-style-type: none"> Permintaan pasar terhadap produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan Market demand on Sustainable Finance products and/or services Kesesuaian produk dan/atau jasa yang sudah ada dengan kriteria kegiatan usaha berkelanjutan Compatibility of existing products and/or services with sustainable business activity criteria Pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan Development of Sustainable Finance products and/or services Integrasi manajemen risiko sosial, lingkungan hidup dan tata kelola dalam aktivitas bisnis perusahaan To integrate risk management on social, environment and governance in the Company's business activity 	Dilakukan kajian terkait pembiayaan ke sektor-sektor yang mendukung program Keuangan Berkelanjutan seiring dengan pengembangan taksonomi hijau (<i>green taxonomy</i>) oleh Pemerintah Conducted study related to financing for any sectors that encourage Sustainable Finance program in line with the development of green taxonomy by the Government	Telah dilakukan kajian terkait pembiayaan ke sektor-sektor yang mendukung program Keuangan Berkelanjutan Study related to financing for any sectors that encourage Sustainable Finance program has been realized
Triwulan III 2023 Quarter III 2023	<ul style="list-style-type: none"> Refreshment Program Keuangan Berkelanjutan di cabang kepada anggota Komite Kredit Sustainable Finance Refreshment in branches to Credit Committee members Risiko sosial, lingkungan hidup dan tata kelola telah terintegrasi dalam aktivitas bisnis Perusahaan Social, environmental and governance risks have been integrated into Company's business activities 	<ul style="list-style-type: none"> Updating pemahaman program keuangan berkelanjutan kepada anggota komite kredit terhadap perkembangan terkini Updating the understanding of the sustainable finance program to members of the credit committee on the latest developments Mengintegrasikan risiko sosial, lingkungan hidup dan tata kelola dalam aktivitas bisnis perusahaan Integrate social, environmental and governance risks in the company's business activities 	<ul style="list-style-type: none"> Sebanyak 50% dari anggota Komite Kredit telah mengikuti refreshment program 50% of Credit Committee member have attended the refreshment program SOP mengenai integrasi risiko sosial, lingkungan dan tata kelola dalam kegiatan pembiayaan sektor Keuangan Berkelanjutan telah diimplementasikan. SOP on integration of social, environmental and governance risks in the financing activities in the Sustainable Finance sector has been implemented

Target prioritas Kegiatan : Persiapan Infrastruktur Keuangan Berkelanjutan
Activity priority targets : Sustainable Financing Infrastructure Preparation

Triwulan Quarter	Uraian Aktivitas Description of Activity	Tujuan Aktivitas Purpose of Activity	Indikator Pencapaian Achievement Indicator
Triwulan IV 2023 Quarter IV 2023	<ul style="list-style-type: none"> Inisiasi portofolio produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan Initiation of portfolio of Sustainable Finance products and/or services Pelatihan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan kepada Credit Marketing Officer di Cabang Training in Sustainable Finance products and/or services to Credit Marketing Officers in branches 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan mulai mengembangkan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan secara selektif The company begins to develop selective Sustainable Finance products and/or services Credit Marketing Office memahami produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan dari Perusahaan The Credit Marketing Office understands sustainable financial products and/or services of the Company 	<ul style="list-style-type: none"> Peluncuran produk pembiayaan berkelanjutan Launching of the sustainable finance products 80% dari total Credit Marketing Officer telah mengikuti pelatihan produk dan/jasa Keuangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di Cabang. 80% of total Credit Marketing Officers have attended the training on Sustainable Finance products and/or services held for branches



Proses Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance Action Plan Preparation Process

Rujukan yang Digunakan Sebagai Acuan

Dalam menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk merujuk kepada Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik yang diundangkan pada tanggal 27 Juli 2017.

Peraturan OJK tersebut mengatur Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan yang di antaranya mencakup kewajiban penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan penyusunan Laporan Keberlanjutan.

Proses Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Proses penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk dapat digambarkan sebagai berikut :

Reference Used as a Reference

In preparing the Sustainable Finance Action Plan (RAKB), PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk refers to the OJK Regulation Number 51/POJK.03/2017 on Implementation of Sustainable Finance to Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies which was promulgated on 27 July 2017.

That OJK regulation regulates the implementation of Sustainable Finance Action Plan, which includes the obligation to prepare a Sustainable Finance Action Plan and prepare a Sustainable Report.

Sustainable Finance Action Plan Preparation Process

The Sustainable Finance Action Plan (RAKB) Preparation Process of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk can be illustrated as follows:



Keterlibatan Pihak yang Melakukan Penyusunan

Dalam penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2023 PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk tidak menggunakan pihak ketiga atau konsultan, namun melibatkan pihak-pihak terkait seperti Direksi, *Corporate Strategic Planning*, *Corporate Secretary*, *Business Development*, *Marketing & Business*, *Branch management*, *Business Admin*, *Compliance & APU PPT*, *Risk Management*, *Business Processing*, *Finance & Accounting* dan *Human Resources Recruitment & Development*. Proses penyusunan dimulai dari pembahasan dalam bentuk *Focus Group Discussion* ("FGD") dari pihak-pihak internal terkait hingga penyusunan dan finalisasi RAKB.

Involvement of The Drafting Parties

In drafting the Sustainable Finance Action Plan year 2023, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk does not engage with third parties or consultants, but involves related parties such Directors, Corporate Strategic Planning, Corporate Secretary, Business Development, Marketing & Business, Branch management, Business Admin, Compliance & APU PPT, Risk Management, Business Processing, Finance & Accounting and Human Resources Recruitment & Development. The drafting process starts from discussion in the form of Focus Group Discussion ("FGD") from relevant internal parties to the preparation and finalization of the RAKB.

○ Faktor Penentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan **Determinative Factors Of Sustainable Finance Action Plan**

Rencana Strategi Bisnis

Rencana strategis Perusahaan selalu mengacu kepada Visi dan Misi Perusahaan. Visi dan Misi Perusahaan tersebut tercermin dalam bentuk pelaksanaan kegiatan operasional dan bisnis yang terintegrasi dengan aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan hidup. Cakupan dalam kegiatan operasional dan bisnis tersebut adalah pada efisiensi energi, air, penggunaan kertas, pengembangan masyarakat sekitar serta perlindungan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang melibatkan karyawan diseluruh jenjang organisasi Perusahaan.

Kapasitas Organisasi

Dalam upaya mendukung Visi dan Misi Perusahaan, Perusahaan senantiasa melakukan penyesuaian struktur organisasi yang berdasarkan pada kebutuhan arah dan pengembangan bisnis yang dilakukan serta karakteristik dan kompleksitas usaha. Dalam rangka menerapkan praktik Keuangan Berkelanjutan, Perusahaan membuat langkah awal yaitu program edukasi untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi dalam rangka memperkuat kapasitas organisasi.

Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis

Perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik untuk mendukung pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan sudah mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kapasitas teknis bagi seluruh pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan.

Kerja Sama dengan Pihak Eksternal

Untuk mendukung peningkatan kualitas, kompetensi dan kapasitas teknis maka Perusahaan melakukan kerja sama dengan lembaga yang menyediakan jasa dan memiliki keahlian dalam memberikan edukasi dan pemahaman tentang penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Strategi Komunikasi

Perusahaan senantiasa menerapkan strategi komunikasi yang tepat kepada seluruh pemangku kepentingan. Hal ini untuk mendukung terciptanya hubungan baik dan terjalannya komunikasi yang berkesinambungan dengan menerapkan komunikasi dua arah yang efektif meliputi komunikasi dengan internal dan eksternal.

Sistem Monitoring, Evaluasi dan Mitigasi

Sistem monitoring, evaluasi dan mitigasi terhadap kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan, dilakukan melalui Rapat Dewan Komisaris, Direksi, Bisnis dan Operasional. Selain itu Perusahaan juga dalam rangka melakukan pengendalian internal menerapkan system third lines of defense yang melibatkan seluruh unit kerja termasuk unit kerja kepatuhan, unit kerja manajemen risiko dan unit kerja internal audit.

Business Strategic Plan

The Company's strategic plan always refers to the Company's Vision and Missions. The Company's vision and missions are reflected in the form of operational and business activity implementation that is integrated with economic, social and environmental aspects. Scope of the operational and business activities in in energy efficiency, paper usege efficiency, development of the surrounding community as well as protection and improvement of quality of the environment which involves at all levels of the Company's organization.

Organizational Capacity

In an effort of supporting the Company's Vision and Missions, the Company continually makes adjustments of the organizational structure based on the required direction and business development conducted as well as the characteristic and complexity of business. In order to implement Sustainable Finance practices, the Company took initial step, namely educational program to improve the quality and competency in order to strengthen the organizational capacity.

Financial Condition and Technical Capacity

The Company has good financial performance to support the implementation of Sustainable Finance in accordance with the plans set by the Company. Therefore, the Company has allocated a budget to increase technical capacity to all parties related with implementation of Sustainable Finance.

Cooperation with External Parties

In order to support the improvement of quality, competency and technical capacity, the Company cooperate with institutions that provide services and have expertise in providing education and understanding on implementation of Sustainable Finance.

Communication Strategy

The company always implements proper communication strategy to all stakeholders. This is to support the creation of good relation and the establishment of continuous communication by implementing effective two-way communication including internal and external communication.

Monitoring, Evaluation and Mitigation System

Monitoring, evaluation and mitigation system on the Company's operational and business activities is carried out through meetings of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Business and Operations. In addition, the Company also in term of carrying out internal control, implements the third lines of defense system which involves all work units including the compliance work unit, the risk management work unit and the internal audit work unit.

Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Isu Keuangan Berkelanjutan

Dalam rangka mendukung Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan kebijakan yaitu :

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik.

Government Policies Related to The Sustainable Finance Issues

In order to support the Sustainable Finance Implementation, the Financial Services Authority (OJK) has issued policies, namely :

1. Law No. 40 of 2007 dated 16 August 2007 regarding Limited Liability Companies.
2. Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 76/POJK.07/2016 dated 28 December 2016 on Improvement of Financial Literacy and Financial Inclusion in the Financial Services Sector for Customers and/or Society .
3. Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 51/POJK.03/2017 dated 27 July 2017 on Implementation of Sustainable Finance to Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies.

Prioritas Uraian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Priority of Detail of Sustainable Finance Action Plan

Dasar Pemikiran

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk menetapkan prioritas implementasi Keuangan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 dan dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal sejalan dengan rencana strategi bisnis serta sesuai pertimbangan kapasitas organisasi, kondisi keuangan dan kapasitas teknis sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya.

Dalam rangka mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan, sebagaimana tercantum pada Tema Utama dan Program Keuangan Berkelanjutan Perusahaan 2020 – 2024, Perusahaan memprioritaskan pada peletakan dasar yang kuat agar Keuangan Berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik. Tahun 2020 Perusahaan masih dalam periode konsolidasi sejak penggabungan usaha efektif pada bulan Juli 2019. Sehingga peletakan dasar yang kuat perusahaan pasca penggabungan usaha dinilai penting untuk penerapan Keuangan Keberlanjutan pada masa berikutnya.

Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan kapasitas internal Sumber Daya Manusia yang akan menerapkan program Keuangan Berkelanjutan. Selain itu Perusahaan mempersiapkan panduan, Standard Operating Procedure (SOP), penyusunan panduan internal dan kajian produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan. Dengan paduan kedua hal mendasar tersebut, diharapkan Perusahaan mampu menerapkan Keuangan Berkelanjutan, baik dalam peningkatan portofolio produk Keuangan Berkelanjutan maupun integrasi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam tata kelola perusahaan sehingga dapat mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Rationale

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk sets the implementation priorities of Sustainable Finance in accordance with OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 and with due regard of external and internal factors in line with the business strategic plan and accordance with consideration of organizational capacity, financial conditions and technical capacity as described in the previous section.

In order to implement the Sustainable Finance, as specified in the Main Theme and Program of the Company's Sustainable Finance 2020-2024, the Company prioritized of laying strong foundation to allow the Sustainable Finance to be realized properly. In 2020 Company was still in the consolidation period since the merger was effective in July 2019. Thus, such a laying strong foundation for the Company after the merger is considered important for implementation of Sustainable Finance in the next period.

This was conducted by increasing the internal capacity of Human Resources who will implement the Sustainable Finance program. In addition, the Company prepares guidelines, Standard Operating Procedures (SOP), preparation of internal guidelines and study of Sustainable Finance products and/or services. With the combination of these two basic things, it is believed that the Company will be able to implement Sustainable Finance, both in increasing the portfolio of Sustainable Finance products and integrating economic, social and environmental aspects in the Corporate Governance so that it can support sustainable development goals.

Kegiatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance Action Plan Activities

Triwulan Quarters	Uraian Kegiatan Description	Sumber Daya yang Dibutuhkan Relevant Resources	Penanggung Jawab Division In Charge
Triwulan I 2023 Quarter I 2023	Finalisasi Kebijakan dan SOP Keuangan Berkelanjutan Finalization of Policy and SOP Sustainable Finance	<ul style="list-style-type: none"> Compliance Business Processing Corporate Strategic Planning Risk Management External Party (Vendor) 	<ul style="list-style-type: none"> Compliance Business Processing
Triwulan II 2023 Quarter II 2023	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan berbagai kajian antara lain : To conduct various studies, among others : <ul style="list-style-type: none"> Permintaan pasar terhadap produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan Market demand on Sustainable Finance products and/or services Kesesuaian produk dan/atau jasa yang sudah ada dengan kriteria kegiatan usaha berkelanjutan Compatibility of existing products and/or services with sustainable business activity criteria Pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan Development of Sustainable Finance products and/or services Integrasi manajemen risiko sosial, lingkungan hidup dan tata kelola dalam aktivitas bisnis perusahaan To integrate risk management on social, environment and governance in the Company's business activity. 	<ul style="list-style-type: none"> Business Development (retail dan corporate) Marketing Corporate Strategic Planning Risk Management 	Business Development (retail and corporate)
Triwulan III 2023 Quarter III 2023	<ul style="list-style-type: none"> Refreshment Program Keuangan Berkelanjutan di cabang kepada anggota Komite Kredit Sustainable Finance Refreshment in branches to Credit Committee members Risiko sosial, lingkungan hidup dan tata kelola telah terintegrasi dalam aktivitas bisnis Perusahaan Social, environmental and governance risks have been integrated into Company's business activities 	<ul style="list-style-type: none"> Human Resources Recruitment & Development Business Development (retail and corporate) Corporate Strategic Planning Risk Management External Party (Vendor) 	<ul style="list-style-type: none"> Human Resources Recruitment & Development Business Development (retail and corporate)
Triwulan IV 2023 Quarter IV 2023	<ul style="list-style-type: none"> Inisiasi portofolio produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan Initiation of portfolio of Sustainable Finance products and/or services Pelatihan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan kepada Credit Marketing Officer di Cabang Training in Sustainable Finance products and/or services to Credit Marketing Officers in branches 	<ul style="list-style-type: none"> Business Development (retail and corporate) Human Resources Recruitment & Development Corporate Strategic Planning 	<ul style="list-style-type: none"> Business Development (retail and corporate) Human Resources Recruitment & Development

Sumber Daya

Perusahaan telah memiliki Sumber Daya Manusia dan struktur organisasi yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Namun perlu didukung oleh peningkatan kapasitas, kualitas dan kompetensi melalui program edukasi.

Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Keberhasilan dari Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan ditentukan melalui evaluasi pencapaian antara realisasi dan rencana yang telah disusun didalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan..

Resource

The Company has adequate human resources and organizational structure in place in supporting the implementation of Sustainable Finance. However, it needs to be supported by the increased capacity, quality and competency through educational program.

Program Evaluation Implementation System

The success of Sustainable Finance Program implementation is determined through evaluation of achievement between the realization and the plan that has been prepared in the Sustainable Finance Action Plan.

Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan Performance Overview of Sustainability Aspect

dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain
in billion Rupiah except otherwise stated

Kinerja Ekonomi Economy Performance	2020	2021	2022
Keterangan / Information			
Pembiayaan Konsumen / Consumer Financing	155.86	189.38	224.00
Sewa Pembiayaan / Finance Leases	100.83	64.88	46.35
Administrasi dan Provisi / Administration and Provision	28.27	29.45	32.45
Penalti / Penalty	11.95	12.36	14.58
Bunga / Interest	0.58	0.44	0.39
Pendapatan lain-lain / Other Income	12.24	6.38	15.29
Jumlah Pendapatan / Total Revenues	309.73	302.89	333.06

Kinerja Lingkungan Environmental Performance	2020	2021	2022
Keterangan / Information			
Penggunaan Listrik (Rp-juta) / Electricity Usage (Rp - million)	722.25	699.83	807.22
Penggunaan Air (Rp-juta) / Water Usage (Rp - million)	40.06	27.17	40.78
Jumlah Penggunaan Listrik dan Air (Rp-juta) / Total Electricity and Water Usage (Rp - million)	762.31	727.00	848.00

Kinerja Sosial Social Performance	2020	2021	2022
Keterangan / Information			
Jumlah Karyawan (orang) / Total Employees (person)	590	614	664
Rasio Perputaran Karyawan (%) / Employee Turn Over Ratio (%)	1.58	1.80	1.90
Rasio Karyawan Perempuan (%) / Female Employee Ratio (%)	23.1	21	21

Pendapatan Pembiayaan Konsumen Consumer Financing Revenues



Per 31 Desember 2022 / Per 31 December 2022

224.00

miliar / billion

Pendapatan Sewa Pembiayaan Finance Lease Revenues



Per 31 Desember 2022 / Per 31 December 2022

46.35

miliar / billion

Administrasi dan Provisi Administration and Provision



Per 31 Desember 2022 / Per 31 December 2022

32.45

miliar / billion

Penalti Penalty



Per 31 Desember 2022 / Per 31 December 2022

14.58

miliar / billion

Bunga Interest



Per 31 Desember 2022 / Per 31 December 2022

0.39

miliar / billion

Pendapatan Lain-lain Other Income



Per 31 Desember 2022 / Per 31 December 2022

15.29

miliar / billion

Jumlah Pendapatan Total Revenues



Per 31 Desember 2022 / Per 31 December 2022

333.06

miliar / billion

Penggunaan Listrik Electricity Usage

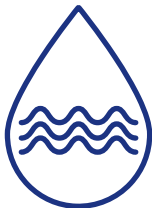


Per 31 Desember 2022 / Per 31 December 2022

RP 807.22

juta / million

Penggunaan Air Water Usage



Per 31 Desember 2022 / Per 31 December 2022

RP 40.78

juta / million

Jumlah Karyawan Number of Employees



Per 31 Desember 2022 / Per 31 December 2022

664

orang / person

Rasio Perputaran Karyawan Employee Turnover Ratio



Per 31 Desember 2022 / Per 31 December 2022

1.90

Penjelasan Direksi

The Board of Directors' Remark



**Konosuke
Mizuta**
Direktur Utama
President Director

Dalam upaya mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional, Perseroan mulai melakukan perubahan pola bisnis konvensional menjadi berkelanjutan. Proses perubahan tersebut dipadukan bersama-sama dengan perkembangan teknologi. Perseroan melakukan pendekatan untuk meningkatkan pertumbuhan pembiayaan yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh. Perseroan akan senantiasa berupaya untuk membina Keuangan Berkelanjutan. Perseroan akan selalu berusaha untuk memupuk Keuangan Berkelanjutan.

In an effort to accelerate the process of national economic recovery, the Company started the change from conventional business patterns to become sustainable. The change process is integrated together with technological developments. The Company takes an approach to increase financing growth that is sustainable, inclusive and resilient. The Company will always strive to foster Sustainable Finance.

Invasi Ukraina oleh Rusia pada awal tahun 2022 terjadi ketika dunia sedang dalam proses pemulihan dari pandemi Covid-19 yang telah menghancurkan baik nyawa maupun mata pencaharian.

Dengan ditemukannya vaksin pada akhir 2020 dan awal 2021, Perseroan optimis dunia akan segera kembali normal dengan tradisi "*new normal*". Munculnya perang Rusia-Ukraina, menurunkan prospek pemulihan global yang cepat dari pandemi. Dengan gangguan pada rantai pasok global, mempercepat serangkaian krisis global yang mengalir dan saling berhubungan pada makanan, bahan bakar, dan energi. Hal ini mengakibatkan harga komoditas secara global menjadi melambung tinggi. Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik ("BPS"), inflasi tahunan naik menjadi 5,95% di bulan September 2022, tingkat inflasi ini merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

The invasion of Ukraine by Russia on early 2022 happened when the world was still recuperating from the Covid-19 pandemic which had destroyed both lives and jobs.

With the discovery of vaccine in late 2020 and early 2021, The Company optimist that the world would soon drift back to normalcy under the "*new normal*" tradition. The advent of the Russia-Ukraine war, emerged to shatter down prospects for a quick global recovery from the pandemic. With disruption in the global supply chain, accelerated a series of cascading and interconnected global crises in food, fuel, and energy. This has resulted in soaring prices for commodities globally. According to the report from the Central Statistics Agency ("BPS"), annual inflation rose to 5.95% in September 2022, this inflation rate was the highest rate in the last 5 years.

Tahun 2022 Indonesia dipercaya untuk memegang Presidensi G20 dengan mengusung tema “Pulih Bersama, Bangkit Lebih Hebat”. Presidensi G20 Indonesia memprioritaskan tiga isu utama, yakni transisi energi berkelanjutan, sistem kesehatan dunia, serta transformasi ekonomi dan digital. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”) memimpin pembahasan pada isu transisi energi berkelanjutan.

Terkait transisi energi, Energy Transitions Working Group (“ETWG”) menitikberatkan fokus pada keamanan energi, akses dan efisiensi energi, serta transisi energi untuk menuju sistem energi yang rendah karbon, termasuk juga pada investasi dan inovasi pada teknologi yang lebih bersih dan efisien. Pemilihan isu transisi energi dalam presidensi G20 sangat relevan. Pasalnya saat ini seluruh dunia tengah menghadapi dampak krisis iklim. Sektor energi, khususnya pembakaran batu bara yang memproduksi karbon dioksida, merupakan penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca, dan bertanggung jawab atas 35% dari total emisi global.

Negara anggota G20 secara kolektif bertanggung jawab atas 75% gas rumah kaca global. Laporan oleh Climate Transparency pada 2021 mencatat bahwa untuk membatasi kenaikan suhu pada 1,5°C, G20 memiliki peran penting dengan berkomitmen pada target pengurangan emisi dan menerapkan kebijakan yang sejalan dengan program 1,5°C sesuai Perjanjian Paris.

Perjanjian Paris pada 2015 menetapkan dunia harus mempertahankan kenaikan suhu pada 1,5°C. Untuk mencapai hal ini, ilmuwan dalam Panel Antar pemerintah tentang Perubahan Iklim (“IPCC”) menyatakan dunia harus mengurangi 45% emisi pada 2030 dan mencapai net zero pada 2050 untuk menghindari dampak iklim yang katastrofik.

Indonesia telah mengalami dampak krisis iklim. Dalam lima tahun terakhir, angka bencana hidrometeorologi mendominasi atau sebanyak 95%. Bencana tersebut di antaranya banjir, curah hujan ekstrem, longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Dua tahun terakhir jumlahnya pun meningkat.

Menurut Badan Penanggulangan Bencana Nasional (“BNPB”), per 1 Januari - 1 September 2022, jumlah bencana telah mencapai 2.372 kejadian. Sementara itu pada 2021, terjadi 3.058 bencana sepanjang tahun 2021. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Indonesia diperkirakan memiliki kerugian ekonomi akibat krisis iklim mencapai Rp112,2 triliun.

Sementara itu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (“BAPPENAS”) memperkirakan, Indonesia dapat mengalami kerugian sebesar Rp544 triliun hingga tahun 2024 akibat dampak perubahan iklim. Empat sektor terbesar yang paling terdampak adalah pesisir dan laut, pertanian, kesehatan, dan perairan. Namun, sebagai salah satu dari 10 negara penghasil emisi terbesar di seluruh dunia, target Indonesia saat ini belum ambisius untuk mengatasi perubahan iklim.

Kebijakan untuk Merespons Tantangan dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

Di tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah merilis kebijakan terkait ketentuan prudensial untuk mendukung program percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (“KBL

In 2022 Indonesia was entrusted with holding the G20 Presidency with the theme “Recover Together, Recover Stronger”. Indonesia’s G20 presidency prioritized three main issues, namely the sustainable energy transition, the world health system, and economic and digital transformation. The Ministry of Energy and Mineral Resources (“ESDM”) led the discussion of sustainable energy transition issue.

Regarding the energy transition, the Energy Transitions Working Group (“ETWG”) focused on energy security, access and energy efficiency, and the energy transition towards a low-carbon energy system, as well as investment and innovation in cleaner and more efficient technologies. The selection of the energy transition issue in the G20 presidency was very relevant. This is because the whole world is currently facing the effects of the climate crisis. The energy sector, particularly the burning of coal which produce carbon dioxide, is the largest contributor to greenhouse gas emissions, and is responsible for 35% of total global emissions.

G20 member countries were collectively responsible for 75% of global greenhouse gases. The report by Climate Transparency in 2021 noted that in order to limit temperature rise to 1.5°C, the G20 has an important role to play by realizing reductions in emissions and implementing policies that was in line with the 1.5°C pathway under the Paris Agreement.

The 2015 Paris Agreement stipulated that the world have to maintain a temperature increase of 1.5°C. To achieve this, scientists at the Intergovernmental Panel on Climate Change (“IPCC”) stated that the world must reduce emissions by 45% by 2030 and reach net zero by 2050 to avoid catastrophic climate impacts.

Indonesia has experienced the effects of the climate crisis. In the last five years, the number of hydrometeorological disasters has dominated or as much as 95%. These disasters include floods, extreme rainfall, landslides, and forest and soil fires. In the last two years the number has increased.

According to the National Disaster Management Agency (“BNPB”), as of January 1 - September 1 2022, the number of disasters has reached 2,372 events. Meanwhile in 2021, 3,058 disasters occurred throughout 2021. According to Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati, Indonesia is estimated to experience economic losses due to the climate crisis reaching Rp112.2 trillion.

Meanwhile, the Ministry of National Development Planning (“BAPPENAS”) estimated that Indonesia could experience a loss of Rp544 trillion by 2024 due to the impact of climate change. The four largest sectors that were most damaged were coastal and marine, agriculture, health and water. However, as one of the 10 largest emitting countries in the world, Indonesia’s current target is not ambitious to tackle climate change.

Policies to Respond The Challenges in Fulfilling Sustainability Challenges

In 2022, the Financial Services Authority (“OJK”) has released a policy related to prudential provisions to support the acceleration program for Battery-Based Electric Motorized Vehicles (“KBL BB”)

BB”) serta pengembangan industri hulunya (industri baterai, industri charging station, dan industri komponen) baik di bidang perbankan, Industri Keuangan Non-Bank (“IKNB”), dan pasar modal. Kebijakan tersebut diantaranya insentif bagi penyediaan dana kepada debitur untuk produksi dan konsumsi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (“KBL BB”) berupa:

- Relaksasi bobot risiko ATMR/Aset Yang Disesuaikan untuk kredit/pembiayaan menjadi 50 persen yang diperpanjang hingga 31 Desember 2023;
- Relaksasi penilaian kualitas kredit/pembiayaan dan pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit/ Pembiayaan (BMPK/BMPP);
- Uang muka untuk pembelian KBL BB dapat diterapkan paling rendah sebesar 0 persen (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan, dengan tetap memenuhi ketentuan dalam POJK 35/2018 dan POJK 10/2019;

Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan menjunjung tinggi kode etik, nilai dan budaya Perseroan. Penerapan budaya Perusahaan dalam bentuk penanaman nilai dan prinsip serta pelaksanaannya akan membawa manfaat tidak hanya terhadap Perseroan tetapi juga bagi individu karyawan. Perseroan secara terencana dan berkesinambungan melakukan pengembangan SDM dan potensi-potensinya.

Hal ini merupakan prioritas utama bagi insan Perseroan dalam menjaga tanggung jawab dan profesionalisme kerja serta kepercayaan dari konsumen. Selain menekankan semakin pentingnya peningkatan produktivitas dan efisiensi, proses pemulihan pasca pandemi merupakan kesempatan Perseroan untuk mengadopsi strategi pertumbuhan ekonomi hijau untuk memberikan kesempatan yang luas bagi pertumbuhan ekonomi yang bersahabat dengan lingkungan.

Dalam menjalankan bisnisnya di berbagai lokasi, Perseroan belum menghadapi potensi permasalahan terkait dengan keberlanjutan yang berdampak pada kegiatan operasional Perseroan.

Kebijakan keberlanjutan akan menjadi salah satu bentuk komitmen Perseroan dalam merespon aspek keberlanjutan, khususnya pada sektor pembiayaan dalam rangka mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (“TPB”) di Indonesia. Perseroan juga menyadari peranannya dalam mempromosikan keberlanjutan di masyarakat lebih luas dan berkomitmen untuk berinteraksi dengan para pemangku kepentingan untuk mempromosikan keberlanjutan. Kebijakan ini juga mencerminkan komitmen Perseroan dalam merespon isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang relevan, signifikan, dan bertanggung jawab sesuai dengan konteks keberlanjutan Perseroan.

Dalam rangka mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan, sebagaimana tercantum pada Tema Utama dan Program Keuangan Berkelanjutan Perusahaan 2020-2024, Perseroan memprioritaskan pada peletakan dasar yang kuat agar Keuangan Berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik. Tahun 2022 Perseroan masih memfokuskan kepada peningkatan kapasitas pemahaman internal tentang Keuangan Berkelanjutan dalam rangka mempersiapkan Perseroan untuk melanjutkan ke Tahap Implementasi Lanjutan. Selain itu Perseroan mempersiapkan panduan Standard Operational Procedure (“SOP”), penyesuaian

as well as the development of its upstream industry (battery industry, charging station industry, and component industry) both in banking, Non-Bank Financial Institution (“IKNB”), and capital market. These policies include incentives for providing funds to debtors for Battery Electric Vehicle (“BEV”) production and consumption in the form of:

- Relaxation of risk weight RWA/Adjusted Assets for credit/financing to 50 percent which was extended until 31 December 2023;
- Relaxation of credit/financing quality assessment and exceptions to the Legal Lending/Financing Maximum Limit (BMPK/BMPP);
- Down payment for the purchase of BEV can be applied at a minimum of 0 percent (zero percent) of the selling price of the pertinent vehicle, while still fulfilling the provisions in POJK 35/2018 and POJK 10/2019;

In carrying out its business, the Company upholds the code of ethics, values and culture of the Company. The application of corporate culture in the form of instilling values and principles and their implementation will bring benefits not only to the Company but also to individual employees. The Company in a planned and sustainable manner develops human resources and their potentials.

This is a top priority for the Company's employee in maintaining the responsibility and professionalism of work as well as the trust of consumers. Apart from emphasizing the increasing importance of increasing productivity and efficiency, the post-pandemic recovery process is an opportunity for the Company to adopt a green economic growth strategy to provide broad opportunities for environmentally friendly economic growth.

In carrying out its business in various locations, the Company has not yet faced potential problems related to sustainability that have an impact on the Company's operational activities.

The sustainability policy will be one of the form of the Company's commitment in responding to sustainability aspects, especially in the financing sector in order to support the Sustainable Development Goals (“SDG”) in Indonesia. The Company is also aware of its role in promoting sustainability in the wider community and is committed to interact with stakeholders to promote sustainability. This policy also reflects the Company's commitment to responding to social, economic and environmental issues that are relevant, significant and responsible in accordance with the context of the Company's sustainability.

In order to implement Sustainable Finance, as stated in the Main Theme and the 2020-2024 Corporate Sustainable Finance Program, the Company prioritizes laying a strong foundation so that Sustainable Finance can be implemented properly. In 2022 the Company will still focus on increasing the capacity of internal understanding of Sustainable Finance in order to prepare the Company to proceed to the Advanced Implementation Stage. In addition, the Company prepares Standard Operational Procedure (“SOP”) guidelines, adjustments to internal guidelines and reviews of Sustainable Finance products and/or services. With the

panduan internal dan kajian produk dan/ atau jasa Keuangan Berkelanjutan. Dengan paduan kedua hal mendasar tersebut, diharapkan Perseroan mampu menerapkan Keuangan Berkelanjutan, baik dalam peningkatan portofolio produk Keuangan Berkelanjutan maupun integrasi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam tata kelola Perseroan sehingga dapat mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Ditengah ketidakpastian ekonomi global yang berlangsung sepanjang tahun 2022, Perseroan mampu meningkatkan kinerja sehingga per 31 Desember 2022, Perseroan berhasil meningkatkan jumlah Pendapatan sebesar 9,96% atau sebesar Rp333,06 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian Perseroan membukukan Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp62,05 miliar meningkat sebesar 898,58% dibandingkan Rugi Bersih Tahun Berjalan tahun sebelumnya. Sejak Desember 2021, Perseroan juga telah menghentikan pendanaan pada debitur terkait pertambangan batu bara.

Sepanjang tahun 2022, Perseroan tidak menghadapi tantangan dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan untuk mencapai target berikutnya, baik target jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Tahun 2022 merupakan tahun yang cukup menantang bagi Perseroan, namun Perseroan mampu mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan kinerja dari segi ekonomi, lingkungan hidup, dan juga sosial.

- Bidang ekonomi:
Pertumbuhan di bidang ekonomi ditandai dengan kenaikan jumlah piutang pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yaitu mengalami peningkatan sebesar 4,12%.
- Bidang lingkungan:
Salah satu inisiatif Perusahaan terkait pengelolaan lingkungan adalah penggunaan gedung yang bersertifikat *green building* untuk kantor pusat Perseroan.
- Bidang sosial:
Perseroan bersama Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia ("APPI") peduli mengadakan donasi untuk Korban Bencana Gempa Bumi Cianjur yang disalurkan melalui Palang Merah Indonesia ("PMI") di Markas Pusat PMI dan diterima langsung oleh Ketua Umum PMI Bapak Jusuf Kalla.

Dalam pelaksanaan Aksi Keuangan Berkelanjutan pada tahun 2022, Perseroan melakukan beberapa kegiatan, yaitu pelatihan analisa kredit terkait manajemen risiko sosial dan lingkungan dari Unit Bisnis Ritel dan Korporasi, termasuk cabang-cabang melalui media konferensi video bekerja sama dengan pihak eksternal. Serta pada kuartal ke empat di tahun 2022, Perseroan melakukan proses pemilihan pihak ketiga (konsultan) untuk penyusunan kebijakan dan pedoman keuangan berkelanjutan dan hingga saat ini proses penyusunan kebijakan dan pedoman bersama konsultan terpilih sedang berjalan.

Strategi Pencapaian Target

Perseroan telah membentuk unit manajemen risiko sesuai POJK NO.44/POJK.05/2020 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank. Perseroan telah

combination of these two basic things, it is hoped that the Company will be able to implement Sustainable Finance, both in increasing the portfolio of Sustainable Finance products and integrating economic, social and environmental aspects in the Company's governance so that it can support sustainable development goals.

In the midst of global economic uncertainty throughout 2022, the Company was able to improve its performance so that as of December 31, 2022, the Company succeeded in increasing total Revenue by 9.96% or Rp333.06 billion compared to the previous year. Then the Company posted a Net Profit for the Year of Rp62.05 billion, an increase of 898.58% compared to the Net Loss for the Year the previous year. Since December 2021, the Company has also stopped funding debtors related to coal mining.

Throughout 2022, the Company did not face any challenges in implementing Sustainable Finance to achieve the next target, both short term, medium term and long term targets

Implementation of Sustainable Finance

2022 was quite a challenging year for the Company, but the Company was able to overcome these challenges and improve performance from an economic, environmental and social perspective.

- Economics sector:
Growth in the economic sector is marked by an increase in the amount of receivables in 2022 which has increased compared to 2021, which has increased by 4.12%.
- Environmental sector:
One of the Company's initiatives related to environmental management is the use of a certified green building for the Company's head office.
- Social sector:
The Company together with the Association of Indonesian Financing Companies ("APPI") made donations for victims of the Cianjur Earthquake Disaster which were channeled through the Indonesian Red Cross ("PMI") at the PMI Headquarters and received directly by PMI Chairman Mr. Jusuf Kalla.

In implementing the Sustainable Finance Action in 2022, the Company is carrying out several activities, namely credit analysis training related to social and environmental risk management from the Retail and Corporate Business Units, including branches via video conferencing media in collaboration with external parties. And in the fourth quarter of 2022, the Company carried out the process of selecting a third party (consultant) to develop policies and guidelines for sustainable finance and until now the process of drafting policies and guidelines with selected consultants is ongoing.

Target Achievement Strategies

The Company has established a risk management unit in accordance with POJK NO.44/POJK.05/2020 concerning the application of risk management for non-bank financial service

memperkuat manajemen risiko, kebijakan, dan prosedur terkait keberlanjutan yang menjadi dasar pelaksanaan prinsip usaha berkelanjutan serta untuk terus berupaya meningkatkan kualitas aspek keberlanjutan.

Pembiayaan berkelanjutan melibatkan pertimbangan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola ("ESG") saat membuat keputusan investasi dan pinjaman. Dengan menawarkan opsi pembiayaan berkelanjutan, Perseroan dapat mengurangi risiko, meningkatkan daya saing, dan berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan.

Salah satu dampak lingkungan dari kegiatan pembiayaan yang menjadi fokus global adalah dampak terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Oleh karena itu, Perseroan dapat berkontribusi untuk mengurangi emisi melalui investasi dalam proyek energi bersih dan teknologi hemat energi. Dengan mempromosikan aset hemat energi dan rendah emisi, Perseroan dapat meningkatkan reputasi, mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon, dan meminimalkan risiko keuangan dan peraturan.

Dampak perubahan iklim menimbulkan risiko atas pembiayaan yang diberikan Perusahaan seperti risiko atas munculnya bencana, kebijakan, perubahan market dan lain – lain. Risiko tersebut dapat mempengaruhi risiko atas pembiayaan yang diberikan kepada debitur/klien. Oleh karena itu, manajemen risiko pembiayaan akibat perubahan iklim menjadi penting untuk Perusahaan.

Dari segi risiko sosial, interaksi antar pekerja dapat menyebabkan risiko sosial seperti pelecehan, ketidakadilan, dan tindakan yang tidak menyenangkan, sehingga sangat penting untuk meminimalkan risiko ini untuk mempertahankan proses bisnis dan kesejahteraan pekerja.

Di tahun 2022, Perseroan mulai memfokuskan untuk mengelola risiko keamanan data dari serangan siber dengan cara menerapkan privasi dan keamanan data untuk menjaga reputasi Perseroan yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan debitur hingga kerugian finansial.

Dalam konteks risiko perlindungan konsumen, Perseroan memastikan bahwa operasi Perusahaan adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Perseroan telah melakukan serangkaian langkah mitigasi risiko sepanjang tahun 2022 seperti:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi terhadap penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan melalui rapat-rapat berkala.
- b. Penyusunan Pedoman dan SOP Keuangan Berkelanjutan.
- c. Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kompetensi karyawan pada unit kerja terkait.
- d. Kecukupan pengendalian internal.

Berkaitan dengan komitmen untuk menerapkan keuangan berkelanjutan, Perseroan menargetkan untuk mencapai Visi Keuangan Berkelanjutan pada tahun 2024 dengan

institutions. The Company has strengthened risk management, policies and procedures related to sustainability which serve as the basis for the implementation on sustainable business principles and to improve the quality of sustainability aspects.

Sustainable finance involves considering environmental, social, and governance ("ESG") factors when making investment and lending decisions. By offering sustainable financing options, the Company can reduce risk, increase competitiveness and contribute to a more sustainable future.

One of the environmental impacts of financing activities which has become a global focus is the impact on greenhouse gas emissions and climate change. Therefore, the Company can contribute to reducing emissions through investment in clean energy projects and energy-saving technologies. By promoting energy-efficient and low-emission assets, the Company can enhance its reputation, support the transition to a low-carbon economy, and minimize financial and regulatory risks.

The impact of climate change poses a risk to the financing provided by the Company, such as the risk of disasters, policies, market changes and others. This risk can affect the risk of financing provided to the debtor/client. Therefore, financing risk management due to climate change is important for the Company.

In terms of social risk, interactions between workers can cause social risks such as harassment, injustice, and unpleasant actions, so it is very important to minimize these risks to maintain business processes and employee welfare.

In 2022, the Company begins to focus on managing data security risks from cyber attacks by implementing data privacy and security to maintain the Company's reputation which results in a loss of debtor trust and financial loss.

In the context of consumer protection risk, the Company ensures that the Company's operations are fair, transparent and responsible.

The Company has carried out a series of risk mitigation measures throughout 2022, such as:

- a. Active supervision of the Board of Commissioners and Board of Directors on the implementation of the Sustainable Finance Action through regular meetings.
- b. Preparation of Sustainable Finance Guidelines and SOPs.
- c. Increase the capacity, quality and competence of employees in related work units.
- d. Adequacy of internal control.

With regard to the commitment to implement sustainable finance, the Company targets to achieve the Sustainable Finance Vision in 2024 by considering both external and internal factors such as

mempertimbangkan baik faktor eksternal maupun faktor internal seperti kondisi keuangan, kapasitas teknis dan kapasitas organisasi.

Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan yaitu menjadi perusahaan yang menciptakan dunia yang berkelanjutan dengan menyelaraskan aspek sosial dan lingkungan.

Dalam mencapai tujuan tersebut Perseroan mengimplementasikan strategi antara lain :

1. Dukungan penuh manajemen dalam penerapan keuangan berkelanjutan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan tata kelola dalam kegiatan usaha Perseroan. Peran aktif karyawan yang memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya maupun kompetensi penerapan keuangan berkelanjutan sesuai jenjang tugasnya.
2. Memperhatikan aspek sosial baik secara internal untuk mewujudkan misi Perseroan dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten maupun secara eksternal lingkungan sosial kantor pusat dan cabang sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Perseroan dan mengendalikan risiko reputasi.
3. Memperhatikan aspek ramah lingkungan di internal Perseroan dan berusaha untuk menjadi Perseroan yang lebih hemat energi dengan menggunakan lebih sedikit air, kertas dan plastik.

Perseroan mengapresiasi regulator dalam memfasilitasi kebijakan restrukturisasi untuk membantu nasabah mengatasi masa-masa sulit dan memberikan relaksasi dalam pelaporan. Perseroan senantiasa merangkul dan membantu nasabah dalam menghadapi tantangan perlambatan perekonomian ini.

Perseroan melakukan penyesuaian terhadap Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 5 tahun, dikarenakan pada kurun waktu tahun 2020, 2021, dan 2022 tidak seluruh program yang telah disusun dapat terlaksana atau terealisasi. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan seluruh dunia pada tahun 2020 dan 2021 serta masih berlanjut hingga tahun 2022, dan status pandemi COVID-19 belum dicabut oleh Pemerintah sehingga menyebabkan kegiatan bisnis dan operasional Perseroan menjadi terganggu, walaupun kondisi tahun 2022 mulai membaik.

Perseroan terus berusaha meningkatkan kinerja tata kelola keberlanjutan untuk melindungi seluruh pemangku kepentingan. Dalam pengelolaan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, Perseroan telah memiliki dasar kerja yaitu peraturan Perseroan, pedoman GCG dan pakta integritas yang harus ditaati oleh segenap manajemen dan karyawan. Seluruh kegiatan usaha Perseroan dilaksanakan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, Perseroan menetapkan beberapa faktor penentu dalam keberhasilan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Bisnis
Rencana strategis Perseroan selalu mengacu kepada Visi dan Misi Perseroan. Visi dan Misi Perseroan tersebut

financial condition, technical capacity and organizational capacity.

The objective of the Company's Sustainable Finance Action Plan is to be a creator of a sustainable world by aligning social and environmental aspects.

In achieving this objective the Company implements strategies as follows:

1. Full management support in implementing sustainable finance by balancing economic, social, environmental and governance aspects in the Company's business activities. The active role of employees who have the expertise needed to carry out their duties and responsibilities as well as competence in implementing sustainable finance according to their job level.
2. Pay attention to social aspects both internally to realize the Company's mission in developing competent human resources and externally the social environment of the head office and branch offices so as to increase public trust in the Company and control reputation risk.
3. Paying attention to environmentally friendly aspects within the Company and trying to become a more energy efficient company by using less water, paper and plastic.

The Company appreciates regulators in facilitating restructuring policies to help customers overcome difficult times and provide relaxation in reporting. The Company always embraces and assists customers in facing the challenges of this economic slowdown.

The Company is making adjustments to the 5-year Sustainable Finance Action Plan, because in the periods of 2020, 2021 and 2022 not all of the programs that have been prepared can be implemented or realized. This is due to the COVID-19 pandemic that hit Indonesia and the whole world in 2020 and 2021 and would continue until 2022, and the status of the COVID-19 pandemic has not been revoked by the Government, causing the Company's business and operational activities to be disrupted, even though conditions in 2022 started to improve.

The Company continues to strive to improve its sustainability governance performance to protect all stakeholders. In managing environmental, social and governance aspects, the Company already has a working basis, namely Company regulations, GCG guidelines and integrity pacts that must be obeyed by all management and employees. All of the Company's business activities are carried out in compliance with the applicable laws and regulations.

In preparing the Sustainable Finance Action Plan, the Company determines several determining factors in the success of the Sustainable Finance Action as follows:

1. Strategic Business Plan
The Company's strategic plan always refers to the Company's Vision and Mission. The Company's vision and mission are

tercermin dalam bentuk pelaksanaan kegiatan bisnis yang terintegrasi dengan aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan hidup. Cakupan dalam kegiatan bisnis ini bertujuan untuk efisiensi energi, air, penggunaan kertas, pengembangan masyarakat sekitar serta perlindungan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang melibatkan karyawan diseluruh jenjang organisasi Perseroan.

reflected in the implementation of business activities that are integrated with economic, social and environmental aspects. The scope of this business activity is aimed at energy efficiency, water, paper use, local community development and environmental protection and quality improvement involving employees at all levels of the Company's organization.

2. Kapasitas Organisasi

Dalam upaya mendukung Visi dan Misi, Perseroan senantiasa melakukan penyesuaian struktur organisasi yang berdasarkan pada kebutuhan arah dan pengembangan bisnis yang dilakukan serta karakteristik dan kompleksitas usaha. Dalam rangka menerapkan praktik Keuangan Berkelanjutan, Perseroan membuat langkah awal yaitu program edukasi untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi dalam rangka memperkuat kapasitas organisasi.

2. Organizational Capacity

In an effort to support the Vision and Mission, the Company always makes adjustments to the organizational structure based on the needs of the direction and development of the business being carried out as well as the characteristics and complexity of the business. In order to implement Sustainable Finance practices, the Company makes the first step in educational program to improve quality and competence in order to strengthen organizational capacity.

3. Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis

Perseroan memiliki kinerja keuangan yang baik untuk mendukung pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Oleh karena itu Perseroan sudah mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kapasitas teknis bagi seluruh pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan.

3. Financial Condition and Technical Capacity

The Company has good financial performance to support the implementation of Sustainable Finance in accordance with the plans set by the Company. Therefore the Company has allocated a budget to increase technical capacity for all parties related to the implementation of Sustainable Finance.

4. Kerja Sama dengan Pihak Eksternal

Untuk mendukung peningkatan kualitas, kompetensi dan kapasitas teknis maka Perseroan akan melakukan kerja sama dengan lembaga yang menyediakan jasa dan memiliki keahlian dalam memberikan edukasi dan pemahaman tentang penerapan Keuangan Berkelanjutan.

4. Cooperation with External Parties

To support the improvement of quality, competence and technical capacity, the Company will collaborate with institutions that provide services and have expertise in providing education and understanding on the implementation of Sustainable Financing.

5. Strategi Komunikasi

Perseroan senantiasa menerapkan strategi komunikasi yang tepat kepada seluruh pemangku kepentingan hal ini untuk mendukung terciptanya hubungan baik dan terjalinnya komunikasi yang berkesinambungan dengan menerapkan komunikasi dua arah yang efektif meliputi komunikasi dengan internal dan eksternal.

5. Communication Strategy

The Company always implements the right communication strategy for all stakeholders, this is to support the creation of good relations and continuous communication by implementing effective two-way communication including internal and external communications.

6. Sistem Monitoring, Evaluasi dan Mitigasi

Sistem monitoring, evaluasi dan mitigasi terhadap kegiatan operasional dan bisnis Perseroan, dilakukan melalui Rapat Dewan Komisaris, Direksi, Bisnis dan Operasional selain itu Perseroan juga dalam rangka melakukan pengendalian internal menerapkan system third lines of defense yang melibatkan seluruh unit kerja termasuk unit kerja kepatuhan, unit kerja manajemen risiko dan unit kerja internal audit.

6. Monitoring, Evaluation and Mitigation System

The monitoring, evaluation and mitigation system for the Company's operational and business activities is carried out through the Board of Commissioners, Board of Directors, Business and Operational Meetings. In addition, the Company also implements a third lines of defense system for internal control, which involves all work units including compliance work units, risk management work unit and internal audit work unit.

Seiring dengan berhasilnya program Pemulihan Ekonomi Nasional (“PEN”) yang dicanangkan Pemerintah, Perseroan akan senantiasa secara berkesinambungan mendorong peningkatan dan pertumbuhan penyaluran pembiayaan khususnya pembiayaan yang menjadi fokus Perseroan yaitu pembiayaan Ritel dan pembiayaan Korporasi. Peningkatan dan pertumbuhan penyaluran pembiayaan dilakukan dengan proses dan dikelola secara *prudent* sehingga mendorong pertumbuhan Perseroan secara sehat dan berkelanjutan. Perseroan juga melakukan peningkatan Teknologi Informasi dalam rangka mendukung efisiensi kegiatan operasional dan meningkatkan produktivitas bisnis Perusahaan termasuk pelayanan kepada konsumen.

Konflik geopolitik yang disebabkan oleh perang Rusia-Ukraina dan percepatan vaksinasi global menimbulkan ketidakpastian iklim ekonomi global. Dengan adanya kebijakan baru yaitu mengenai pembatasan pembiayaan di sektor industri yang menyumbang gas emisi karbon dan kerusakan lingkungan, maka Perusahaan akan memperluas portfolio investasi ke beberapa sektor industri lainnya agar terjadi diversifikasi portfolio yang lebih baik.

Apresiasi

Direksi memberikan penghargaan dan apresiasi bagi seluruh karyawan Perseroan dan seluruh pemangku kepentingan atas dedikasi dan loyalitas dalam melaksanakan komitmen Perseroan dalam aspek keberlanjutan.

Bagi kami, keberlanjutan merupakan cara untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan Perseroan di masa depan dalam mewujudkan visi Perseroan yaitu menjadi Perseroan Pembiayaan yang kuat dan memberikan nilai lebih bagi stakeholder yang bertujuan menjaga keselarasan antara kinerja aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Jakarta, April 2023
Atas nama Direksi
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Along with the success of the National Economic Recovery (“PEN”) program launched by the Government, the Company will continuously encourage the improvement and growth of financing distribution, especially the financing that is the focus of the Company, namely Retail financing and Corporate financing. The increase and growth of financing disbursement is carried out through a prudent process and managed so as to encourage the Company’s growth in a healthy and sustainable manner. The Company also made improvements to Information Technology in order to support the efficiency of operational activities and increase the productivity of the Company’s business, including services to consumers.

Geopolitical conflicts caused by the Russia-Ukraine war and accelerated global vaccination lead to uncertainty in the global economic climate. With the new policy regarding limiting financing in the industrial sector which contributes to carbon emissions and environmental damage, therefore the Company will expand its investment portfolio to several other industrial sectors in order to achieve better portfolio diversification.

Appreciation

The Board of Directors gives awards and appreciation to all of the Company’s employees and all stakeholders for their dedication and loyalty in carrying out the Company’s commitments in the sustainability aspect.

For us, sustainability is a way to encourage the growth and development of the Company in the future in realizing the Company’s vision, namely to become a strong financing company and provide added value to stakeholders with the aim of maintaining harmony between economic, social and environmental performance aspects.

Jakarta, April 2023
On behalf of the Board of Directors
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk



Konosuke Mizuta
Direktur Utama / President Director

Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance

Dalam Pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk tidak membentuk departemen khusus atau unit kerja khusus, melainkan seluruh pihak yang terkait bertanggung jawab terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.

In Implementation of the Sustainable Finance, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk does not establish a special department or special work unit, but all related parties will be responsible for implementation of Sustainable Finance.

Pejabat Official	Tugas dan Wewenang Duties and Authorities
Direksi Board of Directors	<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung Jawab terhadap Pelaksanaan Program Aksi Keuangan Berkelanjutan secara keseluruhan. To be responsible for the overall implementation of Sustainable Finance Action Program.
Corporate Strategic Planning	<ul style="list-style-type: none"> Setiap Direktur wajib melaksanakan dan mengelola Program Aksi Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan program yang telah direncanakan dan disetujui. Each Director is obliged to implement and manage the Sustainable Finance Action Program in accordance with the planned and agreed program
Corporate Secretary	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan memastikan kolaborasi antar departemen berjalan dengan optimal dan melakukan evaluasi secara berkala dan melaporkannya kepada Direksi. To support the execution of Sustainable Financial Action Plan by ensuring that any collaboration among departments will work optimally and conduct periodic evaluations and report it to the Board of Directors. Mengkoordinasikan persiapan konsep dengan pengkajian garis besar Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. To coordinate concept preparation with the outline study of Sustainable Financial Action Plan.
Business Development (Corporate Business)	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Laporan Keberlanjutan To prepare Sustainability Report. Memastikan pelaporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Laporan Keberlanjutan ke OJK. To ensure the submission of Sustainable Financial Action Plan and Sustainability Report to OJK (Financial Service Authority).
Business Development (Corporate Business)	<ul style="list-style-type: none"> Pengkajian Produk dan/atau Jasa Bisnis Korporasi kategori Keuangan Berkelanjutan. Assessment of Corporate Business Products and/or Services of Sustainable Finance category
Business Development (Corporate Business)	<ul style="list-style-type: none"> Mempersiapkan dan membuat Produk dan/atau Jasa Bisnis Korporasi kategori Keuangan Berkelanjutan. To prepare and create Corporate Business Products and/or Services of Sustainable Finance category.
Business Development (Corporate Business)	<ul style="list-style-type: none"> Penyaluran pembiayaan Produk dan/atau Jasa Bisnis Korporasi kategori Keuangan Berkelanjutan. Distribution of financing to Corporate Business Products and/or Services of Sustainable Finance category.

Pejabat Official	Tugas dan Wewenang Duties and Authorities
<p>Marketing & Business Development (Retail Business)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian Produk dan/atau Jasa Bisnis Retail kategori Keuangan Berkelanjutan • Assessment of Retail Business Products and/or Services of Sustainable Finance category • Mempersiapkan dan membuat Produk dan/atau Jasa Bisnis Retail kategori Keuangan Berkelanjutan • To prepare and create Retail Business Products and/or Services of Sustainable Finance category • Penyaluran pembiayaan Produk dan/atau Jasa Bisnis Retail kategori Keuangan Berkelanjutan • Distribution of financing to Retail Business Products and/or Services of Sustainable Finance category
<p>Branch Management & Business Admin</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengelola pelaksanaan Program Aksi Keuangan Berkelanjutan di Cabang-Cabang PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk • To manage the implementation of Sustainable Finance Action Program in of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
<p>Compliance & APU PPT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji penyusunan Pedoman & Standard Operating Procedure (SOP) Perusahaan Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk • To study the preparation of Guidance & Standard Operating Procedures (SOP) for the Sustainable Financial Action of The PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk. • Melakukan pembaharuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan melibatkan berbagai departemen terkait untuk realisasi rencana yang berhubungan dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. • To make the updating of Sustainable Financial Action Plan by involving various relevant departments for plan realization related to the Sustainable Financial Action Plan. • Melakukan <i>review</i> dan rekomendasi terkait aspek kepatuhan terhadap Program Aksi Keuangan Berkelanjutan. • To conduct review and recommendation related to the aspects of compliance with the Sustainable Financial Action Program.
<p>Risk Management</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji integrasi aspek risiko dalam kegiatan usaha dalam rangka penerapan Keuangan Berkelanjutan. • To study the integration of risk aspects into business activities in term of Sustainable Finance implementation. • Melakukan <i>monitoring</i> risiko kredit dan risiko lainnya terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan. • To monitor the credit risk and other risks related to implementation of Sustainable Finance.
<p>Business Processing</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun draft & penyesuaian Pedoman & SOP terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan. • Prepare draft & adjustments to the SOP related to the implementation of Sustainable Finance.
<p>Finance and Accounting</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan bulanan terkait realisasi penyaluran pembiayaan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan. • Monthly report related to realization of distribution of financing for Sustainable Finance products and/or services.
<p>Human Resources Recruitment and Development</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi terkait program penerapan Keuangan Berkelanjutan. • To conduct competency improvement training related to Sustainable Finance implementation program.
<p>Internal Audit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengendalian internal pada pelaksanaan program Keuangan berkelanjutan. • To conduct internal control on the implementation of Sustainable Finance Program

Pengembangan Kompetensi

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan aktivitas yang mendukung Keuangan Keberlanjutan sebagai berikut :

- Telah dilakukan training analisa kredit terkait manajemen risiko sosial dan lingkungan terhadap 31 (tiga puluh satu) orang dari Unit Bisnis Korporasi dan Unit Bisnis Ritel, termasuk cabang-cabang pada bulan November 2022 melalui media Zoom.
- Proses pemilihan pihak ketiga (konsultan) untuk penyusunan Kebijakan dan Pedoman Keuangan Berkelanjutan telah terlaksana dan saat ini proses penyusunan kebijakan dan pedoman bersama konsultan terpilih sedang berjalan.

Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko yang dilakukan Perseroan yaitu :

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi terhadap penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan melalui rapat-rapat berkala.
- b. Penyusunan Pedoman dan SOP Keuangan Berkelanjutan.
- c. Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kompetensi karyawan pada unit kerja terkait.
- d. Kecukupan pengendalian internal.

Pemangku Kepentingan

Perseroan senantiasa menerapkan strategi komunikasi yang tepat kepada seluruh pemangku kepentingan hal ini untuk mendukung terciptanya hubungan baik dan terjalinya komunikasi yang berkesinambungan dengan menerapkan komunikasi dua arah yang efektif meliputi komunikasi dengan internal dan eksternal.

Kendala

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi tantangan terbesar bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan keuangan saat ini. Dalam waktu yang relatif singkat, virus ini telah mengubah drastis arah pembangunan global dari optimisme pemulihan ekonomi yang di awal 2022 diyakini masih akan terjadi, menjadi ancaman krisis kesehatan serta resesi yang tak terhindarkan. Dari aspek ekonomi, perkembangan penyebaran Covid-19 secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas operasional debitur yang berpotensi mengganggu kinerja perusahaan dan stabilitas sistem keuangan. Untuk meningkatkan stimulus perekonomian yang melemah dan dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah, Perusahaan mengeluarkan ketentuan restrukturisasi untuk debitur yang terdampak penyebaran Covid-19.

Competence Development

In 2022 the following activities have been carried out to support the Sustainable Finance:

- Credit analysis training has been carried out related to social and environmental risk management for 31 (thirty one) people from the Corporate Business Unit and Retail Business Unit, including branches in November 2022 via Zoom media.
- The process of selecting a third party (consultant) for the preparation of the Sustainable Finance Policy and Guidelines has been carried out and currently the process of developing policies and guidelines with the selected consultant is ongoing.

Risk Mitigation

The risk mitigation to be carried out by the Company includes:

- a. Active supervision of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the implementation of Sustainable Finance Action through periodic meetings.
- b. Preparation of Sustainable Finance Guidelines and SOPs.
- c. Improving the capacity, quality and competency of employees in relevant work units.
- d. Adequacy of internal control.

Stakeholders

The Company always implements proper communication strategy to all stakeholders, this is to support the creation of good relation and the establishment of continuous communication by implementing effective two-way communication including internal and external communication.

Challenges

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) has become the most challenging entity for social, economic and financial developments nowadays. In a relatively short period of time, this virus has drastically changed the direction of global development from optimism that economic recovery, which was believed to be imminent in early 2022, has become the threat of a health crisis and an inevitable recession. From an economic aspect, the development of the global spread of Covid-19 has had a direct and indirect impact on the performance and operational capacity of debtors, which has the potential to disrupt company performance and financial system stability. To stimulate the weakening economic situation and in order to support the Government policies, the Company issued a restructuring provision for debtors affected by the spread of Covid-19.

Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Follow Up To Sustainable Finance Action Plan

Penanggung Jawab Terhadap Monitoring dan Evaluasi Aksi Keuangan Berkelanjutan

Penanggung jawab terhadap monitoring dan evaluasi Aksi Keuangan Berkelanjutan Perusahaan akan dilakukan oleh Unit Kerja Internal Audit yang berkerjasama dengan penanggung jawab masing-masing program.

Penentuan Waktu untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Waktu untuk mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan akan dilakukan secara triwulanan, pengukuran yang dilakukan meliputi persentase pencapaian antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan didalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam hal program-program yang telah disusun dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ini belum dapat terlaksana sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Perseroan akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Mengkaji ulang indikator kinerja yang digunakan untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan realisasi program Keuangan Berkelanjutan yang telah dilaksanakan.
- b. Melakukan revisi atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Person in Charge for Monitoring and Evaluation of Sustainable Finance Action

The responsibility for monitoring and evaluation of the Company's Sustainable Finance Action will lay on the Internal Audit Work Unit in collaboration with the person in charge of each program.

Timing for Measuring the Realization of Sustainable Finance Action Plan

Timing for measuring the realization of Sustainable Finance Action Plan will be carried out on a quarterly basis, the measurement to be conducted include percentage of achievement between the realization and the target set in the Sustainable Finance Action Plan.

Follow Up To Sustainable Finance Action Plan

In the event the programs that have been established in this Sustainable Finance Action Plan cannot be implemented in accordance with the predetermined timeframe, the Company will follow up as follows:

- a. To review the performance indicators used for the next years based on realization of the Sustainable Finance programs that have been implemented.
- b. To revised the Sustainable Finance Action Plan.



Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance

Kegiatan Membangun Kinerja Keberlanjutan

Mizuho Leasing memahami bahwa setiap bisnis harus selalu menyesuaikan perkembangan zaman. Karena itu Perseroan selalu berusaha menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Bagi Perseroan, hal ini adalah kunci kelangsungan bisnis sambil menjaga kontribusi positif kepada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Perseroan juga menyadari bahwa dukungan semua pihak, termasuk seluruh pemangku kepentingan, juga merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja yang optimal di era globalisasi ini. Berbagai capaian kinerja yang baik hanya dapat terwujud jika Perseroan bersama seluruh Pemangku Kepentingan mampu berkolaborasi dan bahu-membahu untuk mendorong keberlanjutan.

Selama tahun 2022, Mizuho Leasing melanjutkan inisiatif dan komitmen pada bisnis yang mengedepankan prinsip dan nilai berkelanjutan. Dalam praktiknya, Perseroan berpartisipasi dalam berbagai kolaborasi yang melibatkan Pemangku Kepentingan untuk mencapai keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG).

Perseroan juga melanjutkan beberapa langkah strategis untuk mempersiapkan tantangan bisnis dan kondisi pasar saat ini, yang salah satunya diwujudkan melalui inisiatif dan transisi bisnis menuju digitalisasi. Melalui transformasi digital, Perseroan akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.

Perseroan juga menerapkan Rencana Aksi Bisnis Berkelanjutan sesuai dengan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 untuk menerapkan pembiayaan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik.

Kinerja Ekonomi

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Perseroan melakukan kegiatan usaha pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna dan kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Izin usaha sebagai lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.994/ KMK.017/1993 tanggal 30 Desember 1993 yang kemudian telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010.

Segmen usaha Perseroan terdiri dari 2 (dua) segmen yaitu Pembiayaan Ritel dan Pembiayaan Korporasi. Pembiayaan Ritel adalah pembiayaan yang lebih fokus terhadap kebutuhan yang bersifat konsumtif dan Pembiayaan Korporasi adalah pembiayaan yang lebih fokus terhadap kebutuhan yang bersifat produktif.

Saat ini, tantangan persaingan di industri Perseroan pembiayaan meningkat, seiring dengan kondisi pasar otomotif yang mengalami perlambatan karena pengaruh perekonomian nasional.

Activities to Build Sustainability Performance

Mizuho Leasing understands that every business must always adapt to the times. Therefore, the Company always tries to adapt itself to the needs of the times. For the Company, this is the key to business continuity while maintaining a positive contribution to economic, social and environmental aspects. The Company also realizes that the support of all parties, including all stakeholders, is also an important factor to achieve optimal performance in this globalization era. Various good performance achievements can only be realized if the Company and all Stakeholders are able to collaborate and work together to encourage sustainability.

During 2022, Mizuho Leasing will continue its initiatives and commitment to a business that promotes sustainable principles and values. In practice, the Company participates in various collaborations involving Stakeholders to achieve a balance between economic, social and environmental aspects, in accordance with the Sustainable Development Goals (SDGs).

The Company also continues several strategic steps to prepare for business challenges and current market conditions, one of which is realized through initiatives and business transitions towards digitalization. Through digital transformation, the Company will continue to provide the best service to consumers.

The Company also implements a Sustainable Business Action Plan in accordance with OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 to implement sustainable financing for financial service institutions, issuers and public companies.

Economic Performance

As previously explained, the Company carries out investment, working capital, multipurpose and other business activities based on the approval of the Financial Services Authority.

The business license as a financial institution owned by the Company is as stated in the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.994 / KMK.017 / 1993 dated December 30, 1993 which has subsequently been amended by the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. Kep-161 / KM.6 / 2004 dated 4 May 2004 and Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. Kep-654 / KM.10 / 2010 dated 9 December 2010.

The Company's business segment consists of 2 (two) segments, namely Retail Financing and Corporate Financing. Retail Financing is financing that is more focused on consumptive needs and Corporate Financing is financing that is more focused on productive needs.

Currently, the challenge of competition in the finance company industry is increasing, in line with the condition of the automotive market which is experiencing a slowdown due to the influence of the national economy.

Di tengah kelesuan ekonomi yang melanda, Perseroan dapat membukukan Piutang Pembiayaan sebesar Rp2.183,49 miliar pada tahun 2022.

In the midst of the economic downturn, the Company was able to book Financing Receivables of Rp2,183.49 billion in 2022.

Menjadi nilai kontrak berdasarkan komposisi jenis pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 terlihat pada tabel di bawah ini.

The contract value based on the composition of the type of financing as of December 31, 2022, December 31, 2021 and December 31 2020 is shown in the table below.

Total Piutang Pembiayaan / Total Financing Receivables			
Keterangan Description	2020	2021	2022
Piutang Pembiayaan (dalam miliar Rupiah) Financing Receivables (in billion Rupiah)	2,431.53	2,089.64	2,183.49
Volume (dalam unit) Volume (units)	15,916	15,208	17,089
Pendapatan Pembiayaan (dalam miliar Rupiah) Revenues from Financing (in billion Rupiah)	256.69	254.26	270.35

Pembiayaan Konsumen / Consumer Financing			
Keterangan Description	2020	2021	2022
Piutang Pembiayaan Konsumen (dalam miliar Rupiah) Consumer Financing Receivables (in billion Rupiah)	1,188.53	1,233.49	1,472.68
Volume (dalam unit) Volume (units)	15,425	14,691	16,768
Pendapatan Pembiayaan Konsumen (dalam miliar Rupiah) Consumer Financing Revenues (in billion Rupiah)	155.86	189.38	224.00

Sewa Pembiayaan / Finance Lease			
Keterangan Description	2020	2021	2022
Piutang Sewa Pembiayaan (dalam miliar Rupiah) Finance Lease Receivables (in billion Rupiah)	1,243.00	856.15	710.81
Volume (dalam unit) Volume (units)	491	517	321
Pendapatan Sewa Pembiayaan (dalam miliar Rupiah) Finance Lease Revenues (in billion Rupiah)	100.83	64.88	46.35

Rasio Keuangan yang Relevan Lainnya

Perseroan secara konsisten menjalankan aktivitas bisnis pembiayaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan taat kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta perundang-undangan yang berlaku. Perseroan mampu memenuhi rasio-rasio keuangan yang diatur oleh *regulator*.

Other Relevant Financial Ratios

The Company consistently runs financing business activities in accordance with the principle of prudence and obedience to the Financial Services Authority regulations and applicable laws. The Company is able to meet financial ratios set by the regulator.

Perbandingan kinerja rasio keuangan utama Perseroan dibandingkan dengan kinerja industri pembiayaan di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The comparison of the performance of the Company's main financial ratios compared to the performance of the industry in 2022 is as follows:

Rasio / Ratio	Industri / Industry*	Perseroan / The Company
<i>Financing Asset Ratio</i> ("FAR")	85.20%	85.67%
<i>Gearing Ratio</i> ("GR (x)")	2.07x	2.42x
Rasio Modal Sendiri – Modal Disetor ("MSMD") <i>Paid-up Capital - Equity Ratio</i>	302.20%	121.12%
<i>Non Performing Financing</i> ("NPF") - Net	2.32%	2.22%
<i>Return On Asset</i> ("ROA")	5.67%	2.52%
<i>Return on Equity</i> ("ROE")	14.38%	9.02%
Beban Operasional – Pendapatan Operasional ("BOPO") / <i>Operational Efficiency Ratio</i>	75.64%	87.29%

* Sumber: Statistik Lembaga Pembiayaan Periode Desember 2022

* Source: Financing Institution Statistics for the Period of December 2022

Target dan Realisasi Tahun Buku

Di tengah kondisi perlambatan ekonomi secara global dan di dalam negeri, yang berdampak terhadap melemahnya daya konsumsi masyarakat serta persaingan di industri pembiayaan yang semakin meningkat berdampak pada pencapaian target pembiayaan yang disalurkan Perseroan pada tahun 2022. Pencapaian, target dan proyeksi kinerja Perseroan adalah sebagai berikut :

Targeted Projection and Realization

In the midst of a global and domestic economic slowdown, which has an impact on the weakening of people's consumption power and increasing competition in the financing industry damaged the Company's achievement financing targets in 2022. Achievements, targets and projections of the Company's performance are as follows:

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

Jenis Type	Target 2022	Realisasi 2022 2022 Realization
Piutang Pembiayaan - neto / Financing Receivables - net	2,395.55	2,113.09
Total Aset / Total Assets	2,720.20	2,466.67
Total Liabilitas / Total Liabilities	2,045.86	1,776.77
Pendapatan / Revenues	366.89	333.06
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income for The Year	52.53	64.65
Modal Ditempatkan & Disetor / Paid-up Capital	568.74	568.70
Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-up Capital	97.58	97.58
Total Ekuitas / Total Equity	674.34	689.90

Target 2023

Manajemen Perseroan telah menyusun rencana untuk tahun 2023 dengan mempertimbangkan perkembangan industri otomotif, kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian baik dari segi makro maupun mikro.

2023 Targets

The Company's management has drawn up a plan for 2023 by considering the development of the automotive industry, current economic conditions and economic projections both in macro and micro terms.

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

Jenis Type	Target 2023
Piutang Pembiayaan - neto / Financing Receivables - net	2,542.89
Total Aset / Total Assets	3,109.06
Total Liabilitas / Total Liabilities	2,356.02
Pendapatan / Revenues	392.19

Jenis Type	Target 2023
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income for The Year	72.41
Modal Ditempatkan & Disetor / Paid-up Capital	568.74
Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-up Capital	97.58
Total Ekuitas / Total Equity	753.04

Kinerja Lingkungan Hidup

Perseroan senantiasa mengoptimalkan efisiensi penggunaan listrik dan air dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal tersebut disosialisasikan dalam berbagai kesempatan secara internal. Adapun paparan penggunaan listrik dan air sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Environmental Performance

The Company always optimizes the efficiency of using electricity and water in carrying out its business activities. This was socialized on various occasions internally. The exposure to electricity and water use throughout 2022 is as follows:

No	Jaringan Kantor Office Network	PAM Water	PLN Electricity	Grand Total
1.	Head Office	-	2.984.114	2.984.114
2.	Batu Ceper	-	54.088.569	54.088.569
3.	Kelapa Gading	2.866.400	50.817.347	53.683.747
4.	Lebak Bulus	-	34.085.000	34.085.000
5.	Surabaya	7.947.689	22.017.258	29.964.947
6.	Tangerang	5.722.402	41.649.235	47.371.637
7.	Kalimalang	-	44.110.000	44.110.000
8.	Bandung	776.800	24.018.409	24.795.209
9.	Medan	1.364.835	46.115.000	47.479.835
10.	Palembang	3.541.900	66.592.632	70.134.532
11.	Bogor	3.423.508	33.583.372	37.006.880
12.	Pekanbaru	-	58.743.271	58.743.271
13.	Samarinda	5.451.521	26.713.890	32.165.411
14.	Makassar	-	44.084.478	44.084.478
15.	Serang	-	12.536.327	12.536.327
16.	Malang	-	19.325.766	19.325.766
17.	Buaran	-	39.076.500	39.076.500
18.	Cikarang	-	53.038.730	53.038.730
19.	Depok	2.945.800	33.073.500	36.019.300
20.	Gading Serpong	5.496.200	25.890.250	31.386.450
21.	Jambi	-	29.515.676	29.515.676
22.	Kediri	-	24.065.475	24.065.475
23.	Lamongan	1.249.814	9.779.218	11.029.032
24.	Denpasar	-	6.727.930	6.727.930
25.	Lampung	-	4.584.666	4.584.666
Total		40.786.869	807.216.613	848.003.482

Kinerja Sosial

Perseroan melihat Sumber Daya Manusia sebagai aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan operasi dan bisnis yang dijalankan. Sebagai perusahaan di sektor pembiayaan, kualitas Sumber Daya Manusia yang baik senantiasa menjadi penentu dari kualitas produk dan layanan yang diberikan Perseroan. Terkait hubungan kerja dengan karyawan, Perseroan berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik terkait ketenagakerjaan, maupun kesehatan dan keselamatan kerja.

Perseroan juga memberikan kesempatan bekerja yang sama kepada mereka yang kompeten dan memiliki integritas tinggi yang selalu menjunjung etos kerja dan kejujuran. Pada tahun 2022, Perseroan telah merekrut 195 orang karyawan baru untuk berbagai posisi. Dalam proses rekrutmen, Perseroan fokus pada kualifikasi berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan serta rencana yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan agar Perseroan memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara baik.

Berikut disampaikan karyawan yang masuk dan keluar di sepanjang tahun 2022, serta tingkat perputaran karyawan dan perbandingannya dengan tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tingkat Perputaran Karyawan / Employee Turnover

Keterangan Description	2020 (Orang) (People)	2021 (Orang) (People)	2022 (Orang) (People)
Jumlah Karyawan awal Tahun / Total Employees at the beginning of Year	547	590	614
Rekrutmen Karyawan Baru / New Employees Recruitment	143	147	195
Karyawan yang Berakhir Hubungan Kerjanya Employees Who Have Ended Their Employment Relationship	123	126	145
Jumlah Karyawan Akhir Tahun / Total Employees at the End of the year	590	614	664
Tingkat Perputaran Karyawan / Employees Turnover Rate	1.58%	1.80%	1.90%

Kesetaraan Kesempatan Bekerja

Perseroan senantiasa memastikan kesetaraan kesempatan bekerja tanpa adanya diskriminasi atas *gender*, golongan, suku maupun ras tertentu. Perseroan menjalankan proses rekrutmen secara transparan, independen dan didasarkan pada kualifikasi serta kompetensi. Prinsip kesetaraan kesempatan bekerja merupakan pedoman utama Perseroan dalam memilih individu terbaik untuk bergabung menjadi karyawan Perseroan.

Komposisi karyawan berdasarkan jenis kelamin dapat ditemukan pada halaman 57.

Social Performance

The Company believes that Human Resources is an important aspect that cannot be separated from the growth of its operations and business. As a Company in the financing sector, the quality of good Human Resources has always been the determinant of the quality of products and services provided by the Company. Regarding work relations with employees, the Company adheres to the prevailing laws and regulations, both related to employment, as well as occupational health and safety.

The Company also provides equal opportunities to work for those with competence and high integrity who always uphold the work ethic and honesty. In 2022, the Company has recruited 195 new employees for various positions. In the recruitment process, the Company focuses on competency-based qualifications that are tailored to the needs and plans that have been determined. This is done so that the Company has competent Human Resources that could carry out its responsibilities properly.

The following is conveyed by employees who entered and left at throughout 2022, as well as employee turnover rates and the comparison with 2021 and 2020 is as follows:

Equal Employment Opportunity

The Company always ensures equal opportunity in employment with no discrimination on gender, class, or ethnicity. The Company carries out the recruitment process in a transparent, independent manner and is solely based on qualifications and competence. The principle of equal employment opportunities is the main guideline for the Company in selecting the best individuals to join in as Company employees.

The training program throughout 2022 can be found on page 57.

Perbandingan Gaji Pokok di Level Terendah dengan Upah Miminum Kabupaten/Kota (UMK)

Besaran remunerasi yang diberikan Perseroan kepada pekerja telah memenuhi peraturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Selain itu, besaran gaji pokok dari pekerja tetap baik wanita maupun pria di level terendah masih lebih besar dari besaran Upah Minimum Kabupaten/ Kota ("UMK") yang berlaku di seluruh wilayah kantor cabang di Indonesia.

Persentase Gaji Pokok Pekerja Tetap di Jakarta pada Tingkat Terendah Terhadap UMK.

Comparison of Basic Salary at the Lowest Level with the City Minimum Wage

The amount of remuneration given by the Company to workers had met the employment regulations in Indonesia. Furthermore, the amount of the basic salary of permanent workers, both women and men at the lowest level, was still greater than the Regency / City Minimum Wage ("UMK") which applied in all branch offices in Indonesia.

Percentage of Basic Salary for Permanent Workers in Jakarta at the Lowest Level Against the UMK.

No	Lokasi Kantor Office Location	UMK 2022	Persentase
1	Medan	3,370,645	4.58%
2	Pekanbaru	4,049,676	5.78%
3	Jambi	2,972,192	1.37%
4	Palembang	3,289,409	7.16%
5	Lampung	2,770,794	3.72%
6	Serang	3,850,526	1.52%
7	Tangerang	4,285,798	4.02%
8	Gading Serpong	4,262,015	4.60%
9	Head Office	4,641,854	1.47%
10	Pecenongan	4,641,854	1.47%
11	Kelapa Gading	4,641,854	1.47%
12	Lebak Bulus	4,641,854	1.47%
13	Buaran	4,641,854	1.47%
14	Bekasi	4,816,921	1.27%
15	Cikarang	4,791,843	1.80%
16	Depok	4,377,231	2.17%
17	Bogor	4,330,249	3.27%
18	Bandung	3,774,860	3.55%
19	Surabaya	4,375,479	2.71%
20	Lamongan	2,501,977	79.62%
21	Kediri	2,118,116	1.60%
22	Malang	2,994,143	9.15%
23	Bali	2,516,971	2.07%
24	Samarinda	3,137,576	10.12%
25	Makassar	3,294,467	6.97%

Lingkungan Kerja yang Layak dan Aman

Perseroan percaya bahwa tempat kerja yang layak dan lingkungan yang kondusif akan mendorong iklim kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja ("K3") didukung oleh manajemen dan seluruh karyawan. Mengacu kepada Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 86 ayat 2 "Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja."

Keselamatan kerja tercermin dari penataan ruang kantor yang mengacu pada beberapa hal, seperti kelengkapan dan kelayakan sarana seperti ruangan kerja, tempat ibadah, ruangan tunggu konsumen dan toilet, maupun lingkungan kerja yang nyaman seperti suhu ruangan kerja yang diatur serta ventilasi udara yang di jaga agar kesejukan dan kesegarannya dapat dinikmati oleh seluruh karyawan. Perseroan juga mengajak partisipasi seluruh karyawan didalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan cara menjalankan program 5R , yang terdiri dari :

1. Ringkas : Selalu memilah dan memilih lalu membuang barang – barang yang telah tidak dipergunakan.
2. Rapi : Selalu menetapkan tata letak barang – barang untuk tujuan mudah dijangkau apabila diperlukan.
3. Resik : Selalu membersihkan tempat kerja
4. Rawat : Selalu merawat kebiasaan diri dan kondisi lingkungan kerja yang telah baik untuk menjadi semakin baik
5. Rajin : Selalu mematuhi seluruh aturan yang ada dan rajin menerapkan 4 komponen R yang lain

Untuk menjaga nihil kecelakaan serta potensi kerugian maka Perseroan menyiapkan perangkat pemadam kebakaran yang sesuai standar dan dengan jumlah yang memadai di setiap lantai dan diruangan kantor. Perawatan peralatan pemadam secara berkala dilakukan sesuai standar dan pada masa waktu pakai peralatan tersebut.

Didalam upaya mitigasi risiko penyebaran virus Covid-19, Perseroan berupaya penuh untuk memastikan seluruh karyawan aman dari potensi tertular, untuk karena itu Perseroan secara penuh mengikuti seluruh protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan secara berkesinambungan mentaati protokol tersebut.

Pengembangan Kompetensi Karyawan

Perseroan senantiasa mengembangkan materi dan sarana pelatihan untuk semua pekerja. Beberapa metode yang digunakan dalam penyampaian materi-materi pelatihan, yaitu melalui *video learning*, *video conference* dan *e-learning*. Pengembangan SDM tidak hanya dilakukan melalui pelatihan tatap muka, baik secara langsung maupun virtual, namun juga melalui *on the job training*, *tutoring*, *rotasi*, *coaching*, *counseling* dan *mentoring*. Materi-materi yang disiapkan tidak hanya berorientasi pada industri pembiayaan saja, namun juga materi *soft skills* seperti kepemimpinan, pengembangan kepribadian, dan komunikasi. Media *e-learning* menjadi salah satu solusi dan strategi yang ditempuh untuk pembelajaran yang berkelanjutan.

Decent and Safe Work Environment

The Company believes that a decent work place and a conducive environment will encourage a work climate which in turn can increase worker productivity. The implementation of the occupational health and safety ("K3") program is supported by management and all employees. Referring to Law Number 13 of 2003 Article 86 paragraph 2 "To protect the safety of workers / labors in order to achieve optimal work productivity, efforts are made to work safety and health."

Work safety is reflected in the arrangement of office space which refers to several things, such as the completeness and appropriateness of facilities such as workspaces, prayer rooms, consumer waiting rooms and toilets, as well as a comfortable working environment such as regulated work room temperature and air ventilation that is kept cool and its freshness can be enjoyed by all employees. The Company also invites the participation of all employees in creating a safe and healthy work environment by running the 5R program, which consists of:

1. Simple : Always sort and choose then throw away items that are not used.
2. Order : Always set item layout - goods for easy-to-reach purposes if needed.
3. Clean : Always clean the workspace
4. Maintain : Taking care of work environment and always focus for betterment.
5. Consistent : Always comply with all existing rules and diligently apply the other 4 R

To maintain zero accidents and potential losses, the Company prepares fire extinguisher equipment according to standards and with an adequate number on each floor and office space. Periodic maintenance of extinguisher equipment is carried out according to standards and during the life of the equipment.

In an effort to mitigate the risk of spreading the Covid-19 virus, the Company makes every effort to ensure that all employees are safe from potential infection, for that reason the Company fully follows all health protocols issued by the government and continuously adheres to these protocols.

Employee Development Trainings

The Company continues to develop training materials and tools for all employees. Several methods are used in the delivery of training materials, namely through video learning, video conferencing, e-learning. Human resource development is not only done through face-to-face training, both in person and virtual, but also through on-job training, tutoring, rotation, coaching, counseling, and mentoring. The materials prepared are not only oriented towards the financing industry, but also soft skills materials such as leadership, personality development, and communication. E-learning media is one of the solutions and strategies adopted for continuous learning.

Perseroan senantiasa menyelenggarakan kegiatan alih Pengetahuan tenaga kerja asing (“TKA”) kepada Tenaga Kerja Lokal lainnya guna proses didalam Alih Pengetahuan (*Transfer of Knowledge*)

Program pelatihan sepanjang 2022 dapat ditemukan pada halaman 58.

Pengembangan Sosial dan Masyarakat

Dalam menjalankan amanah Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK No.76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat. Di tengah masa pandemi COVID-19, Perseroan tetap menjalankan kegiatan Literasi Keuangan bekerjasama dengan Diary Bunda melalui platform Instagram Live. Tujuan umum dari diselenggarakan Literasi Keuangan ini untuk menyediakan teknologi serta informasi terpercaya dalam memberikan edukasi keuangan, khususnya membantu para ibu untuk membuka peluang usaha.

Perseroan mempunyai tanggung jawab dibidang sosial kemasyarakatan yang ditunjukkan melalui kegiatan CSR yang diadakan pada tanggal 5 Desember 2022. Salah satu kegiatannya adalah mengadakan donasi untuk Korban Bencana Gempa Bumi Cianjur. Bersama dengan 43 Perusahaan dibawah Lembaga Keuangan Non-Bank, donasi tersebut telah APPI salurkan melalui Palang Merah Indonesia (“PMI”) di Markas Pusat PMI dan diterima langsung oleh Ketua Umum PMI Bapak Jusuf Kalla.

Pihak Perseroan yang diwakili oleh Bapak Andi Harjono selaku Direktur Perseroan mengungkapkan, perseroan turut berduka cita terhadap bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Cianjur, “Semoga bantuan yang kami berikan dapat meringankan beban mereka dan dapat memberikan semangat untuk melewati masa-masa sulit ini.”ujarnya

Donasi Peduli Cianjur bersama APPI ini merupakan bagian dari rangkaian program CSR yang telah dijalankan Perseroan setiap tahunnya. Perseroan terus berkomitmen untuk memberikan program tanggung jawab sosial berkelanjutan yang tepat sasaran.

The Company always organizes knowledge transfer activities for foreign workers (“TKA”) to other local workers for the process of Transfer of Knowledge.

The training program throughout 2022 can be found on page 58.

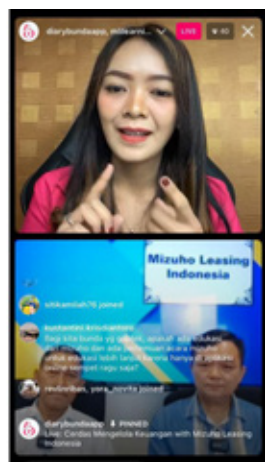
Social and Community Development

In carrying out the mandate of the Financial Services Authority through POJK No.76/POJK.07/2016 concerning Increasing Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and / or the Community. In the midst of the COVID-19 pandemic, the Company continues to carry out Financial Literacy activities in collaboration with Diary Bunda through the Instagram Live platform. The general objective of organizing this Financial Literacy is to provide trusted technology and information in providing financial education, especially helping mothers to open business opportunities.

The Company has a responsibility in the social sector which is shown through CSR activities held on December 5, 2022. One of the activities donation for the Cianjur Earthquake Victims. Together with 43 companies under Non-Bank Financial Institutions, the donation has been channeled by APPI through the Indonesian Red Cross (“PMI”) at PMI Headquarters and received directly by PMI Chairman Mr. Jusuf Kalla.

The Company, represented by Mr. Andi Harjono as Director of the Company, revealed that the Company was sorry for the disaster that befell our brothers and sisters in Cianjur, “Hopefully the assistance we provided can ease their burden and can provide encouragement to get through these difficult times.” he said.

The Cianjur Donation with APPI is part of a series of CSR programs that the Company has carried out every year. The Company continues to be committed to providing sustainable social responsibility programs that are right on target.



Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan **Responsibility for Sustainable Product Developments and/or Services**

Sesuai dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 5 (Lima) Tahun yang telah disusun, maka Perseroan menargetkan untuk mulai melakukan beberapa kajian terkait permintaan pasar terhadap produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan, Kesesuaian produk dan/atau jasa yang sudah ada dengan kriteria kegiatan usaha berkelanjutan, dan Pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan di tahun 2023.

Perlakuan Setara untuk Konsumen

Konsumen merupakan salah satu pemangku kepentingan utama PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk. Kehadiran mereka sangat menentukan perkembangan dan keberlangsungan perusahaan.

Semakin banyak konsumen yang berhasil diraih dan kepercayaannya terjaga, apalagi dengan adanya konsumen setia yang telah menjadi pelanggan, maka akan semakin terjamin keberlangsungan usaha Perseroan. Dan demikian sebaliknya. Karena posisi konsumen yang strategis, Perseroan tetap berkomitmen untuk memberikan produk dan layanan yang terbaik dan setara kepada seluruh konsumen tanpa terkecuali.

In accordance with the 5 (Five) Year Sustainable Finance Action Plan that has been prepared, the Company is targeting to start conducting several studies related to market demand for Sustainable Financial products and / or services, the suitability of existing products and / or services with the criteria for sustainable business activities, and Development of Sustainable Financial products and / or services in 2023.

Equal Treatment for Consumers

Consumers are one of the main stakeholders of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk. Their presence greatly determines the development and sustainability of the company.

The more consumers who are successfully achieved and their trust is maintained, especially with loyal customers who have become customers, the more the continuity of the Company's business will be guaranteed. And vice versa. Due to the strategic position of consumers, the Company remains committed to providing the best and equal products and services to all consumers without exception.



Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Report and Complaint Resolution

Per	Jenis Kegiatan Activities	Jenis Produk dan/atau Layanan Products/Services	Kategori Permasalahan Category	Jumlah Amount	Status Penyelesaian Resolution Status		
					Selesai Settled	Tidak Selesai Unsettled	Dalam Proses On Progress
JAN - MAR 2022	Konvensional Conventional	Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Multipurpose Financing with installments	Denda/Penalti Fines / Penalties	717	717	0	0
		Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Multipurpose Financing with installments	Klaim Asuransi Insurance claim	1	1	0	0
APR - JUN 2022	Konvensional Conventional	Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Multipurpose Financing with installments	Denda/Penalti Fines / Penalties	534	534	0	0
		Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Multipurpose Financing with installments	Penarikan Jaminan Fidusia Repossession of Fiduciary Collateral	1	1	0	0
		Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Multipurpose Financing with installments	Keberatan Biaya Tambahan/denda Objection to additional costs/ fines	1	1	0	0
JUL - AUG 2022	Konvensional Conventional	Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Multipurpose Financing with installments	Denda/Penalti Fines / Penalties	590	590	0	0
	Konvensional Conventional	Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Multipurpose Financing with installments	Fraud, Penipuan, kecurangan oleh pegawai dan/pihak lain, Fraud by employees and/or other parties	1	1	0	0
	Konvensional Conventional	Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Multipurpose Financing with installments	Perilaku petugas penagihan Collector behavior	2	2	0	0
	Konvensional Conventional	Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Multipurpose Financing with installments	Permasalahan Agunan/Jaminan Collateral Issues Total	1	0	0	1
OCT - DEC 2022	Konvensional Conventional	Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Multipurpose Financing with installments	Denda/Penalti Fines / Penalties	621	621	0	0
		Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Multipurpose Financing with installments	Perilaku petugas penagihan Collector behavior	1	1	0	0

Referensi Kriteria POJK No. 51/POJK.03/2017
Criteria Reference pursuant to POJK No. 51/POJK.03/2017

No	Uraian Description	Halaman Page
1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan	Explanation of Sustainability Strategy 158
2	Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan	Performance Overview of Sustainability Aspect 170
	a. Aspek ekonomi, paling sedikit meliputi: 1. Kuantitas produksi atau jasa yang dijual; 2. Pendapatan atau penjualan; 3. Laba atau rugi bersih; 4. Produk ramah lingkungan; dan 5. Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan.	a. Economic aspect, at least includes: 1. Quantity of products and services sold; 2. Revenue or sales; 3. Net profit or loss; 4. Environment-friendly products; and 5. Engagement of local party related to business process of Sustainable Finance. 170
	b. Aspek Lingkungan Hidup, paling sedikit meliputi: 1. Penggunaan energi (antara lain listrik dan air); 2. Pengurangan emisi yang dihasilkan Perseroan yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan lingkungan hidup; 3. Pengurangan limbah dan efluen (limbah yang telah memasuki lingkungan) yang dihasilkan Perseroan yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup; atau 4. Pelestarian keanekaragaman hayati bagi Perseroan yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup.	b. Environmental aspect, at least includes: 1. Energy consumption (including electricity and water); 2. Reduction of emission generated by a Company in which its business process directly related to environment; 3. Reduction of waste and effluent (waste entering environment) generated by a Company in which its business process directly related to environment; or 4. Biodiversity conservation for a Company in which its business process directly related to environment. 170
	c. Aspek sosial yang merupakan uraian mengenai dampak positif dan negatif dari penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan (termasuk orang, daerah, dan dana).	c. Social aspect, which is a description of positive and negative impacts of implementing Sustainability Finance for community and environment (including people, area, and fund). 170
3	Profil Singkat Perusahaan	Brief Company Profile 157
	a. Visi, misi, dan nilai keberlanjutan Perusahaan;	a. Corporate vision, mission, and sustainable values; 157
	b. Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat surat elektronik (e-mail), dan situs web, serta kantor cabang dan/atau kantor perwakilan Perusahaan;	b. E-mail address, website, and addresses of branch offices and/or representative office of the Company; 157
	c. Skala usaha Perusahaan secara singkat, meliputi: 1. Total aset atau kapitalisasi aset, dan total liabilitas (dalam jutaan rupiah); 2. Jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan; 3. Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah); dan 4. Wilayah Operasional	c. Brief Company's business scale includes: 1. Total assets or asset capitalization, and total liabilities (in million rupiah); 2. Total employees classified by gender, position, age, education, and employment status; 3. Percentage of shareholding (public and government); and 4. Area of operations. 157
	d. Penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan;	d. Brief description of products, services, and business operations; 157
	e. Keanggotaan pada asosiasi;	e. Membership in associations; 157
	f. Perubahan Perusahaan yang bersifat signifikan, antara lain terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan.	f. Significant changes of the Company, including those related to closing or opening branch(es), and ownership structure. 157

No	Uraian Description	Halaman Page
4	Penjelasan Direksi	172
	a. Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan, paling sedikit meliputi:	173
	1. Penjelasan nilai keberlanjutan bagi Perusahaan;	
	2. Penjelasan respon Perusahaan terhadap isu terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan;	
	3. Penjelasan komitmen pimpinan Perusahaan dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan;	
	4. Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan	
	5. Tantangan pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan.	
	b. Penerapan Keuangan Berkelanjutan, paling sedikit meliputi:	175
	1. Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup) dibandingkan dengan target; dan	
	2. Penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan (bagi Perusahaan yang diwajibkan membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan).	
	c. Strategi pencapaian target, paling sedikit meliputi:	180
	1. Pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup;	
	2. Pemanfaatan peluang dan prospek usaha; dan	
	3. Penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan Perusahaan.	
	a. Policy to respond challenges to comply with a sustainability strategy, at least includes:	
	1. Explanation of sustainability values for the Company;	
	2. Explanation of the Company's responses to issues related to Sustainable Finance implementation;	
	3. Explanation of commitment of the Company's leaders to achieve targets of Sustainable Finance implementation;	
	4. Performance achievements of Sustainable Finance implementation;	
	5. Challenges on performance achievement of Sustainable Finance implementation;	
	b. Sustainable Finance implementation, at least includes:	
	1. Performance achievement of Sustainable Finance implementation (economic, social, and environmental aspects) compared with targets; and	
	2. Explanation of achievements and challenges, including important events during the reporting period (for a Company required to make an Sustainable Finance Action Plan).	
	b. Strategy for achieving targets, at least includes:	
	1. Risk management of implementation Sustainable Finance related to economic, social, and environmental aspects;	
	2. Opportunities utilization and business prospect; and	
	3. Explanation of external economic, social, and environmental conditions potentially affecting the Company's sustainability.	

No	Uraian Description	Halaman Page
5	Tata Kelola Keberlanjutan	Sustainability Governance 180
	a. Uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/ atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.	a. Explanation of duties of the Board of Directors and the Board of Commissioners, employee, executive, and/or work unit to be responsible for Sustainable Finance implementation. 180
	b. Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/ atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.	b. Explanation of competence development for members of Board of Directors and Board of Commissioners, employee, executive, and/or work unit to be responsible for Sustainable Finance implementation. 182
	c. Penjelasan mengenai prosedur Perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko perusahaan.	c. Explanation of the Company's procedure in identifying, measuring, monitoring, and controlling risks of Sustainable Finance implementation related to economic, social, and environmental aspects, including roles of the Board of Directors and the Board of Commissioners in managing, reviewing periodically, and evaluating effectiveness of the Company's risk management process. 182
	d. Penjelasan mengenai pemangku kepentingan yang meliputi: 1. Keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian (<i>assessment</i>) manajemen, RUPS, surat keputusan atau lainnya; dan 2. Pendekatan yang digunakan Perusahaan dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain dalam bentuk dialog, survei, dan seminar.	d. Explanation of stakeholders, includes: 182 1. Engagement of stakeholders based on result of assessment on the management, GMS, decree, or others; and 2. Approach with used by the Company to engage stakeholders in Sustainable Finance implementation, among others, in the form of dialog, survey, and seminar.
	e. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.	e. Problems encountered, developments, and influence toward implementing Sustainable Finance. 182
6	Kinerja Keberlanjutan	Sustainability Performance 184
	a. Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal Perseroan.	a. Explanation of activities in building the culture of sustainability within the Company. 184
	b. Uraian mengenai kinerja ekonomi dalam 3 tahun terakhir meliputi: 1. Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi dalam hal Laporan Keberlanjutan disusun secara terpisah dengan Laporan Tahunan; dan 2. Perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan.	b. Explanation of economic performance in the last 3 years, includes: 184 1. Comparison between target and performance of production, portfolio, financing target, or investment, revenue and profit/loss in terms of the Sustainability Report are prepared separately from the Annual Report; and 2. Comparison between target and performance of portfolio, financing target, or investment of financial instruments or projects which are in line with the implementation of Sustainable Finance.

No	Uraian Description	Halaman Page
c.	<p>Kinerja sosial dalam 3 tahun terakhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Perusahaan untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen. 2. Ketenagakerjaan, paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak; b. Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional; c. Lingkungan bekerja yang layak dan aman; dan d. Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai. 3. Masyarakat, paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan; b. Mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti; dan c. TJSL yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat. 	188
c.	<p>Social performance in the last 3 years:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Company's commitment to providing consumers with equal products and/or services. 2. Employment, at least contains: <ol style="list-style-type: none"> a. Statement on equality of job opportunity and existence of forced labor and child labor; b. Percentage of permanent employee's lowest remuneration to regional minimum wage; c. Decent, safe workplace; and d. Training and development on employees' capability. 3. Community, at least contains: <ol style="list-style-type: none"> a. Information of activities or area of operations making positive and negative impacts on surrounding communities, including financial literacy and inclusion; b. Public complaint mechanism as well as total public complaints received and followed up; and c. Social and environmental responsibility which can be associated with support to the sustainable development goals, i.e. types and achievements of community empowerment programs. 	188
d.	<p>Kinerja Lingkungan Hidup, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan; 2. Uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan jenis material daur ulang; dan 3. Uraian mengenai penggunaan energi, paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah dan intensitas energi yang digunakan; dan b. Upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan. 	187
d.	<p>Environmental performance, at least contains:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Environmental cost spent; 2. Explanation of use of environment-friendly material, e.g. use of recycled material; and 3. Explanation of energy consumption, at least contains: <ol style="list-style-type: none"> a. Total and intensity of energy consumed; and b. Effort and achievement of energy efficiency implemented, including use of renewable energy. 	187

No	Uraian Description	Halaman Page
	<p>e. Kinerja Lingkungan Hidup bagi Perusahaan yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf d; 2. Informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem; 3. Keanekaragaman hayati, paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati; dan b. Usaha konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies flora atau fauna. 4. Emisi, paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya; dan b. Upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan. 5. Limbah dan efluen, paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis; b. Mekanisme pengelolaan limbah dan efluen; dan c. Tumpahan yang terjadi (jika ada). 6. Jumlah dan materi pengaduan Lingkungan Hidup yang diterima dan diselesaikan. 	187
	<p>f. Tanggung jawab pengembangan Produk dan/ atau Jasa Keuangan Berkelanjutan, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan; 2. Jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan; 3. Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari Produk dan/ atau Jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif; 4. Jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya; atau 5. Survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan. 	192
7	Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada.	Written verification of independent party, if any. -

Lembar Umpan Balik Feedback Sheet

Laporan ini menyajikan informasi terkait kinerja Perseroan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perseroan sangat mengharapkan kritik, masukan, atau saran dari Bapak/Ibu/Saudara untuk meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan berikutnya.

This report presents information related to performance of the Company in economic, social, and environmental aspects. The Company welcomes your criticisms, feedback or suggestions for improving quality of the subsequent sustainable reports.

Pertanyaan Questions	Setuju Agree	Tidak setuju Disagree
<p>Laporan Keberlanjutan ini telah memberikan informasi yang bermanfaat mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan Perseroan. This Sustainability Report has provided useful information on economic, social, and environmental performance of the Company.</p> <p>Data dan informasi yang diungkapkan mudah dipahami, lengkap, transparan, dan berimbang. Data and information disclosed are easy to understand, complete, transparent, and balanced.</p> <p>Data dan informasi yang disajikan berguna dalam pengambilan keputusan. Data and information presented are useful for making decision.</p> <p>Laporan ini menarik dan mudah dibaca. This report is interesting and easy to read.</p>		

Mohon berikan nilai mengenai aspek yang terdapat dalam Laporan ini. (1 = paling penting, 2 = penting, 3 = tidak penting, 4 = sangat tidak penting).

Please score on aspects presented in this Report. (1 = most important, 2 = important, 3 = not important, 4 = very important).

Kinerja Ekonomi
Economic Performance

Ketenagakerjaan
Employment

Pengelolaan Limbah
Waste Treatment

Portofolio Produk
Product Portfolio

Penggunaan Energi
Energy Consumption

Privasi Nasabah
Customer Privacy

Pelatihan dan Pendidikan
Training and Education

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja yang Adil
Gender Equality and Fair Job Opportunity

Anti Korupsi dan Anti *Fraud*
Anti-Corruption and Anti-Fraud

Teknologi Informasi
Information Technology

Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Work Health and Safety

Pengurangan Emisi
Emission Reduction

Mohon berikan komentar/saran/usulan bagi laporan ini / Please give your comments/suggestions/proposals for this report

.....

.....

.....

Profil Anda / Your Profile

Nama / Name :
Pekerjaan / Occupation :
Nama Lembaga/Perusahaan / Name of Institution/Company :
Kontak (telepon, email) / Contact (phone, e-mail) :

Kategori Pemangku Kepentingan / Category of Stakeholder

Investor / Investor Nasabah / Customer Pegawai / Employee Distributor / Distributor
 Media / Media Masyarakat / Public Pemerintah / Government Lain-lain / Other

Saran dan tanggapan yang Anda berikan atas informasi yang disajikan dalam Laporan ini mohon dikirimkan kepada:
Please send your suggestion and response to information presented in this Report to:

Fransisca Y Gunawan
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Menara Astra 32nd Floor
Jl. Jend Sudirman Kav. 5-6 Jakarta 10220
Telp: +62 21 5085.1848 Fax: +62 21 5085.1849

**SURAT PERNYATAAN
ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN & LAPORAN KEBERLANJUTAN 2022
PT MIZUHO LEASING INDONESIA TBK**

STATEMENT LETTER OF
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE 2022 ANNUAL REPORT & SUSTAINABILITY REPORT OF
PT MIZUHO LEASING INDONESIA TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk tahun 2022 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Jakarta, April 2023

We the undersign hereby declare that all information in the 2022 Annual Report & Sustainability Report of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk has been provided in complete and are fully responsible for the accuracy of the content of the Company's Report.

The statement was made in actuality.
Jakarta, April 2023

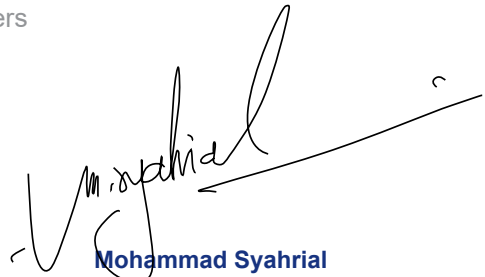
Dewan Komisaris
Board of Commissioners



Takeshi Sasaki
Komisaris Utama
President Commissioner

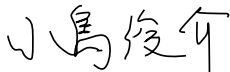


Roosniati Salihin
Komisaris
Commissioner



Mohammad Syahril
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Direksi
Board of Directors



Shunsuke Kojima
Direktur
Director



Konosuke Mizuta
Direktur Utama
President Director



Andi Harjono
Direktur
Director



Ade Rafida Saulina S
Direktur
Director



Yudi Gustiawan
Direktur
Director

**LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN YANG TELAH DIAUDIT /
AUDITED ANNUAL FINANCIAL STATEMENT**

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)

LAPORAN KEUANGAN/FINANCIAL STATEMENTS

**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021/
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

**DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

	<u>Halaman/ Page</u>	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		DIRECTORS' STATEMENT LETTER
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
LAPORAN KEUANGAN - Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021		FINANCIAL STATEMENTS - For the years ended December 31, 2022 and 2021
Laporan Posisi Keuangan	1	Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas	4	Statements of Changes in Equity
Laporan Arus Kas	5	Statements of Cash Flows
Catatan Atas Laporan Keuangan	6	Notes to Financial Statements

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
 TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
 KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
 31 DESEMBER 2022**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
 RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE
 FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED
 DECEMBER 31, 2022**

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini/ We, the undersigned:

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | Nama/ Name
Alamat kantor/ Office address

Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/
Domicile as stated in ID card

Nomor telepon/ Phone number
Jabatan/ Position | : | Konosuke Mizuta
Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling
5-6, Jakarta 10220
Apartemen Plaza Senayan Unit C232 Tower C Lt. 23,
Jl. Tinju No. 1, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat

(021) 50851848
Presiden Direktur/ President Director |
| 2. | Nama/ Name
Alamat kantor/ Office address

Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/
Domicile as stated in ID card

Nomor telepon/ Phone number
Jabatan/ Position | : | Shunsuke Kojima
Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling
5-6, Jakarta 10220
Apartemen Plaza Senayan, Jl. Tinju No. 1, Gelora Bung
Karno, Tanah Abang

(021) 50851848
Direktur/ Director |

Menyatakan bahwa/ State that:

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1. | Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022; | 1. | We are responsible for the preparation and presentation of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk's financial statements for the year ended December 31, 2022; |
| 2. | Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. | The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3. | a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;

b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | 3. | a. All information contained in the financial statements is complete and correct;

b. The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts; |
| 4. | Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan. | 4. | We are responsible for the Company's internal control system. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 14 Maret 2023/March 14, 2023



Konosuke Mizuta
 Presiden Direktur/President Director

Shunsuke Kojima
 Direktur/Director

Laporan Auditor Independen

Independent Auditor's Report

No. 00049/2.1265/AU.1/09/1626-1/1/III/2023

No. 00049/2.1265/AU.1/09/1626-1/1/III/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

To the Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Opini

Opinion

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (dahulu PT Verena Multi Finance Tbk) ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

We have audited the financial statements of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (formerly PT Verena Multifinance Tbk) ("the Company"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at December 31, 2022, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



Imelda & Rekan

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities, each of which are separate and independent legal entities, provide services from more than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Hanoi, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei and Tokyo.

Imelda & Rekan

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Kerugian Kredit Ekspetasian (“KKE”) pada piutang pembiayaan (piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen)

Mengacu pada Catatan 3e Instrumen keuangan; Catatan 6 Piutang pembiayaan konsumen; Catatan 7 Piutang sewa pembiayaan; dan Catatan 37 Manajemen Risiko – Risiko kredit.

Pada 31 Desember 2022, Perusahaan memiliki piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan masing-masing sebesar Rp 1.829 miliar dan Rp 797 miliar. Cadangan KKE terhadap piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan masing-masing sebesar Rp 34 miliar dan Rp 36 miliar. Perusahaan mengimplementasikan ketentuan PSAK 71 Instrumen Keuangan untuk menghitung estimasi KKE atas eksposur kredit piutang pembiayaan.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matters identified in our audit are outlined as follows:

Expected credit losses (“ECL”) on financing receivables (finance lease receivables and consumer financing receivables)

Refer to Note 3e Financial instruments; Note 6 Consumer financing receivables; Note 7 Finance lease receivables; and Note 37 Risk management – credit risk.

As at December 31, 2022, the Company has financing receivables comprising of consumer financing receivables and finance lease receivables amounting to Rp 1.829 billion, and Rp 797 billion, respectively. Allowance for ECL against these consumer financing receivables and finance lease receivables amounted to Rp 34 billion and Rp 36 billion, respectively. The Company applies PSAK 71 Financial Instruments requirements to calculate the ECL for its financing receivables exposures.

Imelda & Rekan

Kami berfokus pada area ini karena besarnya nilai tercatat piutang pembiayaan setelah nilai KKE yang mewakili 85.67% dari total aset Perusahaan. Penentuan KKE didasarkan pada beberapa asumsi yang kompleks dan subjektif dan juga pertimbangan yang digunakan oleh Manajemen. Lebih jauh, kondisi ekonomi dan geopolitik saat ini turut meningkatkan tingginya ketidakpastian atas estimasi dan tingkat pertimbangan yang dibutuhkan untuk digunakan dalam mengestimasi KKE. Dengan melihat faktor-faktor ini, kami mengidentifikasi KKE sebagai hal audit utama.

Perusahaan menghitung KKE untuk piutang pembiayaan yang tidak mengalami penurunan nilai maupun untuk yang mengalami penurunan nilai. Untuk piutang pembiayaan yang tidak mengalami penurunan nilai dan yang mengalami penurunan nilai, yang tidak dianggap signifikan secara individual, Perusahaan menilai KKE secara kolektif. Untuk piutang pembiayaan yang mengalami penurunan nilai, yang nilainya signifikan secara individual, Perusahaan menilai KKE secara individual.

a. KKE kolektif atas piutang pembiayaan

KKE kolektif atas piutang pembiayaan dihitung dengan mempertimbangkan probability of *default* ("PD"), *loss given default* ("LGD"), *exposure at default* ("EAD") dan tingkat diskonto. Perusahaan menggunakan model yang bergantung pada data internal dan eksternal. Perhitungan KKE kolektif menggunakan pertimbangan dan asumsi yang signifikan; termasuk di dalamnya:

- Penilaian atas peningkatan risiko kredit secara signifikan dan kredit *default*;
- Ekspektasi atas faktor makro ekonomi masa depan dan skenario, termasuk penentuan bobot pertimbangannya; dan
- Asumsi model yang digunakan.

b. KKE individual atas piutang pembiayaan

KKE individual atas piutang pembiayaan dihitung dengan estimasi arus kas yang akan diterima di masa depan, dengan mengombinasikan beberapa skenario, asumsi probabilitas tertimbang dan tingkat diskonto. Perhitungan KKE individual menggunakan pertimbangan dan asumsi yang signifikan, termasuk di dalamnya:

- Perkiraan atas arus kas yang diterima;
- Penilaian aset yang dijaminan; dan
- Estimasi atas skenario, waktu untuk menerima pembayaran di masa depan dan bobot pertimbangannya.

We focused on this area due to the significance of the carrying value of financing receivables after its ECL representing 85.67% of the total assets of the Company. The determination of ECL is based on a number of complex and subjective assumptions and judgements used by Management. Further, the current economic and geopolitical condition have increased the uncertainty of these estimates and degree of judgment required to be exercised in estimating the ECL. In view of these factors, we identified ECL as a key audit matter.

The Company calculates ECL for both non-impaired and impaired financing receivables. For non-impaired and impaired financing receivables, which are not considered individually significant, the Company assesses ECL on a collective basis. For impaired financing receivables, which are considered individually significant, the Company assesses ECL on an individual basis.

a. Collective ECL on financing receivables

Collective ECL on financing receivables is calculated by considering the probability of default ("PD"), loss given default ("LGD"), exposure at default ("EAD") and discount rates. The Company utilizes modelling which are reliant on internal and external data. The measurement of collective ECL involves significant management judgements and assumptions, including, among others:

- Assessment of significant increase in credit risk and default criteria;
- Expectations of forward-looking macroeconomic factors and scenarios, including in determining the probability weightings; and
- The model assumptions used.

b. Individual ECL on financing receivables

Individual ECL on financing receivables is assessed by the estimation of future cash flows, combining scenarios, probability weightings assumptions and discount rates. The measurement of individual ECL involves significant management judgements and assumptions, including, among others:

- Expected amount of cash flows;
- Collateral valuations; and
- Estimations of the scenarios, timing to collect the future cash flows and the weighting.

Imelda & Rekan

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama

Kami telah melakukan prosedur berikut untuk merespon hal audit utama:

a. KKE kolektif atas piutang pembiayaan

Kami memperoleh pemahaman mengenai pengendalian yang berhubungan dengan audit kami dan menilai desain dan implementasi dari pengendalian yang relevan atas KKE. Hal ini termasuk:

- Identifikasi peningkatan risiko kredit secara signifikan (SICR), kriteria default atau penurunan nilai kredit;
- Penilaian atas informasi masa depan yang digunakan dalam model KKE;
- Penilaian atas keandalan dan akurasi dari elemen data utama yang digunakan dalam model KKE;
- Penilaian dan persetujuan atas hasil perhitungan KKE;
- Penilaian terhadap pengendalian umum dari Teknologi Informasi (TI) atas sistem KKE, dengan melibatkan spesialis TI kami.

Kami melibatkan spesialis internal kami untuk membantu kami dalam melakukan prosedur berikut ini dengan dasar sampel:

- Mengevaluasi kelayakan penilaian Perusahaan atas kriteria peningkatan risiko kredit secara signifikan;
- Menguji pendekatan Perusahaan dalam pemilihan skenario ekonomi untuk menilai kewajaran atas skenario ekonomi dan bobot pertimbangan yang diaplikasikan oleh Perusahaan;
- Menilai kewajaran atas pertimbangan dan asumsi utama yang dibuat oleh Manajemen pada model dan parameter dalam *probabilities of default (PD)* dan *loss given default (LGD)*;
- Melakukan validasi independen atas model KKE dan penilaian hasil validasi model oleh Manajemen.

Kami juga melakukan prosedur substantif pada basis sampel:

- Mengevaluasi masukan dan asumsi relevan yang digunakan oleh Perusahaan dalam model KKE;
- Menghitung ulang KKE secara independen untuk portofolio yang terpilih.

How our audit addressed the key audit matter

We have performed the following procedures to address this key audit matter:

a. Collective ECL on financing receivables

We obtained an understanding of the controls relevant to our audit and assessed the design and implementation of such relevant controls over the ECL. These include:

- Identification of significant increase in credit risk (SICR), default criteria or credit impairment;
- Assessment of the forward-looking information used in the ECL models;
- Assessment of the reliability and accuracy of critical data elements in the ECL models;
- Assessment and approval of the ECL results;
- Assessment on General IT controls over the ECL system, by involving our IT specialist.

We involved our internal specialist to assist us in performing the following procedures on a sampling basis:

- Evaluated the appropriateness of the Company's assessment of its SICR criteria;
- Challenged the Company's approach for the selection of economic scenario to assess the reasonableness of the economic scenarios and corresponding weightages applied by the Company;
- Assessed the reasonableness of key judgments and assumptions made by management in the probabilities of default (PD) and loss given default (LGD) models and parameters;
- Performed independent validation of the ECL models and assessment of model validation results by management.

We also performed substantive testing on a sampling basis:

- Evaluated relevant inputs and assumptions used by the Company in the ECL models;
- Independently recalculated the ECL for the selected portfolio.

Imelda & Rekan

Kami telah menilai ketepatan atas pengungkapan terkait yang dibuat di dalam laporan keuangan.

b. KKE individual atas piutang pembiayaan

Kami memperoleh pemahaman tentang pengendalian yang relevan terhadap audit kami dan menilai desain dan implementasi pengendalian yang relevan atas KKE atas piutang pembiayaan, yang mencakup penilaian dan pemantauan agunan, pemantauan dan peninjauan piutang pembiayaan, serta peninjauan dan persetujuan atas KKE yang dinilai secara individual.

Untuk sampel kami atas piutang pembiayaan yang dinilai secara individual, kami melakukan prosedur berikut:

- Mengkritisi asumsi utama manajemen yang diterapkan dalam ekspektasi arus kas masa depan termasuk jumlah, waktu, dan probabilitas tertimbang yang digunakan;
- Melakukan perhitungan ulang KKE individual.

Kami telah menilai ketepatan atas pengungkapan terkait yang dibuat di dalam laporan keuangan.

Hal Lain

Laporan keuangan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 7 Maret 2022.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidak konsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

We have assessed appropriateness of the related disclosures made in the financial statements.

b. Individual ECL on financing receivables

We obtained an understanding of the controls relevant to our audit and assessed the design and implementation of the controls of such relevant controls over the ECL on financing receivables, which include collateral valuation and monitoring, credit monitoring and reviews, and review and approval of the individually assessed ECL.

For our selected samples of financing receivables that are individually assessed, we performed the following procedures:

- Challenged management's key assumptions applied on the expected future cash flows of the debtor, including amounts, timing, and probability-weighted outcome used;
- Recalculated the individual ECL

We have assessed appropriateness of the related disclosures made in the financial statements.

Other Matter

The financial statements of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk as of December 31, 2021 and for the year then ended were audited by other independent auditor who expressed an unmodified opinion on such financial statements on March 7, 2022.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above, when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Imelda & Rekan

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Imelda & Rekan

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
 - Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
 - Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
 - Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
 - Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
 - Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
 - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
 - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
 - Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Imelda & Rekan

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Perusahaan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Perusahaan. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities business activities within the Company to express an opinion on the financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Company audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

IMELDA & REKAN



Bayu M Dayat

Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP. 1626

14 Maret 2023/*March 14, 2023*



00049

	Catatan/ Notes	2022 Rp'000	2021 Rp'000	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	5			Cash and cash equivalents
Pihak berelasi	33	34.057.828	15.311.287	Related parties
Pihak ketiga		68.541.908	80.326.629	Third parties
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi cadangan kerugian kredit sebesar Rp 34.416.928 pada 31 Desember 2022 (31 Desember 2021: Rp 39.813.361)	6	1.438.260.924	1.193.675.816	Consumer financing receivables - net of allowance for credit losses of Rp 34,416,928 at December 31, 2022 (December 31, 2021: Rp 39,813,361)
Piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi cadangan kerugian kredit sebesar Rp 35.977.048 pada 31 Desember 2022 (31 Desember 2021: Rp 20.375.740)	7	674.828.310	835.778.272	Finance lease receivables - net of allowance for credit losses of Rp 35,977,048 at December 31, 2022 (December 31, 2021: Rp 20,375,740)
Piutang lain-lain - bersih	8			Other receivables - net
Pihak berelasi	33	497.515	1.013.336	Related parties
Pihak ketiga		78.561.814	90.728.054	Third parties
Biaya dibayar dimuka	9			Prepaid expenses
Pihak berelasi	33	11.917	22.917	Related parties
Pihak ketiga		1.735.082	1.001.449	Third parties
Aset pajak tangguhan	19	11.581.921	5.609.982	Deferred tax assets
Aset tetap - bersih	11	53.032.718	39.824.601	Property and equipment - net
Aset derivatif	12	17.532.167	187.849	Derivative assets
Aset hak-guna - bersih	10	33.763.452	8.653.107	Right-of-use assets - net
Aset lain-lain	13			Other assets
Pihak berelasi	33	558.295	573.920	Related parties
Pihak ketiga		53.706.698	50.446.989	Third parties
JUMLAH ASET		2.466.670.549	2.323.154.208	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

	Catatan/ Notes	2022 Rp'000	2021 Rp'000	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang usaha	15	714.424	846.385	Trade payables
Biaya masih harus dibayar	17			Accrued expenses
Pihak berelasi	33	2.182.874	722.366	Related parties
Pihak ketiga		12.186.551	2.838.979	Third parties
Utang pajak	18	2.245.199	2.005.338	Taxes payables
Liabilitas derivatif	12	-	179.534	Derivative liabilities
Liabilitas sewa	20	29.542.427	4.950.271	Lease liabilities
Utang bank	14			Bank loans
Pihak berelasi	33	1.137.759.920	1.050.871.419	Related parties
Pihak ketiga		523.617.697	561.886.661	Third parties
Utang lain-lain	16			Other payables
Pihak berelasi	33	7.865.500	14.269.000	Related parties
Pihak ketiga		48.249.346	47.646.307	Third parties
Liabilitas imbalan pasca-kerja	21	12.408.918	11.693.250	Post-employment benefits liabilities
Jumlah Liabilitas		<u>1.776.772.856</u>	<u>1.697.909.510</u>	Total Liabilities
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal				Share capital - par value
Rp 100 (dalam Rupiah penuh)				Rp 100 (in full Rupiah)
per saham				per share
Modal dasar - 10.000.000.000				Authorized capital -
saham				10,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh -				Issued and fully paid -
5.687.353.997 saham	22	568.735.400	568.735.400	5,687,353,997 shares
Tambahan modal disetor	23	97.585.106	97.585.106	Additional paid-in capital
Komponen ekuitas lain		1.028.277	(1.578.930)	Other equity components
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya		1.200.000	1.200.000	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		21.348.910	(40.696.878)	Unappropriated
Jumlah Ekuitas		<u>689.897.693</u>	<u>625.244.698</u>	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u><u>2.466.670.549</u></u>	<u><u>2.323.154.208</u></u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021

	Catatan/ Notes	2022 Rp'000	2021 Rp'000	
PENDAPATAN				REVENUES
Pembiayaan konsumen	24	224.002.335	189.383.258	Consumer financing
Sewa pembiayaan	25	46.353.196	64.874.030	Finance leases
Administrasi dan provisi	26	32.444.527	29.453.706	Administration and provision
Penalti	27	14.580.192	12.361.619	Penalty
Bunga		390.037	439.011	Interest
Pendapatan lain-lain	28	15.290.298	6.383.103	Other income
Jumlah Pendapatan		333.060.585	302.894.727	Total Revenues
BEBAN				EXPENSES
Bunga dan keuangan	29	(59.244.572)	(58.225.922)	Interest and financing charges
Kepegawaian	30	(102.961.163)	(92.072.194)	Personnel
Umum dan administrasi	31	(63.899.439)	(50.448.528)	General and administrative
Penyisihan kerugian penurunan nilai		(49.550.126)	(93.384.458)	Provision for impairment losses
Beban lain-lain		(2.066.803)	(590.180)	Other expenses
Jumlah Beban		(277.722.103)	(294.721.282)	Total Expenses
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		55.338.482	8.173.445	PROFIT BEFORE INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX
Kini		-	-	Current
Tangguhan	19	6.707.306	(15.939.367)	Deferred
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan		6.707.306	(15.939.367)	Income Tax (Expense) Benefit
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		62.045.788	(7.765.922)	NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti		(27.925)	(47.798)	Gain (loss) on defined benefit actuarial program
Pajak penghasilan terkait		6.143	10.515	Income tax related
Jumlah		(21.782)	(37.283)	Total
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will be reclassified subsequently to profit or loss:
Laba dari lindung nilai arus kas		3.370.498	1.475.217	Gain from cash flow hedge
Pajak penghasilan terkait		(741.509)	(324.548)	Income tax related
Jumlah		2.628.989	1.150.669	Total
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain		2.607.207	1.113.386	Total Other Comprehensive Income
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		64.652.995	(6.652.536)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
LABA (RUGI) PER SAHAM (dalam Rupiah penuh)	32	10,91	(1,37)	BASIC EARNING (LOSS) PER SHARE (in full Rupiah)

Lihat Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital Rp'000	Tambahannya Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital Rp'000	Komponen Ekuitas Lain/ Other equity components		Ditetapkan Penggunaannya/ Appropriated Rp'000	Belum Ditetapkan Penggunaannya/ Unappropriated Rp'000	Jumlah Ekuitas/ Total Equity Rp'000	
			Kerugian Aktuarial (Catatan 21)/ Loss on Actuarial (Note 21) Rp'000	Lindung Nilai Arus Kas (Catatan 12)/ Cash Flows Hedge (Note 12) Rp'000				
Saldo per 1 Januari 2021	568.735.400	97.585.106	(1.609.969)	(1.082.347)	1.100.000	(32.830.956)	631.897.234	Balance as of 1 January 2021
Pencadangan saldo laba	22	-	-	-	100.000	(100.000)	-	Appropriation of retained earnings
Rugi tahun berjalan	-	-	-	-	-	(7.765.922)	(7.765.922)	Loss for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(37.283)	1.150.669	-	-	1.113.386	Other comprehensive income
Saldo 31 Desember 2021	568.735.400	97.585.106	(1.647.252)	68.322	1.200.000	(40.696.878)	625.244.698	Balance as of 31 December 2021
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	62.045.788	62.045.788	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(21.782)	2.628.989	-	-	2.607.207	Other comprehensive income
Saldo 31 Desember 2022	<u>568.735.400</u>	<u>97.585.106</u>	<u>(1.669.034)</u>	<u>2.697.311</u>	<u>1.200.000</u>	<u>21.348.910</u>	<u>689.897.693</u>	Balance as of 31 December 2022

Lihat Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

	Catatan/ Notes	2022 Rp'000	2021 Rp'000	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan		1.730.308.369	1.488.045.825	Cash receipts from consumer financing and finance lease
Penerimaan kas sehubungan dengan pembiayaan bersama		10.534.472	8.167.602	Cash receipts in connection with joint financing
Penerimaan operasional lainnya		4.366.536	1.970.853	Other operating received
Penerimaan bunga		390.037	439.011	Interest received
Pembayaran kas untuk:				Cash paid for:
Pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan		(1.584.707.760)	(1.034.887.003)	Consumer financing and finance lease
Beban operasional		(73.186.505)	(60.895.940)	Operational expenses
Pembayaran operasional lainnya		(32.832.323)	(20.446.447)	Payment for other operating activities
Pembayaran bunga		(58.518.274)	(58.832.749)	Payment of interest
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi		<u>(3.645.448)</u>	<u>323.561.152</u>	Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	11	(25.007.851)	(9.578.633)	Acquisition of property and equipments
Hasil penjualan aset tetap	11	<u>968.980</u>	<u>79.578</u>	Proceed from sale of property and equipments
Arus Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi		<u>(24.038.871)</u>	<u>(9.499.055)</u>	Net Cash Flows Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan utang bank	14	1.123.314.342	2.590.945.068	Receipts of bank loans
Pembayaran utang bank	14	(1.074.694.805)	(2.928.030.498)	Payments for bank loans
Pembayaran pendanaan lainnya		(13.973.398)	(12.911.524)	Other funding payments
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan		<u>34.646.139</u>	<u>(349.996.954)</u>	Net Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		6.961.820	(35.934.857)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	5	<u>95.637.916</u>	<u>131.572.773</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGIINING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	5	<u><u>102.599.736</u></u>	<u><u>95.637.916</u></u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk ("Perusahaan") didirikan dengan nama PT Maxima Perdana Finance berdasarkan Akta No. 43 tanggal 21 Juli 1993 dari Sri Nanning, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-11503.HT.01.01.Th.93 tanggal 29 Oktober 1993 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 4 November 1994, Tambahan No. 8832. Perusahaan telah melakukan perubahan nama beberapa kali, terakhir dari PT Verena Multi Finance Tbk menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Verena Multi Finance Tbk No. 8 tanggal 19 September 2022 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Otoritas Jasa Keuangan, masing-masing dengan surat No AHU-0068946.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 24 September 2022 dan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-806/NB.11/ 2022 tanggal 12 Desember 2022.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir adalah sebagaimana tersebut dalam Akta No. 8 tanggal 19 September 2022 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068946.AH.01.02.Tahun 2022 Tanggal 24 September 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan utama Perusahaan meliputi usaha pembiayaan:

- a. Pembiayaan investasi
- b. Pembiayaan modal kerja
- c. Pembiayaan multiguna
- d. Kegiatan Usaha Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (the "Company") was established under the name of PT Maxima Perdana Finance based on Deed No. 43 dated July 21, 1993 of Sri Nanning, S.H., Notary in Jakarta. The Deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. C2-11503.HT.01.01.Th.93 dated October 29, 1993, and was published in Supplement No. 8832 of State Gazette of the Republic of Indonesia No. 88 dated November 4, 1994. The Company has changed its name several times, the latest from PT Verena Multi Finance Tbk to become PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk based on the Deed of Shareholders' Extraordinary Meeting of PT Verena Multi Finance Tbk No. 8 dated September 19, 2022 of Fathiah Helmi, S.H. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as well as the Financial Services Authority, in letter No. AHU-0068946.AH.01.02.TAHUN 2022 and Copy of Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) No. KEP-806/NB.11/2022 dated December 12, 2022, respectively.

The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment to the Company's Articles of Association is as stated in Deed No. 8 dated September 19, 2022 from Fathiah Helmi, SH, Notary in Jakarta, have received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0068946.AH.01.02. Year 2022 dated 24 September 2022 concerning Approval of Amendments to the Limited Liability Company Articles of Association.

Based on Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of activities of the Company comprises of financing activities:

- a. Investment financing
- b. Working capital financing
- c. Multipurpose financing
- d. Other Business Activities Based on Approval from OJK.

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

Selain kegiatan usaha utama di atas, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa (*fee*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perusahaan, dengan nama sebelumnya, PT Maxima Perdana Finance, memperoleh izin usaha lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 994/KMK.017/1993 tanggal 30 Desember 1993. Perusahaan mulai beroperasi pada tanggal 21 Juni 2003, dengan izin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 Jo. No. KEP-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010 Jo. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.KEP-806/NB.11/2022 tanggal 12 Desember 2022.

Saat ini, Perusahaan menjalankan usaha utamanya dibidang pembiayaan konsumen dan aktivitas sewa pembiayaan dan mempunyai 24 (dua puluh empat) kantor cabang yang terletak di kota Bandar Lampung, Bandung, Bekasi, Bogor, Cikarang, Denpasar, Depok, Jakarta, Jambi, Kediri, Lamongan, Makassar, Malang, Medan, Palembang, Pekanbaru, Samarinda, Semarang, Serang, Surabaya dan Tangerang. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5-6, Jakarta Pusat 10220.

Perusahaan berada dalam pengendalian Mizuho Leasing Co., Ltd. (dahulu IBJ Leasing, Co., Ltd.) Jepang.

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah 664 dan 614 karyawan (tidak diaudit).

In addition to the above main business activities, the Company can carry out supporting business activities to perform operating leases and/or fee-based activities as long as the Company does not violate the laws and regulations in the financial services sector.

The Company, under its former name of PT Maxima Perdana Finance, obtained its license to operate as a financing company from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia based on Decision Letter No. 994/KMK.017/1993 dated December 30, 1993. The Company started operating on June 21, 2003 with operating license based on the Decision Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-161/KM.6/2004 dated May 4, 2004 Jo. No. KEP-654/KM.10/2010 dated December 9, 2010 Jo. Copy of Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) No. KEP-806/NB.11/2022 dated December 12, 2022.

Currently, the Company is engaged in consumer financing and finance lease activities and has 24 (twenty four) branches located in the city of Bandar Lampung, Bandung, Bekasi, Bogor, Cikarang, Denpasar, Depok, Jakarta, Jambi, Kediri, Lamongan, Makassar, Malang, Medan, Palembang, Pekanbaru, Samarinda, Semarang, Serang, Surabaya and Tangerang. The head office is located at Menara Astra, 32nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5-6, Central Jakarta 10220.

The Company is under control of Mizuho Leasing Co., Ltd. (formerly IBJ Leasing, Co., Ltd.) Japan.

As of December 31, 2022 and 2021, the Company had a total of 664 and 614 employees, respectively (unaudited).

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

**b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit,
Sekretaris Perusahaan dan Karyawan**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen

2022

Takeshi Sasaki
Roosniati Salihin
Mohammad Syahrial

2021

Takeshi Sasaki
Gunawan Santoso
Mohammad Syahrial

Direksi

Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

Konosuke Mizuta
Andi Harjono
Ade Rafida Saulina S.
Shunsuke Kojima
Yudi Gustiawan

Konosuke Mizuta
Andi Harjono
Ade Rafida Saulina S.
Shunsuke Kojima
Yudi Gustiawan

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Direktur Utama mencakup memastikan proses manajemen risiko, kepatuhan, audit internal, penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, legal korporasi, sekretaris perusahaan dan hubungan investor.

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Direktur mencakup pengembangan bisnis dan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis, menjalankan fungsi pemasaran, pemberian pembiayaan, manajemen aset, penagihan, analisa kredit, pencarian sumber dana, proses dan pelaporan keuangan dan akuntansi, teknologi informasi, sumber daya manusia, remunerasi, pengadaan barang dan jasa dan legal litigasi, memastikan semua fungsi dan tanggung jawab kepada pemangku kepentingan, membuat pelaporan kepada otoritas terkait secara lengkap dan tepat waktu dan menjalankan program tanggung-jawab sosial dan literasi keuangan.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 003/BOC-VMF/LEGAL/III/21 tertanggal 31 Maret 2021, susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua
Anggota
Anggota

2022

Mohammad Syahrial
Bondan Anugrah
Gregory O.K Ongko

2021

Mohammad Syahrial
Bondan Anugrah
Gregory O.K Ongko

Corporate Secretary dan Kepala Audit Internal Perusahaan masing-masing dijabat oleh Fransisca Y Gunawan dan Guntur Sunaryo Putro.

**b. Boards of Commissioners, Directors,
Audit Committee, Corporate Secretary
and Employees**

The composition of the Company's Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2022 and 2021, was as follows:

Audit Committee

President Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner

Boards of Directors

President Director
Director
Director
Director
Director

The scope of duties and responsibilities of the President Director include ensuring the process of risk management, compliance, internal audit, anti-money laundering, prevention of terrorism financing, corporate legal, corporate secretary and investor relations.

The scope of duties and responsibilities of the Director covers business development and achievement of targets set in the business plan, carrying out marketing functions, financing provision, asset management, billing, credit analysis, finding sources of funds, financial and accounting processes and reporting, information technology, sources human resources, remuneration, procurement of goods and services, legal and corporate litigation, ensuring all functions and responsibilities to stakeholders, making full and timely reporting to relevant authorities and carrying out social responsibility programs and financial literacy.

Based on the Decision of the Board of Commissioners No. 003/BOC-VMF/LEGAL/III/21 dated March 31, 2021, the composition of the Company's Audit Committee is as follows:

Audit Committee

Chairman
Member
Member

The Corporate Secretary and Head of Internal Audit of the Company is held by Fransisca Y Gunawan and Guntur Sunaryo Putro, respectively.

c. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Penawaran Umum Saham Perdana

Pada tanggal 13 Juni 2008, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) berdasarkan surat BAPEPAM-LK No. S-3825/BL/2008 untuk melakukan penawaran umum atas 460.000.000 saham Perusahaan kepada masyarakat dengan nilai nominal per saham sebesar Rp 100 (dalam Rupiah penuh) dan harga penawaran per saham sebesar Rp 100 (dalam Rupiah penuh). Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 25 Juni 2008. Penawaran umum saham perdana ini disertai dengan penerbitan 46.000.000 Waran Seri I.

Penawaran Umum Saham Terbatas I

Pada tanggal 27 April 2017, Perusahaan telah memperoleh surat pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal No. S-204/D.04/2017 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD") sebanyak 1.583.160.556 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) setiap lembar saham yang ditawarkan dengan harga Rp 112 (dalam Rupiah penuh) setiap lembar sahamnya atau sebesar Rp 177.313.982 ribu dan biaya emisi saham sebesar Rp 6.180.220 ribu.

Penawaran Umum Saham Terbatas II

Pada tanggal 28 Desember 2018, Perusahaan telah memperoleh surat pernyataan efektif dari Dewan Komisiner OJK Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal No. S-193/D.04/2018 untuk melakukan PUT II dalam rangka penerbitan HMETD sebanyak 3.102.193.089 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) setiap lembar saham yang ditawarkan dengan harga Rp 140 (dalam Rupiah penuh) setiap lembar sahamnya atau sebesar Rp 434.307.033 ribu dengan biaya emisi saham sebesar Rp 3.945.083 ribu.

c. Public Offering of the Company's shares

Initial Public Offering of Shares

On June 13, 2008, the Company received the effective statement from the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK") based on the BAPEPAM-LK's letter No. S-3825/BL/2008 to carry out an Initial Public Offering of 460,000,000 shares with par value and offering price of Rp 100 (in full Rupiah) per share. On June 25, 2008, the Company's shares were listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI). Along with the Initial Public Offering, the Company also issued 46,000,000 Series I Warrants.

Limited Public Offering of Shares I

On April 27, 2017, the Company obtained the notice of effectivity from the Chief Executive Officer Capital Market Chairman of Financial Service Authority (OJK) through its Letter No. S-204/D.04/2017 for the Company's Limited Public Offering of Shares I ("HMETD") of 1,583,160,556 common shares with par value of Rp 100 (in full Rupiah) per share with an offering price of Rp 112 (in full Rupiah) per shares or equivalent to Rp 177,313,982 thousand and issuance cost of Rp 6,180,220 thousand.

Limited Public Offering of Shares II

On December 28, 2018, the Company obtained the notice of effectivity from the Chief Executive Officer Capital Market Chairman of OJK through its Letter No. S-193/D.04/2018 for the Company's PUT II through HMETD of 3,102,193,089 common shares with par value of Rp 100 (in full Rupiah) per share with an offering price of Rp 140 (in full Rupiah) per share or equivalent to Rp 434,307,033 thousand with issuance cost of Rp 3,945,083 thousand.

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jumlah saham Perusahaan yang tercatat di BEI sebanyak 5.687.353.997 lembar.

As of December 31, 2022 and 2021, the Company's outstanding shares listed on the BEI were 5,687,353,997 shares.

Ikhtisar penerbitan dan pencatatan saham Perusahaan di BEI adalah sebagai berikut:

Summary of the issuance and listing of the Company's shares in BEI are as follows:

<u>Keterangan</u>	<u>Tahun/ Year</u>	<u>Jumlah Saham Ditempatkan dan Beredar/ Number of Shares Issued and Outstanding</u>	<u>Akumulasi Jumlah Saham Tercatat/ Accumulated Number of Listed Shares</u>	<u>Nilai Nominal/ Par Value</u>	<u>Descriptions</u>
Sebelum Penawaran Umum Perdana	-	542.000.000	542.000.000	100	Before Initial Public Offering
Penawaran Umum Perdana	2008	460.000.000	1.002.000.000	100	Initial Public Offering
Konversi Waran	2009	20	1.002.000.020	100	Conversion of Warrant
Konversi Waran	2010	332	1.002.000.352	100	Conversion of Warrant
Penawaran Umum Terbatas I	2017	1.583.160.556	2.585.160.908	100	Limited Public Offering I
Penawaran Umum Terbatas II	2018	3.102.193.089	5.687.353.997	100	Limited Public Offering II

d. Transaksi Akuisisi dan Penggabungan Usaha

d. Acquisiton and Merger Transaction

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan memiliki 20% saham pada PT IBJ Verena Finance (IBJV), entitas asosiasi, yang seperti halnya Perusahaan juga menjalankan usaha sebagai perusahaan pembiayaan.

As of December 31, 2018, the Company owned 20% shares in PT IBJ Verena Finance (IBJV), an associate, which like the Company also engaged business activities as financing company.

Berdasarkan Akta No. 24 tanggal 25 Januari 2019 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., seluruh saham IBJV sebanyak 141.000 saham yang dimiliki oleh Mizuho Leasing, Co., Ltd., (dahulu IBJ Leasing, Co., Ltd.) entitas induk Perusahaan (Catatan 23), telah dialihkan kepada Perusahaan. Sehubungan dengan pengalihan ini, maka kepemilikan Perusahaan atas saham IBJV meningkat dari semula sebesar 20% menjadi 100% dan dengan demikian Perusahaan memperoleh pengendalian penuh atas IBJV dan bagi Perusahaan IBJV merupakan entitas anak. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0085595 tanggal 12 Februari 2019.

Based on Notarial Deed No. 24 dated January 25, 2019 of Fathiah Helmi, S.H., all of 141,000 IBJV's shares which owned by Mizuho Leasing, Co., Ltd., (formerly IBJ Leasing Co., Ltd.) parent entity of the Company (Note 23), have been transferred to the Company. Pertinent to this transfer, the Company's share ownership in IBJV then increased from previously 20% to become 100% and therefore the Company obtained full control over IBJV and for the Company, IBJV then considered as a subsidiary. This Deed has been received and registered in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0085595 dated February 12, 2019.

Transaksi pengalihan saham di atas termasuk dalam lingkup kombinasi bisnis entitas sepengendali sebagaimana diatur di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 38 tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", mengingat bahwa baik sebelum ataupun setelah terjadinya transaksi, seluruh entitas yang bergabung pada akhirnya tetap dikendalikan oleh pihak yang sama, yaitu Mizuho Leasing Co., Ltd. (dahulu IBJ Leasing, Co., Ltd.) (Catatan 1a), dan pengendalian tersebut tidak bersifat sementara. Efektif 25 Januari 2019, Mizuho Leasing Co., Ltd., (dahulu IBJ Leasing, Co., Ltd.) adalah entitas yang mengendalikan Perusahaan, menggantikan PT Bank Pan Indonesia Tbk. Sesuai dengan PSAK No. 38, penggabungan tersebut dilakukan sejak awal periode di mana entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian, yang dalam hal ini sejak awal bulan Januari 2019.

Imbalan yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada Mizuho Leasing Co., Ltd., (dahulu IBJ Leasing, Co., Ltd.) atas 80% saham IBJV yang diambil alih tersebut, adalah sebesar Rp 214.307.032 ribu dan arus kas neto yang dibayarkan, setelah dikurangi kas IBJV yang diperoleh, adalah sebesar Rp 117.134.966 ribu. Adapun selisih yang timbul dari jumlah tercatat perolehan Perusahaan terhadap seluruh saham IBJV dengan porsi kepemilikan Perusahaan atas aset neto IBJV pada tanggal pengalihan tersebut adalah sebesar Rp 32.990.607 ribu yang seluruhnya dicatat pada ekuitas sebagai bagian dari akun "Tambahkan Modal Disetor" (Catatan 23).

Selanjutnya berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan No. 23 tanggal 17 Juli 2019 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan Akta Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkular IBJV No. 24 pada tanggal dan dari Notaris yang sama, seluruh pemegang saham, baik dari Perusahaan ataupun IBJV, telah menyetujui rencana penggabungan usaha antara Perusahaan dengan IBJV, entitas anak. Rancangan dan konsep penggabungan tersebut telah dinyatakan dalam Akta Penggabungan Usaha No. 25 pada tanggal dan dari Notaris yang sama. Dalam akta tersebut disepakati bahwa IBJV merupakan pihak yang menggabungkan diri, dan sebagai akibatnya keberadaan IBJV akan berakhir secara hukum tanpa melalui proses likuidasi, dan Perusahaan, sebagai entitas yang dipertahankan, akan menerima penggabungan tersebut terhitung sejak tanggal efektifnya penggabungan usaha. Pada tanggal efektif

Such transfer of shares are within the scope of business combination for entities under common control as prescribed in the Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) No. 38 on "Business Combination of Entities Under Common Control", considering prior or post transaction occurred, all of combined entities ultimately still under the common control of the same party, which is Mizuho Leasing, Co., Ltd. (formerly IBJ Leasing Co., Ltd) (Note 1a), and such control is not temporarily. Effective January 25, 2019, Mizuho Leasing Co., Ltd., (formerly IBJ Leasing Co., Ltd) is an entity which control over the Company, replacing PT Bank Pan Indonesia Tbk. In accordance with PSAK No. 38, such combination shall carried out since the beginning of period where combined entities are under common control, which since the beginning of January 2019.

Consideration paid by the Company to Mizuho Leasing, Co., Ltd., (formerly IBJ Leasing Co., Ltd) for 80% of IBJV acquired shares amounted to Rp 214,307,032 thousand and net cash flow paid, net of IBJV's acquired cash, amounted to Rp 117,143,966 thousand. The difference arise from the total carrying amount of the Company's acquisition cost for the all IBJV shares with the Company's ownership portion over the net assets of IBJV on such transfer date amounted to Rp 32,990,607 thousand which entirely accounted for in equity as part of "Additional Paid-in Capital" account (Note 23).

Moreover, based on Notarial Resolution Deed of Extraordinary Shareholders Meeting (RUPSLB) of the Company No. 23 dated July 17, 2019 of Fathiah Helmi, S.H., and Notarial Circular Resolution Deed of Shareholders of IBJV No. 24 on the same date and from the same Notary, all of the shareholders, both of the Company or IBJV, have approved the merger plan between the Company and IBJV, a subsidiary. The merger draft and concept have been notarized in the Merger Deed No. 25 on the same date and from the same Notary. In such deed, both parties have agreed that IBJV shall become the party who merged, and as a result, IBJV shall no longer legally exist without through liquidation process, and the Company, as a surviving entity, shall accept such merger on the effective merger date. On the effective merger date, legally, all of the IBJV's assets and liabilities as well as the all agreements and contracts between IBJV and third parties

penggabungan usaha, secara hukum, seluruh aset dan liabilitas IBJV serta seluruh perjanjian dan kontrak antara IBJV dengan pihak ketiga akan beralih kepada Perusahaan. Oleh karena penggabungan usaha ini merupakan penggabungan secara vertikal, yang terjadi di antara Perusahaan sebagai entitas induk dan IBJV sebagai entitas anak (100%), maka tidak menimbulkan konversi saham ataupun mengakibatkan perubahan struktur permodalan pada Perusahaan. Setelah penggabungan usaha, seluruh kegiatan usaha pembiayaan yang dijalankan oleh IBJV tetap dilanjutkan oleh Perusahaan.

Sebelum penggabungan, Perusahaan memiliki keunggulan dalam pembiayaan retail dan IBJV dalam pembiayaan korporasi. Melalui penggabungan usaha ini diharapkan dapat, antara lain, menyatukan keunggulan dan aset yang dimiliki oleh masing-masing pihak, memperluas jaringan pembiayaan, mengintegrasikan bisnis dan teknologi, meningkatkan daya saing, menghasilkan struktur permodalan yang lebih kuat dan kemampuan finansial yang lebih baik.

Perusahaan telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehubungan dengan penggabungan usaha tersebut berdasarkan Surat yang diterbitkan oleh Dewan Komisiner OJK Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal No. S-110/D.04/2019 tanggal 10 Juli 2019. Akta Penggabungan Usaha di atas juga telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.10-0008953 tanggal 23 Juli 2019. Di samping itu, sesuai dengan Keputusan yang diterbitkan oleh Dewan Komisiner OJK Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya No. 113/KD.05/2019 tanggal 20 November 2019, izin usaha IBJV sebagai perusahaan pembiayaan telah dicabut terhitung sejak tanggal 23 Juli 2019.

Pada tanggal 5 Agustus 2019, Perusahaan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk mengumumkan hasil penggabungan usaha di atas melalui surat kabar.

shall be transferred to the Company. Since such merger is a vertical merger, occurred between the Company as parent entity and IBJV as a subsidiary (100% owned), therefore neither rise a share conversion nor affect to the Company's capital structure. Post-merger, all of the financing business activities carried out by IBJV still continue by the Company.

Before merger, the Company has an advantage in retail financing while IBJV in corporate financing. Through such merger, among others, expected that shall be a combination of advantageous and assets owned by respective parties, extend finance networking, integrating business and technology, enhance the competitiveness, strengthen the capital structure and improvement in the financial capability.

The Company has obtained effective statement from Financial Services Authority (OJK) regarding with such merger based on Letter issued by OJK Commissioner Board – Chief Executive of Capital Market Supervisor No. S-110/D.04/2019 dated July 10, 2019. The Merger Deed have also been received and registered in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-0008953 dated July 23, 2019. In addition, pursuant to Decision issued by OJK Commissioner Board – Chief Executive of Insurance, Pension Fund, Financial Institution, and Other Financial Institution Supervisor No. 113/KD.05/2019 dated November 20, 2019, IBJV's business license as financing company has been cancelled effective July 23, 2019.

On August 5, 2019, the Company has complied with the statutory law provision to announce its merger result through a newspaper.

<p>2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)</p> <p>a. Perubahan kebijakan akuntansi</p> <p>Pengatribusian imbalan pada periode jasa</p> <p>Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) menerbitkan siaran pers dan mengklarifikasi pengatribusian imbalan pada periode jasa untuk program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaan (UU Ketenagakerjaan).</p> <p>Perusahaan telah menerapkan panduan dalam siaran pers dan menerapkan perubahan yang diperlukan atas kebijakan akuntansi. Perusahaan menentukan bahwa dampak atas perubahan tersebut tidak material terhadap laporan keuangan periode berjalan dan periode sebelumnya.</p> <p>b. Amendemen/ Penyesuaian Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan</p> <p>Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan sejumlah amendemen/ penyesuaian PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Penerapan atas PSAK baru/revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan.</p> <p>c. Standar dan Amendemen/Penyesuaian Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan</p> <p>Pada tanggal persetujuan laporan keuangan perusahaan, standar, interpretasi dan amandemen-amandemen atas PSAK yang relevan bagi Perusahaan, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:</p> <p>Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang • PSAK 16 (amendemen) Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan 	<p>2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATIONS OF PSAK (“ISAK”)</p> <p>a. Change in accounting policy</p> <p>Attribution of benefits to periods of services</p> <p>In April 2022, the Indonesian Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI) has issued a press release and clarified the attribution of benefits to the periods of service for the pension program under the Manpower Act or the Job Creation Law and its implementing regulations (Manpower Act).</p> <p>The Company has implemented the guidance in the press release and applied the necessary changes to its accounting policies. The Company has determined that the impact is not material to its current and prior period financial statements.</p> <p>b. Amendments/ Improvements to Standards Effective in the Current Year</p> <p>In the current year, the Company has applied a number of amendments/improvements to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2022. The adoption of these new/revised PSAKs does not result in changes to the Company’s accounting policies and has no material effect on the amounts reported in these financial statements.</p> <p>c. Standard and Amendments/ Improvements to Standards Issued not yet Adopted</p> <p>At the date of authorization of these company financial statements, the following standard, interpretation and amendments to PSAK relevant to the Company were issued but not effective, with early application permitted:</p> <p>Effective for periods beginning on or after January 1, 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • PSAK 1 (amendment) Presentation of financial statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current • PSAK 16 (amendment) Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use
--	---

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

- PSAK 25 (amendemen) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi
- PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
- PSAK 46 (amendemen) Pajak Penghasilan: Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024

- PSAK 73 (amendemen) Sewa: Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik
- PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Penyajian Laporan Keuangan terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK"), yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sejak tanggal 1 Januari 2013) No.VIII.G.7 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.KEP-347/BL/2012 tanggal 25 September 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

- PSAK 25 (amendment) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Accounting Estimates

- Amendments to PSAK 1 (amendment) Presentation of Financial Statements: Disclosure of Accounting Policies

- PSAK 46 (amendment) Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction

Effective for periods beginning on or after January 1, 2024

- PSAK 73 (amendment) Leases: Lease Liability in a Sale and Leaseback
- PSAK 1 (amendment) Presentation of financial statements: Non-current Liabilities with Covenants

As of the issuance date of the financial statements, the effects of adopting these standards, amendments and interpretations on the financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

These financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which comprise of the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI).

The financial statements have also been prepared and presented in accordance with Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK"), whose function has been transferred to the Financial Services Authority ("OJK") starting January 1, 2013), rule No.VIII.G.7, Appendix of the Decree of the Chairman of the BAPEPAM-LK No.KEP-347/BL/2012 dated September 25, 2012 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure of the Issuer or Public Company".

b. Dasar Penyusunan

Dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran, terlepas dari apakah harga tersebut dapat diamati secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengestimasi nilai wajar dari suatu aset atau liabilitas, Perusahaan memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Nilai wajar untuk tujuan pengukuran dan/atau pengungkapan pada laporan keuangan ditentukan atas dasar tersebut kecuali untuk transaksi sewa yang merupakan ruang lingkup PSAK 73, dan pengukuran yang memiliki kemiripan dengan nilai wajar namun bukan merupakan nilai wajar, seperti nilai pakai dalam PSAK 48.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Direksi memiliki, pada saat persetujuan laporan keuangan, suatu ekspektasi yang memadai bahwa Perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan keberadaan operasinya untuk di masa yang akan datang. Sehingga, mereka melanjutkan penerapan dasar akuntansi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan.

b. Basis of Preparation

The measurement basis used in the financial statements is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases as described in the related accounting policies.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Company takes into account the characteristics of the asset or liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date. Fair value for measurement and/or disclosure purposes in these financial statements is determined on such a basis, except for leasing transactions that are within the scope of PSAK 73, and measurements that have some similarities to fair value but are not fair value, such as net realizable value in PSAK 48.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The directors have, at the time of approving the financial statements, a reasonable expectation that the Company has adequate resources to continue in operational existence for the foreseeable future. Thus, they continue to adopt the going concern basis of accounting in preparing the financial statements.

c. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam mata uang fungsional (Rupiah) dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disajikan ke dalam mata uang fungsional berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

Nilai tukar kurs mata uang asing ke dalam Rupiah yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
1 Dolar Amerika Serikat	15.731	14.269	<i>United States Dollar 1</i>
100 Yen	11.757	12.389	<i>Yen 100</i>

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - 1) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - 2) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - 3) merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - 1) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - 2) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

c. Transactions and Foreign Currency Translation of Financial Statements

Transactions in foreign currencies are translated into functional currency (Rupiah) using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. In the statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are presented in the functional currency using Bank Indonesia middle rate prevailing at that date. Any resulting gains or losses from foreign exchanges are credited or charged to current operations.

The foreign exchange rates into Rupiah as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

d. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company (reporting entity):

- a) A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - 1) has control or joint control over the reporting entity;
 - 2) has significant influence over the reporting entity; or
 - 3) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - 1) the entity and the reporting entity are members of the same gr (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - 2) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).

- | | |
|--|---|
| 3) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama. | 3) both entities are joint ventures of the same third party. |
| 4) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga. | 4) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity. |
| 5) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. | 5) the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. |
| 6) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a). | 6) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a). |
| 7) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas). | 7) a person identified in (a) (1) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity). |
| 8) entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor. | 8) the entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity. |

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements.

e. Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pada laporan posisi keuangan pada saat Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan dan liabilitas keuangan ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, jika diperlukan, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi diakui langsung pada laba rugi.

Semua pembelian atau penjualan reguler aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya berdasarkan tanggal perdagangan. Pembelian atau penjualan reguler adalah pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau konvensi di pasar.

e. Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are recognized on the statement of financial position when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities are added to or deducted from the fair value of the financial assets and financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

All regular way purchases or sales of financial assets are recognized and derecognized on a trade date basis. Regular way purchases or sales are purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within the time frame established by regulation or convention in the marketplace.

Semua aset keuangan yang diakui selanjutnya diukur secara keseluruhan pada biaya perolehan yang diamortisasi atau nilai wajar, tergantung pada klasifikasi aset keuangan tersebut.

Klasifikasi aset keuangan

Instrumen utang yang memenuhi persyaratan berikut selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Instrumen utang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI"), jika memenuhi kedua kondisi berikut ini:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Seluruh aset keuangan lain selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Meskipun telah disebutkan sebelumnya, Perusahaan dapat menetapkan pilihan tak terbatal pada saat pengakuan awal aset keuangan sebagai berikut:

- menyajikan perubahan selanjutnya nilai wajar investasi pada instrumen ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain jika kriteria tertentu dipenuhi; dan
- menetapkan aset keuangan yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI sebagai diukur pada FVTPL, jika penetapan itu mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch).

All recognized financial assets are measured subsequently in their entirety at either amortized cost or fair value, depending on the classification of the financial assets.

Classification of financial assets

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at amortized cost:

- The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI"):

- the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial assets; and
- the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

By default, all other financial assets are subsequently measured at fair value through profit or loss ("FVTPL").

Despite the foregoing, the Company may make the following irrevocable election/designation at initial recognition of a financial asset:

- irrevocably elect to present subsequent changes in fair value of an equity investment in other comprehensive income if certain criteria are met; and
- irrevocably designate a debt investment that meets the amortized cost or FVTOCI criteria as measured at FVTPL if doing so eliminates or significantly reduces an accounting mismatch.

Biaya perolehan diamortisasi dan metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah nilai aset keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya. Di sisi lain, jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan, sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

Pendapatan bunga diakui dalam laba rugi dan dimasukkan dalam pos "Penghasilan bunga".

Aset keuangan pada FVTPL

Aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI (di atas) diukur pada FVTPL, khususnya:

- investasi dalam instrumen ekuitas diklasifikasi sebagai FVTPL, kecuali Perusahaan menetapkan investasi ekuitas yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan dan bukan merupakan imbalan kontingen dari kombinasi bisnis, sebagai FVTOCI pada pengakuan awal.
- instrumen utang yang tidak memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI diklasifikasi sebagai FVTPL. Sebagai tambahan, instrumen utang yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi dan FVTOCI dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan (yang disebut "inkonsistensi akuntansi") pengukuran dan pengakuan yang timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian dengan basis berbeda. Perusahaan tidak menetapkan instrumen utang sebagai FVTPL.

Amortized cost and effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period.

The amortized cost of a financial asset is the amount at which the financial asset is measured at initial recognition minus the principal repayments, plus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for any loss allowance. On the other hand, the gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any loss allowance.

Interest income is recognized in profit or loss and is included in the "Interest income" line item.

Financial assets at FVTPL

Financial assets that do not meet the criteria for being measured at amortized cost or FVTOCI (above) are measured at FVTPL, specifically:

- investments in equity instruments are classified as at FVTPL, unless the Company designates an equity investment that is neither held for trading nor a contingent consideration arising from a business combination as at FVTOCI on initial recognition.
- debt instruments that do not meet the amortized cost criteria or the FVTOCI criteria are classified as at FVTPL. In addition, debt instruments that meet either the amortized cost criteria or the FVTOCI criteria may be designated as at FVTPL upon initial recognition if such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (so called 'accounting mismatch') that would arise from measuring assets or liabilities or recognizing the gains and losses on them on different bases. The Company has not designated any debt instruments as at FVTPL.

Aset keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi sepanjang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditetapkan (lihat kebijakan akuntansi terkait lindung nilai). Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi termasuk dividen atau bunga yang diperoleh atas aset keuangan dan dimasukkan dalam pos "Keuntungan dan kerugian lain-lain". Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 35.

Keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing

Jumlah tercatat aset keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang tersebut dan dijabarkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada setiap tanggal pelaporan.

Penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") atas piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen dan piutang lainnya. Nilai kerugian kredit ekspektasian diperbarui pada tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal masing-masing instrumen keuangan.

Perusahaan mengakui ECL 12 bulan dan/atau sepanjang umurnya untuk sewa pembiayaan, pembiayaan konsumen, dan piutang lainnya. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan diestimasi menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan, disesuaikan untuk faktor spesifik debitur, kondisi ekonomi umum serta penilaian atas arah kondisi kini dan perkiraan masa depan pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu atas uang jika tepat.

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur merupakan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur instrumen keuangan. Sebaliknya, ECL 12 bulan mewakili porsi ECL sepanjang umur yang timbul dari peristiwa gagal bayar pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Financial assets at FVTPL are measured at fair value at the end of each reporting period, with any fair value gains or losses recognized in profit or loss to the extent they are not part of a designated hedging relationship (see hedge accounting policy). The net gain or loss recognized in profit or loss includes any dividend or interest earned on the financial asset and is included in the "Other gains and losses" line item (Note 48). Fair value is determined in the manner described in Note 35.

Foreign exchange gains and losses

The carrying amount of financial assets that are denominated in a foreign currency is determined in that foreign currency and translated at the Bank Indonesia middle rate at the end of each reporting period.

Impairment of financial assets

The Company recognizes a loss allowance for expected credit losses ("ECL") on finance lease receivables, consumer finance receivables, and other receivables. The amount of expected credit losses is updated at each reporting date to reflect changes in credit risk since initial recognition of the respective financial instrument.

The Company recognizes 12 months and/or lifetime ECL for finance lease receivables, consumer finance receivables, and other receivables. The expected credit losses on these financial assets are estimated using a provision matrix based on the Company's historical credit loss experience, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions and an assessment of both the current as well as the forecast direction of conditions at the reporting date, including time value of money where appropriate.

Lifetime ECL represents the expected credit losses that will result from all possible default events over the expected life of a financial instrument. In contrast, 12-month ECL represents the portion of lifetime ECL that is expected to result from default events on a financial instrument that are possible within 12 months after the reporting date.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan baik informasi kuantitatif maupun kualitatif yang wajar dan mendukung, termasuk pengalaman historis dan informasi bersifat perkiraan masa depan, yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan. Informasi masa depan yang dipertimbangkan mencakup prospek masa depan industri di mana debitur Perusahaan beroperasi, yang diperoleh dari laporan ahli ekonomi, analisis keuangan, badan pemerintah, lembaga terkait, dan organisasi serupa lainnya, serta pertimbangan berbagai sumber eksternal aktual dan prakiraan informasi ekonomi yang terkait dengan operasi inti Perusahaan.

Secara khusus, informasi berikut diperhitungkan ketika menilai apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal:

- memburuknya kondisi usaha, keuangan atau ekonomi yang terjadi saat ini atau prakiraan yang akan menyebabkan penurunan signifikan atas kemampuan peminjam untuk menyelesaikan kewajiban utangnya;
- terdapat penurunan yang signifikan terhadap hasil operasi debitur, baik secara aktual atau yang diperkirakan akan terjadi; dan
- aset keuangan yang telah mengajukan program restrukturisasi.

Terlepas dari hasil penilaian di atas, Perusahaan membuat praduga risiko kredit aset keuangan telah meningkat signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari, kecuali jika Perusahaan memiliki informasi yang wajar dan didukung yang menunjukkan hal sebaliknya.

Significant increase in credit risk

In assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Company compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition. In making this assessment, the Company considers both quantitative and qualitative information that is reasonable and supportable, including historical experience and forward-looking information that is available without undue cost or effort. Forward-looking information considered includes the future prospects of the industries in which the Company's debtors operate, obtained from economic expert reports, financial analysts, governmental bodies, relevant think-tanks and other similar organizations, as well as consideration of various external sources of actual and forecast economic information that relate to the Company's core operations.

In particular, the following information is taken into account when assessing whether credit risk has increased significantly since initial recognition:

- existing or forecast adverse changes in business, financial or economic conditions that are expected to cause a significant decrease in the debtor's ability to meet its debt obligations;
- an actual or expected significant deterioration in the operating results of the debtor; and
- financial assets that has been proposed restructured program.

Irrespective of the outcome of the above assessment, the Company presumes that the credit risk on a financial asset has increased significantly since initial recognition when contractual payments are more than 30 days past due, unless the Company has reasonable and supportable information that demonstrates otherwise.

Meskipun demikian, Perusahaan mengasumsikan bahwa risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika instrumen keuangan tersebut ditetapkan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Instrumen keuangan bertekad memiliki risiko kredit rendah jika:

1. instrumen keuangan memiliki risiko gagal bayar yang rendah;
2. debitur memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam waktu dekat; dan
3. memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka panjang dapat, tetapi tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya.

Perusahaan menganggap aset keuangan memiliki risiko kredit rendah ketika aset memiliki peringkat kredit eksternal '*investment grade*' sesuai dengan definisi yang dipahami secara global atau jika peringkat eksternal tidak tersedia, aset tersebut memiliki peringkat internal '*performing*'. *Performing* berarti bahwa rekanan memiliki posisi keuangan yang kuat dan tidak ada jumlah yang tertunggak.

Perusahaan secara teratur memantau efektivitas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan dan merevisinya jika perlu untuk memastikan bahwa kriteria tersebut mampu mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sebelum jumlahnya jatuh tempo.

Definisi gagal bayar

Perusahaan menganggap bahwa gagal bayar telah terjadi ketika aset keuangan tertunggak lebih dari 90 hari kecuali jika Perusahaan memiliki informasi yang wajar dan terdukung untuk menunjukkan bahwa kriteria yang lebih panjang lebih tepat.

Aset keuangan memburuk

Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak buruk pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut telah terjadi. Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai termasuk data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau peminjam;

Despite the foregoing, the Company assumes that the credit risk on a financial instrument has not increased significantly since initial recognition if the financial instrument is determined to have low credit risk at the reporting date. A financial instrument is determined to have low credit risk if:

1. the financial instrument has a low risk of default;
2. the debtor has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term; and
3. adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations.

The Company considers a financial asset to have low credit risk when the asset has external credit rating of 'investment grade' in accordance with the globally understood definition or if an external rating is not available, the asset has an internal rating of 'performing'. *Performing* means that the counterparty has a strong financial position and there is no past due amounts.

The Company regularly monitors the effectiveness of the criteria used to identify whether there has been a significant increase in credit risk and revises them as appropriate to ensure that the criteria are capable of identifying significant increase in credit risk before the amount becomes past due.

Definition of default

The Company considers that default has occurred when a financial asset is more than 90 days past due unless the Company has reasonable and supportable information to demonstrate that a more lagging default criterion is more appropriate.

Credit-impaired financial assets

A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of that financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes observable data about the following events:

- significant financial difficulty of the issuer or the borrower;

- pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau tunggakan;
 - pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
 - terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
 - hilangnya pasar aktif untuk aset keuangan itu akibat kesulitan keuangan; atau
 - pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.
- a breach of contract, such as a default or past due event;
 - the lender(s) of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower's financial difficulty, having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise consider;
 - it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
 - the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
 - the purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.

Kebijakan penghapusan

Perusahaan menghapuskan aset keuangan ketika ada informasi yang menunjukkan bahwa pihak lawan berada dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis, contoh ketika pihak lawan dalam proses likuidasi atau telah memasuki proses kebangkrutan, atau ketika jumlahnya sudah lebih 180 hari tertunggak, mana yang terjadi lebih dulu. Aset keuangan yang dihapuskan dapat menjadi subjek aktivitas paksaan dalam prosedur pemulihan Perusahaan, dengan mempertimbangkan nasihat hukum yang sesuai. Setiap pemulihan yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Pengukuran dan pengakuan atas kerugian kredit ekspektasian

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian merupakan fungsi dari *probability of default*, *loss given default* (yaitu besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar) dan eksposur pada gagal bayar. Penilaian *probability of default* dan *loss given default* berdasarkan data historis yang disesuaikan dengan informasi masa depan seperti dijelaskan di atas. Adapun eksposur atas gagal bayar, untuk aset keuangan, diwakili oleh nilai tercatat bruto aset pada tanggal pelaporan.

Write-off policy

The Company writes off a financial asset when there is information indicating that the counterparty is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery, e.g. when the counterparty has been placed under liquidation or has entered into bankruptcy proceedings, when the amounts are over 180 days past due, whichever occurs sooner. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Company's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

Measurement and recognition of expected credit losses

The measurement of expected credit losses is a function of the probability of default, loss given default (i.e. the magnitude of the loss if there is a default) and the exposure at default. The assessment of the probability of default and loss given default is based on historical data adjusted by forward-looking information as described above. As for the exposure at default, for financial assets, this is represented by the assets' gross carrying amount at the reporting date.

Untuk aset keuangan, kerugian kredit ekspektasian diestimasi sebagai selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada Perusahaan sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diekspektasi akan diterima oleh Perusahaan, didiskontokan pada suku bunga efektif awal. Untuk piutang sewa, arus kas yang digunakan untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian konsisten dengan arus kas yang digunakan dalam mengukur piutang sewa berdasarkan PSAK 73.

Apabila kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur diukur secara kolektif untuk kasus dimana bukti kenaikan signifikan risiko kredit pada level instrumen individual tidak tersedia, instrumen keuangan dikelompokkan dengan dasar sebagai berikut:

- Status jatuh tempo; dan
- Jenis jaminan untuk piutang sewa pembiayaan, pembiayaan konsumen dan piutang jual dan sewa-balik.

Pengelompokan ditelaah secara teratur oleh manajemen untuk memastikan setiap kelompok mempunyai karakteristik risiko yang sama.

Jika Perusahaan telah mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan sebesar ECL sepanjang umurnya pada periode pelaporan sebelumnya, tetapi menentukan pada tanggal pelaporan kini bahwa kondisi untuk ECL sepanjang umurnya tidak lagi terpenuhi, Perusahaan mengukur cadangan kerugian sejumlah ECL 12 bulan pada tanggal pelaporan kini.

Perusahaan mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai dalam laba rugi untuk semua instrumen keuangan dengan penyesuaian terkait ke jumlah tercatat melalui akun cadangan kerugian.

For financial assets, the expected credit loss is estimated as the difference between all contractual cash flows that are due to the Company in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at the original effective interest rate. For a lease receivable, the cash flows used for determining the expected credit losses is consistent with the cash flows used in measuring the lease receivable in accordance with PSAK 73.

Where lifetime ECL is measured on a collective basis to cater for cases where evidence of significant increases in credit risk at the individual instrument level may not yet be available, the financial instruments are Companyed on the following basis:

- Past-due status; and
- Classification of collaterals for finance lease receivables, consumer financing receivables, and sale and leaseback receivables.

The Companying is regularly reviewed by management to ensure the constituents of each Company continue to share similar credit risk characteristics.

If the Company has measured the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to lifetime ECL in the previous reporting period, but determines at the current reporting date that the conditions for lifetime ECL are no longer met, the Company measures the loss allowance at an amount equal to 12-month ECL at the current reporting date.

The Company recognizes an impairment gain or loss in profit or loss for all financial instruments with a corresponding adjustment to their carrying amount through a loss allowance account,.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Pembelian kembali instrumen ekuitas Perusahaan (saham treasury) diakui dan dikurangkan secara langsung dari ekuitas. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas Perusahaan tersebut tidak diakui dalam laba rugi.

Derecognition of financial assets

The Company derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset measured at amortized cost, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is recognized in profit or loss.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as debt or equity

Debt and equity instruments issued by the Company are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Company are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Repurchase of the Company's own equity instruments (treasury shares) is recognized and deducted directly in equity. No gain or loss is recognized in profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the Company's own equity instruments.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan liabilitas keuangan tersebut, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dimana beban bunga diakui berdasarkan tingkat pengembalian yang efektif, kecuali untuk liabilitas jangka pendek dimana pengakuan bunganya tidak material.

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL

Liabilitas keuangan diklasifikasi FVTPL ketika liabilitas keuangan merupakan 1) imbalan kontinjen yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22 diterapkan, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan sebagai FVTPL.

Liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan jika:

- diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola Perusahaan secara bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Liabilitas keuangan selain liabilitas keuangan yang diperdagangkan dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau

Financial liabilities

The Company financial liabilities was classified as FVTPL or at amortized cost.

Financial liabilities at amortized cost

At initial recognition, financial liabilities measured at amortized cost are recognized at fair value net of transaction costs which are directly attributable to the issuance of such, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, where interest expense is recognized based on the rate of effective return, except for short-term liabilities when the recognition of interest would be immaterial.

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities are classified as at FVTPL when the financial liability is 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination to which PSAK 22 applies, 2) held for trading, or 3) it is designated as at FVTPL.

A financial liability is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of repurchasing in the near term; or
- on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the Company manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.

A financial liability other than a financial liability held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition if:

- such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or

- liabilitas keuangan membentuk bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal.
- merupakan bagian kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 atau PSAK 71 mengizinkan seluruh kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai FVTPL.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

Keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing

Untuk liabilitas keuangan dalam mata uang asing dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan, keuntungan atau kerugian kurs mata uang asing ditentukan berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dari instrumen. Keuntungan atau kerugian kurs mata uang asing diakui dalam laba rugi untuk liabilitas keuangan yang tidak merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

- the financial liability forms part of a group of financial assets or financial liabilities or both which is managed and its performance is evaluated on a fair value basis in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the grouping is provided internally on that basis.
- it forms part of a contract containing one or more embedded derivatives, and PSAK 55 or PSAK 71 permits the entire combined contract (asset or liability) to be designated as at FVTPL.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Foreign exchange gains and losses

For financial liabilities that are denominated in a foreign currency and are measured at amortized cost as at each reporting date, the foreign exchange gains and losses are determined based on the amortized cost of the instruments. These foreign exchange gains and losses are recognized in profit or loss for financial liabilities that are not part of a designated hedging relationship.

Derecognition of financial liabilities

The Company derecognizes financial liabilities when, and only when, the Company's obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

f. Saling apus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika Perusahaan tersebut memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus harus ada pada saat ini dan tidak bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dapat dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

g. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

h. Piutang Pembiayaan Konsumen

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penurunan nilai dan penghentian pengakuan piutang pembiayaan konsumen mengacu pada Catatan 3e.

Pendapatan administrasi yang diperoleh dari konsumen pada saat perjanjian pembiayaan pertama kali ditandatangani, dibukukan sebagai pendapatan pada laba rugi tahun berjalan.

i. Biaya Dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset Tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

f. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position when the Company has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. A right to set-off must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.

g. Cash and Cash Equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

h. Consumer Financing Receivables

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, impairment and derecognition of consumer financing receivables are discussed in Note 3e.

Administration income earned from customers at the time the consumer financing is signed is recorded as income in the current year.

i. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight line method.

j. Premises and Equipment

Premises and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Penyusutan diakui dengan menggunakan metode garis lurus setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>	
Bangunan	20	Building
Prasarana	4 - 8	Leasehold improvement
Kendaraan	4 - 8	Motor vehicles
Perabot dan peralatan kantor	4 - 8	Fixtures and office equipment
Komputer	4	Computer

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

k. Sewa

Perusahaan sebagai penyewa

Perusahaan menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal inisiasi kontrak. Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perusahaan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Depreciation is recognized so as to write-off the cost of assets less residual values using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Land is stated at cost and is not depreciated.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of premises and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

An item of premises and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of premises and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in profit or loss.

k. Lease

The Company as lessee

The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Company recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Company recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi insentif sewa.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Perusahaan mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna) jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian;
- terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan); atau
- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Company uses the incremental borrowing rate specific to the lessee.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise fixed lease payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives.

The lease liability is presented as a separate line in the statement of financial position.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

The Company remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use assets) whenever:

- the lease term has changed or there is a change in the assessment of the exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate;
- the lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which case a revised discount rate is used); or
- a lease contract is modified and the lease modification is not accounted for as a separate lease, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.

The right-of-use assets comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Jika Perusahaan dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Aset hak-guna disajikan sebagai pos terpisah di laporan posisi keuangan.

Perusahaan menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

Perusahaan sebagai pesewa

Sewa dimana Perusahaan sebagai pesewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

Dalam sewa pembiayaan, jumlah terutang oleh penyewa diakui sebagai piutang sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto Perusahaan. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih pesewa.

Ketika suatu kontrak mencakup komponen sewa dan non-sewa, Perusahaan menerapkan PSAK 72 untuk mengalokasikan imbalan berdasarkan kontrak bagi setiap komponen.

Whenever the Company incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK 57. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying assets. If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Company expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

The right-of-use assets are presented as a separate line in the statement of financial position.

The Company applies PSAK 48 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

The Company as lessor

Leases for which the Company is a lessor are classified as finance leases. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease.

Amounts due from lessees under finance leases are recognized as receivables at the amount of the Company's net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the Company's net investment outstanding in respect of the leases.

When a contract includes lease and non-lease components, the Company applies PSAK 72 to allocate the consideration under the contract to each component.

I. Instrumen keuangan derivatif

Perusahaan melakukan berbagai transaksi instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur atas risiko suku bunga dan risiko perubahan nilai tukar mata uang asing menggunakan kontrak valuta berjangka dan swap suku bunga.

Derivatif awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak dilakukan dan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajarnya pada setiap akhir periode pelaporan. Dampak keuntungan atau kerugian diakui segera di laba rugi kecuali jika derivatif ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai di mana saat pengakuan di laba rugi bergantung pada sifat dari hubungan lindung nilai.

Derivatif dengan nilai wajar positif diakui sebagai aset keuangan sedangkan derivatif dengan nilai wajar negatif diakui sebagai liabilitas keuangan. Derivatif tidak saling hapus dalam laporan keuangan kecuali Perusahaan memiliki hak yang memiliki kekuatan hukum dan intensi untuk saling hapus.

Akuntansi lindung nilai

Perusahaan menerapkan akuntansi lindung nilai arus kas. Pada penetapan awal lindung nilai, Perusahaan secara formal mendokumentasikan hubungan antara instrumen lindung nilai dengan item yang dilindung nilai, termasuk tujuan manajemen risiko dan strategi dalam melakukan transaksi lindung nilai, bersamaan dengan metode yang akan digunakan untuk menilai efektifitas dari hubungan lindung nilai tersebut. Perusahaan melakukan penilaian, baik pada awal hubungan lindung nilai maupun secara berkelanjutan, untuk menentukan apakah instrumen lindung nilai tersebut dapat secara sangat efektif menutupi perubahan arus kas dari item yang dilindung nilai.

Perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai dicatat dalam laba rugi tahun berjalan. Jika instrumen derivatif dirancang dan memenuhi syarat akuntansi lindung nilai, perubahan nilai wajar yang berkaitan dengan lindung nilai diakui sebagai penyesuaian terhadap item yang dilindungi nilainya dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan atau disajikan dalam ekuitas, tergantung pada jenis transaksi dan efektifitas dari lindung nilai tersebut.

I. Derivative financial instruments

Company enter into a variety of derivative financial instruments to manage its exposure to interest rate and foreign exchange rate risks, using foreign exchange forward contracts and interest rate swaps.

Derivatives are initially recognized at fair value at the date the derivative contracts are entered into and are subsequently remeasured to their fair values at the end of each reporting period. The resulting gain or loss is recognized in profit or loss immediately unless the derivative is designated and effective as hedging instrument in which event the timing of the recognition in profit or loss depends on the nature of the hedge relationship.

A derivative with a positive fair value is recognized as a financial asset whereas a derivative with a negative fair value is recognized as a financial liability. Derivatives are not offset in the financial statements unless the Company have both a legally enforceable right and intention to offset.

Hedge accounting

Company applied cash flow hedge accounting. On initial designation of the hedge, the Company formally document the relationship between the hedging instruments and hedged items, including the risk management objective and strategy in undertaking the hedge transaction, together with the method that will be used to assess the effectiveness of the hedging relationship. Company make an assessment, both at the inception of the hedge relationship as well as on an ongoing basis, whether the hedging instruments are expected to be "highly effective" in offsetting the changes in the cash flows of the respective hedged items.

Changes in fair value of derivative instruments that do not qualify for hedge accounting are recognized to the current year profit or loss. If derivative instruments are designated and qualify for hedge accounting, changes in fair value of derivative instruments are recorded as adjustments to the hedged items in the current year other comprehensive income or in the equity, depending on the type of hedge transaction represented and the effectiveness of the hedge.

Pada saat derivatif dirancang sebagai instrumen lindung nilai untuk melindungi perubahan arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu dari aset atau liabilitas yang diakui atau suatu prakiraan transaksi yang dapat mempengaruhi laba rugi, maka bagian efektif dari perubahan nilai wajar dari derivatif diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya. Jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya direklasifikasi ke laporan laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tahun yang sama dimana arus kas yang dilindungi nilai tersebut mempengaruhi laba rugi, dan pada baris item yang sama pada laporan laba rugi. Setiap bagian yang tidak efektif dalam perubahan nilai wajar derivatif diakui langsung pada laporan laba rugi.

Jika derivatif lindung nilai kadaluwarsa atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan, atau pada saat lindung nilai tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai arus kas atau pada saat transaksi lindung nilai dibatalkan maka secara prospektif akuntansi lindung nilai dihentikan. Pada saat lindung nilai atas suatu prakiraan transaksi dihentikan, maka jumlah kumulatif yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya sejak tahun dimana lindung nilai tersebut efektif, direklasifikasi dari penghasilan komprehensif lainnya ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada saat prakiraan transaksi tersebut terjadi dan mempengaruhi laba rugi. Jika prakiraan transaksi tidak lagi diharapkan akan terjadi, maka saldo di penghasilan komprehensif lainnya langsung direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

m. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

When a derivative is designated as the hedging instrument to hedge the variability in cash flows attributable to a particular risk associated with a recognized asset or liability or a highly probable forecast transaction that could affect profit or loss, the effective portion of changes in the fair value of the derivative is recognized in other comprehensive income. The amount recognized in other comprehensive income is reclassified to the profit or loss as a reclassification adjustment in the same year as the hedged cash flows affect profit or loss, and in the same line item in the statement of profit or loss. Any ineffective portion of changes in the fair value of the derivative is recognized immediately in the statement of profit or loss.

If the hedging derivative expires or is sold, terminated, or exercised, or when the hedge no longer meets the criteria for cash flow hedge accounting, or when the hedge designation is cancelled, then hedge accounting is discontinued prospectively. When the hedge of a forecast transaction is discontinued, the cumulative amount recognized in other comprehensive income from the year when the hedge was effective, is reclassified from other comprehensive income to profit or loss as a reclassification adjustment when the forecast transaction occurs and affects profit or loss. If the forecast transaction is no longer expected to occur, then the balance in other comprehensive income is reclassified immediately to profit or loss as a reclassification adjustment.

m. Impairment of Non Financial Asset

At the end of each reporting period, the Company reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi kecuali aset relevan tersebut disajikan pada jumlah revaluasi, di mana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dibalik, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat ketika kerugian penurunan nilai tidak diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang bersangkutan disajikan pada jumlah revaluasi, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan revaluasi (lihat Catatan 3e di atas).

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3e.

n. Jaminan yang Dikuasakan Kembali

Jaminan yang dikuasakan kembali dinyatakan sebesar nilai realisasi bersih pada saat jaminan ditarik. Selisih nilai realisasi bersih jaminan yang dikuasakan kembali diatas nilai piutang yang tidak tertagih akan dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi. Beban yang berhubungan dengan aset yang dikuasakan kembali dan pemeliharaannya akan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Pada saat akhir tahun, jaminan yang dikuasakan kembali akan direviu apabila terdapat penurunan nilai. Pada saat jaminan yang dikuasakan kembali dijual, nilai tercatatnya akan dikeluarkan dan hasil laba atau rugi akan dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss unless the relevant asset is carried at revaluation amount, in which the impairment loss is treated as revaluation decrease.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase (see Note 3e above).

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3e.

n. Foreclosed Collaterals

Foreclosed collaterals are stated at net realizable value at the time of foreclosure. The excess of net realizable value of the foreclosed collateral over the balance of uncollectible receivables is credited or charged to profit or loss. Expense related to the foreclosed assets and its maintenance are charged to profit or loss as incurred. At the end of the year, foreclosed collateral are reviewed for any impairment in value. When the foreclosed collaterals are disposed of, their carrying values are removed from the accounts and any resulting gains or losses are credited or charged to profit or loss.

o. Imbalan Kerja

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas imbalan pasti neto.

Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut: (i) biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian); (ii) beban atau pendapatan bunga neto; (iii) pengukuran kembali.

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

p. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

o. Employee Benefits

The Company provides defined post-employment benefit plan for its employees in accordance with Labor Law No. 13/2003. No funding has been made to this defined benefit plan.

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognised in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognised in other comprehensive income as a separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognised in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability.

Defined benefit costs are categorised as follows: (i) service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements); (ii) net interest expense or income; (iii) remeasurement.

The Company presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

p. Provisions

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Company will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

q. Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal disetor meliputi selisih antara agio saham (yaitu kelebihan setoran pemegang saham di atas nilai nominal) dengan biaya-biaya saham yang terkait langsung dengan penerbitan efek ekuitas Perusahaan dalam penawaran umum (Catatan 1c) serta selisih nilai transaksi restrukturisasi dengan entitas sependengali.

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sependengali adalah sebesar selisih antara harga pengalihan dengan proporsi jumlah tercatat aset neto entitas yang diakuisisi. Selisih ini terkait dengan transaksi kombinasi bisnis entitas sependengali yang merupakan kombinasi bisnis di mana seluruh entitas atau bisnis yang bergabung, pada akhirnya dikendalikan oleh pihak yang sama (baik sebelum maupun sesudah kombinasi bisnis) dan pengendalian tersebut tidak bersifat sementara. Transaksi ini tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dipertukarkan dan oleh karenanya dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan.

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan pembiayaan konsumen, pendapatan sewa pembiayaan, pendapatan bunga dan beban bunga diakui secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif (Catatan 3e).

Pendapatan sewa pembiayaan dialokasikan berdasarkan metode yang dijelaskan pada Catatan 3k.

Beban provisi sehubungan dengan pinjaman yang diterima diamortisasi dengan metode suku bunga efektif dan dibukukan sebagai bagian dari beban bunga dan beban pembiayaan lainnya.

Pendapatan dan beban lainnya

Pendapatan jasa administrasi yang tidak beratribusi secara langsung atas transaksi sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen dibukukan sebagai pendapatan pada laba rugi dan diakui pada saat diterima.

q. Additional Paid-in Capital

Additional paid-in capital includes the difference between the excess of paid-up share capital made by shareholders over its par value and the direct costs incurred in respect of the issuance of the Company's shares in the public offering (Note 1c) and the difference from restructuring transactions with entities under common control.

Difference from restructuring transactions with entities under common control are the difference between transfer price and the proportionate of the carrying amount of acquired entity's net assets. This difference pertinent to transaction of business combination under common control entities which is a business combination where all the entities or business that combines, eventually control by the same party (whether before or after business combination) and in nature, the control is permanent. This transaction do not result substantive change in economical ownership on the exchanged business and accordingly accounted for using pooling of interest method.

r. Revenue and Expenses Recognition

Consumer financing income, finance lease income, interest income and interest expense are recognized under the accrual basis accounting using the effective interest method (Note 3e).

Finance lease income is allocated based on method described in Note 3k.

Loan fees related to the borrowings are amortized using the effective interest method and recorded as part of interest expense and other financial charges.

Income and Other expenses

Administrative income that are not directly attributable to finance lease and consumer financing are recorded as income in profit or loss and recognized when incurred.

Pendapatan denda keterlambatan dan keuntungan penghentian kontrak diakui pada saat diterima.

Revenue from late charges and early termination are recognized when received.

Beban lainnya diakui pada saat terjadinya.

Other expenses are recognized when incurred.

s. Pajak Penghasilan

s. Income Tax

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak kini terutang dan pajak tangguhan.

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

The tax currently payable is based on taxable profit to the year. Taxable profit differs from profit before tax as reported in the statement of profit or loss and other comprehensive income because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Provisi diakui untuk penentuan pajak yang tidak pasti, tetapi kemungkinan besar akan mengakibatkan arus keluar dana kepada otoritas pajak. Provisi diukur sebesar estimasi terbaik atas jumlah ekspektasian yang terhutang. Penilaian berdasarkan pada pertimbangan professional pajak dalam Perusahaan yang didukung dengan pengalaman lalu atas aktivitas tersebut dan dalam kasus tertentu berdasarkan saran pakar pajak independen.

A provision is recognized for those matters for which the tax determination is uncertain, but it is considered probable that there will be a future outflow of funds to a tax authority. The provisions are measured at the best estimate of the amount expected to become payable. The assessment is based on the judgement of tax professionals within the Company supported by previous experience in respect of such activities and in certain cases based on specialist independent tax advice.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau kejadian yang diakui diluar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

t. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority or either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

t. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

u. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang secara reguler direview oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a) Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b) Yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) Dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada lokasi geografis.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

u. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Company that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- a) That engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expense (including revenues and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);
- b) Whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- c) For which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance is more specifically focused on geographic location.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

In the application of the Company's accounting policies, which are described in Note 3, the management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Peningkatan risiko kredit yang signifikan

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai cadangan yang setara dengan ECL 12 bulan untuk aset tahap 1, atau ECL sepanjang umur untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Suatu aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kreditnya telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. PSAK 71 tidak menjelaskan apa yang merupakan peningkatan risiko kredit yang signifikan. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Perusahaan mempertimbangkan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif.

Sumber Ketidakpastian Estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini.

Perhitungan Cadangan Kerugian

Saat mengukur ECL, Perusahaan menggunakan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana penggerak ini akan saling mempengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar. Perhitungan didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual terutang dan yang diharapkan akan diterima, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probability of default merupakan input utama dalam mengukur ECL. *Probability of default* adalah perkiraan kemungkinan gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Significant increase in credit risk

As explained in Note 3, expected credit losses are measured as an allowance equal to 12-month ECL for stage 1 assets, or lifetime ECL for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when its credit risk has increased significantly since initial recognition. PSAK 71 does not define what constitutes a significant increase in credit risk. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased the Company takes into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward-looking information.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are discussed below.

Calculation of Loss Allowance

When measuring ECL the Company uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direvisi secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 11.

Imbalan kerja

Nilai kini atas kewajiban imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan dari basis aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi nilai tercatat atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Perusahaan menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga atas *Zero Coupon Bonds* yang mempunyai jatuh tempo yang mendekati jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Penilaian instrumen keuangan

Seperti dijelaskan dalam Catatan 35, Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang meliputi input yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi untuk mengestimasi nilai wajar dari beberapa jenis instrumen keuangan. Catatan 35 memberikan informasi yang rinci mengenai asumsi utama yang digunakan dalam menentukan nilai wajar instrumen keuangan.

Direksi berpendapat bahwa teknik penilaian yang dipilih dan asumsi yang digunakan adalah tepat dalam menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan.

Estimated useful lives of premises and equipment

The useful life of each item of the Company's premises and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

The carrying amounts of premises and equipment are disclosed in Note 11.

Employee benefits

The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

The assumptions used in determining the net cost (income) for employee benefits include the discount rate. The Company determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of *Zero Coupon Bonds* that have terms to maturity approximating the terms of the related employee benefit liability.

Valuation of financial instruments

As described in Note 35, the Company uses valuation techniques that include inputs that are not based on observable market data to estimate the fair value of certain types of financial instruments. Note 35 provides detailed information about the key assumptions used in the determination of the fair value of financial instruments.

The Directors believe that the chosen valuation techniques and assumptions used are appropriate in determining the fair value of financial instruments.

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
	Rp'000	Rp'000	
Kas - Rupiah	268.281	189.782	Cash on hand - Rupiah
Bank			Bank
Pihak berelasi (Catatan 33)			Related parties (Note 33)
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank Mizuho Indonesia	27.092.522	10.936.103	PT Bank Mizuho Indonesia
PT Bank Pan Indonesia Tbk	390.541	943.235	PT Bank Pan Indonesia Tbk
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
PT Bank Mizuho Indonesia	4.868.986	1.787.050	PT Bank Mizuho Indonesia
<u>Yen</u>			<u>Yen</u>
PT Bank Mizuho Indonesia	1.705.779	1.644.899	PT Bank Mizuho Indonesia
Subjumlah	<u>34.057.828</u>	<u>15.311.287</u>	Sub-total
Pihak ketiga			Third parties
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank Victoria International Tbk	19.975.184	68.750.151	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	11.570.522	6.194.084	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.525.889	796.873	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	714.099	215.278	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	707.502	14.516	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BTPN Tbk	339.656	2.095.769	PT Bank BTPN Tbk
Deutsche Bank AG	64.084	217.991	Deutsche Bank AG
Lainnya (di bawah Rp 400)	64.229	196.620	Others (below Rp 400)
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
PT Bank Central Asia Tbk	2.025.836	591.907	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	579.475	525.892	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Deutsche Bank AG	430.852	390.810	Deutsche Bank AG
PT Bank ANZ Indonesia	248.290	80.299	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank DBS Indonesia	22.967	61.648	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank BTPN Tbk	2.068	1.875	PT Bank BTPN Tbk
<u>Yen</u>			<u>Yen</u>
PT Bank BTPN Tbk	2.974	3.134	PT Bank BTPN Tbk
SubJumlah	<u>38.273.627</u>	<u>80.136.847</u>	Sub-total
Subjumlah	<u>72.331.455</u>	<u>95.448.134</u>	Sub-total
Deposito Berjangka			Time Deposit
Bank ANZ Indonesia dengan tingkat bunga per tahun sebesar 4,15% tahun 2022	30.000.000	-	Bank ANZ Indonesia with interest rates per annum at 4.15% in 2022
Jumlah	<u>102.599.736</u>	<u>95.637.916</u>	Total

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

As of December 31, 2022 and 2021, there are no cash and cash equivalents which restricted in use.

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

6. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

6. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES

	<u>2022</u> Rp'000	<u>2021</u> Rp'000	
Pihak ketiga <u>Rupiah</u>			Third parties <u>Rupiah</u>
Piutang pembiayaan konsumen	1.829.106.989	1.543.432.038	Consumer financing receivables
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	<u>(356.429.137)</u>	<u>(309.942.861)</u>	Unearned income on consumer financing
Jumlah	1.472.677.852	1.233.489.177	Total
Cadangan kerugian kredit	<u>(34.416.928)</u>	<u>(39.813.361)</u>	Allowance for credit losses
Bersih	<u>1.438.260.924</u>	<u>1.193.675.816</u>	Net

Pada tahun 2022 dan 2021 suku bunga efektif piutang pembiayaan konsumen berkisar antara 13% - 26%.

In 2022 and 2021, annual effective interest rate for consumer financing receivables were ranging at 13% - 26%.

Pada tanggal 31 Desember 2022, pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui termasuk biaya transaksi yang belum diamortisasi yang terkait langsung sebesar Rp 45.205.657 ribu (31 Desember 2021: Rp 37.769.908 ribu).

As of December 31, 2022, unearned revenue on consumer financing receivables includes unamortized direct transaction costs amounting to Rp 45,205,657 ribu (December 31, 2021: Rp 37,769,908 thousand).

Ringkasan piutang pembiayaan konsumen berdasarkan kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

Summary of consumer financing receivables based on business activities are as follows:

	<u>2022</u> Rp'000	<u>2021</u> Rp'000	
Multiguna	1.663.299.149	1.435.190.056	Multipurpose
Modal kerja	142.589.623	63.989.352	Working capital
Investasi	<u>23.218.217</u>	<u>44.252.630</u>	Investment
Jumlah	<u>1.829.106.989</u>	<u>1.543.432.038</u>	Total

Jumlah angsuran pembiayaan konsumen sesuai dengan jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Total consumer financing installments based on maturity date are as follows:

	<u>2022</u> Rp'000	<u>2021</u> Rp'000	
Dalam tahun berjalan	7.360.907	9.482.812	During the year
Dalam satu tahun berikutnya	836.275.572	660.823.413	Within one year
Dalam dua tahun berikutnya	527.610.174	494.463.582	Within two years
Dalam tiga tahun berikutnya atau lebih	<u>457.860.336</u>	<u>378.662.231</u>	Within three years or more
Jumlah	<u>1.829.106.989</u>	<u>1.543.432.038</u>	Total

Jangka waktu rata-rata pembiayaan konsumen berkisar antara 1 - 4 tahun.

The average period of consumer financing is ranging from 1 - 4 years.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, piutang pembiayaan konsumen tidak digunakan sebagai jaminan atas utang bank.

As of December 31, 2022 and 2021, consumer financing receivables are not used as collateral for bank loans.

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)

Tabel berikut menunjukkan perubahan nilai tercatat bruto piutang pembiayaan konsumen:

The following tables show movement of the gross carrying amount of consumer financing receivables:

	31 Desember 2022/December 31, 2022				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2022	1.199.225.101	21.051.736	13.212.340	1.233.489.177	Beginning balance - January 1, 2022
Transfer ke tahap 1	1.513.633	(1.513.633)	-	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	(20.741.163)	20.810.236	(69.073)	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	(22.312.865)	(11.752.760)	34.065.625	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi Perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(887.086.195)	(13.170.210)	(7.174.658)	(907.431.063)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accrued interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	1.175.516.246	-	-	1.175.516.246	New financial assets originated
Penghapusan	-	-	(28.896.508)	(28.896.508)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2022	<u>1.446.114.757</u>	<u>15.425.369</u>	<u>11.137.726</u>	<u>1.472.677.852</u>	Ending balance - December 31, 2022

	31 Desember 2022/December 31, 2021				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2021	1.059.648.937	26.587.862	131.077.585	1.217.314.384	Beginning balance - January 1, 2021
Transfer ke tahap 1	2.385.613	(2.352.139)	(33.474)	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	(45.907.399)	45.993.456	(86.057)	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	(50.857.788)	(9.306.196)	60.163.984	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi Perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(553.449.474)	(39.871.247)	(23.349.288)	(616.670.009)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accrued interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	787.405.212	-	-	787.405.212	New financial assets originated
Penghapusan	-	-	(154.560.410)	(154.560.410)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2021	<u>1.199.225.101</u>	<u>21.051.736</u>	<u>13.212.340</u>	<u>1.233.489.177</u>	Ending balance - December 31, 2021

Tabel berikut menunjukkan perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen:

The following tables show movement of the allowance for credit losses of consumer financing receivables:

	31 Desember 2022/December 31, 2022				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2022	24.849.569	6.556.631	8.407.161	39.813.361	Beginning balance - January 1, 2022
Transfer ke tahap 1	433.600	(433.600)	-	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	(538.271)	582.648	(44.377)	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	(278.527)	(115.990)	394.517	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi Perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(7.653.120)	(5.613.084)	(7.035.641)	(20.301.845)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accrued interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	17.062.025	-	-	17.062.025	New financial assets originated
Pengukuran kembali penurunan nilai-bersih	(9.746.349)	2.903.295	33.582.951	26.739.897	Remeasurement of loss allowance
Penghapusan	-	-	(28.896.510)	(28.896.510)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2022	<u>24.128.927</u>	<u>3.879.900</u>	<u>6.408.101</u>	<u>34.416.928</u>	Ending balance - December 31, 2022

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

	31 Desember 2021/December 31, 2021				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2021	18.235.571	8.834.977	91.762.740	118.833.288	Beginning balance - January 1, 2021
Transfer ke tahap 1	685.988	(664.626)	(21.362)	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	(539.284)	597.587	(58.303)	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	(230.134)	(622.539)	852.673	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi Perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(5.183.931)	(7.293.028)	(89.450.582)	(101.927.541)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accrued interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	16.238.557	-	-	16.238.557	New financial assets originated
Pengukuran kembali penurunan nilai-bersih	(4.357.198)	5.704.260	159.882.405	161.229.467	Remeasurement of loss allowance
Penghapusan	-	-	(154.560.410)	(154.560.410)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2021	<u>24.849.569</u>	<u>6.556.631</u>	<u>8.407.161</u>	<u>39.813.361</u>	Ending balance - December 31, 2021

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian credit dan agunan yang diterima dari konsumen telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

The management believes that the amount of allowance for credit losses and the value of collateral received from consumers are adequate to cover the possible losses that might arise from uncollectible receivables.

7. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

7. FINANCE LEASE RECEIVABLES

	2022 Rp'000	2021 Rp'000	
Pihak ketiga Rupiah			Third parties Rupiah
Piutang sewa pembiayaan	555.237.332	554.366.411	Finance lease receivables
Nilai sisa	126.736.021	125.035.003	Residual value
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(61.997.052)	(52.875.814)	Unearned finance lease revenues
Simpanan jaminan	<u>(126.736.021)</u>	<u>(125.034.993)</u>	Security deposit
Jumlah	<u>493.240.280</u>	<u>501.490.607</u>	Total
Dikurangi bagian yang dibiayai perusahaan pembiayaan lain sehubungan dengan transaksi: Pembiayaan bersama - bersih	<u>(13.044.824)</u>	<u>(25.031.860)</u>	Less amounts financed by other finance company relating to the transactions: Joint financing - net
Jumlah piutang sewa pembiayaan bruto	480.195.456	476.458.747	Total finance lease receivables - gross
Cadangan kerugian kredit	<u>(35.977.048)</u>	<u>(20.375.740)</u>	Allowance for credit losses
Subjumlah	<u>444.218.408</u>	<u>456.083.007</u>	Sub-total

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

	<u>2022</u> Rp'000	<u>2021</u> Rp'000	
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
Piutang sewa pembiayaan	145.934.791	248.704.930	Finance lease receivables
Nilai sisa	14.892.207	14.061.147	Residual value
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(8.871.805)	(10.736.964)	Unearned finance lease revenues
Simpanan jaminan	<u>(14.892.207)</u>	<u>(14.061.147)</u>	Security deposit
Subjumlah	<u>137.062.986</u>	<u>237.967.966</u>	Sub-total
<u>Yen</u>			<u>Yen</u>
Piutang sewa pembiayaan	95.749.679	145.036.886	Finance lease receivables
Nilai sisa	735.055	774.563	Residual value
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(2.202.763)	(3.309.587)	Unearned finance lease revenues
Simpanan jaminan	<u>(735.055)</u>	<u>(774.563)</u>	Security deposit
Subjumlah	<u>93.546.916</u>	<u>141.727.299</u>	Sub-total
Jumlah	<u>674.828.310</u>	<u>835.778.272</u>	Total

Pada tahun 2022 dan 2021, kisaran suku bunga efektif piutang sewa pembiayaan dalam masing-masing mata uang adalah sebagai berikut:

In 2022 and 2021, range of annual effective interest rate for finance lease in each currency are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Rupiah	7,00% - 17,00%	7,00% - 17,00%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	2,25% - 8,23%	2,44% - 4,5%	United States Dollar
Yen	1,28% - 3,17%	1,28% - 3,15%	Yen

Pada tanggal 31 Desember 2022, pendapatan pembiayaan yang belum diakui termasuk biaya transaksi yang terkait langsung dengan pemberian sewa pembiayaan sebesar Rp 88.851 ribu (31 Desember 2021 Rp 12.859 ribu).

As of December 31, 2022, unearned finance lease revenue include direct transaction cost amounting to Rp 88,851 thousand (December 31, 2021: Rp 12,859 thousand).

Jumlah piutang sewa pembiayaan berdasarkan jenis produk dan kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

Total finance lease receivables based on type of products and business activities are as follows:

a. Berdasarkan jenis produk

a. Based on type of products

	<u>2022</u> Rp'000	<u>2021</u> Rp'000	
Mesin	136.137.233	169.308.642	Machinery
Alat berat	465.390.343	615.307.098	Heavy equipment
Kendaraan bermotor	<u>195.394.226</u>	<u>163.492.487</u>	Vehicles
Jumlah	<u>796.921.802</u>	<u>948.108.227</u>	Total

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

b. Berdasarkan kegiatan usaha

b. Based on business activities

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
	Rp'000	Rp'000	
Investasi	796.516.798	944.105.012	Investment
Multiguna	<u>405.004</u>	<u>4.003.215</u>	Multipurpose
Jumlah	<u>796.921.802</u>	<u>948.108.227</u>	Total

Jumlah angsuran sewa pembiayaan sesuai dengan jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Total finance lease installments based on maturity date are as follows:

	Pembayaran Minimum Sewa Pembiayaan/ <i>Minimum Lease Payments</i>		Nilai Kini dari Pembayaran Minimum Sewa Pembiayaan/ <i>Present Value of Minimum Lease Payments</i>		
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Angsuran Sewa Pembiayaan					Lease Installments
Telah jatuh tempo dan sampai dengan satu tahun	374.450.752	507.696.804	340.454.678	471.663.963	Due and within one year
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	<u>422.471.050</u>	<u>440.411.423</u>	<u>383.395.494</u>	<u>409.521.899</u>	More than one year up to five years
Subjumlah	<u>796.921.802</u>	<u>948.108.227</u>	<u>723.850.172</u>	<u>881.185.862</u>	Sub-total
Pendapatan Sewa Pembiayaan Belum Diakui					Unearned Lease Income
Telah jatuh tempo dan sampai dengan satu tahun	(33.996.074)	(36.032.841)	-	-	Due and within one year
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	<u>(39.075.556)</u>	<u>(30.889.524)</u>	-	-	More than one year up to five years
Subjumlah	<u>(73.071.630)</u>	<u>(66.922.365)</u>	-	-	Sub-total
Jumlah	<u>723.850.172</u>	<u>881.185.862</u>	<u>723.850.172</u>	<u>881.185.862</u>	Total

Jangka waktu rata-rata pembiayaan adalah 2 sampai 5 tahun.

The average period of financing is 2 up to 5 years.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, piutang sewa pembiayaan tidak digunakan sebagai jaminan atas utang bank.

As of December 31, 2022 and 2021, finance lease receivables are not used as collateral for bank loans.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, piutang sewa pembiayaan tidak digunakan sebagai jaminan atas utang bank.

As of December 31, 2022 and 2021, finance lease receivables not used as collateral for bank loans.

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

Tabel berikut menunjukkan perubahan nilai tercatat bruto piutang sewa pembiayaan:

The following tables show movement of the gross carrying amount of finance lease receivables:

	31 Desember 2022/December 31, 2022				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2022	780.777.260	4.189.464	71.187.288	856.154.012	Beginning balance - January 1, 2022
Transfer ke tahap 1	-	-	-	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	(1.092.320)	1.092.320	-	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	(3.487.526)	(3.846.656)	7.334.182	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi Perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(549.521.434)	(883.497)	(3.123.953)	(553.528.884)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accrued interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	409.191.514	-	-	409.191.514	New financial assets originated
Penghapusan	-	-	(1.011.284)	(1.011.284)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2022	<u>635.867.494</u>	<u>551.631</u>	<u>74.386.233</u>	<u>710.805.358</u>	Ending balance - December 31, 2022
	31 Desember 2022/December 31, 2021				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2021	1.181.050.583	16.760.044	16.400.155	1.214.210.782	Beginning balance - January 1, 2021
Transfer ke tahap 1	576.237	(76.941)	(499.296)	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	(4.863.207)	4.863.207	-	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	(53.065)	(16.190.288)	16.243.353	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi Perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(571.870.028)	(1.166.558)	(499.297)	(573.535.883)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accrued interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	175.936.740	-	45.186.788	221.123.528	New financial assets originated
Penghapusan	-	-	(5.644.415)	(5.644.415)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2021	<u>780.777.260</u>	<u>4.189.464</u>	<u>71.187.288</u>	<u>856.154.012</u>	Ending balance - December 31, 2021

Tabel berikut menunjukkan perubahan cadangan kerugian kredit piutang sewa pembiayaan:

The following tables show movement of the allowance for credit losses of finance lease receivables:

	31 Desember 2022/December 31, 2022				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2022	190.825	80.725	20.104.190	20.375.740	Beginning balance - January 1, 2022
Transfer ke tahap 1	-	-	-	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	(10.919)	10.919	-	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	(3.922)	(576)	4.498	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi Perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(76.037)	(53.916)	(22.892)	(152.845)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accrued interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	1.549.064	-	-	1.549.064	New financial assets originated
Pengukuran kembali penurunan nilai-bersih	(1.456.245)	25.485	16.647.131	15.216.371	Remeasurement of loss allowance
Penghapusan	-	-	(1.011.282)	(1.011.282)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2022	<u>192.766</u>	<u>62.637</u>	<u>35.721.645</u>	<u>35.977.048</u>	Ending balance - December 31, 2022

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

	31 Desember 2021/December 31, 2021				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2021	785.557	328.602	1.516.328	2.630.487	Beginning balance - January 1, 2021
Transfer ke tahap 1	15.789	(15.789)	-	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	(14.051)	14.051	-	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	(768)	(7.774)	8.542	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi Perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(636.544)	(238.365)	(995.981)	(1.870.890)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accrued interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	40.842	-	3.629.664	3.670.506	New financial assets originated
Pengukuran kembali penurunan nilai-bersih	-	-	21.590.052	21.590.052	Remeasurement of loss allowance
Penghapusan	-	-	(5.644.415)	(5.644.415)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2021	<u>190.825</u>	<u>80.725</u>	<u>20.104.190</u>	<u>20.375.740</u>	Ending balance - December 31, 2021

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian kredit atas piutang sewa pembiayaan telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

The management believes that allowance for credit losses on finance lease receivables are adequate to cover the possible losses that might arise from uncollectible receivables.

Simpanan Jaminan

Pada saat perjanjian sewa pembiayaan dimulai, lessee memberikan simpanan jaminan yang akan digunakan sebagai pembayaran atas pembelian dari aset sewa pembiayaan pada akhir masa sewa, bila opsi dilaksanakan penyewa pembiayaan. Apabila opsi tidak dilaksanakan, simpanan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada lessee pada akhir masa sewa pembiayaan.

Security Deposits

At the inception of finance lease contract, the lessee rendered security deposits which will be used as payment of purchased leased assets at the end of the lease period, if the option is exercised. If the option is not exercised, such security deposits will be returned at the end of the lease period.

8. PIUTANG LAIN-LAIN

	2022 Rp'000
Pihak berelasi (Catatan 33)	497.515
Pihak ketiga	
Piutang yang jaminannya dalam proses diambil alih	84.218.350
Cadangan kerugian kredit	(12.575.301)
Bersih	71.643.049
Lainnya	6.918.765
SubJumlah	78.561.814
Jumlah	79.059.329

8. OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE

	2021 Rp'000
Related parties (Note 33)	1.013.336
Third parties	
Receivables which collateral under take over process	88.573.077
Allowance for credit losses	(3.137.842)
Net	85.435.235
Others	5.292.819
Sub-total	90.728.054
Total	91.741.390

Piutang yang Jaminannya Dalam Proses Diambil Alih

Akun ini merupakan piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan yang jaminannya sedang dalam proses pengambilalihan oleh Perusahaan.

Mutasi cadangan kerugian kredit adalah sebagai berikut:

	2022 Rp'000	2021 Rp'000	
Saldo awal	3.137.842	9.217.857	Beginning balance
Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan	<u>9.437.459</u>	<u>(6.080.015)</u>	Provision (recovery) for the year
Saldo Akhir	<u>12.575.301</u>	<u>3.137.842</u>	Ending Balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian credit nilai piutang yang jaminannya dalam proses diambil alih adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tersebut.

Receivables Which Collateral Undertake Over Process

This account represents consumer financing receivables, financing lease receivables whose collateral is in the process of being taken over by the Company.

The changes in the allowance for credit losses are as follows:

	2022 Rp'000	2021 Rp'000	
Saldo awal	3.137.842	9.217.857	Beginning balance
Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan	<u>9.437.459</u>	<u>(6.080.015)</u>	Provision (recovery) for the year
Saldo Akhir	<u>12.575.301</u>	<u>3.137.842</u>	Ending Balance

Management believes that the allowance for credit lossess of receivables which collateral under take over process is adequate to cover potential losses.

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Akun ini merupakan pembayaran atas sewa, asuransi dan lainnya. Pada 31 Desember 2022, jumlah tercatat biaya dibayar dimuka adalah sebesar Rp 1.746.999 ribu (31 Desember 2021: Rp 1.024.366 ribu).

9. PREPAID EXPENSES

This account represents payment of rent, insurances and others. As of December 31, 2022 the carrying amount of prepaid expenses amounted to Rp 1,746,999 thousand (December 31, 2021: Rp 1,024,366).

10. ASET HAK-GUNA

	1 Januari/ January 1, 2022 Rp'000	Penambahan/ Additions Rp'000	Pengurangan/ Deductions Rp'000	31 Desember/ December 31, 2022 Rp'000	
Biaya perolehan					Cost
Sewa bangunan	32.118.812	33.146.900	11.837.294	53.428.418	Rental building
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Sewa bangunan	23.465.705	8.036.555	11.837.294	19.664.966	Rental building
Jumlah Tercatat	<u>8.653.107</u>			<u>33.763.452</u>	Carrying Value
	1 Januari/ January 1, 2021 Rp'000	Penambahan/ Additions Rp'000	Pengurangan/ Deductions Rp'000	31 Desember/ December 31, 2021 Rp'000	
Biaya perolehan					Cost
Sewa bangunan	24.633.371	7.485.441	-	32.118.812	Rental building
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Sewa bangunan	15.403.176	8.062.529	-	23.465.705	Rental building
Jumlah Tercatat	<u>9.230.195</u>			<u>8.653.107</u>	Carrying Value

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

Beban penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun 2022 sebesar Rp 8.036.556 ribu (2021: Rp 8.062.529 ribu) dimana seluruhnya dibebankan pada beban umum dan administrasi (Catatan 31).

Depreciation expense charged to statement of profit or loss and other comprehensive income in 2022 is amounted to Rp 8,036,556 thousand (2021: Rp 8,062,529 thousand) where entirely charged to general and administrative expenses (Note 31).

11. ASET TETAP

11. PROPERTY AND EQUIPMENT

	1 Januari/ January 1, 2022 Rp'000	Penambahan/ Additions Rp'000	Pengurangan/ Deductions Rp'000	31 Desember/ December 31, 2022 Rp'000	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Tanah	13.069.791	-	-	13.069.791	Land
Bangunan	9.496.296	287.000	-	9.783.296	Building
Prasarana bangunan	7.177.442	9.789.525	3.454.393	13.512.574	Leasehold improvements
Kendaraan	10.028.512	4.436.318	1.441.557	13.023.273	Vehicles
Perabot dan peralatan kantor	3.415.089	4.309.960	1.559.353	6.165.696	Fixtures and office equipment
Komputer	28.448.795	6.185.048	2.591.892	32.041.951	Computer
Jumlah Biaya Perolehan	71.635.925	25.007.851	9.047.195	87.596.581	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	4.141.279	474.815	-	4.616.094	Building
Prasarana bangunan	4.546.910	1.398.911	3.454.393	2.491.428	Leasehold improvements
Kendaraan	4.536.818	1.334.367	564.826	5.306.359	Vehicles
Perabot dan peralatan kantor	2.409.055	604.907	1.533.945	1.480.017	Fixtures and office equipment
Komputer	16.177.262	7.061.872	2.569.169	20.669.965	Computer
Jumlah Akumulasi Penyusutan	31.811.324	10.874.872	8.122.333	34.563.863	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku	39.824.601			53.032.718	Book Value
	1 Januari/ January 1, 2021 Rp'000	Penambahan/ Additions Rp'000	Pengurangan/ Deductions Rp'000	31 Desember/ December 31, 2021 Rp'000	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Tanah	13.069.791	-	-	13.069.791	Land
Bangunan	9.496.296	-	-	9.496.296	Building
Prasarana bangunan	5.651.661	1.525.781	-	7.177.442	Leasehold improvements
Kendaraan	8.969.265	1.186.347	127.100	10.028.512	Vehicles
Perabot dan peralatan kantor	2.802.421	615.918	3.250	3.415.089	Fixtures and office equipment
Komputer	22.198.208	6.250.587	-	28.448.795	Computer
Jumlah Biaya Perolehan	62.187.642	9.578.633	130.350	71.635.925	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	3.666.464	474.815	-	4.141.279	Building
Prasarana bangunan	3.580.384	966.526	-	4.546.910	Leasehold improvements
Kendaraan	3.295.475	1.263.850	22.507	4.536.818	Vehicles
Perabot dan peralatan kantor	2.086.297	324.263	1.505	2.409.055	Fixtures and office equipment
Komputer	10.027.079	6.150.183	-	16.177.262	Computer
Jumlah Akumulasi Penyusutan	22.655.699	9.179.637	24.012	31.811.324	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku	39.531.943			39.824.601	Book Value

Beban penyusutan aset tetap untuk tahun 2022 sebesar Rp 10.874.872 ribu (2021: Rp 9.179.637 ribu) dimana seluruhnya dibebankan pada beban umum dan administrasi (Catatan 31).

Depreciation expenses of property and equipment in 2022 amounted to Rp 10,874,872 thousand (2021: Rp 9,179,637 thousand), which entirely charged to general and administrative expenses (Note 31).

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

Perhitungan laba (rugi) penjualan aset tetap selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The computations of gain (loss) on sale of property and equipment during the year are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
	Rp'000	Rp'000	
Hasil penerimaan dari penjualan	968.980	79.578	Proceeds from sales
Nilai buku	<u>(924.862)</u>	<u>(106.338)</u>	Book value
Laba (rugi) penjualan aset tetap	<u>44.118</u>	<u>(26.760)</u>	Gain (loss) on sale of property and equipment

Perusahaan memiliki 3 bidang tanah di Jakarta dan Medan dengan hak legal berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan yang berjangka waktu 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2035, 2036 dan 2042. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

The Company owns 3 pieces of land in Jakarta and Medan with Building Use Right (HGB) for 20 (twenty) until 30 (thirty) years expiring in the year of 2035, 2036 and 2042. Management believes that there are no problem with the extension of land right because the land was acquired legally and is supported by sufficient evidence of ownership.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Tanah dan bangunan tersebut tidak digunakan sebagai jaminan atas utang bank.

As of December 31, 2022 and 2021, The Land and building are not used as collateral for bank loans.

Aset tetap selain tanah telah diasuransikan atas risiko kebakaran, kecurian dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 42.847.023 ribu (31 Desember 2021: Rp 39.610.918 ribu). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang ditanggungkan.

Property and equipment except land are covered by insurance against losses by fire, theft and other risks with total coverage as of December 31, 2021 amount of Rp 42,847,023 thousand (December 31, 2021: Rp 39,610,918 thousand). The management believes that the above insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tercatat dari seluruh aset tetap tersebut dapat dipulihkan dan tidak terdapat adanya peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai, sehingga tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan nilai atas aset tetap.

Management believes that the carrying amount of property and equipment are recoverable and also there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment, therefore no provision for impairment of property and equipment were provided.

12. ASET (LIABILITAS) DERIVATIF

Perusahaan menggunakan instrumen derivatif, terutama *swap* suku bunga dan *swap cross currency*. Instrumen-instrumen ini meningkatkan kemampuan Perusahaan dalam mengelola risiko, terutama risiko atas fluktuasi suku bunga dan nilai tukar yang timbul sebagai bagian dari kegiatan operasi Perusahaan.

12. DERIVATIVE ASSETS (LIABILITIES)

The Company utilizes derivative instruments, principally interest rate swaps contracts, and cross currency swaps contracts. These instruments enhance the Company's ability to manage risks, primarily interest rates and exchange rates fluctuations, which exist as part of its ongoing business operations.

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

Estimasi nilai wajar dari instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The estimated fair values of the Company's derivative instruments as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	2022		2021		
	Nilai Nasional/ Outstanding National Rp'000	Nilai Wajar Disajikan sebagai Aset (Liabilitas) Derivatif/Fair Value Presented as Derivative Assets (Liabilities) Rp'000	Nilai Nasional/ Outstanding National Rp'000	Nilai Wajar Disajikan sebagai Aset (Liabilitas) Derivatif/Fair Value Presented as Derivative Assets (Liabilities) Rp'000	
Aset					Assets
Swap suku bunga	1.051	895.839	1.545	187.849	Interest rate swap
Swap crosss currency	11.107	16.636.328	-	-	Cross currency swap
Subjumlah	12.158	17.532.167	1.545	187.849	Sub-total
Liabilitas					Liabilities
Swap suku bunga	-	-	(945)	(138.071)	Interest rate swap
Swap crosss currency	-	-	(979)	(41.463)	Cross currency swap
Subjumlah	-	-	(1.924)	(179.534)	Sub-total
Neto	12.158	17.532.167	(379)	8.315	Net

Penurunan nilai wajar sebesar Rp 17.523.854 ribu pada 31 Desember 2022 (31 Desember 2021: Rp 2.561.138 ribu) adalah bagian dari cadangan lindung nilai bersih setelah efek pajak.

The corresponding decrease in fair value of Rp 17,523,854 thousand in December 31, 2022 (December 31, 2021: Rp 2,561,138 thousand) are included as part of hedging reserve, net of the related tax effect.

Kontrak *swap* suku bunga mempertukarkan tingkat suku bunga mengambang dengan tingkat suku bunga tetap, di mana kontrak tersebut ditujukan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas.

The interest rate swap contracts exchange floating rate interest for fixed rate interest and are designated and effective as cash flow hedge instruments.

Kontrak *swap cross currency* mempertukarkan pinjaman yang diterima dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan pinjaman dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar yang spesifik pada tanggal dimulainya transaksi, di mana kontrak tersebut ditujukan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas.

The cross currency swap contracts exchange loan received in United States Dollar to Rupiah with a specified exchange rate at initial date and are designated and effective as cash flow hedge.

Kisaran jangka waktu kontrak derivatif adalah 3-4 tahun pada tahun 2022.

The range of period for derivative contract are 3-4 years in 2022.

Beban bunga kontrak *swap* suku bunga dan *swap cross currency* pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 5.030.832 ribu (2021: Rp 2.273.380 ribu).

Interest expenses for interest rate swap and cross currency swap in 2022 amounted to Rp 5,030,832 thousand (2021: Rp 2,273,380 thousand).

Pendapatan bunga kontrak swap suku bunga dan *swap cross currency* pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 249.663 ribu (2021: nihil).

Interest income for interest rate swap and cross currency swap in 2022 amounted to Rp 249,663 thousand (2021: nil).

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

Estimasi nilai wajar dari kontrak swap suku bunga dan *swap cross currency* dihitung berdasarkan nilai pasar. Perjanjian atas swap suku bunga dan *swap cross currency* digunakan untuk mengelola eksposur suku bunga dan nilai tukar dari pinjaman (Catatan 14).

The estimated fair values of the interest rate swap and cross currency swap contracts are calculated based on market rates. An interest rate swap and cross currency swap agreements are used to manage interest rate exposure and exchange rate exposure on the borrowings (Note 14).

Eksposur terhadap risiko kredit pihak lawan (*counterparty*) dianggap rendah karena perjanjian ini dibuat dengan lembaga keuangan terpercaya dengan peringkat kredit yang baik yang diharapkan memenuhi ketentuan sesuai dengan perjanjian.

Exposure to counterparty credit risk is considered low because these agreements have been entered into with major creditworthy institutions with good credit ratings, and they are expected to perform fully under the terms of the agreements.

Mutasi cadangan lindung nilai yang dimiliki oleh Perusahaan pada tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The movement of the Company's cash flow hedging reserve in 2022 and 2021 are as follows:

	<u>2022</u> Rp'000	<u>2021</u> Rp'000	
Saldo awal	68.322	(1.082.347)	Beginning balance
Laba (Rugi) dari perubahan nilai wajar	17.523.854	2.561.138	Gain (Loss) on changes in fair value
Reklasifikasi ke Laba Rugi	(14.153.356)	(1.085.921)	Reclassified to profit or loss
Pajak penghasilan terkait yang diakui pada penghasilan komprehensif lain (Catatan 19)	<u>(741.509)</u>	<u>(324.548)</u>	Income tax related recognized in other comprehensive income (Note 19)
Saldo akhir	<u>2.697.311</u>	<u>68.322</u>	Ending balance

13. ASET LAIN-LAIN

13. OTHER ASSETS

	<u>2022</u> Rp'000	<u>2021</u> Rp'000	
<u>Pihak berelasi (Catatan 33)</u>			Related party (Note 33)
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Uang jaminan	558.295	558.295	Security deposits
Beban ditangguhkan	<u>-</u>	<u>15.625</u>	Deferred charges
Subjumlah	<u>558.295</u>	<u>573.920</u>	Sub-total
<u>Pihak ketiga</u>			Third parties
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Jaminan yang dikuasakan kembali	2.369.319	2.363.875	Foreclosed collateral
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(1.813.966)</u>	<u>(1.974.575)</u>	Allowance for impairment loss
Bersih	<u>555.353</u>	<u>389.300</u>	Net
Beban ditangguhkan	47.304.533	47.304.533	Deferred charges
Uang jaminan	3.221.164	1.693.584	Security deposits
Uang muka	2.617.783	1.052.436	Advances
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
Uang jaminan	<u>7.865</u>	<u>7.136</u>	Security deposits
Subjumlah	<u>53.706.698</u>	<u>50.446.989</u>	Sub-total
Jumlah	<u>54.264.993</u>	<u>51.020.909</u>	Total

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

Beban amortisasi atas beban ditangguhkan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp 90.625 ribu (31 Desember 2021: Rp 62.500 ribu).

Jaminan yang dikuasakan kembali

Jaminan yang dikuasakan kembali merupakan jaminan piutang pembiayaan berupa kendaraan, alat berat dan mesin yang telah diambil alih oleh Perusahaan.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai jaminan yang dikuasakan kembali cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tersebut.

Atas jaminan yang dikuasakan kembali, Perusahaan terus melakukan upaya penyelesaian.

Beban ditangguhkan

Beban ditangguhkan merupakan beban ditangguhkan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak sebesar Rp 47.304.534 ribu untuk tahun 2022 dan 2021 (Catatan 19).

Lainnya

Lainnya terdiri dari uang jaminan sewa, uang jaminan lain-lain dan uang muka lain-lain.

Amortization expense of deferred charges for the year ended December 31, 2022 amounted to Rp 90.625 thousand (December 31, 2021: Rp 62,500 thousand).

Foreclosed collateral

Foreclosed collateral represents consumer financing collateral in the form of vehicles, heavy equipment and machineries that have been foreclosed by the Company.

Management believes that the allowance for decline in value of foreclosed collateral is adequate to cover potential losses.

For the foreclosed collateral, the Company continues to make settlement efforts.

Deferred charges

Deferred charges represent deferred charges of the Underpayment Tax Assessment Letter and Tax Collection Letter amounted to Rp 47,304,534 thousand in 2022 and 2021 (Note 19).

Others

Others consist of rent refundable deposit, other refundable deposit and other advances.

14. UTANG BANK

14. BANK LOANS

	<u>2022</u> Rp'000	<u>2021</u> Rp'000	
<u>Jangka Pendek</u>			<u>Short-term</u>
Pihak berelasi (Catatan 33)			Related parties (Note 33)
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank Mizuho Indonesia	805.000.000	836.000.000	PT Bank Mizuho Indonesia
PT Bank Pan Indonesia Tbk	40.000.000	100.000.000	PT Bank Pan Indonesia Tbk
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
PT Bank Mizuho Indonesia (USD 4.600 ribu, 2021: USD 800 ribu)	72.362.600	11.415.200	PT Bank Mizuho Indonesia (USD 4,600 thousand, 2021: USD 800 thousand)
<u>Yen</u>			<u>Yen</u>
PT Bank Mizuho Indonesia (2021: JPY 260.000 ribu)	-	32.211.348	PT Bank Mizuho Indonesia (2021: JPY 260,000 thousand)
Subjumlah	<u>917.362.600</u>	<u>979.626.548</u>	Sub-total

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

	<u>2022</u> Rp'000	<u>2021</u> Rp'000	
Pihak ketiga			Third parties
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank BTPN Tbk	357.550.000	251.000.000	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank Victoria International Tbk	10.000.000	35.000.000	PT Bank Victoria International Tbk
Deutsche Bank AG Jakarta	-	25.000.000	Deutsche Bank AG Jakarta
<u>Yen</u>			<u>Yen</u>
Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited, Singapore (JPY 280,000 ribu, 2021: JPY 380.000 ribu)	<u>32.918.676</u>	<u>47.078.124</u>	Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited, Singapore (JPY 280,000 thousand, 2021: JPY 380,000 thousand)
Subjumlah	<u>400.468.676</u>	<u>358.078.124</u>	Sub-total
Jumlah Jangka Pendek	<u>1.317.831.276</u>	<u>1.337.704.672</u>	Total Short-term
<u>Jangka Panjang</u>			<u>Long-term</u>
Pihak berelasi (Catatan 33)			Related party (Note 33)
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
PT Bank Mizuho Indonesia (USD 14.010 ribu, 2021: USD 4.993 ribu)	<u>220.397.320</u>	<u>71.244.871</u>	PT Bank Mizuho Indonesia (USD 14,010 thousand, 2021: USD 4,993 thousand)
Pihak ketiga			Third parties
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank Resona Perdania	-	5.480.769	PT Bank Resona Perdania
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
The Chiba Bank, Ltd., Hong Kong (USD 3.850 ribu, 2021: USD 8.123 ribu)	60.564.350	115.899.953	The Chiba Bank, Ltd., Hong Kong (USD 3,850 thousand, 2021: USD 8,123 thousand)
The Chugoku Bank Ltd, Hong kong (USD nihil , 2021: USD 1.073 ribu)	-	15.303.503	The Chugoku Bank Ltd, Hong Kong (USD nil, 2021: USD 1,073 thousand)
The Musashino Bank, Ltd., Tokyo (USD nihil, 2021: USD 800 ribu)	-	11.415.200	The Musashino Bank, Ltd., Tokyo (USD nil, 2021: USD 800 thousand)
<u>Yen</u>			<u>Yen</u>
The Hachijuni Bank, Ltd., Hong Kong	36.200.746	-	The Hachijuni Bank, Ltd., Hong Kong
The Shizouka Bank, Ltd., Hong Kong (JPY 224.416 ribu, 2021: JPY 449.667 ribu)	<u>26.383.925</u>	<u>55.709.112</u>	The Shizouka Bank, Ltd., Hong Kong (JPY 224,416 thousand, 2021: JPY 449,667 thousand)
Subjumlah	<u>123.149.021</u>	<u>203.808.537</u>	Sub-total
Jumlah Jangka Panjang	<u>343.546.341</u>	<u>275.053.408</u>	Total Long-term
Jumlah	<u>1.661.377.617</u>	<u>1.612.758.080</u>	Total
Nilai tercatat pada biaya perolehan diamortisasi dari utang bank adalah sebagai berikut:			Carrying amount at amortized cost of bank loans are as follows:
	<u>2022</u> Rp'000	<u>2021</u> Rp'000	
Utang bank	1.661.377.617	1.612.758.080	Bank loan
Bunga masih harus dibayar			Accrued interest expenses
Pihak berelasi	2.182.874	722.366	Related party
Pihak ketiga	<u>1.017.951</u>	<u>1.069.198</u>	Third parties
Jumlah	<u>1.664.578.442</u>	<u>1.614.549.644</u>	Total

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

Berikut adalah fasilitas utang bank yang dimiliki Perusahaan:

The Company's bank loans facilities are as follows:

Bank	Fasilitas/Facility	Batas Kredit/ Credit Limit Rp '000	Awal/Begin	Akhir/Due
Bank Pan Indonesia	Pinjaman cerukan (Perjanjian atas fasilitas ini berakhir pada 10 September 2022 dan sudah diperpanjang sampai 10 September 2023)	30.000.000	30/11/2010	10/09/2023
	<i>Money Market Line (Facility agreement will be ended in September 10, 2022 and has been extended until September 10, 2023)</i>	525.000.000	31/10/2016	10/09/2023
PT Bank Victoria International Tbk	Permintaan Pinjaman dengan Mekanisme Pasar Uang (Perjanjian atas fasilitas ini berakhir pada 29 September 2022 dan sudah diperpanjang sampai 29 September 2023)/	88.000.000	24/09/2014	29/09/2023
	<i>Demand loan with Money Market Line Mechanism (Facility agreement will be ended in September 29, 2022 and has been extended until September 29, 2023)</i>			
PT Bank BTPN Tbk	Pinjaman Revolving/ (Perjanjian atas fasilitas ini berakhir pada 28 April 2022 dan sudah diperpanjang sampai 28 April 2023)/	500.000.000	07/06/2012	28/04/2028
	<i>Revolving Loan (Facility agreement will be ended in April 28, 2022 and has been extended until April 28, 2023)</i>	(atau nilai yang setara dalam USD)/ <i>(or its equivalent in USD)</i>		
PT Bank Mizuho Indonesia	Pinjaman Revolving (Perjanjian atas fasilitas ini berakhir pada 30 April 2022 dan sudah diperpanjang sampai 30 April 2023)/	USD 100.000	07/02/2011	30/04/2028
	<i>Revolving Loan (Facility agreement will be ended in April 30, 2022 and has been extended until April 30, 2023)</i>	(atau nilai yang setara dalam mata uang lain)/ <i>(or its equivalent in other currencies)</i>		
The Chiba Bank, Ltd., Hong Kong	Pinjaman Jangka Panjang USD/	USD 11.000	15/02/2019	15/08/2024
	<i>USD Long Term Loan</i>			

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)

Bank	Fasilitas/Facility	Batas Kredit/ Credit Limit Rp '000	Awal/Begin	Akhir/Due
The Shizuoka Bank, Ltd., Hong Kong	Pinjaman Jangka Pendek Multikurs Berulang (Perjanjian atas fasilitas ini berakhir pada 28 Juni 2022 dan sudah diperpanjang sampai 27 Juni 2023)/ <i>Multi-currency Short Term Loan (Facility agreement will be ended in June 28, 2022 and has been extended until June 27, 2023)</i>	USD 10.000	30/06/2011	27/06/2028
	Pinjaman Multikurs Berulang Jangka Panjang (Perjanjian atas fasilitas ini berakhir pada 28 Juni 2022 dan sudah diperpanjang sampai 27 Juni 2023)/ <i>Long-term Multi-currency Revolving Loan (Facility agreement will be ended in June 28, 2022 and has been extended until June 27, 2023)</i>	USD 10.000	10/09/2018	27/06/2028
Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited, Singapore	Kredit Berulang (Perjanjian atas fasilitas ini berakhir pada 31 Maret 2022 dan sudah diperpanjang sampai 31 Maret 2023)/ <i>Revolving Loan (Facility agreement will be ended in March 31, 2022 and has been extended until March 31, 2023)</i>	JPY 1.500.000	31/03/2017	31/03/2023
The Norinchukin Bank, Singapore	Pinjaman Berjangka Jangka Pendek Berulang (Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 27 September 2021 dan fasilitas ini tidak akan diperpanjang)/ <i>Term Loan Short-term Revolving (This facility was fully paid on September 27, 2021 and this facility will be not extended)</i>	USD 15.000	15/03/2019	13/03/2025
The Chugoku Bank, Ltd., Hong Kong	Pinjaman Jangka Panjang Mata Uang Tunggal/ <i>Single Currency Long Term Loan</i>	USD 10.000	11/02/2017	05/09/2024
Japan Bank for International Cooperation	Fasilitas Kredit (Pinjaman Ini telah dilunasi pada tanggal 31 Agustus 2021)/ <i>Loan Facility (This facility was fully paid on August 31, 2021)</i>	USD 7.000	21/09/2016	30/09/2026

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

Bank	Fasilitas/Facility	Batas Kredit/ Credit Limit Rp '000	Awal/Begin	Akhir/Due
The Musashino Bank, Ltd., Tokyo	Pinjaman Berjangka/ <i>Term Loan</i>	USD 5.000	08/03/2018	02/03/2024
Deutsche Bank AG Jakarta	Pembiayaan Kembali Piutang dan pinjaman jangka pendek (Perjanjian atas fasilitas ini berakhir pada 30 Juni 2022 dan sudah diperpanjang sampai 30 June 2023/ <i>Receivable Refinancing and Short Term Loan (Facility agreement will be ended in June 30, 2022 and has been extended until June 30, 2023)</i>	USD 10.000 (atau nilai yang setara dalam mata uang Rupiah)/ <i>(or its equivalent in IDR currencies)</i>	16/11/2018	30/06/2023
The Hachijuni Bank, Ltd., Hong Kong	Pinjaman Berjangka (Perjanjian atas fasilitas ini berakhir pada 20 Januari 2022 dan sudah diperpanjang sampai 20 Januari 2023/ <i>Term Loan (Facility agreement will be ended in January 20, 2022 and has been extended until January 20, 2023)</i>	USD 5.000 (atau nilai yang setara dalam mata uang Yen Jepang)/ <i>(or its equivalent in JPY currencies)</i>	20/01/2022	20/01/2028

Pada tanggal 31 Desember 2022, seluruh fasilitas di atas dijamin dengan jaminan Perusahaan dari Mizuho Leasing Co., Ltd. (dahulu IBJ Leasing Co., Ltd.).

On December 31, 2021, all facilities above are guarantee by the corporate guarantee from Mizuho Leasing Co., Ltd. (formerly IBJ Leasing Co., Ltd.).

Seluruh utang bank yang diterima Perusahaan digunakan untuk kebutuhan modal kerja.

All of the bank loans obtained by the Company are used for working capital purposes.

Terkait dengan seluruh utang-utang bank yang diperoleh, Perusahaan wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada seluruh Bank jika terdapat perubahan susunan pengurus, merger dan akuisisi, perubahan bentuk perusahaan, komposisi permodalan dan pembagian laba Perusahaan. Untuk Bank Panin, Perusahaan wajib menjaga gearing ratio sebesar 10x dan untuk Bank Victoria rasio perusahaan wajib menjaga *non-performing financing* untuk tunggakan lebih dari 90 hari tidak lebih dari 5%.

In accordance with all bank loans obtained, the Company is obliged to provide written notification to all banks if there are any changes in management, mergers and acquisitions, changes in company structure, changes in composition of capital, and the Company's profit sharing. For Bank Panin, The Company is also required to maintain its gearing ratio at 10x and for Bank Victoria, the Company obliged to maintain non-performing financing ratio of overdue payment more than 90 days for no exceed than 5%.

Perusahaan tidak memiliki tunggakan pembayaran pokok, bunga maupun pelanggaran lainnya berkaitan dengan utang bank selama tahun 2022 dan 2021.

The Company did not have any default in the principal or interest payment or breach any covenants with respect to the bank loans in 2022 and 2021.

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

15. UTANG USAHA

Akun ini merupakan utang kepada *dealer* kendaraan bermotor (pihak ketiga) serta *vendor* mesin dan alat berat sehubungan dengan kegiatan pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan yang tidak dikenakan bunga dan jangka waktu.

15. TRADE PAYABLES

This account represents payable to motor-vehicle dealer (third parties) along with machine and heavy equipment vendor in connection with the consumer financing and lease financing activities which do not bear interests and without any stated repayment terms.

16. UTANG LAIN-LAIN

16. OTHER ACCOUNTS PAYABLE

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
	Rp'000	Rp'000	
Pihak berelasi (Catatan 33)	<u>7.865.500</u>	<u>14.269.000</u>	Related party (Note 33)
Pihak ketiga			Third parties
Pembayaran diterima di muka dari pelanggan	38.336.860	39.802.441	Customers' deposits
Pendapatan ditangguhkan	6.003.555	5.730.499	Deferred income
Utang asuransi	2.438.990	1.587.184	Insurance payables
Lainnya	<u>1.469.941</u>	<u>526.183</u>	Others
Subjumlah	<u>48.249.346</u>	<u>47.646.307</u>	Sub-total
Jumlah	<u>56.114.846</u>	<u>61.915.307</u>	Total

17. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

17. ACCRUED EXPENSES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
	Rp'000	Rp'000	
Pihak berelasi (Catatan 33)	<u>2.182.874</u>	<u>722.366</u>	Related party (Note 33)
Pihak ketiga:			Third parties:
Bonus dan tunjangan	8.700.000	-	Bonuses and allowances
Jasa profesional	1.608.337	1.205.400	Professional fee
Bunga atas utang bank	1.017.951	1.069.198	Interest of bank loans
Telepon, internet dan listrik	233.376	218.592	Telephone, internet and electricity
Lain-lain	<u>626.887</u>	<u>345.789</u>	Others
Subjumlah	<u>12.186.551</u>	<u>2.838.979</u>	Sub-total
Jumlah	<u>14.369.425</u>	<u>3.561.345</u>	Total

18. UTANG PAJAK

18. TAXES PAYABLE

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
	Rp'000	Rp'000	
Pajak penghasilan:			Income tax:
Pasal 21	1.363.943	1.408.181	Article 21
Pasal 26	500.352	372.531	Article 26
Pasal 4 (2)	172.289	71.194	Article 4 (2)
Pasal 23	68.163	100.327	Article 23
Pajak Pertambahan Nilai	<u>140.452</u>	<u>53.105</u>	Value Added Tax
Jumlah	<u>2.245.199</u>	<u>2.005.338</u>	Total

19. PAJAK PENGHASILAN

19. INCOME TAX

a. Pajak Penghasilan Badan

a. Corporate Income Tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran penghasilan kena pajak (rugi fiskal) untuk tahun berjalan:

The reconciliation between income before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income (fiscal loss) for the year are as follows:

	2022 Rp'000	2021 Rp'000	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	55.338.482	8.173.445	Income before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income
<u>Beda temporer:</u>			<u>Temporary differences:</u>
Kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen	16.390.629	(67.171.943)	Impairment losses consumer financing receivables
Penyisihan penurunan nilai jaminan yang dikuasakan kembali	(160.609)	(823.063)	Allowance for decline in value of foreclosed collateral
Penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain	5.807.795	(2.450.350)	Allowance for decline in value other receivables
Penyusutan aset tetap	(442.371)	184.986	Depreciation of property and equipment
Amortisasi goodwill yang timbul atas transaksi penggabungan usaha	(685.343)	(685.343)	Amortization of goodwill arise from merger transaction
Aset hak-guna	161.984	(119.129)	Right-of-use-asset
Imbalan pasca-kerja	715.668	1.593.771	Post-employment benefits
Bonus	8.700.000	(2.980.595)	Bonus
<u>Beda tetap:</u>			<u>Permanent differences:</u>
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal	5.682.333	5.944.577	Non-deductible expenses for fiscal purpose
Penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final	(390.037)	(439.011)	Income already subjected to final tax
Taksiran Penghasilan Kena Pajak Tahun Berjalan	91.118.531	(58.772.655)	Estimated Taxable Income for Current Year
Akumulasi laba (rugi) fiskal:			Accumulated fiscal (loss) profit:
2021	(58.772.655)	-	2021
2020	(89.656.377)	(55.561.834)	2020
Akumulasi Rugi Fiskal Akhir Tahun	(57.310.501)	(114.334.489)	Accumulated Fiscal Loss at End of The Year

Jumlah taksiran penghasilan kena pajak (rugi fiskal) di atas menjadi dasar dalam penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan ke Kantor Pajak.

The annual tax return (SPT) which submitted to the tax office are prepared based on the above estimated taxable income (fiscal loss).

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

Rekonsiliasi antara manfaat (beban) pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku terhadap laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income tax benefit (expense) included in the statements of profit or loss and other comprehensive income and the amount computed by applying the applicable tax rates to income (loss) before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2022 Rp'000	2021 Rp'000	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	55.338.482	8.173.445	Income (loss) before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income
Manfaat (beban) pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku efektif	12.174.466	1.798.158	Income tax benefit (expense) calculated using effective rate
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal	1.250.113	1.307.806	Non-deductible expenses for fiscal purposes
Penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final	(85.808)	(96.582)	Income already subjected to final tax
Beban pajak penghasilan yang dikompensasi dengan akumulasi rugi fiskal	(6.631.465)	(18.948.749)	Income tax expense compensated against accumulated fiscal loss
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	6.707.306	(15.939.367)	Income Tax Benefit (Expense)

Besarnya pajak terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (self-assessment). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan pajak dalam jangka waktu lima tahun sejak pajak terutang.

The determination of the tax liabilities is based on self assessment. The tax office can perform examination of income taxes within five years after the tax becomes due.

Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ("Undang-undang No. 2 Tahun 2020") mengatur mengenai adanya penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 - 2021 dan sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

Based on Law No. 2 of 2020 dated May 18, 2020 regarding State Financial Policies and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic and/or in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability ("Law No. 2 of 2020") regulates the adjustment of the Income Tax rate for domestic Corporate Taxpayers and permanent business entity regarding the rate reduction of Article 17 paragraph (1) letter b for the Law on Income Tax to 22% (twenty two percent) effective for Fiscal Year 2020 – 2021 and 20% (twenty percent) which will be effective for Fiscal Year 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya. Dengan demikian, penetapan tarif pajak sebelumnya sebesar 20% menjadi tidak berlaku setelah Undang-Undang ini disahkan.

Untuk tahun pajak 2022 dan 2021, berdasarkan Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan ("PPH") bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka, Wajib Pajak dapat memperoleh penurunan tarif PPh sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif PPh Wajib Pajak Badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perpajakan tersebut diatas apabila memenuhi tambahan kriteria sebagai berikut:

- Jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak.
- Masing-masing pihak yang dimaksud di atas hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.
- Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan (183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
- Pihak-pihak yang memenuhi persyaratan 300 (tiga ratus) pihak dan 5% (lima persen) sebagaimana di atas, tidak termasuk: Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang membeli kembali sahamnya; dan/atau yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka (tercermin dari kepemilikan saham oleh pengendali dan/atau pemegang saham utama).

Berdasarkan kriteria di atas, Tarif pajak penghasilan Perusahaan untuk tahun pajak 2022 dan 2021 adalah sebesar 22%.

On October 29, 2021, the Government issue Law of the Republic of Indonesia No.7 Year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards, and a further reduction of the tax rate by 3% for domestic taxpayers who meet certain requirements. Hence, the previously tax rate determination of 20% will be invalid after the ratification of this Law.

For the fiscal year 2022 and 2021, based on Article 3 of Government Regulation No. 30 year 2020 regarding the Decrease in Income Tax Rates ("PPH") for Domestic Corporate Tax Payers in the Form of Public Companies, tax payers can obtain a reduction in the PP rate of 3% (three percent) lower than the rate of domestic corporate tax payers as regulated in the Taxation Law, if it meets the following additional criteria:

- The public owned 40% (forty percent) or more of the total paid up shares and those shares are owned by at least 300 (three hundred) parties.
- Each party can only own less than 5% (five percent) of total paid-up shares.
- The tax payer should fulfill the above mentioned criteria at least within 6 (six) months (183 (one hundred and eighty three) calendar days) in 1 (one) fiscal year.
- Parties that meet the requirements of 300 (three hundred) parties and 5% (five percent) as stated above, do not include: Public Company Tax Payers who buy back their shares; and/or Those who have a special relationship as stipulated in the Income Tax Law with Public Company Tax Payers (reflected in: share ownership by the controlling party and/or major shareholder).

Based on criteria above, The Company's tax rate for the fiscal year 2022 and 2021 is 22%

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

b. Pajak Tangguhan

Rincian aset pajak tangguhan-bersih Perusahaan adalah sebagai berikut:

	1 Januari/ January 1, 2022	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2022	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Liabilitas Imbalan pasca-kerja	2.572.515	157.448	6.142	2.736.105	Post-employment benefit liabilities
Cadangan kerugian kredit atas piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan	-	3.605.938	-	3.605.938	Allowance for credit losses on consumer financing receivables and financ lease receivables
Cadangan kerugian kredit atas piutang lain-lain	1.488.851	1.277.715	-	2.766.566	Allowance for credit losses on other receivables
Cadangan penurunan kredit jaminan yang dikuasakan kembali	434.406	(35.334)	-	399.072	Allowance for credit losses on foreclosed collateral
Bonus	-	1.914.000	-	1.914.000	Bonus
Aset hak-guna	67.577	35.636	-	103.213	Right-of-use assets
Penyusutan aset tetap	224.074	(97.322)	-	126.752	Depreciation of fixed assets
Lindung nilai arus kas	(19.271)	-	(741.509)	(760.780)	Cash flow hedges
Goodwill atas transaksi penggabungan usaha	841.830	(150.775)	-	691.055	Goodwill from merger transaction
Jumlah aset pajak tangguhan	5.609.982	6.707.306	(735.367)	11.581.921	Total deferred tax assets

b. Deferred Tax

The details of the Company's deferred tax assets-net are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2021	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2021	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Bonus	655.731	(655.731)	-	-	Bonus
Liabilitas Imbalan pasca-kerja	2.211.370	350.630	10.515	2.572.515	Post-employment benefit liabilities
Cadangan kerugian kredit atas piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan	14.777.828	(14.777.828)	-	-	Allowance for credit losses on consumer financing receivables and financ lease receivables
Cadangan kerugian kredit atas piutang lain-lain	2.027.928	(539.077)	-	1.488.851	Allowance for credit losses on other receivables
Cadangan penurunan kredit jaminan yang dikuasakan kembali	615.480	(181.074)	-	434.406	Allowance for credit losses on foreclosed collateral
Aset hak-guna	93.785	(26.208)	-	67.577	Right-of-use assets
Penyusutan aset tetap	183.378	40.696	-	224.074	Depreciation of fixed assets
Lindung nilai arus kas	305.277	-	(324.548)	(19.271)	Cash flow hedges
Goodwill atas transaksi penggabungan usaha	992.605	(150.775)	-	841.830	Goodwill from merger transaction
Jumlah aset pajak tangguhan	21.863.382	(15.939.367)	(314.033)	5.609.982	Total deferred tax assets

Berdasarkan PMK No.81/PMK.03/2009, untuk perhitungan aset pajak tangguhan atas penyisihan penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar nihil.

Perusahaan mencatat akumulasi rugi fiskal sebesar Rp 57.310.501 ribu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 (31 Desember 2021: Rp 114.334.489 ribu). Rugi fiskal ini telah dicatat namun manajemen yakin diperlukan penyisihan sehubungan dengan sifat ketidakpastian estimasinya terutama berkaitan dengan peraturan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah perpajakan dalam 5 (lima) tahun sejak pajak tersebut terhutang. Secara konservatif, manajemen menghindari pengakuan pendapatan pajak tangguhan yang berasal dari rugi fiskal lebih awal sehingga aset pajak tangguhan belum diakui.

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan di atas dapat dipulihkan dengan penghasilan kena pajak Perusahaan di masa mendatang.

c. Surat Ketetapan Pajak

Pajak Penghasilan 2014

Pada tanggal 28 Februari 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak atas kekurangan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 8.711.947 ribu setelah dikompensasi dengan jumlah kurang bayar yang disetujui sebesar Rp 237.584 ribu untuk tahun pajak 2014. Pada tanggal 8 Mei 2019, Perusahaan telah membayar seluruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut.

Pada tanggal 27 Mei 2019, Perusahaan mengajukan keberatan dengan surat No. 183/VMF-ACC/XVII/V/19 atas Surat Ketetapan Pajak No. 00006/206/14/054/19 tertanggal 28 Februari 2019 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014.

Pada tanggal 16 Maret 2020, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-01370/KEB/WPJ.07/2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas kekurangan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 8.949.531 ribu untuk tahun pajak 2014.

Based on PMK No.81/PMK.03/2009, the calculation of deferred tax assets for the allowance for impairment of consumer financing receivables and leases as of December 31, 2022 is nil.

The Company has accumulated tax loss carry forward for the year ended December 31, 2022 amounted Rp 57,310,501 thousand (December 31, 2021: Rp 114,334,489 thousand). These tax losses have been carried forward however management believes valuation allowance should be provided considering its nature of estimate uncertainty especially under the prevailing regulation, the Directorate General of Tax may assess or amend taxes within 5 (five) years of the time the tax becomes due. Conservatively, the management avoid to recognize deferred tax income from carry forward tax loss earlier and hence deferred tax assets have not been recognized.

Management believes that deferred tax assets are recoverable against the Company's future taxable income.

c. Surat Ketetapan Pajak

Income Tax 2014

On February 28, 2019, the Company received the Tax Assessment Letter from the Directorate General of Taxation for the underpayment of income tax amounting to Rp 8,711,947 thousand after being compensated for the agreed underpayment amounted to Rp 237,584 thousand for the tax year 2014. On May 8, 2019, the Company paid all of the Underpayment Tax Assessment Letter.

On May 27, 2019, the Company filed objection letter No. 183/VMF-ACC/ XVII/V/19 on Tax Assessment Letter No. 00006/206/14/054/19 dated February 28, 2019 regarding the Tax Assessment Letter for Underpayment of Corporate Income for the tax year 2014.

On Maret 16, 2020, the Company received the Tax Assessment Letter from the Directorate General of Taxation No. KEP-01370 / KEB / WPJ.07 / 2020 concerning Taxpayer Objection for the underpayment of income tax amounted to Rp 8,949,531 thousand for the tax year 2014.

Pada tanggal 15 Juni 2020, Perusahaan mengajukan Permohonan Banding dengan surat No. 093/VMCF-ACC/XVII/VI/20 atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01370/KEB/WPJ.07/2020 tertanggal 16 Maret 2020 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan No. 00006/206/14/054/19 tertanggal 28 Februari 2019 Tahun Pajak 2014.

Pajak Penghasilan 2015

Pada tanggal 13 November 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak atas kekurangan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 13.488.980 ribu untuk tahun pajak 2015.

Pada tanggal 4 Februari 2020, Perusahaan telah membayar seluruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas pajak penghasilan untuk Tahun Pajak 2015 sebesar Rp 13.488.980 ribu.

Pada tanggal 7 Februari 2020, Perusahaan mengajukan keberatan dengan Surat No. 024/VMF-ACC/XVIII/II/20 atas Surat Ketetapan Pajak No. 00009/206/15/054/19 tertanggal 13 November 2019 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Penghasilan Badan Tahun Pajak 2015.

Pada tanggal 5 Mei 2021, Perusahaan Melakukan Permohonan Banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00545/KEB/WPJ.07/2021 pada tanggal 11 Februari 2021 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan No. 00009/206/15/054/19 tertanggal 13 November 2019 untuk tahun Pajak 2015.

Pajak Penghasilan 2018

Pada tanggal 6 Juli 2020, Perusahaan mengajukan keberatan dengan Surat No. 108/VMF-ACC/XVIII/VII/20 mengenai Surat keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak yang menolak seluruh Keberatan Perusahaan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan untuk tahun pajak 2018 senilai Rp 873.019 ribu.

Pada tanggal 6 Juli 2021, Perusahaan menerima Surat Keputusan tentang Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dengan No surat KEP-02019/KEB/WPJ.07/2021 yang memutuskan mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dalam suratnya nomor 108/VMF-ACC/XVIII/VII/20 pada tanggal 6 Juli 2020 dan mempertahankan jumlah pajak yang lebih dibayar dalam SKPLB Pajak Penghasilan nomor 00037/406/18/054/20 pada tanggal 8 April 2020 untuk Tahun Pajak 2018.

On June 15, 2020, the Company filed Appeal Letter No. 093 / VMCF-ACC / XVII / VI / 20 on the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-01370/ KEB / WPJ.07 / 2020 dated March 16, 2020 regarding the Appeal Applicant's Objection to the Tax Underpayment Assessment Letter No. 00006/206/14/054/19 dated February 28, 2019 for Tax Year 2014.

Income Tax 2015

On November 13, 2019, the Company received the Tax Assessment Letter from the Directorate General of Taxation for the underpayment of income tax amounted to Rp 13,488,980 thousand for the tax year 2015.

As of February 4, 2020, the Company paid all of the Underpayment Tax Assessment Letter of income tax for the Tax Year 2015 amounted to Rp 13,488,980 thousand.

On February 7, 2020, the Company filed objection Letter No. 024/VMF-ACC/XVIII/II/20 on Tax Assessment Letter No. 00009/206/15/054/19 dated November 13, 2019 regarding the Tax Assessment Letter for Underpayment of Corporate Income for the Tax Year 2015.

On May 5, 2021, the Company filed an appeal against the Decision Letter of the Director General of Taxes Number KEP-00545/KEB/WPJ.07/2021 on February 11, 2021 concerning Objection to the Underpayment of Corporate Income Tax Assessment Letter No. 00009/206/15/054/19 on November 13, 2019 for the tax year 2015.

Income Tax 2018

On July 6, 2020, the Company filed objection Letter No. 108/VMF-ACC/XVIII/VII/20 related to Decision Letter from Directorate General of Taxation, that rejected all the Company's objection to an assessment letter on tax underpayment of Income period for the tax year 2018 amounting to Rp 873,019 thousand.

On July 6, 2021, the Company received a Decision Letter regarding the Tax Assessment Letter Overpayment (SKPLB) with letter No. KEP-02019/KEB/WPJ.07/2021 which decided to accept part of the Taxpayer's objection in its letter number 108/VMF-ACC/XVIII /VII/20 on July 6, 2020 and maintain the amount of overpaid tax in the Income Tax SKPLB number 00037/406/18/054/20 on April 8, 2020 for the Fiscal Year 2018.

Pada tanggal 6 September 2021, Perusahaan Membuat Surat Permohonan Banding dengan Surat No.102/VMF-ACCT/XIX/IX/21 atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan No. 00037/406/18/054/20 tanggal 8 April 2020 untuk tahun Pajak 2018.

On September 6, 2021, the Company made an appeal letter with letter no. letter No.102/VMF-ACCT/XIX/IX/21 on the Assessment Letter Tax Overpaid Corporate Income Tax No. 00037/406/18/054/20 on April 8, 2020 for the Fiscal year 2018.

Pada tanggal 28 Februari 2022 Perusahaan Menerima Permintaan Surat Bantahan atas Surat Uraian Banding yang diajukan dari Pengadilan Pajak dengan Surat No. B-009579.15.2021/PAN.Wk/2021 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2018.

On February 28, 2022 the Company Received a Request for a Letter of Rebuttal for the Letter of the Appeal submitted from the Tax Court with Letter No. B-009579.15.2021/PAN.Wk/2021 for the 2018 Corporate Income Tax Underpayment Assessment Letter.

Pada tanggal 11 Maret 2022 Perusahaan Membuat Surat Bantahan atas Permintaan Surat Uraian Banding yang diterima dari Pengadilan Pajak dengan Surat No. 080/VMF-ACC/XX/III/22 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2018.

On March 11, 2022 the Company made a Rebuttal Letter on the Request for Letter of Appeal received from the Tax Court with Letter No. 080/VMF-ACC/XX/III/22 for the 2018 Corporate Income Tax Underpayment Assessment Letter.

Pajak Pertambahan Nilai 2018

Value Added Tax 2018

Pada tanggal 12 Maret 2020, Perusahaan menerima Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan surat No.SPHP-00083/WPJ.07/KP.0805/RIK.SIS/2020. untuk Tahun Pajak 2018 atas Kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 25.103.607 ribu.

On March 12, 2020, the Company received an Audit Result Notification with letter No. SPHP-00083/ WPJ.07 / KP.0805 / RIK.SIS / 2020. for the Tax Year 2018 on the Underpayment of Value Added Tax of amounted to Rp 25,103,607 thousand.

Pada tanggal 9 Juni 2020, Perusahaan membayarkan penalti atas Kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 3.084.886 dan di tanggal 25 Juni 2020, perusahaan membayarkan Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Januari – Desember 2018 senilai Rp 22.018.721 ribu untuk masa Tahun Pajak 2018.

On June 9, 2020, the Company paid a penalty for the Value Added Tax underpayment of Rp 3,084,886 and on June 25, 2020, the company paid underpayment of Value Added Tax for Goods and Services for the Period of January - December 2018 amounting to Rp 22,018,721 thousand for the Tax Year 2018.

Pada tanggal 6 Juli 2020, Perusahaan mengajukan keberatan dengan Surat No. 096/VMF-ACC/XVIII/VII/20 – 107/VMF-ACC/XVIII/VII/20 mengenai Surat keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak yang menolak seluruh Keberatan Perusahaan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari – Desember 2018 senilai Rp 22.018.721 ribu.

On July 6, 2020, the Company filed objection Letter No.096/VMF-ACC/XVIII/VII/20 – 107/VMF ACC/XVIII/VII/20 related to Decision Letter from Directorate General of Taxation, that rejected all the Company's objection to an assessment letter on tax underpayment of Value Added Tax on Goods and Services Tax Period January-December 2018 amounted to Rp 22,018,721 thousand.

Pada tanggal 14 Juni 2021, Perusahaan menerima Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-01609–01621/KEB/WPJ.07/2021 dan Nomor KEP-01671–01674/KEB/WPJ.07/2021 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa untuk Masa Pajak Januari – Desember 2018.

On June 14, 2021, the Company received the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-01609–01621/KEB/WPJ.07/2021 and Number KEP-01671–01674/KEB/WPJ.07/2021 concerning Tax Assessment Letter of Underpayment of Added Tax Value of Goods and Services for the Tax Period January – December 2018.

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

Pada tanggal 6 September 2021, Perusahaan Membuat Surat Permohonan Banding dengan Surat No. 090-101/VMF-ACC/XIX/IX/21 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa untuk Masa Pajak Januari – Desember 2018.

On September 6, 2021, the Company made an appeal letter with letter no. 090-101/VMF-ACC/XIX/IX/21 on the Tax Assessment Letter of Underpayment of Value Added Tax on Goods and Services for the Tax Period January – December 2018.

Pada tanggal 12 Oktober 2021, 28 Oktober 2021 dan 23 November 2021 Perusahaan Menerima Surat dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak atas Banding yang diajukan dengan Surat No. S2469-2471.SUB/WPJ.07/2021, Surat No. S2475.SUB/WPJ.07/2021, Surat No. S2616-2619.SUB/WPJ.07/2021, Surat No. S2820-2822.SUB/WPJ.07/2021 dan Surat No. S2828.SUB/WPJ.07/2021 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa untuk Masa Pajak Januari – Desember 2018.

On October 12, 2021, October 28, 2021 and November 23, 2021, the Company received a letter from the Ministry of Finance of the Directorate General of Taxes regarding the appeal filed with Letter No. S2469-2471.SUB/WPJ.07/2021, Letter No. S2475.SUB/WPJ.07/2021, Letter No. S2616-2619.SUB/WPJ.07/2021, Letter No. S2820-2822.SUB/WPJ.07/2021 and Letter No. S2828.SUB/WPJ.07/2021 on the Tax Assessment Letter of Underpayment of Value Added Tax on Goods and Services for the Tax Period January – December 2018.

Pada tanggal 21 Oktober 2021, 03 November 2021 dan 29 November 2021 Perusahaan Menerima Permintaan Surat Bantahan atas Surat Uraian Banding yang diajukan dari Pengadilan Pajak dengan Surat No. B-009580-009591.16.2021/PAN.Wk/2021 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa untuk Masa Pajak Januari – Desember 2018.

On October 21, 2021, November 3, 2021 and November 29, 2021, the Company received a request for a letter of rebuttal on an appeal letter filed from the Tax Court with Letter No. B-009580-009591.16.2021/PAN.Wk/2021 on the Tax Assessment Letter of Underpayment of Value Added Tax on Goods and Services for the Tax Period January – December 2018.

Pada tanggal 24 November 2021 dan 27 Desember 2021 Perusahaan Membuat Surat Bantahan atas permintaan Surat bantahan Uraian banding yang diterima dari Pengadilan Pajak dengan Surat No. 120-127/VMF-ACC/XIX/XI/21 dan Surat No. 130-133/VMF-ACC/XIX/XII/21 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa untuk Masa Pajak Januari – Desember 2018.

On November 24, 2021 and December 27, 2021, the Company made a rebuttal letter on the request. 120-127/VMF-ACC/XIX/XI/21 and Letter No. 130-133/VMF-ACC/XIX/XII/21 on the Tax Assessment Letter of Underpayment of Value Added Tax on Goods and Services for the Tax Period January – December 2018.

20. LIABILITAS SEWA

20. LEASE LIABILITIES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
	Rp'000	Rp'000	
Masa jatuh tempo (dalam tahun):			Maturity date (in years):
1 tahun	3.642.221	4.950.271	1 year
Lebih dari 1 tahun	<u>25.900.206</u>	<u>-</u>	More than 1 years
Jumlah	<u>29.542.427</u>	<u>4.950.271</u>	Total

Jumlah biaya bunga yang dibebankan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 779.578 ribu (31 Desember 2021: Rp 410.636 ribu) (Catatan 29).

Interest expense changed for the year ended December 31, 2022 is amounted Rp 779,578 thousand (December 31, 2021: Rp 410,636 thousand) (Note 29).

21. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan menghitung imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut pada tanggal 31 Desember 2022 adalah 500 karyawan (2021: 469 karyawan).

Liabilitas imbalan pasca kerja imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

Risiko tingkat bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko harapan hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Rekonsiliasi antara saldo awal dan saldo akhir dari liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal	11.693.250	10.051.681	Beginning balance
Biaya jasa lalu/kerugian kuartilmen	(96.949)	-	Past services cost/curtailment loss
Beban jasa kini	3.856.068	4.959.322	Current service cost
Beban bunga	888.687	743.825	Interest cost
Kerugian aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain:			Actuarial loss recognized
Dampak perubahan asumsi keuangan	27.925	47.797	in other comprehensive income:
Pembayaran manfaat	(3.960.063)	(4.109.375)	Effect on change in financial assumption
	<u>12.408.918</u>	<u>11.693.250</u>	Benefits paid
Saldo akhir	<u>12.408.918</u>	<u>11.693.250</u>	Ending balance

21. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION

The Company calculates defined post-employment benefits for its employees in accordance with Labor Law No. 13/2003. The number of employees entitled to the benefits as of December 31, 2022 are 500 employees (2021: 469 employees).

The defined employment benefit liabilities plan typically expose the Company to actuarial risks such as interest rate risk, longevity risk and salary risk.

Interest risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Longevity risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants both during and after their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Reconciliation between beginning and ending balance of post-employment benefits liabilities are as follows:

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

Rincian beban imbalan pascakerja yang diakui di dalam laba rugi selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The details of post-employment benefits expenses recognized in profit or loss for the year are as follows:

	2022 Rp'000	2021 Rp'000	
Beban jasa kini	3.856.068	4.959.322	Current service cost
Biaya jasa lalu/kerugian kurtailmen	(96.949)	-	Past services cost/curtailment loss
Beban bunga	888.687	743.825	Interest cost
Subjumlah	4.647.806	5.703.147	Sub-total
Kerugian aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	27.925	-	Actuarial loss recognized in other comprehensive income
Jumlah	4.675.731	5.703.147	Total

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 analisis sensitivitas dari perubahan tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diasumsikan (dimana variabel lain dianggap konstan) akan memiliki dampak sebagai berikut:

As of December 31, 2022 and 2021, the sensitivity analysis of change in the assumed discount and salary rate (which other variables held constant) would have the following effects:

31 Desember 2022/December 31, 2022				
	Perubahan Asumsi/ Change in Assumption	Kenaikan Asumsi/ Increase in Assumption	Penurunan Asumsi/ Decrease in Assumption	
		Rp'000	Rp'000	
Tingkat diskonto	1%	(9.094.659)	7.888.682	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	7.871.827	(9.115.488)	Salary increase rate
31 Desember 2021/December 31, 2021				
	Perubahan Asumsi/ Change in Assumption	Kenaikan Asumsi/ Increase in Assumption	Penurunan Asumsi/ Decrease in Assumption	
		Rp'000	Rp'000	
Tingkat diskonto	1%	(4.402.345)	5.628.505	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	5.646.719	(4.379.727)	Salary increase rate

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation liability recognised in the statement of financial position.

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

Analisis umur estimasi pembayaran liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Aging analysis of estimated payment of post-employment benefits as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	2022 Rp'000	2021 Rp'000	
Masa jatuh tempo (dalam tahun):			Maturity date (in years):
Kurang dari 1 tahun	329.018	2.497.391	Less than a year
1 - 3 tahun	2.514.749	132.264	1 - 3 years
3 - 5 tahun	3.339.812	5.038.106	3 - 5 years
5 - 10 tahun	15.484.871	9.221.136	5 - 10 years
Lebih dari 10 tahun	238.486.417	226.382.579	Over 10 years
Jumlah	<u>260.154.867</u>	<u>243.271.476</u>	Total

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan mencatat liabilitas imbalan pascakerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh KKA Marcel Pryadarshi Soepeno dahulu PT Konsul Penata Manfaat Sejahtera, aktuaris independen, dimana menggunakan metode aktuarial "Projected Unit Credit" dan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

As of 31 December 2022, the Company accrued post-employment benefits liabilities based on the actuarial calculation prepared by KKA Marcel Pryadarshi Soepeno formerly PT Konsul Penata Manfaat Sejahtera, an independent actuary, which using actuarial "Projected Unit Credit" method and the following main assumptions:

	2022	2021	
Umur pensiun normal	57 tahun/57 years	55 tahun/55 years	Normal pension age
Tingkat diskonto	7,4% per tahun/7.4% per year	7,4% per tahun/7.4% per year	Discount rate
Tingkat kenaikan Gaji	4,0% per tahun/4.0% per year	4,0% per tahun/4.0% per year	Salary increase rate
Tingkat mortalitas	TMI IV/TMI IV	TMI IV/TMI IV	Mortality rate

22. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 berdasarkan laporan yang di susun oleh PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut :

22. CAPITAL STOCK

The details of the Company's shareholders as of December 31, 2022 and 2021 based on the report prepared by PT Raya Saham Registra, Share Registrar, are as follows :

Nama pemegang saham	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase pemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal/ Total paid-up capital stock Rp'000	Name of stockholders
Mizuho Leasing Co., Ltd (dahulu IBJ Leasing Co., Ltd)	3.835.346.804	67,44%	383.534.680	Mizuho Leasing Co., Ltd (formerly IBJ Leasing Co., Ltd)
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.425.482.304	25,06%	142.548.230	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Masyarakat (masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	426.524.889	7,50%	42.652.490	Public (each below 5% ownership)
Jumlah	<u>5.687.353.997</u>	<u>100,00%</u>	<u>568.735.400</u>	Total

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) No. 67 tanggal 30 Agustus 2021 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., bahwa Pemegang Saham setuju, Perusahaan membentuk dana cadangan umum sejumlah Rp 100.000. Pada tanggal 31 Desember 2021, cadangan umum Perusahaan berjumlah Rp 1.200.000.

Based on the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) No. 67 dated August 30, 2021 from Notary Fathiah Helmi, S.H., that the Shareholders agreed, the Company established a general reserve fund of Rp 100,000. As of December 31, 2021, the Company's general reserves amounted to Rp 1,200,000.

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

23. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	<u>Rp'000</u>
Biaya emisi saham sehubungan dengan penawaran umum perdana saham pada tahun 2008	<u>(2.384.634)</u>
Penawaran Umum Terbatas I pada tahun 2017	
Agió saham	18.997.926
Biaya emisi saham	<u>(6.180.220)</u>
Subjumlah	<u>12.817.706</u>
Penawaran Umum Terbatas II pada tahun 2019	
Agió saham	124.087.724
Biaya emisi saham	<u>(3.945.083)</u>
Subjumlah	<u>120.142.641</u>
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (Catatan 1d)	<u>(32.990.607)</u>
Neto	<u>97.585.106</u>

Sehubungan dengan transaksi pengalihan (akuisisi) seluruh saham IBJV (Catatan 1d), Perusahaan telah mencatat selisih nilai restrukturisasi entitas sepengendali dengan rincian sebagai berikut:

Investasi pada IBJV dengan kepemilikan sebelumnya setara 20%	45.329.107
Imbalan tunai yang dialihkan untuk memperoleh 80% kepemilikan IBJV	<u>214.307.032</u>
Jumlah	259.636.139
Jumlah tercatat aset neto IBJV pada tanggal akuisisi	<u>226.645.532</u>
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	<u>32.990.607</u>

Ikhtisar dari jumlah tercatat aset neto IBJV pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

Aset	
Kas dan setara kas	97.172.065
Piutang sewa pembiayaan	1.250.524.595
Aset keuangan lainnya	8.597.505
Liabilitas	<u>(1.129.648.634)</u>
Neto	<u>226.645.531</u>

Selisih di atas mencerminkan manfaat sinergi, perluasan pasar dan pencapaian skala ekonomis yang lebih baik sebagaimana diharapkan timbul dari transaksi pengalihan saham tersebut.

23. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

The details of this account are as follows:

	<u>Rp'000</u>
Share issuance cost in connection with initial public offering in 2008	<u>(2.384.634)</u>
Limited Public Offering I in 2017	
Share premium	18.997.926
Share issuance cost	<u>(6.180.220)</u>
Sub-total	<u>12.817.706</u>
Limited Public Offering II in 2019	
Share premium	124.087.724
Share issuance cost	<u>(3.945.083)</u>
Sub-total	<u>120.142.641</u>
Difference in value of transactions among entities under common control (Notes 1d)	<u>(32.990.607)</u>
Total	<u>97.585.106</u>

In accordance with acquisition of the all shares of IBJV (Note 1d), the Company recognized difference in value of transactions among entities under common control with the detail as follows:

Investment on IBJV with previous ownership equivalent to 20%	45.329.107
Cash consideration that transferred to obtain 80% ownership on IBJV	<u>214.307.032</u>
Total	259.636.139

The carrying amount of net assets of IBJV on acquisition date

Difference in value of transaction among entities under common control

The summary of carrying amount of IBJV net assets on acquisition date are as follows:

Asset	
Cash and cash equivalents	97.172.065
Finance lease receivable	1.250.524.595
Other financial assets	8.597.505
Liabilities	<u>(1.129.648.634)</u>
Net	<u>226.645.531</u>

The above difference reflects the benefit of synergy, market extension and enhanced of economic scale as expected shall be arise from such shares transfer transaction.

24. PENDAPATAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

24. CONSUMER FINANCING INCOME

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
	Rp'000	Rp'000	
Pembiayaan sendiri	<u>224.002.335</u>	<u>189.383.258</u>	Self financing
Jumlah	<u><u>224.002.335</u></u>	<u><u>189.383.258</u></u>	Total

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah amortisasi biaya transaksi yang diakui sebagai pengurang dari pendapatan pembiayaan konsumen adalah sebesar Rp 38.845.812 ribu (31 Desember 2021: Rp 33.824.006 ribu) serta jumlah pendapatan yang diperoleh (digunakan) dari piutang pembiayaan konsumen yang mengalami penurunan nilai adalah sebesar Rp (3.643.933) ribu (31 Desember 2021: Rp (413.306) ribu) (Catatan 6).

As of December 31, 2022, total amortization of transaction costs which are recognized as a deduction of consumer financing revenues amounted to Rp 38,845,812 thousand (December 31, 2021: Rp 33,824,006 thousand), and total consumer financing revenues earned (used) from non-performing consumer financing receivables amounted to Rp (3,643,933) thousand (December 31, 2021: Rp (413,306) thousand) (Note 6).

Pada tahun 2022 dan 2021, tidak terdapat transaksi kepada satu pihak yang jumlahnya melebihi 10% dari pendapatan pembiayaan konsumen.

In 2022 and 2021, there were no transactions made to any single party whose the amount exceeding 10% of the consumer financing revenues.

25. PENDAPATAN SEWA PEMBIAYAAN

25. FINANCE LEASES INCOME

Pendapatan sewa pembiayaan merupakan pendapatan yang diperoleh dari transaksi sewa pembiayaan atas alat-alat berat, peralatan dan mesin-mesin produksi. Pendapatan sewa pembiayaan diperoleh dari piutang sewa pembiayaan yang berasal dari pihak ketiga.

Finance leases income represent income earned from finance lease transactions from heavy equipment, equipment and production machines. Finance leases income arises from third parties.

Pada tahun 2022, pendapatan yang diperoleh (digunakan) dari piutang sewa pembiayaan yang mengalami penurunan nilai sebesar Rp 690 ribu (2021: Rp (121.023) ribu) (Catatan 7).

In 2022, revenue earned (used for) from impaired finance lease receivables amounted to Rp 690 thousand (2021: Rp (121,023) thousand) (Note 7).

Pada tahun 2022 dan 2021, tidak ada transaksi kepada satu pihak yang jumlah pendapatannya melebihi 10% dari pendapatan sewa pembiayaan.

In 2022 and 2021, there were no transactions made to any single party with related income exceeding 10% of finance lease income.

26. PENDAPATAN ADMINISTRASI

26. ADMINISTRATION INCOME

Akun ini merupakan pendapatan yang diterima Perusahaan dari pihak ketiga atas jasa administrasi kepada pelanggan dan pengurusan dokumen-dokumen pelanggan.

Administration income represents income earned by the Company from third parties for administration services to the customers and handling of the customers' documents.

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

27. PENDAPATAN PENALTI

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Rp'000	Rp'000
Pihak ketiga		
Keterlambatan pelunasan angsuran	4.101.551	5.351.843
Pelunasan dipercepat	<u>10.478.641</u>	<u>7.009.776</u>
Jumlah	<u>14.580.192</u>	<u>12.361.619</u>

27. PENALTY INCOME

Third parties
Late charges
Early termination
Total

28. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Merupakan pendapatan yang berasal dari piutang yang tertagih kembali, pendapatan bunga lainnya, pendapatan bunga pinjaman karyawan, keuntungan penjualan aset tetap dan lainnya.

28. OTHER INCOME

Represents income from recovered receivables, other interest income, interest income from employee loan, gain on sales of premises and equipment and others.

29. BEBAN BUNGA DAN PEMBIAYAAN LAINNYA

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Rp'000	Rp'000
Pihak berelasi (Catatan 33)		
Beban bunga utang bank	32.981.977	38.494.772
Beban bunga transaksi swap	4.512.552	163.644
Provisi dan administrasi bank	<u>508.592</u>	<u>589.548</u>
	<u>38.003.121</u>	<u>39.247.964</u>
Pihak ketiga		
Beban bunga utang bank	17.345.101	14.016.755
Beban bunga transaksi swap	518.280	2.109.736
Provisi dan administrasi bank	2.598.492	2.440.831
Beban bunga atas liabilitas sewa	<u>779.578</u>	<u>410.636</u>
	<u>21.241.451</u>	<u>18.977.958</u>
Jumlah	<u>59.244.572</u>	<u>58.225.922</u>

29. INTEREST AND OTHER FINANCING CHARGES

Related Parties (Notes 33)
Interest expenses on bank loans
Interest expenses on swap transaction
Provision fees and bank charges
Third parties
Interest expenses on bank loans
swap transaction
Provision fees and bank charges
Interest expenses on lease liabilities

30. BEBAN KEPEGAWAIAN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Rp'000	Rp'000
Gaji, bonus dan tunjangan	98.313.357	86.369.047
Imbalan pasca-kerja (Catatan 21)	<u>4.647.806</u>	<u>5.703.147</u>
Jumlah	<u>102.961.163</u>	<u>92.072.194</u>

30. PERSONNEL EXPENSES

Salaries, bonuses and allowances
Post-employment benefits (Note 21)
Total

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

31. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
	Rp'000	Rp'000	
Penyusutan (Catatan 10 dan 11)	18.911.428	17.242.166	Depreciation (Notes 10 and 11)
Iklan dan promosi	9.188.707	5.751.088	Advertising and promotion
Honorarium	6.441.267	6.135.884	Honorarium
Perbaikan dan pemeliharaan	5.393.199	3.328.542	Repairs and maintenance
Pajak dan perijinan	5.020.276	4.549.577	Taxes and license
Perjalanan dinas	3.733.454	2.657.996	Business travelling
Komunikasi	3.232.663	2.479.275	Communication
Alat tulis dan perlengkapan kantor	2.281.969	1.305.943	Office supplies and stationaries
Sewa	1.565.475	464.525	Rental
Pendidikan dan pelatihan	1.444.536	1.054.114	Education and training
Keamanan	1.312.456	1.218.165	Security
Jamuan	1.272.230	1.044.453	Representation
Utilitas	879.582	783.963	Utilities
Asuransi	596.646	612.568	Insurance
Lainnya	2.625.551	1.820.269	Others
Jumlah	<u>63.899.439</u>	<u>50.448.528</u>	Total

31. GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES

32. LABA (RUGI) PER SAHAM

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba (rugi) per saham dasar/dilusi:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
	Rp'000	Rp'000	
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	<u>62.045.788</u>	<u>(7.765.922)</u>	Net profit (loss) for the year
Jumlah saham (dalam angka penuh)	<u>Lembar/Share</u>	<u>Lembar/Share</u>	Number of shares (in full amount)
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun berjalan	<u>5.687.353.997</u>	<u>5.687.353.997</u>	Outstanding weighted average number of shares during the year
Laba (rugi) per saham (dalam Rupiah penuh)	<u>10,91</u>	<u>(1,37)</u>	Earnings (loss) per shares (in full Rupiah)

32. EARNINGS (LOSS) PER SHARE

The computation of basic/diluted earnings (loss) per share is based on the following information:

Pada tahun 2022 dan 2021, Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

In 2022 and 2021, the Company's does not have any dilutive ordinary shares.

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

33. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Rincian saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	Jumlah/Total		Persentase terhadap Jumlah Aset (Liabilitas) atau Akun Terkait/ Percentage to Total Assets (Liabilities) or Related Account		
	31 Desember/ December 31, 2022 Rp'000	31 Desember/ December 31, 2021 Rp'000	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Aset					Assets
Bank	34.057.828	15.311.287	2,60%	0,66%	Cash in bank
Piutang lain-lain	497.515	1.013.336	0,02%	0,04%	Other receivables
Biaya dibayar dimuka	11.917	22.917	0,00%	0,00%	Prepaid expenses
Aset lain-lain	558.295	573.920	0,02%	0,02%	Other assets
Jumlah	35.125.555	16.921.460	2,64%	0,72%	Total
Liabilitas					Liabilities
Utang bank	1.137.759.920	1.050.871.419	64,04%	61,89%	Bank loan
Utang lain-lain	7.865.500	14.269.000	0,44%	0,84%	Other payables
Biaya masih harus dibayar	2.182.874	722.366	0,12%	0,04%	Accrued expenses
Jumlah	1.147.808.294	1.065.862.785	64,60%	62,77%	Total
Pendapatan					Revenues
Bunga	107.660	15.797	0,03%	0,01%	Interest
Beban					Expenses
Beban bunga dan pembiayaan lainnya	37.494.529	38.658.416	13,50%	13,12%	Interest and others financing charge
Provisi dan administrasi bank	508.592	589.548	0,18%	0,20%	Provision fees and bank charges
Beban umum dan administrasi	441.651	30.030	0,16%	0,01%	General and administrative expenses
Jumlah	38.444.772	39.277.994	13,84%	13,33%	Total

Ringkasan transaksi dan sifat hubungan antara Perusahaan dan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Summary of transactions and nature of relationships between the Company and related parties were as follows:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat transaksi/ Nature of transactions	Sifat hubungan/ Nature of relationships
Mizuho Leasing Co., Ltd	Uang muka operasional, jaminan dan pemberian pinjaman serta penjualan piutang/ Advances operational, deposits and borrowing and sale of receivable	Pemegang saham pengendali/ Controlling shareholder
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Penempatan dana dalam bentuk giro, biaya dibayar di muka atas sewa gedung, fasilitas kredit utang bank, biaya masih harus dibayar atas bunga dan pembiayaan lainnya/ Placement of fund in the form of current accounts, prepaid expenses of rent building, credit facilities of bank loan, accrued expenses of interest and financing charges	Pemegang saham/Shareholder

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

Pihak-pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat transaksi/ <i>Nature of transactions</i>	Sifat hubungan/ <i>Nature of relationships</i>
PT Bank Mizuho Indonesia	Penempatan dana dalam bentuk giro, fasilitas kredit utang bank, biaya masih harus dibayar atas bunga/ <i>Placement of fund in the form of current accounts, credit facilities of bank loan, accrued expenses of Interest</i>	Pihak berelasi lainnya/ <i>Other related party</i>

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah kompensasi kepada manajemen kunci yang seluruhnya merupakan imbalan kerja jangka pendek adalah sebesar Rp 8.491.888 ribu (31 Desember 2021: Rp 8.310.386 ribu).

As of December 31, 2022, total compensation to the key management which entirely represent short-term employee benefits amounted to Rp 8,491,888 thousand (December 31, 2021: Rp 8,310,386 thousand).

34. SEGMENT OPERASI

Perusahaan bergerak dalam bidang usaha pembiayaan dengan aktivitas utama pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan multiguna.

Organisasi Perusahaan tidak dikelompokkan per masing-masing segmen usaha, informasi segmen yang tersedia untuk pendapatan, beban, aset dan liabilitas Perusahaan dibagi berdasarkan segmen geografis. Perusahaan tidak mempunyai dasar memadai untuk mengalokasikan pendapatan, beban, aset dan liabilitas ke masing-masing segmen usaha. Berikut adalah segmen geografis Perusahaan:

34. OPERATING SEGMENT

The Company is engaged in the business of financial institution with main activities are investment financing, working capital financing and multifunction financing.

The Company's organization is not separately classified into business segments, therefore the available segment information of income, expenses, assets and liabilities are divided by geographical segment. The Company has no adequate basis for allocating income, expenses, assets and liabilities to the respective business segments. The geographical segment information of the Company are as follows:

	2022			
	Jabotabek Rp'000	Luar Jabotabek/ Non-Jabotabek Rp'000	Jumlah/ Total Rp'000	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan segmen				Segment Income
Pembiayaan konsumen	124.888.312	99.114.023	224.002.335	Consumer financing
Sewa pembiayaan	39.060.252	7.292.944	46.353.196	Finance lease
Pendapatan administrasi	17.728.801	14.715.726	32.444.527	Administration income
Jumlah pendapatan segmen	<u>181.677.365</u>	<u>121.122.693</u>	<u>302.800.058</u>	Total segment revenues
Beban segmen				Segment expenses
Bunga dan keuangan	(44.658.511)	(14.586.061)	(59.244.572)	Interest and other financing expense
Rugi penjualan dan penyisihan jaminan yang dikuasakan kembali	(50.609)	-	(50.609)	Loss on sale and provision of foreclosed collateral
Penyisihan kerugian kredit	(34.563.580)	(14.935.937)	(49.499.517)	Provision for credit
Jumlah beban segmen	<u>(79.272.700)</u>	<u>(29.521.998)</u>	<u>(108.794.698)</u>	Total segment expenses
Hasil segmen	102.404.665	91.600.695	194.005.360	Segment income
Pendapatan tidak dapat dialokasikan			30.260.527	Unallocated income
Beban tidak dapat dialokasikan			<u>(168.927.405)</u>	Unallocated expenses
Laba sebelum pajak			55.338.482	Income before tax
Manfaat pajak penghasilan			6.707.306	Income tax benefit
Laba bersih			<u>62.045.788</u>	Net Income
ASET				ASSETS
Aset segmen	1.403.365.073	710.151.510	2.113.516.583	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasikan			<u>353.153.966</u>	Unallocated assets
Jumlah aset			<u>2.466.670.549</u>	Total assets
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segmen	1.700.104.652	13.829.563	1.713.934.215	Segment liabilities
Liabilitas tidak dapat dialokasikan			<u>62.838.641</u>	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas			<u>1.776.772.856</u>	Total liabilities

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

	2021			
	Jabotabek Rp'000	Luar Jabotabek/ Non-Jabotabek Rp'000	Jumlah/ Total Rp'000	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan segmen				Segment Income
Pembiayaan konsumen	107.757.900	81.625.358	189.383.258	Consumer financing
Sewa pembiayaan	55.968.147	8.905.883	64.874.030	Finance lease
Pendapatan administrasi	16.029.913	13.423.793	29.453.706	Administration income
Jumlah pendapatan segmen	<u>179.755.960</u>	<u>103.955.034</u>	<u>283.710.994</u>	Total segment revenues
Beban segmen				Segment expenses
Beban bunga dan keuangan lainnya	42.905.950	15.319.972	58.225.922	Interest and financing expense
Rugi penjualan dan penyisihan jaminan yang dikuasakan kembali	186.904	347.419	534.323	Loss on sale and provision of foreclosed collateral
Penyisihan kerugian kredit	<u>56.233.874</u>	<u>36.616.261</u>	<u>92.850.135</u>	Provision for credit
Jumlah beban segmen	<u>99.326.728</u>	<u>52.283.652</u>	<u>151.610.380</u>	Total segment expenses
Hasil segmen	80.429.232	51.671.382	132.100.614	Segment income
Pendapatan tidak dapat dialokasikan			19.183.733	Unallocated income
Beban tidak dapat dialokasikan			<u>(143.110.902)</u>	Unallocated expenses
Laba sebelum pajak			8.173.445	Income before tax
Beban pajak penghasilan			<u>(15.939.367)</u>	Income tax expense
Rugi bersih			<u>(7.765.922)</u>	Net loss
ASET				ASSETS
Aset segmen	1.493.933.711	536.129.878	2.030.063.589	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasikan			<u>293.090.619</u>	Unallocated assets
Jumlah aset			<u>2.323.154.208</u>	Total assets
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segmen	1.548.695.321	15.086.030	1.563.781.351	Segment liabilities
Liabilitas tidak dapat dialokasikan			<u>134.128.159</u>	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas			<u>1.697.909.510</u>	Total liabilities

35. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Kecuali untuk yang disebutkan dalam tabel di bawah ini, manajemen menilai bahwa nilai tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan mendekati dengan nilai wajarnya:

35. FAIR VALUE MEASUREMENTS

Except as detailed in the following table, the management considers that the carrying amount of financial assets and financial liabilities approximate their fair values:

	2022		2021		
	Nilai tercatat/ Carrying amount Rp'000	Nilai wajar/ Fair value Rp'000	Nilai tercatat/ Carrying amount Rp'000	Nilai wajar/ Fair value Rp'000	
	Aset Keuangan				
Biaya perolehan diamortisasi					Amortized cost
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	1.438.260.924	1.575.649.571	1.193.675.816	1.240.590.737	Consumer financing receivables - net
Piutang sewa pembiayaan - bersih	674.828.310	713.545.627	835.778.272	856.530.982	Finance lease receivables - net
Piutang lain-lain - bersih	79.059.329	87.149.754	91.741.390	94.820.407	Other accounts receivable - net
Aset derivatif	<u>17.532.167</u>	<u>17.532.167</u>	<u>187.849</u>	<u>187.849</u>	Derivative assets
Jumlah	<u>2.209.680.730</u>	<u>2.393.877.119</u>	<u>2.121.383.327</u>	<u>2.192.129.975</u>	Total
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Biaya perolehan diamortisasi					Amortized cost
Utang bank	1.661.377.617	1.654.490.565	1.614.549.645	1.605.952.997	Bank loans
Liabilitas derivatif	-	-	179.534	179.534	Derivative liabilities
Jumlah	<u>1.661.377.617</u>	<u>1.654.490.565</u>	<u>1.614.729.179</u>	<u>1.606.132.531</u>	Total

Teknik penilaian dan asumsi yang diterapkan untuk tujuan pengukuran nilai wajar

- Manajemen menganggap bahwa nilai tercatat kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar mendekati nilai tercatatnya karena memiliki sifat jangka pendek dan atau sering dilaksanakan *re-pricing*.
- Estimasi nilai wajar piutang pembiayaan konsumen – bersih dan piutang sewa pembiayaan – bersih dengan suku bunga tetap tanpa kuota. Nilai wajar ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan menggunakan suku bunga untuk piutang baru dengan jangka waktu yang serupa.
- Estimasi nilai wajar dari utang bank dengan bunga tetap tanpa kuota. Nilai wajar didasarkan pada diskonto arus kas menggunakan suku bunga untuk utang baru dengan jangka waktu yang serupa.

Hirarki pengukuran nilai wajar atas aset dan liabilitas Perusahaan

Tabel berikut ini merangkum nilai wajar aset dan liabilitas, yang dianalisis nilai wajarnya berdasarkan pada:

Pengukuran nilai wajar level 1 adalah yang berasal dari harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik; yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran;

Pengukuran nilai wajar level 2 adalah yang berasal dari input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga); dan

Pengukuran nilai wajar level 3 adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Valuation techniques and assumptions applied for the purposes of measuring fair value

- Management considers that the carrying amount of cash and cash equivalents, restricted cash, other accounts receivables, trade accounts payable, other accounts payable and accrued expenses approximate their carrying value because of short term maturities, and/or related instrument are repriced frequently.
- The estimated fair value of consumer financing receivables – net and finance lease receivables – net with fixed interest rate where quoted market prices are not available. The fair value is determined by discounting the estimated future cash flows using a current yield curve appropriate for similar term of the receivables.
- The estimated fair value of bank loans with fixed interest rate where quoted market prices are not available. The fair value is determined by discounting the estimated future cash flows using a current yield curve appropriate for similar term of bank loans.

Fair value measurement hierarchy of the Company's assets and liabilities

The following tables summarize the fair values of the assets and liabilities, analyzed among those whose fair value is based on:

Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date;

Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and

Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

		2022					
		Level 1	Level 2	Level 3	Jumlah/ Total		
		Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000		
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan						Assets for which fair value are disclosed	
Aset keuangan						Financial assets	
	Piutang pembiayaan konsumen - bersih	-	-	1.575.649.571	1.575.649.571	Consumer financing receivables - net	
	Piutang sewa pembiayaan - bersih	-	-	713.545.627	713.545.627	Finance lease receivables - net	
	Piutang lain-lain - bersih	-	-	87.149.754	87.149.754	Other accounts receivable - net	
	Aset derivatif	-	17.532.167	-	17.532.167	Derivative assets	
	Jumlah Aset	-	17.532.167	2.376.344.952	2.393.877.119	Total Assets	
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan						Liabilities for which fair values are disclosed	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities	
	Utang bank	-	-	1.654.490.565	1.654.490.565	Bank loans	
	Jumlah Liabilitas	-	-	1.654.490.565	1.654.490.565	Total Liabilities	
		2021					
		Level 1	Level 2	Level 3	Jumlah/ Total		
		Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000		
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan						Assets for which fair value are disclosed	
Aset keuangan						Financial assets	
	Piutang pembiayaan konsumen - bersih	-	-	1.240.590.737	1.240.590.737	Consumer financing receivables - net	
	Piutang sewa pembiayaan - bersih	-	-	856.530.982	856.530.982	Finance lease receivables - net	
	Piutang lain-lain - bersih	-	-	94.820.407	94.820.407	Other accounts receivable - net	
	Aset derivatif	-	187.849	-	187.849	Derivative assets	
	Jumlah Aset	-	187.849	2.191.942.126	2.192.129.975	Total Assets	
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan						Liabilities for which fair values are disclosed	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities	
	Utang bank	-	-	1.605.952.997	1.605.952.997	Bank loans	
	Liabilitas derivatif	-	179.534	-	179.534	Derivative liabilities	
	Jumlah Liabilitas	-	179.534	1.605.952.997	1.606.132.531	Total Liabilities	

Pada tahun 2022 dan 2021, tidak terdapat perpindahan metode pengukuran nilai wajar dari Level 1 menjadi Level 2, dan sebaliknya.

In 2022 and 2021, there is no transfer in the measurement method of fair value from Level 1 to Level 2, and vice versa.

36. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN

Pada tanggal 29 Juni 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian penyelesaian dan jual beli piutang dengan PT KDB Tifa Finance Tbk (Sebelumnya PT Tifa Finance Tbk), dimana diterangkan terlebih dahulu bahwa PT KDB Tifa Finance Tbk telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT Sri Rezeki Isman Tbk (PT SRI) dengan akad Ijarah Muntahia Bittamlik (Akad Sewa Guna Usaha) No. SJSIS20100003/02 tanggal 3 November 2020 yang dituangkan ke dalam Akta No. 2 yang di buat dihadapan Felix johansyah, S.H., Notaris dan PPAT di Surakarta ("Perjanjian IMBT"), dan kemudian bahwa PT SRI sedang dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang ("PKPU") berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg., tanggal 6 Mei 2021, sehubungan dengan hal-hal tersebut PT KDB Tifa Finance Tbk bermaksud untuk menjual seluruh Piutang tersebut kepada Perusahaan dengan Piutang IMBT dengan harga sebesar Rp 46.280.295.878, dimana pembayaran harga jual beli piutang dilakukan dengan mempertemukan (kompensasi) kewajiban PT KDB Tifa Finance kepada Perusahaan.

36. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND AGREEMENTS

On June 29, 2021, the Company signed a settlement and sale and purchase agreement of receivables with PT KDB Tifa Finance Tbk (Formerly PT Tifa Finance Tbk), in which it was explained in advance that PT KDB Tifa Finance Tbk had provided financing facilities to PT Sri Rezeki Isman Tbk (PT SRI) under an agreement Ijarah Muntahia Bittamlik (Lease Agreement) No. SJSIS20100003/02 dated November 3, 2020 as stated in the Deed No. 2 which drawn up before Felix johansyah, SH, Notary and Land Deed Official in Surakarta (the "IMBT Agreement"), and whereas PT SRI is in the process of postponing its obligations to pay debts ("PKPU") based on the Decision of the Commercial Court at the Semarang District Court Number 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg., dated May 6, 2021, in connection with these matters PT KDB Tifa Finance Tbk intends to sell all of the Receivables to the Company with the value of the IMBT Receivables of Rp 46,280,295,878, where the payment of the sale and purchase price of receivables is carried out by meeting (compensation) the obligations of PT KDB Tifa Finance to the Company.

Pada tanggal 16 Desember 2021, Perusahaan dan KDB Tifa Finance Tbk telah menandatangani perjanjian pembiayaan bersama untuk membiayai piutang sewa pembiayaan dengan porsi masing-masing sebesar 50% dari jumlah pembiayaan dengan jangka waktu 36 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah piutang pembiayaan tersebut sebesar Rp 13.044.824 ribu (Catatan 7).

On December 16, 2021, the Company and KDB Tifa Finance Tbk have entered into a joint finance agreement to finance lease receivables with a portion for each 50% of the total financing with a term of 36 months. As of December 31, 2022, the outstanding finance receivables are Rp 13,044,824 thousand (Note 7).

37. MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan memiliki eksposur terhadap risiko-risiko sebagai berikut:

- Risiko operasional
- Risiko pasar
- Risiko likuiditas
- Risiko kredit

Kerangka Manajemen Risiko

Kebijakan manajemen risiko Perusahaan disusun untuk memenuhi perkembangan yang pesat dalam industri jasa pembiayaan. Kebijakan manajemen risiko Perusahaan konsisten dengan Mizuho Leasing Co., Ltd sebagai induk perusahaan (*parent company*) yang bergerak dalam bidang jasa pembiayaan.

Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kegiatan pembiayaan yang sehat dan berlandaskan tata kelola yang baik membutuhkan penerapan manajemen risiko yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Dalam penerapannya Perusahaan menyadari bahwa peran aktif Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Senior Manajemen sangat menentukan efektivitas penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko yang baik dapat mendukung kinerja dari perusahaan pembiayaan, maka manajemen risiko menjadi elemen pendukung penting bagi Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Sasaran dan tujuan utama dari diterapkannya manajemen risiko di Perusahaan adalah untuk menjaga dan melindungi Perusahaan melalui pengelolaan risiko atas kemungkinan kerugian yang timbul dari aktivitas Perusahaan serta menjaga tingkat risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

Kebijakan manajemen risiko merupakan salah satu upaya manajemen Perusahaan untuk menjamin adanya landasan yang kuat bagi pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan sehingga kegiatan usaha dapat berjalan dalam batas risiko yang terukur untuk mencapai target peningkatan *shareholder value*.

37. RISK MANAGEMENT

The Company has exposure to the following risks are as follows:

- Operational risk
- Market risk
- Liquidity risk
- Credit risk

Risk Management Framework

The Company's risk management policy designed to address the rapid growth in the financing services industry. Company's risk management policy is consistent with Mizuho Leasing Co., Ltd as the holding company (parent company) which is engaged in Financing services.

The Company realizes that the sound management of financial activities and sound corporate governance grounded in efficient management principles requires the application of risk management including the process of identification, measurement, monitoring and control of risk. In applying this risk management, the Company recognizes that the active role of the Board of Commissioners, Directors and Senior Management strongly determines the effectiveness of implementation the risk management. The implementation of good risk management can support the performance of the financing company, thus risk management is an important supporting element for the Company to operate the business. The target and main purpose of the implementation of the risk management in the Company is to guard and protect the Company through the risk management of possible losses that might arise from Company activities and to maintain the level of risk to comply with Company's policies.

The risk management policy is one of the Company's management efforts to ensure a strong foundation for the implementation of operational activities so that operations can be conducted within measurable limits of risk to achieve the target of increasing shareholder value.

Tujuan penerapan kebijakan manajemen risiko adalah:

- Untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis dan kegiatan pendukung Perusahaan telah memperhitungkan seluruh potensi risiko yang mungkin timbul.
- Untuk melakukan fungsi kontrol dan pengelolaan terhadap seluruh risiko yang melekat pada aktivitas bisnis dalam batas-batas toleransi risiko Perusahaan yang telah ditetapkan.
- Untuk mengoptimalkan penggunaan modal Perusahaan.
- Untuk memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan yang relevan, dari Otoritas Jasa keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan otoritas lain.
- Untuk meningkatkan *shareholder value* dalam jangka panjang.

Strategi untuk mendukung sasaran dan tujuan dari manajemen risiko diwujudkan dengan pembentukan dan pengembangan budaya risiko yang kuat, penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik, pelestarian nilai-nilai kepatuhan terhadap regulasi, infrastruktur yang memadai, serta proses kerja yang terstruktur dan sehat. Budaya risiko yang kuat ini diciptakan dengan membangun kesadaran risiko yang kuat dimulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai kepada seluruh karyawan Perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik disosialisasikan dan dikembangkan secara menyeluruh pada semua komponen dan aktivitas Perusahaan untuk memastikan bahwa dilaksanakan dengan tanpa kompromi.

Sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, manajemen Perusahaan memiliki komitmen penuh untuk menerapkan manajemen risiko secara komprehensif yang secara esensi mencakup kecukupan kebijakan, prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Perusahaan tetap dapat terarah dan terkendali pada batasan risiko yang dapat diterima, serta tetap menguntungkan Perusahaan. Departemen Manajemen Risiko yang berperan secara aktif dalam mengkoordinasikan tindakan-tindakan pencegahan, proaktif dan responsive dengan seluruh karyawan dari berbagai tingkatan yang ada di dalam Perusahaan untuk mendukung penerapan manajemen risiko ini, karena semua bagian di dalam Perusahaan masing-masing akan memainkan peranan penting.

The objectives of the risk management are:

- To ensure that all business and support activities in the Company's operations have taken into consideration all potential risks that may arise.
- To perform the function of supervision and management of all risks inherent in the Company's business activities within the specified risk tolerance limits.
- To optimize the use of the Company's capital.
- To ensure compliance with all relevant regulations, including regulations of Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, the Ministry of Finance and other authorities.
- To increase shareholder value over in the long run.

Strategies to support the goals and objectives of risk management is developed through the formation and development of a strong risk culture, the implementation of good corporate governance practices, preserving the values of compliance with regulations, adequate infrastructure, as well as structured and healthy working processes. This strong risk culture is created by building a strong awareness of risk starting from the Board of Commissioners, Board of Directors and to the entire employees of the Company. Good corporate governance is socialized and developed thoroughly in all components and activities within the Company to ensure that they are being implemented without compromise.

As the Company engages in financing activities, the Company's Management is fully committed to implement comprehensive risk management, which essentially covers the adequacy of policies, procedures and methodology of risks management; hence, the Company's business activities could remain to be directed and controlled at an acceptable risk limit, at the same time the Company can still be profitable. Risk Management Department is playing an active role in coordinating preventive, proactive and responsive actions with all employees from various levels within the Company in order to support the implementation of risk management, because all divisions of the Company will play their respective important roles.

Dalam penerapan manajemen risiko, Perusahaan menyadari pentingnya untuk memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi oleh Perusahaan. Perusahaan memiliki mekanisme yang bertumpu pada 4 (empat) pilar manajemen risiko, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Pilar 1: Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif tersebut tercermin sejak perencanaan bisnis tahunan, yang mencakup:

- Menyetujui dan melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala;
- Melakukan evaluasi dan menyetujui aktivitas yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris atau Direksi;
- Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk penetapan otoritas dalam pemberian batasan serta tinjauan atas kualitas portofolio secara berkala;
- Terdapatnya Komite Audit dan Pemantau Risiko sebagai organ Dewan Komisaris dan Komite Manajemen Risiko sebagai organ Direksi dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

Pilar 2: Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Batasan

Perusahaan menyusun kebijakan-kebijakan terkait manajemen risiko yang diperiksa secara berkala dan selalu disesuaikan dengan keadaan usaha terkini. Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam Standar Operasional Prosedur dan Memo Internal yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Perusahaan juga memiliki kebijakan-kebijakan mengenai batasan persetujuan/otorisasi untuk transaksi kredit maupun yang bukan transaksi kredit.

Pilar 3: Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko di Perusahaan yang digunakan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Departemen Manajemen Risiko adalah pihak yang berfungsi memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah risiko.

In the application of risk management, the Company realizes the importance of having an adequate mechanism to accommodate the risks faced by the Company. The Company has a mechanism that rests on five (5) risk management pillars, which can be described as follows:

Pillar 1: Active Supervision by Board of Commissioners and Directors

Active supervision is reflected starting from the annual business planning, which includes:

- Approving and evaluating risk management policies periodically;
- Evaluating and approving actions that require the approval of the Board of Commissioners or Board of Directors;
- Establishing risk management policies and strategies, including establishment of authority in setting limits and evaluation of the quality of the portfolio on a regular basis;
- The existence of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee as an organ of the Board of Commissioners and Risk Management Committee as organ of the Board of Directors in carrying out its oversight responsibilities;

Pillar 2: Adequacy of Policy, Procedure and Application of Limits Determination

The Company formulates policies related to risk management which are checked regularly and continually adapted to current business conditions. The policies are translated into the Standard Operating Procedures and Internal Memos which are distributed to all employees. The Company also has policies regarding restrictions approval/authorization limits for credit transactions and non-credit transactions.

Pillar 3: Adequacy of Identification Process, Assessment, Monitoring and Risks Control

The processes of identification, assessment, monitoring and risks control are the main components of the process of risks management implementation in the company which is used to analyze resources and potential risks along with the impacts. Risk Management Department is a division responsible to analyze the level, trend, and course of the risk.

Perusahaan memiliki perangkat untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengawasi risiko terutama risiko kredit dan risiko operasional melalui mekanisme pelaporan dan sistem informasi manajemen yang ada serta melalui pertemuan berkala Komite Audit dan Pemantau Risiko. Selain itu, sistem teknologi informasi utama Perusahaan mampu menyediakan data/informasi secara cepat, akurat dan *real time online* kepada pihak Manajemen.

Pilar 4: Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Perusahaan memiliki Divisi Audit Internal yang secara independen melaporkan proses dan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Akuntabilitas dari Divisi Audit Internal mencakup:

- Menyediakan penilaian atas kecukupan dan efektifitas dari semua proses yang ada di dalam Perusahaan;
- Melaporkan masalah-masalah penting yang terkait dengan proses pengendalian aktivitas-aktivitas di dalam Perusahaan termasuk perbaikan yang potensial terhadap proses-proses tersebut;
- Koordinasi dengan fungsi pengendali dan pengawasan lainnya (manajemen risiko, kepatuhan, hukum dan audit eksternal).

Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan karena kekurangan dan kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem ataupun permasalahan-permasalahan yang berdampak pada operasi Perusahaan. Penanganan risiko operasional dalam Perusahaan dilakukan dengan 3 (tiga) langkah, yaitu:

- Pengidentifikasian risiko
- Pengukuran risiko
- Manajemen, pengawasan dan pengendalian risiko

Ketiga langkah di atas merupakan satu kesatuan proses yang tidak terpisahkan. Langkah di atas telah diterjemahkan Perusahaan dalam mekanisme manajemen risiko operasional sebagai berikut:

- Pengertian yang jelas oleh semua lini yang terkait terhadap risiko yang melekat pada setiap tahapan proses kegiatan operasional yang berhubungan terutama dengan persetujuan dan pencairan pembiayaan, pelayanan konsumen, pencatatan pembukuan dan penyusunan laporan.

The Company has tools to identify, assess and monitor risks, particularly credit risk and operational risk through the existing reporting mechanism and the management information systems also through regular meetings of Audit Committee and Risk Monitoring Committee. In addition, the Company's main information technology system is able to provide, quick, accurate and in real time online data/information for Management.

Pillar 4: Comprehensive Internal Control

The Company has an Internal Audit Division, which independently reports the process and results of its investigations to the Board of Commissioners and the President Director. The accountability of the Internal Audit Division includes:

- Providing an assessment of the adequacy and effectiveness of all existing processes within the Company;
- Reporting on key issues related to the process of monitoring activities within the Company, including potential improvements to these processes;
- Coordinating with other control and oversight functions (risk management, compliance, legal and external audit).

Operational Risk

Operational risk is the risk caused by shortcomings and failures of internal processes, human errors, system failures or problems that could bring impact to the Company's operations. The operational risks in the Company are handled through 3 (three) steps as follows:

- Risk identification
- Risk measurement
- Risk management, supervision and control

The three steps above are inseparable unified processes. The steps above have been converted to the Company's operational risk management mechanism as follows:

- A clear understanding by all lines concerned regarding the risk inherent in each stage of the processes of operational activities relating primarily to the approval and disbursement of financing, customer service, accounting records and preparation of reports.

- Pembagian tugas yang jelas dan terpisah antara pelaksana dan kontrol. Sebagai pelaksana, aktivitas yang dikerjakan berdasarkan *Standard Operating Procedures* (SOP) baku Perusahaan, sedangkan fungsi kontrol memastikan aktivitas sudah memenuhi persyaratan yang digariskan oleh SOP.
- Perusahaan menggunakan Sistem Teknologi Informasi dari perusahaan terkemuka IMS agar kelangsungan dan kelancaran pengoperasian sistem dapat terjamin. Perusahaan sudah menerapkan sistem *on-line* dan *real time* sehingga dengan demikian pihak manajemen dapat memonitor seluruh aktivitas operasional secara langsung, dan dengan cepat dapat mengambil keputusan strategis dan tepat untuk memitigasi kemungkinan risiko yang terjadi akibat kelalaian, tidak berfungsinya sistem, maupun penyimpangan dari pelaksanaan SOP dan/atau kebijakan Perusahaan.
- Perusahaan juga sudah menerapkan *Risk Control Self Assessment* (RCSA), suatu konsep manajemen risiko yang dibentuk berdasarkan SOP yang berlaku dalam Perusahaan, untuk menelaah dan mengukur besarnya potensi risiko-risiko yang berlangsung selama proses internal untuk menghasilkan status risiko operasional, dan dilaporkan secara periodik.
- Perusahaan senantiasa mengembangkan kemampuan dan pengetahuan karyawannya dengan berbagai pelatihan melalui *MLI Learning Centre* agar dapat menekan seminimal mungkin frekuensi kesalahan manusia dan sistem operasional dan dampak kerugian finansial yang diakibatkan oleh hal tersebut.
- A clear separation of duties between executors and overseers. Executors, carry out activities based on the Company's Standard Operating Procedures (SOP), while the oversight functions ensure that the activities are done in accordance with the requirements outlined by the SOP.
- The Company uses Information Technology Systems from a leading company IMS to ensure the continuity and the smooth operation of the system. The Company has implemented the system on line and in real time so that management can monitor all operational activities directly and can quickly make the right strategic decisions to reduce possible risks that may arise from negligence, system failure, or deviations in implementation of SOPs and/or Company policy.
- The Company has also implemented a Risk Control Self Assessment (RCSA), a concept of risk management, which was established based on applicable Standard Operating Procedures in the Company, to examine and measure the extent of potential risk occurring throughout the internal processes in order to generate operational risk status, and is reported periodically.
- The Company continuously develops the skills and knowledge of its employees through various types of training through MLI Learning Centre in order to reduce the occurrence of human error and operational system errors and the financial losses thereby incurred.

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan / atau rekening administrative termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Risiko Pasar antara lain meliputi Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko ekuitas. Manajemen Risiko pada Risiko Pasar dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan modalan Perusahaan

Market Risk

Market Risk is Risk in the position of assets, liabilities, equity, and / or administrative accounts including derivative transactions due to overall changes in market conditions. Market Risk includes, among others, interest rate risk, exchange rate risk and equity risk. Market Risk Management is carried out to minimize the possibility of negative impacts due to changes in market conditions on the Company's assets and capital

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko kerugian pada akun aset ataupun liabilitas Perusahaan Pembiayaan akibat perubahan suku bunga. Perusahaan mengelola risiko suku bunga dengan menggunakan instrumen derivatif yaitu swap suku bunga. Melalui swap suku bunga, Perusahaan setuju untuk mempertukarkan selisih antara suku bunga tetap dengan suku bunga mengambang yang dihitung sesuai dengan nilai nosional yang telah disepakati. Nilai wajar dari swap suku bunga pada akhir periode pelaporan ditentukan dengan mendiskonto nilai arus kas di masa yang akan datang dengan menggunakan kurva pada akhir periode pelaporan dan risiko kredit yang melekat pada kontrak. Nilai rata-rata suku bunga ditentukan dari nilai saldo pada akhir periode pelaporan. Kontrak swap suku bunga mempertukarkan tingkat suku bunga mengambang dengan tingkat suku bunga tetap, dimana kontrak tersebut ditujukan dan efektif sebagai instrument lindung nilai arus kas.

Tabel berikut menggambarkan rincian berdasarkan suku bunga atas aset bruto dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal *repricing* atau tanggal jatuh tempo kontraktual untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga:

Interest Risk

Interest risk is the risk of loss in the Company's financial assets or liabilities due to changes in interest rates. The Company manages interest rate risk using derivative instruments, which is interest rate swaps. Through an interest rate swap, the Company agrees to exchange the difference between a fixed interest rate and a floating interest rate calculated according to the agreed notional value. The fair value of interest rate swaps at the end of the reporting period is determined by discounting the value of future cash flows using a curve at the end of the reporting period and credit risk attached to the contract. The average value of the interest rate is determined from the balance value at the end of the reporting period. An interest rate swap contract exchanges a floating interest rate with a fixed rate, which is designated and effective as a cash flow hedge instrument.

The following table summarizes the breakdown based on interest rates on gross assets and financial liabilities of the Company which are grouped according to which is earlier between the repricing date or contractual due date to see the impact of changes in interest rates:

	2022						Jumlah/ Total	
	Suku bunga variabel/Variable interest			Suku bunga tetap/Fixed interest				
	Sampai dengan 1 bulan/ Until 1 month Rp 000	>1-12 bulan/ >1-12 months Rp 000	>1-5 tahun/ >1-5 year Rp 000	Sampai dengan 1 bulan/ Until 1 month Rp 000	>1-12 bulan/ >1-12 months Rp 000	>1-5 tahun/ >1-5 year Rp 000		
Aset keuangan								Financial assets
Kas dan setara kas	102.331.455	-	-	-	-	-	102.331.455	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen	-	-	-	69.634.045	609.607.118	793.436.689	1.472.677.852	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	-	-	-	45.791.418	281.618.435	383.395.505	710.805.358	Finance lease receivables
Piutang lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	Other accounts receivable
Pihak ketiga	-	-	-	75.284.542	3.892.861	11.959.712	91.137.115	Third parties
Pihak berelasi	-	-	-	-	497.515	-	497.515	Related parties
Aset derivatif	-	17.532.167	-	-	-	-	17.532.167	Derivative assets
Jumlah	102.331.455	17.532.167	-	190.710.005	895.615.929	1.188.791.906	2.394.981.462	Total
Liabilitas keuangan								Financial liabilities
Utang bank	(6.227.282)	(116.598.688)	(158.135.699)	(1.208.243.299)	(139.449.920)	(32.722.729)	(1.661.377.617)	Bank loans
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	-	(3.200.825)	-	-	(3.200.825)	Accrued expense
Jumlah	(6.227.282)	(116.598.688)	(158.135.699)	(1.211.444.124)	(139.449.920)	(32.722.729)	(1.664.578.442)	Total
Bersih	96.104.173	(99.066.521)	(158.135.699)	(1.020.734.119)	756.166.009	1.156.069.177	730.403.020	Net

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

	2021						Total		
	Suku bunga variabel/Variable interest			Suku bunga tetap/Fixed interest					
	Sampai dengan 1 bulan/ Until 1 month	>1-12 bulan/ >1-12 months	>1-5 tahun/ >1-5 year	Sampai dengan 1 bulan/ Until 1 month	>1-12 bulan/ >1-12 months	>1-5 tahun/ >1-5 year			Jumlah/ Total
	Rp 000	Rp 000	Rp 000	Rp 000	Rp 000	Rp 000			Rp 000
Aset keuangan								Financial assets	
Kas dan setara kas	95.448.135	-	-	-	-	-	95.448.135	Cash and cash equivalents	
Piutang pembiayaan konsumen	-	-	-	57.740.510	477.958.797	697.789.870	1.233.489.177	Consumer financing receivables	
Piutang sewa pembiayaan	-	-	-	51.415.316	395.216.786	409.521.910	856.154.012	Finance lease receivables	
Piutang lain-lain pihak ketiga	-	-	-	82.255.989	799.926	10.809.983	93.865.898	Other accounts receivable	
Pihak berelasi	-	-	-	-	1.013.336	-	1.013.336	Third parties	
Aset derivatif	-	187.849	-	-	-	-	187.849	Related parties from third parties	
Jumlah	95.448.135	187.849	-	191.411.815	874.988.845	1.118.121.763	2.280.158.407	Total	
Liabilitas keuangan								Financial liabilities	
Utang bank	(12.473.143)	(100.263.415)	(106.607.737)	(1.292.319.709)	(73.291.141)	(27.802.935)	(1.612.758.080)	Bank loans	
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	-	-	-	(1.791.565)	-	-	(1.791.565)	Securities issued - net	
Liabilitas derivatif	-	(179.534)	-	-	-	-	(179.534)	Derivative liabilities	
Jumlah	(12.473.143)	(100.442.949)	(106.607.737)	(1.294.111.274)	(73.291.141)	(27.802.935)	(1.614.729.179)	Total	
Bersih	82.974.992	(100.255.100)	(106.607.737)	(1.102.699.459)	801.697.704	1.090.318.828	665.429.228	Net	

Perusahaan terpapar risiko suku bunga terutama karena utang bank memiliki suku bunga tetap dan mengambang.

Companies are exposed to interest rate risk mainly because of bank loans have fixed and floating interest rates.

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar dan risiko suku bunga atas arus kas dijelaskan dalam Catatan 5, 6, 7, 8, 12 dan 14.

The Company's financial assets and liabilities that are exposed to fair value interest rate risk and cash flow interest rate risk are detailed in Notes 5, 6, 7, 8, 12 and 14.

Risiko Mata Uang

Currency Risk

Perusahaan terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama karena transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing seperti penyaluran piutang pembiayaan dan penerimaan pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing. Perusahaan mengelola eksposur mata uang asing dengan mencocokkan, sebisa mungkin, penerimaan dan pembayaran dalam masing-masing individu mata uang.

The Company is exposed to the effects of fluctuations in foreign exchange rates mainly due to transactions of denominated foreign currencies such as distribution of finance lease receivables and receipt of loans denominated in foreign currencies. The Company manages foreign currency exposure by matching receipts and payments in each individual currency, as much as possible.

Risiko nilai tukar terhadap mata uang asing adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas di masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi dikarenakan adanya perubahan nilai tukar terhadap mata yang asing. Eksposur risiko Perusahaan terhadap nilai tukar berasal dari kas di bank, piutang sewa pembiayaan, aset lain lain, utang bank, utang pemegang saham, biaya masih harus dibayar dan utang lain lain.

Exchange rate risk against foreign currencies is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in the exchange rate of foreign currencies. The Company's risk exposure to the exchange rate comes from cash in banks, finance lease receivables, other assets, bank loans, loan from shareholder, accrued expenses and other payables.

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

Pada risiko ini, Perusahaan mengelola risiko dengan menyesuaikan kondisi mata uang piutang sewa pembiayaan dengan mata uang pendanaan pinjaman yang ditetapkan oleh bank. Perusahaan mengelola risiko nilai tukar dengan menggunakan instrumen derivatif yaitu *swap cross currency*. Melalui *swap cross currency*, Perusahaan setuju untuk mempertukarkan pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dengan pinjaman dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar yang spesifik pada tanggal dimulainya transaksi, di mana kontrak tersebut memenuhi kriteria dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas.

At this risk, the Company manages risk by adjusting the condition of the finance lease receivables with the loan funding currency specified by the bank. The Company manages exchange rate risk by using a derivative instrument, namely cross currency swap. Through cross currency swaps, the Company agrees to exchange loans received in foreign currencies for loans in Rupiah using a specific exchange rate at the date of commencement of the transaction, where the contract meets the criteria and is effective as a cash flow hedge instrument.

	2022		
	Kenaikan (Penurunan)/ <i>Increase</i> (Decrease)	Sensitivitas Laba (Rugi)/ <i>Profit (Loss)</i> <i>Sensitivity</i>	
Mata Uang Asing			Foreign Currency
Dolar Amerika Serikat	0,46%	(733.289)	United States Dollar
Yen	1,45%	80.204	Yen

	2021		
	Kenaikan (Penurunan)/ <i>Increase</i> (Decrease)	Sensitivitas Laba (Rugi)/ <i>Profit (Loss)</i> <i>Sensitivity</i>	
Mata Uang Asing			Foreign Currency
Dolar Amerika Serikat	0,46%	5.776	United States Dollar
Yen	0,69%	275.127	Yen

Aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

The Company's assets and liabilities denominated in foreign currency are as follows:

		2022		2021		
		Mata uang asing/ <i>Foreign currency</i>	Ekuivalen Rupiah/ <i>Equivalent Rupiah</i> Rp'000	Mata uang asing/ <i>Foreign currency</i>	Ekuivalen Rupiah/ <i>Equivalent Rupiah</i> Rp'000	
Kas dan setara kas	USD	519.895	8.178.472	241.046	3.439.482	USD Cash and cash equivalents
	Yen	14.768	1.708.753	133.024	1.648.032	
Piutang sewa pembiayaan	USD	8.712.923	137.062.986	16.677.270	237.967.966	USD Finance lease receivables
	Yen	808.460	93.546.916	11.439.769	141.727.299	
Aset lain-lain	USD	500	7.866	500	7.136	USD Other assets
Jumlah			<u>103.442.007</u>		<u>384.789.915</u>	Total
Utang bank	USD	22.460.382	353.324.270	15.787.983	225.278.727	USD Bank loan
	Yen	825.368	95.503.347	10.896.649	134.998.584	
Utang lain-lain pihak berelasi	USD	500.000	7.865.500	1.000.000	14.269.000	Other payables related parties
Jumlah			<u>456.693.117</u>		<u>374.546.311</u>	Total

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilititas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan.

Manajemen Risiko pada Risiko Likuiditas dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas.

Pada awal bulan Perusahaan menetapkan tingkat suku bunga dan juga spread yang akan diterapkan pada bulan tersebut. Penetapan dilakukan setelah melakukan analisa pasar. Funding cost ditetapkan dengan memperhatikan spread dan suku bunga pinjaman kreditur serta suku bunga pasar yang diperoleh dari Bloomberg. Dengan demikian pergerakan suku bunga pinjaman tetap dapat tertutup oleh suku bunga piutang sewa pembiayaan. Perusahaan juga berusaha menetapkan suku bunga tetap atau mengambang dalam kegiatan pendanaan disesuaikan dengan suku bunga tetap atau mengambang pada piutang sewa pembiayaan. Pada akhir bulan akan dibuat laporan yang melaporkan jumlah pinjaman selama bulan tersebut. Laporan tersebut berisi total jumlah pinjaman, bunga, dan spread.

Analisis Sensitivitas

Untuk utang bank suku bunga mengambang, analisis sensitivitas disusun dengan asumsi jumlah utang bank terutang pada tanggal laporan posisi keuangan adalah yang terutang untuk sepanjang tahun. Perubahan dari 100 basis poin suku bunga pada tanggal laporan keuangan akan meningkatkan laba (rugi) sebelum pajak pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.809.617 ribu (31 Desember 2021: Rp 2.193.443 ribu). Analisis ini mengasumsikan bahwa semua variabel lainnya tetap konstan. Perubahan terutama disebabkan oleh tingkat suku bunga pinjaman variabel.

Untuk modal kerja, utang dan pinjaman investasi, Perusahaan berusaha dengan mengurangi risiko tingkat suku bunganya dengan cara mendapatkan struktur pinjaman dengan suku bunga kompetitif.

Dalam pemberian fasilitas pembiayaannya, selain menggunakan dana sendiri, Perusahaan juga membina kerjasama dengan beberapa bank nasional dan bank pemerintah maupun bank asing dalam bentuk *demand loan* dan *term loan*. Dalam hal ini Perusahaan mengharuskan limit fasilitas pinjaman yang didapatkan minimal 110% dari total kebutuhan dana untuk aktivitas pembiayaan.

Liquidity Risk

Liquidity Risk is the Risk due to the inability of the Company to meet maturing liabilities from cash flow funding sources and / or from liquid assets that can be easily converted into cash, without disrupting the Company's activities and financial condition.

Risk Management on Liquidity Risk is carried out to minimize the possibility of the Company's inability to obtain cash flow funding sources.

At the beginning of the month, the Company sets the interest rate and spread that will be applied for the month. The determination is made after conducting a market analysis. Funding costs are determined by taking into account the spread and interest rates on creditors' loans as well as market interest rates obtained from Bloomberg. Thus the movement in loan interest rates can still be covered by the interest rates on finance lease receivables. The Company also seeks to set a fixed or floating interest rate in its financing activities at a fixed or floating rate on finance lease receivables. At the end of the month, a report will be generated that reports the loan amount during the month. The report contains the total loan amount, interest, and spread.

Sensitivity Analysis

For floating rate bank loans, the sensitivity analysis is prepared assuming the amount of bank loans outstanding at the statement of financial position date was outstanding for the whole year. A change of 100 basis points in interest rates at the reporting dates would have increased or decreased the profit (loss) before tax for 31 December 2022 is Rp 2,809,617 thousand (31 December 2021: Rp 2,193,443 thousand). This analysis assumes that all other variables remain constant. The movement is mainly attributable to interest rates on its variable rate borrowings.

For working capital, investment loans and borrowings, the Company may seek to mitigate its interest rate risk by obtaining loans structure with competitive interest rate.

In its financing activities the Company does not only rely on their own funds, the Company is also able to use other sources of funds from several banks by agreement in the forms of demand loan and term loan. In regard to this, in the situations where the Company needs to borrow some funds from mentioned parties; the lenders shall give loan in the least, amounted 110% from the sum of the required funds.

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

Saldo kas setiap hari cukup untuk minimal menutupi kebutuhan dana pembiayaan satu hari. Perusahaan juga mempunyai fasilitas Pinjaman Rekening Koran yang dapat ditarik setiap waktu dengan limit minimal menutup kebutuhan dana 5 hari kerja.

An adequate cash balance is maintained every day to cover financing needs for one day. The Company also has a current account loan facility that may be withdrawn at any time with a minimum limit to cover financing needs for 5 business days.

Perusahaan memiliki rasio likuiditas yang sangat sehat. Perbandingan liabilitas terhadap ekuitas Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 257,76% (31 Desember 2021: 271,56%). Dalam hal perbandingan liabilitas terhadap jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 72,03% (31 Desember 2021: 73,09%).

The Company has a very healthy liquidity ratio. The comparison of the Company's liabilities to equity as of December 31, 2022 amounted to 257.76% (December 31, 2021: 271.56%). Meanwhile, the ratio of liabilities to total assets as of December 31, 2022 amounted to 72.03% (December 31, 2021: 73.09%).

Tabel berikut menggambarkan profil perbedaan jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

The following table shows the differences in the maturity profile of the Company's financial assets and liabilities on December 31, 2022 and 2021:

	2022				Jumlah/ Total Rp'000	
	Sampai dengan 1 bulan/ Until 1 month Rp'000	> 1 bulan s.d 3 bulan/ > 1 month until 3 months Rp'000	> 3 bulan s.d 12 bulan/ > 3 months until 12 months Rp'000	> 1 tahun s.d 5 tahun/ > 1 year until 5 years Rp'000		
Aset keuangan						Financial assets
Tanpa suku bunga						Non-interest bearing
Kas dan setara kas	268.281	-	-	-	268.281	Cash and cash equivalents
Suku bunga variabel						Variable interest
Kas dan setara kas	72.331.455	-	-	-	72.331.455	Cash and cash equivalent
Aset derivatif	-	17.532.167	-	-	17.532.167	Derivative assets
Suku bunga tetap						Fixed interest
Kas dan setara kas	30.000.000	-	-	-	30.000.000	Cash and cash equivalent
Piutang pembiayaan konsumen	69.634.045	155.727.371	453.879.746	793.436.690	1.472.677.852	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	45.791.418	57.823.991	223.794.444	383.395.505	710.805.358	Finance lease receivables
Piutang lain-lain kepada pihak berelasi	-	-	497.515	-	497.515	Other account receivables to related parties
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga	75.284.542	292.748	3.600.116	11.959.709	91.137.115	Other account receivables to third parties
Jumlah	293.309.741	231.376.277	681.771.821	1.188.791.904	2.395.249.743	Total
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Tanpa suku bunga						Non-interest bearing
Utang usaha	714.424	-	-	-	714.424	Trade accounts payable
Utang lain-lain	1.469.943	38.336.860	2.438.991	18.412.470	60.658.264	Other accounts payable
Suku variabel						Variable interest
Utang bank	6.227.282	24.561.143	92.037.546	158.135.699	280.961.670	Bank loans
Suku bunga tetap						Fixed interest
Utang bank	1.211.444.124	73.047.380	66.402.540	32.722.728	1.383.616.772	Bank loans
Liabilitas sewa	541.915	1.032.596	2.067.709	25.900.207	29.542.427	Lease liabilities
Jumlah	1.220.397.688	136.977.979	162.946.786	235.171.104	1.755.493.557	Total
Bersih	(927.087.947)	94.398.298	518.825.035	953.620.800	639.756.186	Net

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

	2021				Jumlah/ Total Rp'000	
	Sampai dengan 1 bulan/ Until 1 month Rp'000	> 1 bulan s.d 3 bulan/ > 1 month until 3 months Rp'000	> 3 bulan s.d 12 bulan/ > 3 months until 12 months Rp'000	> 1 tahun s.d 5 tahun/ > 1 year until 5 years Rp'000		
Aset keuangan						Financial assets
Tanpa suku bunga						Non-interest bearing
Kas dan setara kas	189.782	-	-	-	189.782	Cash and cash equivalents
Suku bunga variabel						Variable interest
Kas dan setara kas	95.448.135	-	-	-	95.448.135	Cash and cash equivalent
Aset derivatif	-	187.849	-	-	187.849	Derivative assets
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	-	-	Restricted cash
Suku bunga tetap						Fixed interest
Piutang pembiayaan konsumen	57.740.510	88.450.160	389.508.637	697.789.869	1.233.489.176	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	51.415.316	76.498.143	318.718.643	409.521.909	856.154.011	Finance lease receivables
Piutang lain-lain kepada pihak berelasi	-	-	1.013.336	-	1.013.336	Other account receivables to related parties
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga	82.255.989	385.802	414.124	10.809.982	93.865.897	Other account receivables to third parties
Jumlah	287.049.732	165.521.954	709.654.740	1.118.121.760	2.280.348.186	Total
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Tanpa suku bunga						Non-interest bearing
Utang usaha	846.385	-	-	-	846.385	Trade accounts payable
Utang lain-lain	526.183	39.802.441	1.587.185	24.949.767	66.865.576	Other accounts payable
Suku variabel						Variable interest
Utang bank	12.491.686	20.963.801	79.318.157	106.607.738	219.381.382	Bank loans
Liabilitas derivatif	-	179.534	-	-	179.534	Derivative liabilities
Suku bunga tetap						Fixed interest
Utang bank	1.294.111.274	52.942.241	20.348.900	27.802.937	1.395.205.352	Bank loans
Liabilitas sewa	-	1.453.906	3.496.365	-	4.950.271	Lease liabilities
Jumlah	1.307.975.528	115.341.923	104.750.607	159.360.442	1.687.428.500	Total
Bersih	(1.020.925.796)	50.180.031	604.904.133	958.761.318	592.919.686	Net

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur antara lain risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk.

Risiko kredit merupakan risiko utama karena Perusahaan bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan. Secara langsung, Perusahaan menghadapi risiko seandainya konsumen tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melunasi kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara konsumen dengan Perusahaan. Oleh karenanya Perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip "Benar dari Awal" yang diterapkan oleh Perusahaan merupakan pencerminan dari sikap kehati-hatian ini. Perusahaan menerapkan proses pemberian kredit yang ketat, antara lain survei calon konsumen, verifikasi data konsumen, dan persyaratan uang muka yang berlaku. Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*) sudah merupakan standar dalam setiap analisa kelayakan konsumen. Juga pemilihan dan analisa *Dealer/Showroom* atau vendor merupakan kesatuan dari analisa persetujuan proses pembiayaan.

Credit Risk

Credit risk is the risk due to failure of other parties to fulfill obligations to the Company, including credit risk due to debtor failure, including credit concentration risk, counterparty credit risk, and settlement risk.

Credit risk is a major risk because the Company is engaged in consumer financing and finance lease. The Company faces risks directly when consumers are not able to fulfill their obligations in paying off loans already agreed upon in the contract between consumers and the Company. Therefore the Company applies the precautionary principle. The "Right from the Beginning" principle adopted by the Company is a reflection of this attitude of prudence. The Company applies a rigorous credit process, including surveys of potential customers, verification of customer data, and applicable requirements for down payments. The 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral* and *Condition*) principles have become standard in every consumer feasibility analysis. Selection and analysis *Dealer/Showroom* or vendor is also an integral part of the financing process analysis.

Analisis calon konsumen dan pemantauan Konsumen secara menyeluruh, Perusahaan menggunakan survei internal untuk validasi informasi calon konsumen dan survei yang telah dilakukan oleh *marketing* (CMO) tanpa mengurangi kecepatan dalam mengambil keputusan persetujuan pembiayaan. Perusahaan pun melakukan pemantauan karakteristik pembayaran angsuran dari konsumen, status jaminan dan kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi sumber penghasilan konsumen sehingga konsumen yang akan bermasalah dapat diantisipasi lebih awal.

Untuk pembiayaan korporasi, Perusahaan menerapkan kebijakan hanya akan bertransaksi dengan rekanan yang memiliki kelayakan kredit dan mendapatkan jaminan yang memadai, bila sesuai, sebagai sarana mengurangi risiko kerugian atau tunggakan. Perusahaan hanya bertransaksi dengan entitas, tergantung pada rating kreditnya, yang mana pemegang saham melakukan bisnis, entitas yang memberikan jaminan memadai, induk perusahaan, pelanggan prospektif dan entitas-entitas yang ditunjuk oleh Mizuho Leasing Co., Ltd. Perusahaan meminimalkan biaya kredit dengan mengoptimalkan struktur manajemen kredit. Pada tahap awal pelaksanaan kesepakatan, Perusahaan memberikan peringkat kredit untuk setiap debitur dan melakukan seleksi kredit yang ketat. Oleh karena itu, Perusahaan menilai kelayakan kredit untuk menandatangani perjanjian dengan melakukan pemeriksaan kredit masing-masing debitur secara ketat. Sistem rating kredit terdiri atas rating untuk Perusahaan Jepang dan non-Jepang, dan akan diklasifikasikan dalam peringkat 1 sampai dengan 10 yang terbagi dalam 2 kategori yaitu untuk perusahaan bermutu baik dalam rating 1 sampai 7- dan perusahaan bermutu buruk, menunggak ataupun Perusahaan dalam kebangkrutan dalam rating 7E sampai dengan 10. Prosedur dan keputusan rating kredit diatur dan disediakan oleh Mizuho Leasing Co., Ltd. Eksposur kelompok usaha dan rating kredit dari pihak lawan dimonitor terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar diantara pihak lawan yang telah disetujui.

Berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko pembiayaan dan analisa konsentrasi risiko pembiayaan Perusahaan.

I. Eksposur maksimum terhadap risiko pembiayaan

Eksposur Perusahaan terhadap risiko pembiayaan hampir seluruhnya berasal dari piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan, dimana eksposur maksimum terhadap risiko pembiayaan sama dengan nilai tercatat dengan menggunakan nilai gross.

In its analysis of prospective consumers and monitoring of consumers as a whole, the Company uses an internal survey service to validate information on prospective consumers and a survey conducted by marketing (CMO) without reducing the speed of financing approval decisions. The Company also monitors the characteristics of consumer installment payments, insurance status, and other conditions that may affect the consumer's income sources so that consumers who might pose problems can be recognized early.

For corporate financing, the Company implements a policy of only transacting with partners who are creditworthy and receive adequate collateral, if appropriate, as a means of reducing the risk of loss or arrears. The Company only transacts with entities, depending on its credit rating, in which shareholders do business, entities that provide adequate guarantees, parent company, prospective customers and entities designated by Mizuho Leasing Co., Ltd. The company minimizes the cost of credit by optimizing the credit management structure. In the early stages of execution of the agreement, the Company assigns a credit rating to each debtor and conducts a strict credit selection. Therefore, the Company assesses the credit worthiness of signing the agreement by closely examining each debtor's credit. The credit rating system consists of ratings for Japanese and non-Japanese companies, and will be classified into ranks 1 to 10 which are divided into 2 categories, namely good quality companies in ratings 1 to 7- and companies with bad quality, arrears or companies in bankruptcy. rating 7E to 10. Credit rating procedures and decisions are regulated and provided by Mizuho Leasing Co., Ltd. The exposure of the business group and the credit rating of the counterparty are monitored continuously and the aggregate value of the related transactions is spread out among the agreed counter parties.

The following are the Company's maximum exposure to financing risk and financing risk concentration analysis.

I. Maximum exposure to financing risk

The Company's financing risk exposure is almost entirely derived from consumer financing and finance lease receivables, where the maximum financing risk exposure is equal to the carrying amount with gross amount.

II. Analisis konsentrasi risiko pembiayaan

Konsentrasi risiko pembiayaan timbul ketika sejumlah konsumen bergerak dalam aktivitas usaha yang sama atau aktivitas dalam wilayah geografis yang sama, atau ketika mereka memiliki karakteristik yang sejenis yang akan menyebabkan kemampuan untuk memenuhi liabilitas kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi atau yang lainnya.

Perusahaan bergerak di bidang usaha pembiayaan konsumen yang pelanggannya mayoritas adalah individu dan tidak terkonsentrasi pada wilayah geografis tertentu, kecuali untuk sewa pembiayaan. Untuk usaha pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, proses pemberian kredit dijalankan sangat ketat, mulai dari survei calon konsumen, verifikasi data konsumen serta pemberian uang muka sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga risiko yang mungkin timbul dapat dikendalikan dengan baik.

Perusahaan juga menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2021 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank.

Tabel berikut menggambarkan jumlah risiko pembiayaan dan konsentrasi risiko atas piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan yang dimiliki Perusahaan:

	2022	2021	
	Rp'000	Rp'000	
Piutang pembiayaan konsumen			Consumer financing receivables
Korporasi	105.793.609	31.156.318	Corporate
Individu	1.723.313.380	1.512.275.720	Individual
Subjumlah	<u>1.829.106.989</u>	<u>1.543.432.038</u>	Subtotal
Piutang sewa pembiayaan			Finance lease receivables
Korporasi	704.612.899	849.494.064	Corporate
Individu	92.308.903	98.614.163	Individual
Subjumlah	<u>796.921.802</u>	<u>948.108.227</u>	Subtotal
Jumlah	<u>2.626.028.791</u>	<u>2.491.540.265</u>	Total

Berdasarkan laporan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan BMPP.

II. Financing risk concentration analysis

Concentration of financing risk arises when a number of consumers operate in the same business activity or in activities within the same geographic area, or when they have similar characteristics that would cause the ability to meet contractual obligations to be equally affected by changes in economic or other conditions.

The Company is engaged in the consumer financing business the majority of whose clients are individuals and not concentrated in any certain geographic areas, except for finance lease. For consumer finance and finance lease business, the process for extending credit is very strict, with the survey of prospective customers, verification of customer data, and down payments based on conditions applied, so the risks that might arise can be controlled properly.

The Company is also implementing Anti-Money-Laundering and Terrorism-Funding-Prevention Programs in respect to the regulation based on Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Art. 12/POJK.01/2021 regarding The Anti-Money-Laundering and Terrorism-Funding-Prevention Programs Implementation by Non-Banks Financial Services Providers.

The following table illustrates the amount of financing risk and concentration risk on consumer financing receivables and finance lease receivables held by the Company:

Based on the maximum financing limit (BMPP) reports as of December 31, 2022 and 2021, there is no financing receivables exceeding the BMPP regulation.

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(DAHULU PT VERENA MULTI FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(FORMERLY PT VERENA MULTIFINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)**

Tabel berikut merupakan rincian nilai dari agunan yang dimiliki oleh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

The following tables detail the Company's collateral held as security as of December 31, 2022 and 2021:

	2022					
	Pembiayaan konsumen/ <i>Consumer finance</i>	Sewa pembiayaan/ <i>Finance lease</i>	Piutang lain-lain/ <i>Other receivable</i>	Kredit karyawan/ <i>Employee loan</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Eksposur kredit	1.472.677.852	710.805.358	84.218.350	2.766.998	2.270.468.558	Credit exposure
Nilai jaminan	1.913.035.746	981.296.655	99.794.838	-	2.994.127.239	Collateral value
Total eksposur tanpa jaminan kredit	-	-	-	2.766.998	2.766.998	Total Unsecured credit exposure
Porsi eksposur kredit tanpa jaminan kredit	-	-	-	100,00%	0,12%	Unsecured portion of credit exposure
Tanah dan bangunan	9.617.668	-	86.560.599	-	96.178.267	Land and building
Kendaraan	1.836.337.478	280.827.009	13.234.239	-	2.130.398.726	Vehicle
Mesin dan alat berat	40.900.600	543.344.997	-	-	584.245.597	Machine and heavy equipment
Lainnya	26.180.000	157.124.649	-	-	183.304.649	Others
Jumlah	1.913.035.746	981.296.655	99.794.838	-	2.994.127.239	Total
	2021					
	Pembiayaan konsumen/ <i>Consumer finance</i>	Sewa pembiayaan/ <i>Finance lease</i>	Piutang lain-lain/ <i>Other receivable</i>	Kredit karyawan/ <i>Employee loan</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Eksposur kredit	1.233.489.177	856.154.012	88.573.077	3.468.074	2.181.684.340	Credit exposure
Nilai jaminan	1.589.656.551	1.113.797.571	98.735.542	-	2.802.189.664	Collateral value
Total eksposur tanpa jaminan kredit	-	-	-	3.468.074	3.468.074	Total Unsecured credit exposure
Porsi eksposur kredit tanpa jaminan kredit	-	-	-	100,00%	0,16%	Unsecured portion of credit exposure
Tanah dan bangunan	10.867.168	-	-	-	10.867.168	Land and building
Kendaraan	1.564.059.383	381.090.521	8.514.296	-	1.953.664.200	Vehicle
Mesin dan alat berat	-	655.614.323	90.221.246	-	745.835.569	Machine and heavy equipment
Lainnya	14.730.000	77.092.727	-	-	91.822.727	Others
Jumlah	1.589.656.551	1.113.797.571	98.735.542	-	2.802.189.664	Total

Dampak pandemik COVID – 19

Pandemik COVID-19 mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian global, pasar dan pihak lawan maupun konsumen dari Perusahaan.

Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dimana salah satunya terkait program restrukturisasi konsumen terdampak COVID-19, yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi kinerja Perusahaan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Effects of the COVID-19 pandemic

COVID-19 pandemic are impacting directly and indirectly to the global economic, markets, and the counterparties and consumer of the Company.

There was regulation issued by the Financial Service Authority (OJK) POJK No. 14/POJK.05/2020 regarding Countercyclical Policy on the Impact of Coronavirus Diseases 2019 for Non-Bank Financial Services Institutions in which one of the regulation is related to restructured program to impacted COVID-19 consumers, with the objective to help the optimization of Company's performance especially for the intermediation function, as to manage the stability of the financial system, and support the economic growth.

Manajemen juga telah melakukan Langkah-langkah untuk memitigasi dampak terhadap bisnis Perusahaan sebagai berikut:

- Memberikan restrukturisasi kredit untuk debitur yang berdampak COVID-19 sesuai dengan peraturan.
- Melakukan penyaluran kredit secara selektif berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- Meningkatkan upaya penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah
- Melakukan efisiensi biaya operasional.
- Menerapkan manajemen risiko likuiditas secara optimum untuk menjaga posisi likuiditas Perusahaan

Dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian, manajemen telah menilai kondisi masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai informasi relevan yang tersedia. Dalam kondisi normal, restrukturisasi pinjaman akan menunjukkan peningkatan risiko kredit yang signifikan dan pindah ke Stage 2. Namun, dalam kondisi saat ini dan sejalan dengan panduan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, manajemen telah mempertimbangkan bahwa restrukturisasi atau peristiwa mungkin tidak secara otomatis memicu peningkatan risiko kredit yang signifikan jika peminjam diharapkan dapat memulihkan dan memenuhi kewajiban kontraktual mereka setelah akhir periode restrukturisasi atau relaksasi.

Manajemen telah melakukan evaluasi dampak pandemic COVID-19 terhadap perhitungan kerugian kredit ekspektasian dengan melakukan penyesuaian, antara lain melakukan perubahan terhadap variabel ekonomi makro dan melakukan perhitungan kerugian kredit ekspektasian secara lifetime untuk konsumen restrukturisasi tertentu yang terdampak COVID-19 dimana mempengaruhi kerugian kredit ekspektasian dan memastikan nilai kerugian kredit ekspektasian yang diakui dalam laporan keuangan dinyatakan secara wajar.

Jumlah piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan yang telah direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada Catatan 6 dan 7.

Management also has been taking actions as to mitigate the impacts on the Company's business as follow:

- Provide credit restructure to impacted COVID-19 consumers based on regulation.
- Provide loans to consumers selectively based on prudent principles.
- Increase efforts on collections and settlements of non-performing loans.
- Manage operational expenses efficiently.
- Implement liquidity risk management optimally as to secure the Company's liquidity position.

In calculating the expected credit loss, management has already assessed the future condition based on available relevant information. Under normal conditions, loan restructure would indicate a significant increase in credit risk and should move to Stage 2. However, in the current condition and in line with guidance issued by the Indonesia Institute of Accountants, management have considered that such a restructure event may not automatically trigger a significant increase in credit risk as the borrowers would be expected to recover and fulfill their contractual obligations after the end of the restructuring or relaxation period.

Management has evaluated the impact of the COVID-19 pandemic on calculating expected credit loss by performing adjustment, such as updated the macro-economic variables and recorded lifetime expected credit losses for certain restructured consumer impacted by COVID-19 which impacted to the expected credit loss and ensured the expected credit loss recognized in the financial statements is stated fairly.

The amount of restructured consumer financing receivables and finance lease receivables as of December 31, 2022 and 2021 are presented in Notes 6 and 7.

38. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Perusahaan yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Perusahaan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

	1 Januari/ Januari 1, 2021 Rp'000	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ Financing cash flows Rp'000	Lain-lain/ Others Rp'000	31 Desember/ December 31, 2021 Rp'000	
Utang bank	1.612.758.080	48.619.537	-	1.661.377.617	Bank loans
Utang lain-lain	14.269.000	(7.440.875)	1.037.375	7.865.500	Other payables
Liabilitas sewa	4.950.271	(6.532.523)	31.124.678	29.542.427	Lease liabilities
	<u>1.631.977.351</u>	<u>34.646.139</u>	<u>32.162.053</u>	<u>1.698.785.544</u>	

	1 Januari/ Januari 1, 2021 Rp'000	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ Financing cash flows Rp'000	Lain-lain/ Others Rp'000	31 Desember/ December 31, 2021 Rp'000	
Utang Bank	1.949.843.509	(337.085.429)	-	1.612.758.080	Bank loans
Utang Lain-lain	21.157.500	(7.156.625)	268.125	14.269.000	Other payables
Liabilitas Sewa	6.727.507	(5.754.899)	3.977.664	4.950.271	Lease liabilities
	<u>1.977.728.516</u>	<u>(349.996.953)</u>	<u>4.245.789</u>	<u>1.631.977.351</u>	

39. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Pada tanggal 3 Januari 2023, Perusahaan mengumpulkan SPT pembetulan atas rugi fiskal tahun 2018 senilai Rp 34.094.543 berdasarkan surat ketetapan pajak nomor KEP-02019/KEB/WPJ.07/2021.

Pada tanggal 3 Februari 2023, perusahaan memperoleh pinjaman berjangka dari The Hachijuni Bank, Hong Kong dengan nilai fasilitas sebesar USD 6.000.000 dengan masa berlaku perjanjian 3 Februari 2023 sampai dengan 3 Februari 2024.

Pada tanggal 15 Februari 2023, Perusahaan menerima Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-2/NB.021/2023 Tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Kota Pontianak yang ditetapkan pada tanggal 8 Februari 2023.

38. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES

The table below details changes in the Company's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Company's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

39. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

On January 3, 2023, the Company submitted SPT correction related to 2018 fiscal loss amounting to Rp 34,094,543 based on the tax assessment letter number KEP-02019/KEB/WPJ.07/2021.

On February 3, 2023, the company obtain new term loan facility from The Hachijuni Bank, Hong Kong, with the facility amounted USD 6,000,000 and validity period from February 3, 2023 until February 3, 2024.

On February 15, 2023 The Company has received a copy of the Decree of the Members of the Board of Commissioners of OJK Number: KEP-2/NB.021/2023 concerning the Granting of Permit to Open Branch Office of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Pontianak City which stipulated on February 8, 2023

**40. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN
PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN**

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan pada halaman 1 sampai dengan 97 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi Perusahaan untuk diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2023.

**40. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND
APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

The preparation and fair presentation of the financial statements on pages 1 to 97 are the responsibilities of the management and are approved and authorized for issue by the Company's Directors on March 14, 2023.

LAMPIRAN 1 - PENGUNGKAPAN RASIO
BERDASARKAN PERATURAN OJK
NO.35/POJK.05/2018

Berdasarkan POJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi sejumlah rasio keuangan tertentu. Rasio-rasio ini dibuat oleh Perusahaan berdasarkan formula sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK untuk tujuan kepatuhan terhadap peraturan.

Berikut ini adalah rasio-rasio keuangan berdasarkan Peraturan OJK:

APPENDIX 1 – RATIOS DISCLOSURES PURSUANT
TO OJK REGULATION NO. 35/POJK.05/2018

Based on POJK No. 35/POJK.05/2018 dated December 31, 2018 regarding the Organisation of Financing Company Business, the Company is required to comply with several financial ratios. These ratios have been prepared by the Company based on the formula as prescribed in the said OJK regulation for regulatory compliance purposes.

The following are the financial ratios based on OJK Regulations (OJK):

	2022 (TIDAK DIAUDIT)/ <u>2022 (UNAUDITED)</u>	2021 (TIDAK DIAUDIT)/ <u>2021 (UNAUDITED)</u>	
Rasio piutang pembiayaan neto terhadap total aset	85.67%	87.36%	Financing to asset ratio
Rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total pendanaan yang diterima	127.19%	125.84%	Net financing receivables to funding ratio
Rasio saldo piutang pembiayaan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dibandingkan dengan total saldo piutang pembiayaan	35.77%	45.23%	Net financing receivables for investment and working capital Financing to total financing receivables ratio
Rasio piutang pembiayaan bermasalah (NPF)	2.22%	2.93%	Non-performing financing (NF) ratio
Rasio permodalan	86.97%	80.46%	Capital ratio
Gearing ratio	2.42%	2.60%	Gearing ratio
Rasio ekuitas terhadap modal disetor	121.12%	110.21%	Equity to paid up capital ratio

MIZUHO Mizuho Leasing Indonesia

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Menara Astra 32nd Floor
Jl. Jend Sudirman Kav. 5-6 Jakarta 10220
Telp: +62 21 5085.1848
Fax: +62 21 5085.1849
www.mizuho-ls.co.id

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

